



**NOTA KEUANGANN
DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1972/1973**

REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PEMBANGUNAN DENGAN STABILISASI : PELAKSANAAN DAN PERKEMBANGANNYA

Tiga tahun tengah beranjak lalu sejak rakyat dan negara Republik Indonesia memulai pembangunannya pada tahun 1969/1970. Teguhnya landasan kebijaksanaan seperti yang jelas tersurat didalam Ketetapan-ketetapan MPRS hasil sidang umum ke-IV, terarahnya setiap langkah sejak 3 Oktober 1966, telah memungkinkan Pemerintah untuk tidak surut seperdua jalan, sekalipun masih banyak hambatan yang harus ditiadakan, sesuatu yang baru harus diadakan bagi lancarnya pertumbuhan pembangunan kini dan datang.

Banyak yang telah dihasilkan oleh Orde Baru, stabilisasi politik makin kuat, keadaan ekonomi makin mantap dan pembangunan terus meluas. Sementara itu aparatur negara bertambah tertib sehingga lebih mampu melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas rutin maupun tugas-tugas pembangunan, sedangkan keamanan dan ketertiban makin terjamin. Dengan makin gairahnya rakyat untuk turut serta dalam pembangunan serta kepercayaan luar negeri yang makin besar, maka tak dapat disangkal, bahwa bersama dengan hasil-hasil yang telah diketengahkan, keadaan rakyat kini jelas lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Betapapun banyak yang telah dihasilkan, namun masih banyak lagi yang harus dikerjakan untuk sampai kepada masyarakat adil dan makmur berdasarkan PANCASILA seperti yang menjadi tujuan dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Suatu tujuan dimana berpadu tekad usaha meniadakan hambatan akibat penjajahan dan harapan untuk menikmati bahagia yang pasti akan ditegakkan oleh kemerdekaan.

Sesudah proklamasi, maka tahun demi tahun rakyat menanti kemakmuran namun yang diharapkan belum juga kunjung datang. Peniadaan hambatan hanya digunakan untuk memperkembangkan sistim yang berasal dari pemikiran liberal yang mengambang tak menyentuh kesadaran rakyat. Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam tahun 1955, seperti yang telah dapat diduga semula, tidak sanggup memenuhi tujuan proklamasi, karena caranya terlepas dari ikatan sejarah perjuangan yang tersimpul dalam falsafah negara PANCASILA. Akibatnya nampak jelas pada keadaan politik yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan PANCASILA dan keadaan ekonomi yang ditandai oleh tekanan inflasi yang kian meningkat.

Usaha penyelamatan Republik Proklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam tahun 1959 telah melahirkan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Sikap keengganan yang apriori terhadap liberalisme dan tiadanya koreksi dari kekuatan-kekuatan masyarakat kala itu,

telah mengakibatkan Pemerintah terperangkap dalam jaringan serba terpimpin. Dalam periode ini, yang kemudian dikenai sebagai orde lama, dimana hampir semua kegiatan harus dinegarakan, karena cara berfikir yang mengarah kepada anggapan bahwa negara adalah rakyat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menjelma didalam diri pemimpin.

Dengan demikian, maka secercah harapan rakyat yang selalu mendambakan kemakmuran dan keadilan, yang muncul dikala kembali ke UUD 1945 didekritkan, telah sirna bersama dengan makin meningkatnya penyelewengan terhadap PANCASILA dan penyimpangan dari UUD 1945. Tidak hanya dibidang sosial politik, tetapi begitu pula dibidang sosial ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi yang normal ditinggalkan. Jika dalam periode itu rencana pembangunan dibuat yakni yang dinamakan "Rencana Pembangunan Semesta Berencana", maka rencana itu tidak didasarkan kepada faktor-faktor yang objektif dan pemikiran yang rasionil berdasarkan hukum-hukum ekonomi. Apa yang dilakukan ialah penyusunan rencana pembangunan yang terutama mempunyai arti simbolik untuk konsumsi politik mercusuar, sehingga lain yang direncanakan, lain pula yang dilaksanakan. Pembiayaan pembangunan tidak tercermin didalam anggaran, sedangkan penggunaan anggaran selalu jauh melampaui yang diperkirakan dan kebijaksanaan keuangan diluar anggaran sudah tidak merupakan pengecualian yang harus dihindarkan.

Dalam keadaan dimana pengkotakan ideologi makin meruncing, ekonomi yang terus memburuk, dimana UUD 1945 disimpangkan, sedangkan PANCASILA diselewengkan dan teramcam oleh keinginan suatu golongan untuk meniadakannya, yang kemudian memuncak dalam bentuk pemberontakan G.30.5./PKI., maka timbullah peledakan sosial sebagai akibatnya. Keadaan pada waktu itu, terutama dibidang ekonomi adalah sangat gawat-sungguh menyulut keberanian dan tanggung jawab untuk memperbaikinya.

Sadar akan misi sejarahnya, maka tindakan yang segera dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru setelah pemberontakan G.30.S./PKI berhasil ditumpas, ialah menyelenggarakan sidang umum MPRS untuk menetapkan landasan pokok kebijaksanaan negara diberbagai bidang dalam kemurnian dasar PANCASILA dan UUD 1945.

MPRS dalam sidang umumnya yang ke-IV ini telah menetapkan landasan yang kokoh kuat, yang oleh Pemerintah dengan konsekuen dijadikan landasan kebijaksanaannya diberbagai bidang kegiatan kenegaraan, terutama dalam menegakkan stabilisasi politik dan ekonomi.

Sebagaimana telah berulang kali ditegaskan, kekuatan yang paling besar dalam menegakkan Orde Baru adalah kesetiaan kepada PANCASILA. Ideologi nasional yang didukung dan berakar dalam jiwa bangsa sudah seharusnya diresapkan didalam segala segi kehidupan : dalam pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dalam kehidupan

ketatanegaraan, dalam melaksanakan politik luar negeri dan sebagainya; dan ini tengah dan terus dilaksanakan. Oleh sebab itu, rumusan PANTJASILA yang bersumber pada ideologi golongan dan telah menimbulkan keruncingan dan pertentangan dimasa lampau tidak bisa dibenarkan. Hendaknya jelas, bahwa rumusan PANCASILA yang resmi dan murni adalah seperti yang tercantum pada alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai falsafah negara, PANCASILA merupakan arti kebulatan yang tunggal, suatu totalitas dimana tiap-tiap sila adalah merupakan bagian yang mutlak dari keseluruhan dan selalu mengandung serta menjiwai keempat Sila lainnya. Dengan ideologi nasional yang bulat seperti itu, dapatlah kiranya dibangun tata-kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang tertib dan dinamis.

Perkembangan semenjak Orde Baru ditegakkan menunjukkan betapa pelaksanaan azas dan sendi demokrasi mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti. Demokrasi setiap bangsa mempunyai ciri-ciri sendiri seperti halnya setiap bangsa yang kuat harus mempunyai kepribadian sendiri. Demokrasi yang ditegakkan, juga harus tumbuh diatas kepribadian Indonesia, harus merupakan pencerminan daripada pandangan hidup bangsa Indonesia. Demokrasi yang ditegakkan haruslah demokrasi yang berdasarkan PANCASILA, ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi berdasarkan PANCASILA memperhatikan kepentingan semua golongan dan lapisan masyarakat. Justru karena demokrasi yang ditegakkan harus bertolak dari pandangan hidup bangsa Indonesia, maka demokrasi berdasarkan PANCASILA harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, memperkuat persatuan Indonesia dan harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Salah satu puncak daripada kemajuan itu ialah terlaksananya Pemilihan Umum dengan tertib dan tentram. Hal ini berarti bahwa Pemerintah selalu mengusahakan terlaksananya kehendak rakyat langkah demi langkah, langkah demi langkah sesuai dengan prioritas dan kemampuan. Melalui Undang-undang PEMILU hasil tiga tahun musyawarah antara DPR-GR dengan Pemerintah ditetapkanlah bahwa PEMILU diselenggarakan dibawah naungan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945. Jika pada tanggal 3 Juli 1971 rakyat menggunakan haknya dalam suasana umum, bebas dan rahasia, dimana tiada tekanan bagaimanapun sifatnya dapat menghambat keputusannya, maka amanat rakyat sangatlah jelas, yakni bahwa wakil-wakilnya harus melaksanakan pembangunan sambil terus berusaha meningkatkan laju pertumbuhannya.

Sejak awal perjuangannya, Pemerintah telah menegaskan bahwa terwujudnya masyarakat makmur yang berkeadilan haruslah melalui serangkaian pembangunan yang bertahap. Demi mempercepat laju pembangunan, maka landasan yang kuat bagi tercapainya masyarakat adil

dan makmur diharapkan akan dapat dicapai dalam 5 atau 6 tahapan. Dalam acuan ini suatu roda umum pembangunan 25 tahun yang meliputi berbagai bidang kehidupan perlu ditumuskan dan dalam rangka pola itu disusunlah rencana-rencana Pembangunan Lima Tahunan.

Mempercepat laju pembangunan adalah suatu keharusan, sebab rakyat segera ingin menikmati kehidupan yang maju dan sejahtera, kehidupan yang adil dan menyenangkan. Juga pembangunan harus dipercepat, sebab kebutuhan rakyat makin banyak dan beraneka ragam, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan rohaniyah. Makin cepat pembangunan dapat dilaksanakan makin besar daya tahan dan kekuatan ekonomi agar tidak terombang-ambing oleh perkembangan ekonomi dunia. Namun harus pula disadari bahwa pelaksanaannya merupakan beban yang bertambah berat. Ini berarti bahwa kesadaran memberi iuran pembangunan harus dapat diperbesar dan harus menjiwai tekad untuk mewujudkan pembangunan. Memberikan sumbangan bagi pembangunan dalam bentuk pajak dan iuran lainnya bukan saja merupakan kewajiban warga negara, tetapi juga mempunyai landasan moral yang lebih dalam, ialah melaksanakan prinsip keadilan sosial.

Dalam pada itu tekad untuk turut serta didalam usaha mempercepat laju pembangunan membawa serta kesediaan untuk menerima pembaharuan yang sewajarnya harus ditrapkan bukan saja dalam bidang-bidang teknologi, organisasi dan management pembangunan yang lebih rasionil, tapi juga dalam sikap mental dan pola berpikir dari seluruh masyarakat. Bermental konstruktif, berorientasi kepada prestasi, berusaha yang produktif dan merasa bertanggung jawab pada masa depan merupakan ciri-ciri utama masyarakat yang membangun.

Untuk melaksanakan pembangunan itu harus dimiliki strategi dasar yang menjadi pegangan dalam memperjuangkannya. Didalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan landasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, landasan mana akan terwujud dalam dua tiga dasa warsa yang akan datang.

REPELITA yang sekarang merupakan tahap pertama yang masih harus dilanjutkan dengan tahap-tahap pembangunan seterusnya, yang secara keseluruhan harus merupakan kesatuan yang sambung-menyambung dan serasi. Dalam tiap tahap inilah harus disusun rencana pembangunan jangka menengah, yaitu rencana pembangunan lima tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan tersebut harus ditentukan prioritas-prioritasnya dan kecepatan penumbuhan ekonominya harus disesuaikan dengan kemampuan yang terus dikembangkan.

Dalam proses pembangunan ini sektor pertanian tetap memegang peranan yang penting, bahkan pertumbuhannya harus dipercepat. Akan tetapi pertumbuhan disektor industri, jasa-jasa dan lain-lain harus lebih cepat lagi agar tercapai penumbuhan ekonomi yang seimbang.

Ini berarti bahwa harus ada perubahan pada titik sentral pembangunan. Dalam

REPELITA yang sekarang titik sentral diletakkan pada sektor pertanian dengan industri yang menunjang dan menampung hasil pertanian itu. Dalam REPELITA berikutnya, pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada sektor industri yang mengolah bahan mentah. Didalam REPELITA ketiga pembangunan harus ditingkatkan pada usaha industri yang menghasilkan barang-barang jadi. Demikianlah selanjutnya proses pembangunan dilaksanakan.

Peningkatan produksi didalam proses pembangunan ini harus diikuti dengan kemajuan dibidang sosial yang memberi arti kepada kehidupan dan kemanusiaan : perluasan lapangan kerja, peningkatan kesehatan masyarakat, pertumbuhan kegiatan beragama, perluasan dan penyempurnaan pendidikan, peningkatan kesejahteraan keluarga, pengembangan kegiatan kebudayaan dan kesenian dan sebagainya.

Yang penting adalah menjaga agar dalam proses pembangunan, strategi dasar yang sudah digariskan tidak menjimpang dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya harus menanam kesadaran, bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana dengan baik, jika setiap pelaksana tetap patuh pada rencana yang ditetapkan. Disiplin pembangunan menghendaki suatu sinkronisasi kegiatan dimana konsistensi antara seluruh sektor dengan sektor lainnya baik secara fisik maupun finansial tetap terpelihara. Hal ini sejalan dengan konsensus nasional bahwa hasil pembangunan bukanlah prestasi perorangan ataupun golongan, tidak pula hasil kerja sesuatu departemen atau sektor tertentu; prestasi pembangunan adalah hasil karya besar dari seluruh rakyat bersama aparaturnya. Oleh sebab itu benarlah pendapat, bahwa pelaksanaan pembangunan haruslah tetap berjalan sesuai rencana dan pemahamannya.

Sebagaimana diketahui, REPELITA I adalah suatu rencana yang menundjuk kearah mana sumber-sumber yang terbatas seyogyanya diarahkan dan faktor-faktor apa yang membatasi ruang gerak dan kecepatan pertumbuhan pembangunan. Bumi Indonesia yang kaya memerlukan dana yang banyak untuk menjamahnya agar bermanfaat bagi rakyat. Kesadaran rakyat yang tertanam bahwa kemakmuran hanya bisa diraih dengan kerja keras, yang selama 20 tahun tertutup oleh selubung politik, jelas memerlukan bimbingan dan pengarahan agar kesadaran tersebut menjelma menjadi partisipasi yang meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan dilaksanakan dengan mengkonsentrasikan dana dan kegiatan kesektor yang diprioritaskan.

Disamping itu, dalam rangka bimbingan dan pengarahan, Pemerintah telah pula memberikan bantuan kepada desa dan kabupaten. Dengan bantuan tersebut diharapkan tersalur kiranya darah baru yang dapat menghidupkan gotong-royong di desa dalam suatu kegiatan yang seirama dengan kegiatan nasional dalam usaha pembangunan. Kiranya pertimbangan-pertimbangan rasional berdasarkan hukum ekonomi yang tertuang didalam rencana sederhana

tapi jelas, akan bertaut dalam kepaduan yang serasi dengan musyawarah desa sebagai penjelmaan daripada tradisi pertanda demokrasi, sehingga yang di kerjakan akan mencapai hasil yang maksimal. Ini disebabkan karena demokrasi yang ditumbuhkan adalah demokrasi yang berdasarkan kepada cara-cara dan berakar dalam jiwa rakyat Indonesia, yakni demokrasi yang sesungguhnya kuat berakar didesa-desa dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Dasar inilah yang dikembangkan dengan bentuk-bentuk modern diatasnya sehingga mampu menampung kemajuan jaman.

Tidaklah dapat disangkal, bahwa musyawarah desa yang mencakup semua eksponen pembina desa, yang dibimbing serta diarahkan kepada usaha pembangunan, adalah salah satu daripada pola pelaksanaan demokrasi yang hakiki. Oleh sebab itu, demokrasi tidak mungkin membenarkan kesepakatan untuk melanjutkan kemelaratan yang membagi kemiskinan.

Demokrasi PANCASILA adalah demokrasi yang menegaskan kewajiban untuk memerangi kemiskinan dan kemelaratan, untuk memberantas kebodohan dan keterbelakangan, untuk memelihara kesatuan dan persatuan dalam negara proklamasi dimana harkat manusia diindahkan dan keadilan ditegakkan dalam kecukupan, sehingga wajah kemerdekaan akan nampak lebih cerah. Setiap orang sadar, bahwa kehidupannya sekarang belum berada pada tingkat kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan yang essensiil. Namun bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya keadaannya kini lebih baik. Hal ini tercermin pada kenaikan produksi dalam negeri pada tahun-tahun akhir ini.

Disektor produksi pangan, perhatian utama ditujukan kepada produksi beras. Pengalaman mengajarkan, bahwa beras adalah faktor yang menentukan dalam menegakkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilisasi. Usaha demi usaha dilakukan agar rencana swasembada pangan dapat mendjelma menjadi kenyataan. Kini dengan INMAS dan BIMAS nasional yang dilancarkan secara besar-besaran melalui Panca Usaha yang meliputi : penggunaan bibit unggul, pengairan yang baik, penggunaan pupuk, penggunaan obat pemberantas hama dan cara bercocok tanam yang tepat, hasil-hasil yang dicapai sungguh tidak mengecewakan.

Kiranya telah tersebar pengertian, bahwa usaha menaikkan produksi pangan pada akhirnya haruslah melalui INMAS. Namun dewasa ini dan dimasa depan yang dekat, BIMAS yang terus-menerus disempumakan masih akan memainkan peranan penting. Kini BIMAS Nasional telah lebih lancar pelaksanaannya. Bimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui penyuluhan serta hasil-hasil positif yang telah terhampar sebagai kenyataan terbukti telah menggugah petani untuk menjadi peserta yang lebih aktif dalam jalur kegiatan unit desa ("*village unit*"). Dengan masuknya petani kedalam lingkaran kegiatan yang

menggunakan teknologi modern, maka roda usaha swasembada akan berputar lebih cepat, sehingga produksipun akan terus terangsang.

Bagi Indonesia, dimana produksi pertanian merupakan kegiatan terbesar yang mencakup lebih dari 2/3 dari jumlah tenaga kerja, dan lebih dari separuh dari pendapatan nasional, maka meningkamja produksi pangan sungguh membawa kesegaran kepada prospek pembangunan. Rakyat Indonesia yang jumlahnya mendekati 120 juta orang itu membutuhkan makanan, sektor industri hanya dapat berkembang jika sektor pertanian telah sanggup memetjahkan lingkaran serba kekurangan, sehingga gambaran akan terjangkaunya swasembada pasti dapat menambah volume kegiatan.

Jika PELITA mentargetkan produksi beras untuk tahun 1970 sebesar 11.430 ribu ton, realisasinya diperkirakan akan mencapai 11.994 ribu ton dan ini berarti suatu kenaikan sebesar 546 ribu ton. Suatu kesimpulan yang didasarkan kepada realisasi yang lebih besar daripada areal BIMAS dan INMAS, dan iklim yang lebih baik bagi tanaman padi, memperkuat rekaan bahwa produksi beras dalam tahun 1971 akan jauh melampaui 12 juta ton. Dalam pada itu produksi jagung dan kacang-kacangan dalam tahun 1970 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan produksi tahun 1969, sedangkan produksi yang sama untuk tahun 1971 diperkirakan akan naik.

Dalam tahun 1970, produksi pertanian untuk bahan-bahan ekspor pada umumnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan produksi tahun 1969. Kenaikan yang berarti terutama terjadi pada produksi karet rakyat/perkebunan besar antara lain disebabkan lebih banyaknya digunakan pupuk serta perbaikan dalam tehnik dan tata-kerja. Kenaikan juga terjadi pada produksi kelapa sawit, kopi, lada, pala dan kopra. Sedikit penurunan dialami oleh produksi tembakau yang disebabkan oleh faktor iklim yang kurang menguntungkan. Kemajuan inipun merupakan indikasi yang jelas bahwa perkebunan-perkebunan negara bertambah sehat dan usaha-usaha perkebunan rakyat mulai menampilkan gerak yang menggugah harapan. Kiranya benar pendapat yang mengatakan bahwa iklim ekonomi yang bertambah baik, prasarana yang memungkinkan lancarnya angkutan, kredit yang disalurkan secara terarah, kebijaksanaan yang menggairahkan ekspor serta lain sebagainya, adalah faktor-faktor yang mendorong kemajuan dibidang ini. Dalam pada itu Pemerintah selalu mengusahakan agar dapat dilakukan ekspor langsung kenegara konsumen. Untuk memungkinkan usaha-usaha ini dapat dicapai, perbaikan mutu dan kontinuitas ekspor harus mendapat perhatian utama.

Dalam hubungan ini suatu langkah penting telah diambil, yakni memberikan dorongan yang kuat untuk dibangunnya industri yang menghasilkan "*crumbrubber*". Masih banyak usaha yang harus dikerjakan, sebelum "*crumb-rubber*" memberikan sahamnya yang penting dalam

menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Sementara itu produksi kayu dalam tahun 1971 diperkirakan akan mencapai 13 juta m³. Dengan adanya peningkatan kegiatan dalam bidang kehutanan, maka penghasilan devisa pun meningkat. Disamping itu terbuka pulalah kesempatan kerja yang lebih besar bagi daerah-daerah yang bersangkutan.

Dalam pada itu disektor pertambangan terdapat kenaikan-kenaikan pada produksi minyak mentah, timah, nikel, bauksit dan sebagainya. Gambaran masa depan dibidang pertambangan nampak dalam usaha-usaha yang kini tengah diolah dengan seksama dan penuh perhitungan. Usaha-usaha baru terus bertambah, perluasan-perluasan diadakan, sumber-sumber baru ditemukan terutama minyak bumi. Sementara itu pasir besi dari Cilacap mulai diekspor, sedangkan tambang tembaga di Irian Barat yang jumlah investasinya melampaui seratus juta dollar kini sedang terus diselesaikan. Di daerah-daerah lainpun hasil tambang seperti nikel, bauksit dan sebagainya tengah dieksplorasi.

Perkembangan usaha ekstraktif yang terus meningkat ini, memberikan kemungkinan yang harus dapat dimanfaatkan dengan mengusahakan pengolahannya menjadi bahan baku dan seterusnya.

Sementara itu produksi dibidang industri memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Suatu kemajuan kuantitatif dalam perkembangan industri nampak tersebar dimana-mana sebagai hasil perpaduan inisiatif pengusaha dan fasilitas serta perlindungan yang diberikan Pemerintah. Dibidang pertekstilan telah dapat dihasilkan kain-kain berkualitas internasional dengan serat buatan seperti tetoron dan trivera dan tjiampuran antara serat buatan dengan kapas. Selanjutnya pabrik-pabrik industri dalam negeri telah dapat pula menghasilkan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti plaat seng, ashes gelombang, susu kental, sabun, detergen, batu baterai, obat-obatan, bahan-bahan kimia, tepung terigu, bahan makanan lainnya dan sebagainya. Bila diperhatikan perkembangan produksi beberapa hasil industri dalam tahun pertama dan kedua PELITA I, maka tampaklah bahwa produksi tekstil, benang tenun, kertas, pupuk/urea, semen dan ban kendaraan telah mencapai kenaikan-kenaikan yang berarti bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula produksi radio, assembling sepeda motor, rokok putih dan rokok kretek telah menunjukkan kenaikan-kenaikan. Hasil-hasil yang dipaparkan diatas adalah produksi yang telah dapat diketengahkan kepada masyarakat. Suatu tanggapan yang positif dari masyarakat untuk lebih banyak menggunakan produksi dalam negeri pasti akan menambah kecepatan perkembangan industri dalam negeri, memperluas penumbuhannya dan meningkatkan kualitasnya.

Maka tidaklah dapat disangkal, bahwa untuk sebagian kenaikan-kenaikan tersebut telah

dimungkinkan oleh meningkatnya perbaikan dan bertambahnya prasarana produksi, yakni sektor yang pembangunannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Irigasi sebagai prasarana pertanian pada umumnya mendapatkan aksentuasinya pada perbaikan sistim dan perluasan jumlahnya. Hasil-hasil yang telah dicapai nampak pada jumlah areal sawah yang dapat diairi. Disamping itu usaha-usaha penelitian dan pengembangan terus dipergiat.

Dalam pada itu pemeliharaan dan rehabilitasi jalan-jalan dan jembatan telah mengalami kemajuan. Realisasi pembangunan tenaga listrik selama dua tahun pelaksanaan PELITA menunjukkan pula kemajuan-kemajuan. Rehabilitasi pembangunan tenaga listrik berjumlah hampir 4.000 kw, sedangkan pembangunan baru mencapai 24.450 kw.

Sektor perhubungan yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, telah pula menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan yang lebih mantap. Angkutan darat telah bertambah cepat dan frekwensinya serta pelajannya mengalami peningkatan dan perbaikan. Angkutan laut telah bertambah besar tonase dan peranannya, angkutan udarapun telah mengalami kemajuan dengan bertambahnya frekwensi dan jangkauan terbangnya.

Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai dibidang perhubungan maka ketjepaeaan pelajanan oleh pos dan telekomunikasi telah meningkat sebagai akibat dari modernisasi dan pengembangan jaringan-jaringan hubungan, baik didalam negeri maupun dalam hubungannya dengan luar negeri.

Salah satu potensi yang bila dikembangkan akan dapat meningkatkan penerimaan devisa dan juga memberi kemungkinan bagi perluasan usaha-usaha masyarakat, adalah sektor pariwisata. Usaha-usaha yang dilakukan dalam beberapa tahun ini telah menghasilkan perkembangan yang positif. Arus wisatawanpun terus bertambah dalam tahun 1970/1971, sedangkan modal yang ditanam dibidang ini telah menghasilkan sarana pariwisata yang terus meningkat.

Selanjutnya, stabilisasi politik dan ekonomi telah menciptakan iklim yang baik bagi penanaman modal. Sadar bahwa modal dalam negeri masih lemah, maka Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada penanaman modal asing untuk membantu proses transformasi kandungan bumi Indonesia dari kekayaan potensiil menjadi kekayaan yang bermanfaat bagi rakyat.

Sejalan dengan itu, usaha terus dilakukan agar peranan penanarnan modal dalam negeri terus meningkat. Jika ditelaah sejenak realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri, maka akan ditemui angka-angka realisasi tidak kurang dari Rp. 132,3 miliar yang terdiri dari Rp. 74,3 miliar untuk penanaman modal asing dan Rp. 58 miliar untuk penanaman modal dalam negeri.

Hasil-hasil yang telah diketengahkan diatas kiranya tidak mungkin dicapai tanpa adanya

stabilisasi, baik stabilisasi ekonomi maupun stabilitasi politik.

Seperti yang telah diungkapkan, keadaan ekonomi Indonesia ditahun 1966 adalah sangat gawat. Laju inflasi mencapai tingkat tertinggi didunia, arus uang terus bertambah sedangkan arus barang semakin berkurang karena impor bahan baku dan bahan penolong terus menurun sehingga melumpuhkan produksi dalam negeri. Dalam pada itu ekspor telah merosot dengan tajam, sedangkan hutang luar negeri dihambur-hamburkan secara konsumtif sedemikian rupa sehingga sangat membahayakan neraca pembayaran Indonesia. Sementara itu keadaan prasarana ekonomi dan sosial rusak tak terawat, banyak jalan dan jembatan tidak dapat dilalui, lalu lintas angkutan laut terhambat dan tidak terpelihara. Listrik, air minum, telekomunikasi dan lain-lain lumpuh akibat kekurangan spare-parts, sedangkan penerimaan pendapatan berada jauh dibawah biaya produksi. Sejalan dengan itu, administrasi dan aparatur negara berada dalam kekacauan akibat kesimpang-siuran peraturan, ketidak jelasan wewenang dan kekaburan kewajiban.

Berhadapan dengan keadaan yang sangat mencemaskan itu diperlukan suatu tindakan yang dengan cepat mampu mengatasinya, agar keadaan yang normal dapat segera terciptakan. Kiranya jelas, bahwa suatu penyelesaian yang memerlukan waktu yang pandyang pada akhirnya akan memukul diri sendiri, akan *"self defeating"*. Oleh sebab itu, jalan keluar terbaik adalah melaksanakan serangkaian tindakan yang drastis : Pemerintah harus melakukan penghematan besar-besaran, departemen dibatasi pengeluarannya, proyek-proyek yang kurang perlu dihentikan, harga minyak bumi disesuaikan dan sebagainya. Tindakan ini akan dirasakan berat oleh masyarakat, namun stabilisasi akan lebih cepat tercapai sehingga pembangunan dalam waktu dekat dapat diselenggarakan.

Keputusan diambil dengan penuh ketabahan. Tindakan operasionil menyusul dan mendapatkan manifestasinya didalam suatu rangkaian peraturan yang kemudian dikenal dengan nama Peraturan 3 Oktober 1966. Didalamnya antara lain tersimpul : kebijaksanaan anggaran berimbang untuk meniadakan salah satu sebab dari pada inflasi; kebijaksanaan perdagangan luar negeri yang lebih memberikan ruang gerak bagi eksportir; kebijaksanaan kredit selektif dan lebih terarah kepada usaha produktif; kebijaksanaan penyelesaian dan penundaan pembayaran hutang-hutang luar negeri guna mengurangi beban neraca pembayaran.

Kenyataan pada saat ini membuktikan, bahwa jalinan peraturan 3 Oktober 1966 dan rangkaian tindakan sistematis sesudahnya terata telah menunaikan tugasnya dengan memuaskan. Laju inflasi telah dapat diturunkan, suatu kenyataan yang tercermin didalam perkembangan angka-angka indeks biaya hidup, indeks harga 9 bahan pokok dan indeks harga beras. Hal ini akan lebih meyakinkan lagi bila dilihat bahwa prosentase kenaikan indeks biaya hidup berdasarkan 62 macam barang sejak dimulainya tahun anggaran 1971/1972 sampai

dengan bulan Oktober 1971 adalah menurun yaitu minus 5,6% sekalipun jumlah uang beredar meningkat mencapai angka Rp. 296,0 miliar.

Apa yang telah dikemukakan diatas adalah indikasi yang jelas dari berhasilnya usaha stabilisasi. Telah menjadi kenyataan bahwa sektor keuangan negara telah dapat ditertibkan dengan bilangnya defisit dan berangsur tegaknya disiplin anggaran, baik berupa kesadaran bahwa penggunaan uang rakyat harus dipertanggung jawabkan maupun perkembangan tata-cara penyusunan dan pengundangannya, pelaksanaan dan pertanggungan jawabnya. Sebagaimana diketahui, prinsip anggaran berimbang mengharuskan adanya penyesuaian pengeluaran-pengeluaran negara dengan volume penerimaan yang terus ditingkatkan. Perkembangan pelaksanaan anggaran berimbang menunjukkan, bahwa bukan saja defisit telah dapat ditiadakan, melainkan telah pula dapat dibentuk tabungan pemerintah, yaitu tabungan yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin.

Dalam pada itu, jika pada permulaan penyusunan APBN dalam tahun pertama pelaksanaan pembangunan, anggaran pembangunan telah disusun berdasarkan sistim planning, programming dan budgeting, maka perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan telah mengharuskan diadakannya peninjauan terhadap tata-cara pembukuan anggaran yang berlaku, yakni kas-stelsel. Didalam masa pembangunan, administrasi keuangan negara harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk menampung kegiatan pembangunan yang tidak dapat terhenti pada tiap akhir tahun anggaran. Pembangunan memerlukan kelangsungan kegiatan untuk jangka waktu yang panjang. Masalah ini telah dapat dipecahkan dengan menggabungkan sistim kas dengan sistim *virement*. Tersurat didalam APBN 1971/1972, bahwa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan tahun 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1971/1972 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1971/1972. Seiring dengan itu, adalah suatu kemajuan pula untuk menetapkan ketentuan, bahwa saldo anggaran lebih ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai anggaran pembangunan. Sebagaimana telah ditegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun oleh Pemerintah untuk kepentingan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat mensahkannya atas nama rakyat. Dengan demikian maka rakyat telah menetapkan sendiri rencana-rencana kerja dan sumber-sumber pembiayaannya, mengawasi dan menetapkan perhitungan anggarannya. Ternyata bahwa didalam tahun anggaran 1971/1972, putaran suatu anggaran seperti yang dikemukakan diatas telah dapat ditutup dengan disahkannya Perhitungan Anggaran 1967.

Mempelajari kembali APBN-APBN yang telah disusun sejak 1967 hingga kini, maka nampaklah betapa tugas Pemerintah terus bertambah. Disamping tugas-tugas umum

pemerintahan yang makin meluas, maka juga usaha rehabilitasi dan pembangunan terus meningkat. Demikian pula apa yang telah dibangun memerlukan pemeliharaan dan perawatan. Semua ini memerlukan biaya yang makin hari makin besar, sehingga usaha menambah penerimaan negara harus terus ditingkatkan.

Sejak semula, usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan telah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Kenyataan menunjukkan, bahwa dengan terkendalinya inflasi usaha tersebut makin lama makin berasa berat. Berbagai kebijaksanaan ditempuh agar penerimaan negara terutama penerimaan dalam negeri dapat terus dikembangkan. Untuk memungkinkan hal ini, Pemerintah juga berusaha menumbuhkan kesadaran membayar pajak dikalangan masyarakat. Tugas ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar apabila masyarakat sendiri sadar akan kewajibannya. Sebagaimana telah ditegaskan, kewajiban membayar pajak sekaligus merupakan cara mendidik yang baik untuk menjadikan setiap warga negara mematuhi dan memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Adalah suatu kenyataan bahwa dimasa sebelum tahun 1966, penerimaan negara melalui perpajakan telah terabaikau. Apa yang dilakukan dimasa itu adalah membiayai sebagian besar kegiatan pemerintahan dengan mencetak uang. Dengan tindakan yang demikian itu, maka aparat perpajakan diabaikan dan tidak memperoleh perhatian yang wajar.

Berbeda dengan orde lama, Pemerintah Orde Baru menyadari benar betapa pentingnya pembinaan aparat perpajakan bagi berhasilnya usaha pembangunan. Sejalan dengan pembinaan, aparat perpajakan maka pemungutan pajak mulai diintensifkan dan jumlah wajib pajak diusahakan menjadi bertambah besar.

Sementara itu, kebijaksanaan dibidang perpajakan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan semata, melainkan juga untuk mendorong kegiatan ekonomi dan produksi dalam masyarakat serta mengetrapkan keadilan sosial.

Seperti diketahui dana yang diperoleh melalui pajak adalah untuk dimanfaatkan kembali oleh rakyat dalam bentuk jalan-jalan, jembatan-jembatan, pengangkutan, bendungan, irigasi, listrik, air minum, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Dengan demikian, maka kebijaksanaan dibidang perpajakan harus dilola sedemikian rupa, agar terbina keseimbangan yang serasi antara tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan kewajiban Pemerintah untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi kegiatan investasi.

Dalam rangka inilah seyogyanya dilihat perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan semenjak permulaan pelaksanaan pembangunan. Sebagai gambaran dapat kiranya diketengahkan kembali penyempurnaan yang dilakukan didalam lima Undang-undang dibidang perpajakan yakni pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak dividen, penanaman modal

dalam negeri dan penanaman modal asing, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan iklim fiskal yang akan merangsang kegiatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, penertibanpun dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan dan sekaligus menciptakan efisiensi serta efektifitas sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembangunan. Penertiban-penertiban dilakukan : dibidang organisasi dan administrasi perpajakan, dibidang peraturan dan perundang-undangan; dibidang hubungan perpajakan internasional, dan keharusan departemen dan bendaharawan menjadi wajib pungut pajak-pajak negara dan sebagainya.

Khusus untuk meningkatkan bea masuk dan mengketatkan pelaksanaannya telah ditempuh berbagai kebijaksanaan seperti penurunan tarif. kebijaksanaan harga patokan, kebijaksanaan antar pulau, kebijaksanaan manifes serta penertiban pelabuhan untuk melancarkan arus barang.

Dibidang cukai masih tetap diberlakukan tarif yang diberikan keringanan guna menggairahkan produksi rokok dalam negeri. Penertiban pita cukai dilakukan guna menghindari persaingan yang tidak sehat.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut juga bertujuan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan harga dan produksi dalam negeri serta roda pembangunan ekonomi. Disamping itu dimaksudkan pula untuk mencegah sejauh mungkin pemasukan barang-barang secara tidak wajar yang dapat mengganggu perkembangan produksi dalam negeri.

Melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada garis besarnya berpusat pada hal yang telah diketengahkan diatas, maka nampaklah bahwa usaha yang dilakukan dengan penuh tekun ternyata telah menghasilkan perkembangan penerimaan yang tidak mengecewakan. Penerimaan dalam negeri yang dalam tahun 1969/1970 berjumlah Rp. 243,7 miliar ternyata telah meningkat menjadi lebih dari Rp. 415,0 miliar dalam tahun 1971/1972. Dalam pada itu penerimaan negara untuk tahun 1972/1973 diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp. 573,6 miliar.

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari tahun ketahun merupakan keharusan sebab kegiatan Pemerintah juga terus meningkat. Kebijakan pengeluaran selalu harus memperhatikan kepentingan pengeluaran dibidang pembangunan dan pengeluaran dibidang rutin. Mengingat adanya keharusan untuk terus meningkatkan kegiatan pembangunan, sedang dilain pihak dana yang tersedia adalah terbatas, maka diperlukan penentuan prioritas yang cermat antara pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. Sebaliknya penentuan yang terlampau ketat terhadap pengeluaran rutin akan mengganggu pelaksanaan tugas pembangunan, mengingat bahwa pelaksanaan tugas pembangunan yang makin meluas memerlukan dukungan

yang seimbang dari aparaturnya Pemerintah. Pengalaman dalam tahun akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perbandingan antara anggaran pembangunan dan anggaran rutin makin lama makin menjadi besar. Bila dalam tahun 1969/1970 pengeluaran pembangunan merupakan 54,5% dari pengeluaran rutin, maka dalam tahun 1970/1971 perbandingan tersebut menjadi 58,9%, realisasi dalam semester I - 1971/1972 sebesar 61,6% dan dalam tahun 1972/1973 diperkirakan mencapai 71,8%. Dari angka-angka tersebut jelas terlihat meningkatnya peranan anggaran pembangunan didalam anggaran sebagai keseluruhan.

Untuk memungkinkan peningkatan kegiatan pembangunan secara terus menerus diperlukan peningkatan dari tabungan pemerintah.

Untuk tahun anggaran 1972/1973 tabungan pemerintah berjumlah Rp. 136,1 miliar, suatu jumlah yang untuk pertama kalinya melampaui penerimaan rupiah dari bantuan program. Jumlah tersebut juga telah melampaui target tabungan pemerintah yang ditentukan untuk tahun akhir REPELITA.

Tabungan pemerintah tergantung dari pengeluaran rutin, mengingat bahwa jumlahnya merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Oleh karenanya penghematan-penghematan dibidang pengeluaran rutin adalah sangat penting. Meskipun demikian beberapa pos pengeluaran memerlukan perhatian khusus. Salah satu pos pengeluaran rutin adalah pos belanja pegawai. Dalam hubungan ini perlu disinggung perbaikan nasib pegawai negeri dan ABRI. Sekalipun pada dasarnya perbaikan tersebut akan terus berkembang sejalan dengan bertambah baiknya ekonomi sebagai akibat meningkatnya pembangunan, kenaikan gaji selalu diusahakan oleh Pemerintah sesuai dengan kesanggupan keuangan negara. Kenaikan gaji dalam tahun anggaran 1971/1972 sebesar 33 1/3 persen merupakan kenaikan yang makin riil dari tahun-tahun sebelumnya, karena kenaikan tersebut dinikmati oleh pegawai negeri dan ABRI dalam suatu perkembangan ekonomi dimana tingkat kenaikan harga hingga akhir tahun anggaran diperkirakan akan berada dibawah 7%. Dengan harapan bahwa keadaan ekonomi dalam tahun anggaran 1972/1973 akan lebih mantap lagi, maka kenaikan gaji untuk pegawai negeri dan ABRI yang direncanakan Pemerintah untuk tahun tersebut akan jelas menambah kesejahteraan secara riil. Pos lain yang juga merupakan beban bagi Pemerintah adalah subsidi daerah otonom dan pembayaran hutang luar negeri. Sekalipun demikian penghematan-penghematan dibidang pengeluaran rutin lainnya masih harus terus dilakukan tanpa menghambat pelaksanaan tugas umum Pemerintah. Jumlah pengeluaran rutin dalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan mencapai Rp. 437,5 miliar. Meskipun terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tingkat kenaikannya masih lebih rendah dari tingkat kenaikan pengeluaran pembangunan. Dalam tahun 1969/1970 anggaran

pembangunan baru berjumlah Rp. 92,8 miliar. Jumlah anggaran pembangunan dalam tahun 1971/1972 yang diperkirakan sebesar Rp. 175,7 miliar menunjukkan betapa pembangunan disektor Pemerintah kian berkembang. Perkiraan anggaran pembangunan untuk tahun 1972/1973 sebesar Rp. 231,1 miliar memperlihatkan makin meluasnya kegiatan pembangunan.

Sementara itu pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan kepada desa dan kabupaten telah membawa hasil yang berlipat ganda. Masyarakat makin terdorong untuk membangun dan tanggung jawab pembangunanpun makin besar. Dengan bantuan-bantuan tersebut tampak jelas kemajuan-kemajuan yang dicapai bukan saja dibidang ekonomi, melainkan dan terutama bertambahnya semangat, kegiatan dan tanggung jawab membangun dari masyarakat sendiri.

Pembiayaan pembangunan selain bersandar pada tabungan Pemerintah, juga mempergunakan nilai lawan bantuan program sebagai pelengkap dana pembangunan. Komponen lain dari dana pembangunan adalah bantuan proyek. Tanpa bantuan proyek, bantuan luar negeri yang dalam tahun 1969/1970 berjumlah Rp. 65,8 miliar menjadi sekitar Rp.103,1 miliar dalam tahun 1971/1972 dan kemudian menurun menjadi Rp.95,0 miliar dalam tahun 1972/1973.

Dengan meningkatnya volume pengeluaran pemerintah yang makin besar tiai tahunnya maka pengawasan terhadap penggunaannya perlu juga ditingkatkan. Diintrodusirnya sistim DIP dalam penyusunan anggaran pembangunan, ditetapkannya pedoman pelaksanaan APBN yang terus menerus mengalami penyempurnaan dan diharuskannya memberikan laporan fisik dan keuangan dalam setiap fase perkembangan proyek, menunjukkan betapa kesadaran tentang pengawasan telah menjadi keyakinan. Dengan demikian dapat terawasi penggunaan anggaran yang sesuai dengan rencana dan dapat dihindarkan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.

Perlu diketahui bahwa dana untuk keperluan pembangunan tidak hanya bersumber pada anggaran belanja negara, tapi juga bersumber pada sektor perbankan yang harus dimobilisir dari sektor swasta. Dalam rangka itulah telah dilaksanakan kebijaksanaan pengerahan dana melalui deposito berjangka, tabungan berhadiah, tabungan pembangunan nasional (Tabanas) dan tabungan asuransi berjangka (Taska) serta sertifikat bank.

Kebijaksanaan deposito berjangka yang dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu, telah mengalami perkembangan yang terus meningkat, sekalipun dalam jangka waktu 3 tahun itu, suku bunga telah berkali-kali diturunkan. Sampai dengan akhir bulan Oktober 1971, deposito berjangka bank-bank umum pemerintah telah meningkat dari posisi Rp. 59,7 miliar pada akhir bulan Maret 1971 menjadi Rp. 92,7 miliar pada akhir bulan Oktober 1971. Kenaikan ini adalah

lebih tinggi dari kenaikan tahun 1970 dalam periode yang sama.

Sementara itu kebijaksanaan tabungan berhadiah 1969 telah pula mengalami kenaikan sehingga pada akhir bulan Oktober 1971 telah mencapai jumlah Rp. 1,7 miliar.

Disamping itu telah dilaksanakan kebijaksanaan dalam bentuk tabungan baru, yakni tabungan pembangunan nasional disingkat "Tabanas" dan tabungan asuransi berjangka yang disebut "Taska". Semenjak dimulainya gerakan Tabanas dan Taska pada tanggal 20 Agustus 1971, kedua tabungan bentuk baru ini telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Sampai dengan bulan Oktober 1971 Tabanas telah mencapai jumlah Rp. 1,334 miliar. Jumlah para penabung untuk kedua tabungan tersebut adalah 218.226 penabung untuk tabanas dan 5.547 penabung untuk taska.

Dalam pada itu sejak bulan April 1970, oleh Bank Indonesia telah diperkenalkan sejenis sural berharga yang hingga bulan Agustus 1971 telah terjual sebanyak Rp. 18,2 miliar. Setelah maksud dan tujuan dikeluarkannya sertifikat Bank Indonesia nampak hasilnya, maka Bank Indonesia telah menghentikan pengeluaran sertifikat untuk diteruskan oleh bank-bank pemerintah lainnya.

Peranan perkreditan bank dalam menggerakkan pembangunan yang sedang berjalan semakin penting artinya. Volume kredit bank telah meningkat dari Rp. 136,5 miliar pada permulaan 1969/1970 menjadi Rp. 448,1 miliar sampai bulan Oktober 1971. Sebagian besar dari volume kredit ini diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan diprioritaskan dalam pembangunan.

Dalam rangka untuk mengarahkan penggunaan kredit kesektor-sektor yang diprioritaskan, maka telah diadakan penurunan tingkat bunga berkali-kali sehingga dewasa ini tingkat bunga yang berlaku adalah sekitar 12 persen dan 4 persen perbulan. Kredit investasipun memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang menggembirakan. Pada tahun 1969/1970 kredit investasi yang telah disetujui adalah sebesar Rp. 31,6 miliar dan menjadi Rp. 100,4 miliar pada bulan September 1971. Sebagian besar dari kredit investasi ini ditujukan kesektor pertanian, industri, perhubungan dan pariwisata.

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan memerlukan volume kredit yang besar, namun kenyataan ini tidak dengan sendirinya membenarkan pendapat, bahwa volume perkreditan harus diperbesar tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Seperti telah diutarakan, penggunaan kredit dalam kegiatan pembangunan, sebagian besar ditujukan untuk barang modal dan bahan baku/penolong yang dewasa ini masih harus diimpor. Kelangkaan devisa yang dihadapi telah menyebabkan Pemerintah berusaha terus menerus untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ekspor. Maka dalam rangka jalinan kebijaksanaan

yang konsisten, besarnya volume perkreditan seyogyanya disesuaikan dengan perkembangan neraca pembayaran disatu pihak sedangkan pihak lain harus pula menunjang pembangunan tanpa mengganggu stabilisasi.

Telah jelas kiranya bahwa meningkatnya perkembangan ekonomi membawa serta peningkatan kebutuhan terhadap berbagai bahan-bahan baku dan bahan penolong dan sebagainya yang harus didatangkan dari luar negeri. Oleh sebab itu perkembangan perdagangan luar negeri perlu mendapat perhatian sepenuhnya terlebih-lebih mengingat perkembangan ekonomi dunia akhir-akhir ini.

Menghadapi gejala ekonomi dunia tersebut, Pemerintah pada tanggal 23 Agustus 1971 telah melaksanakan berbagai kebijaksanaan yang antara lain bertujuan untuk mengamankan ekspor. Perkembangan dibidang ekspor menunjukkan bahwa nilai ekspor termasuk minyak bumi dalam tahun 1968 telah naik dari US \$ 963 juta menjadi US \$ 1.039 juta dalam tahun 1969/1970. Dalam tahun 1970/1971 ekspor termasuk minyak mencapai angka US \$ 1.204 juta, sedangkan bersamaan dengan kebijaksanaan Pemerintah pada tanggal 23 Agustus 1971 terlihat indikasi, bahwa ekspor dalam tahun 1971/1972 akan dapat mencapai US \$ 1.364 juta. Dengan demikian maka akan dapat dilampaui angka ekspor tertinggi yang pernah dicapai oleh Indonesia pada tahun 1951.

Dalam pada itu bidang impor pun mengalami kenaikan dan perbaikan dalam komposisinya sejalan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi. Melalui kebijaksanaan impor dan kebijaksanaan tarif, maka nilai impor termasuk minyak bumi yang dicapai dalam tahun 1969/1970 adalah sebesar US \$ 1.071 juta. Dalam tahun 1970/1971 nilainya mencapai angka US \$ 1.106 juta, sedangkan nilainya untuk tahun 1971/1972 diperkirakan sebesar US \$ 1.282 juta.

Dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun terakhir dan kebijaksanaan yang dipersiapkan secara konsisten dan dilaksanakan dengan upaya yang terkoordinasi secara terus menerus, maka untuk tahun 1972/1973 nilai ekspor diperkirakan mencapai US \$ 1.889 juta dan impor US \$ 1.613 juta.

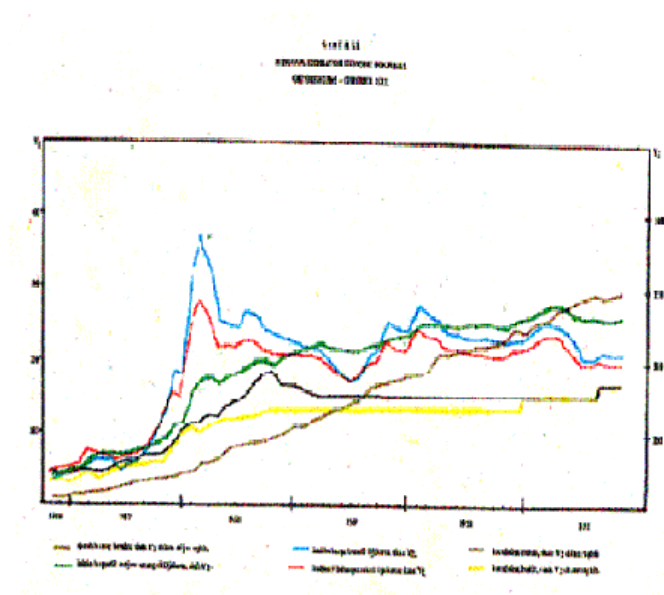
Pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan adalah strategi agar semua tujuan pembangunan akhirnya dapat dicapai. Tujuan ini akan sulit tercapai, bila tidak dimiliki kesadaran tentang perlunya perencanaan keluarga. Kenaikan produksi pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya kurang mempunyai arti terhadap terbentuknya kesejahteraan rakyat, bila kenaikan tersebut tidak diikuti oleh berkurangnya prosentase pertambahan jumlah penduduk. Sebaliknya berhasilnya program keluarga berencana akan berarti bertambah baiknya taraf hidup rakyat.

Nampaknya suasana yang lebih cerah dibidang politik dengan berlalunya Pemilu dan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dalam suasana Undang-undang Dasar 1945 serta stabilitasnya harga-harga seperti yang belum pernah dialami oleh Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menyebabkan orang cenderung lupa bahwa baru lima tahun lalu bangsa dan rakyat Indonesia berada dalam keadaan politik dan ekonomi yang sungguh mengkhawatirkan. Masa lampau, betapapun pendek jarak masa lampau itu, tidak menarik lagi.

Pembangunan memerlukan waktu yang bertahun-tahun lamanya : persiapan perencanaan, pekerjaan dan jumlah modal yang banyak diperlukan sebelum memulai dan menyelesaikan sebuah proyek. Ini berarti bahwa masyarakat harus berani bersikap untuk menunda nikmat masa kini bagi keuntungan yang lebih besar dihari-hari mendatang. Seiring dengan itu, maka tertanamlah kesadaran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih berbahagia bagi generasi yang akan datang. Kesadaran ini pulalah yang melandasi tekad untuk mempercepat laju pembangunan. Mempercepat laju pembangunan adalah suatu keharusan karena berlomba dengan waktu. Kiranya telah jelas, bahwa hasil-hasil kemajuan ekonomi seyogyanya memungkinkan terjawabnya tantangan-tantangan sosial yang luas : kesempatan kerja, kesehatan yang lebih baik, kebutuhan pendidikan dan sebagainya, atau dengan kata lain: lebih meratanya keadilan sosial pada tingkatan kehidupan yang lebih maju.

Tetapi hendaknya ditanam pula kesadaran, bahwa tekad untuk mempercepat pembangunan membawa serta keharusan untuk memikul beban yang lebih berat.

Maka bertambah jelaslah kini bahwa tugas bersama yang harus dikerjakan adalah : meningkatkan pelaksanaan pembangunan.



BAB II

PERKEMBANGAN HARGA, GAJI DAN UPAH

2.1. Perkembangan harga

Tahun anggaran 1971/1972 merupakan tahun keenam dari pelaksanaan kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dimulai sejak bulan Oktober 1966. Kenyataan menunjukkan bahwa sasaran stabilisasi telah dapat dicapai. Laju inflasi yang pada tahun 1966 mencapai 650% telah turun menjadi 85% pada akhir tahun 1968 dan kemudian menjadi 9,9% dalam tahun 1969 dan ditahun 1970 turun lagi menjadi 8,8%. Selama tahun anggaran 1971/1972 harga-harga menunjukkan perkembangan yang makin mantap.

Kalau indeks biaya hidup di Jakarta berdasarkan 62 macam barang dipakai sebagai bahan pengukur perkembangan harga maka ternyata bahwa perkembangannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
PROSENTASE KENAIKAN INDEKS BIAYA HIDUP DI JAKARTA
1966 - OKTOBER 1971 (OKTOBER 1966 = 100) ,

Tahun	Prosentase kenaikan
1966	650 %
1967	112 %
1968	85 %
1969	9,9%
1970	8,8%
1970/1971	7,8%
1971/1972 s/d Oktober 1971	- 5,6%

Tabel diatas menunjukkan perkembangan indeks biaya hidup di Jakarta sejak tahun 1966 sampai dengan bulan Oktober 1971, yang memperlihatkan prosentase kenaikan yang semakin menurun. Keadaan ini menunjukkan hasil nyata dari kebijaksanaan tersebut diatas. Terlebih lagi jika diingat bahwa sejak tahun anggaran 1969/1970 telah dijalankan kebijaksanaan pembangunan lima tahun pertama. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup kebijaksanaan Pemerintah bertambah luas, yaitu disamping menjalankan

kebijaksanaan stabilisasi juga menjalankan kebijaksanaan pembangunan. Biasanya suatu kebijaksanaan pembangunan yang tidak terarah akan mengganggu kestabilan ekonomi. Sebaliknya suatu kebijaksanaan yang tidak memelihara kestabilan ekonomi akan mengganggu pelaksanaan pembangunan. Namun demikian perkembangan data-data indeks biaya hidup diatas, selama tiga tahun anggaran terakhir ini memperlihatkan bahwa kebijaksanaan pembangunan yang serasi dapat dijalankan tanpa mengganggu kestabilan ekonomi.

Perkembangan harga-harga dalam tahun anggaran 1971/1972 dapat dilihat pada perkembangan angka-angka indeks biaya hidup, indeks harga 9 bahan pokok dan indeks harga beras di Jakarta. Disamping itu dapat pula diikuti perkembangan harga barang-barang ekspor penting dan kurs valuta asing di Jakarta sebagai dimuat dalam tabel-tabel yang dilampirkan.

2.1.1. Indeks biaya hidup

Selama periode akhir Maret 1971 sampai dengan akhir Oktober 1971 indeks biaya hidup menunjukkan penurunan sebesar -5,61%. Penurunan ini merupakan penjumlahan dari turunnya angka indeks tersebut yang terjadi pada triwulan I - 1971/1972 dan pada triwulan II - 1971/1972 masing-masing sebesar -5,53% dan -1,17%. Dilihat dari sudut sektomja maka penurunan sebesar -5,61 % tersebut diatas adalah berasal dari perubahan-perubahan angka indeks yang terjadi pada sektor makanan, sektor perumahan, sektor pakaian dan sektor lain-lain selama periode itu.

Indeks makanan selama periode tersebut turun dengan -9,25% yaitu dari indeks 554,95 pada akhir Maret 1971 menjadi indeks 503,61 pada akhir Oktober 1971. Indeks perumahan dan indeks lain-lain masingmasing selama periode tersebut memperlihatkan penurunan sebesar -3,96%, dan -0,04% sedangkan indeks pakaian naik dengan +1,03%. Sebagai hasil akhir dari perubahan-perubahan keempat komponen-komponen ini selama periode tersebut menunjukkan penurunan angka indeks biaya hidup dengan -5,61%.

2.1.2. Indeks Harga 9 Bahan Pokok

Perkembangan indeks dari harga 9 bahan pokok di Jakarta pada akhir Oktober 1971 menunjukkan angka 521,29 dibandingkan dengan angka yang terdapat pada akhir Maret 1971 ialah sebesar 601,80. Ini berarti selama periode itu telah terjadi penurunan sebesar -13,38%. Fluktuasi masing-masing triwulan selama periode itu adalah sebagai berikut : Triwulan I-1971/1972 turun sebesar -14,14%, triwulan II -1971/1972 naik

dengan + 0,43% dan triwulan III - 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 naik dengan +0,46%. Sebagai hasil akhir selama periode Maret - Oktober 1971 tersebut telah terjadi penurunan sebesar -13,38%.

Keadaan ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 1970/1971, dimana angka indeks harga 9 bahan pokok pada masa itu menunjukkan penurunan sebesar - 9,87% dan selalu menunjukkan penurunan pada triwulan I, II dan III - 1970/1971.

Penurunan angka indeks harga 9 bahan pokok sebesar -13,38% selama periode Maret - Oktober dari pelaksanaan Pelita tahun ketiga adalah disebabkan antara lain karena turunnya harga. beras dari Rp. 35,90 per liter pada akhir Maret 1971 menjadi Rp. 29,75 per liter pada akhir Oktober 1971, turunnya harga ikan asin dari Rp. 189,29 per kg menjadi Rp. 172,86 per kg pada periode yang sama dan juga turunnya minyak goreng serta gula pasir masing-masing sebesar Rp. 7,78 per botol untuk minyak goreng dan Rp. 4,39 untuk per kg gula pasir. Di lain pihak harga barang-barang lain seperti garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil dan batik selama periode tersebut memperlihatkan harga yang relatif mantap.

2.1.3. Perkembangan Harga Barang-Barang Utama Lainnya

Pada akhir Maret 1971 indeks harga beras adalah sebesar 753,48 kemudian pada akhir Oktober 1971 indeks ini menjadi 624,40, berarti selama periode itu telah terjadi penurunan sebesar -7,13%. Pola ini hampir sama jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 1970 dimana telah terjadi penurunan sebesar -16,17%. Penurunan yang agak besar selama periode Maret - Oktober 1971 dari pelaksanaan Pelita tahun ketiga terjadi pada bulan Mei 1971 sebesar - 8,73% dan pada bulan Juni 1971 sebesar - 8,43%. Pada triwulan I-1971/1972 indeks harga beras turun sebesar -19,22% sedangkan pada triwulan II-1971/1972 indeks ini naik sebesar + 1,72%.

Masalah dan kebijaksanaan harga beras kerap mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama dalam setiap menghadapi hari-hari raya dan hari-hari besar lainnya menjelang akhir suatu tahun. Demikian pula terhadap harga 9 bahan pokok, Pemerintah selalu berusaha mempertahankan kestabilan harganya.

Dalam pada itu harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, tepung terigu dan tekstil selama tahun 1971 memperlihatkan fluktuasi yang tidak begitu besar. Harga tepung terigu dipelbagai kota antara Januari 1971 sampai dengan Agustus 1971 berkisar antara Rp. 40,00 per kg dan Rp. 65,00 per kg. Harga terendah terjadi di

Semarang dan Bandung, sedangkan harga tertinggi umumnya di Banjarmasin. Gula pasir pada periode tersebut diatas harganya berfluktuasi antara Rp. 83,33 per kg di Jogjakarta dan Rp.118,75 per kg di Banjarmasin. Demikian pula dengan harga tekstil pada umumnya memperlihatkan naik turun yang tidak begitu berarti. Harga terendah terdapat di Semarang dan Bandung sedangkan harga tertinggi umumnya terjadi di Banjarmasin dan Manado. Perkembangan harga dari ketiga jenis barang tersebut selama periode tersebut diatas dapat diikuti pada **Tabel II.5**.

2.1.4. Indeks Harga Emas dan Valuta Asing

Harga rata-rata valuta asing (**Tabel II.6**) selama periode Maret – Oktober 1971 dari pelaksanaan Pelita tahun ketiga menunjukkan kenaikan sebesar rata-rata Rp. 52,50 per valuta asing atau naik dengan +11,70% yaitu dari angka indeks rata-rata 291,87 pada akhir Maret 1971 menjadi indeks 326,02 pada akhir Oktober 1971. Kenaikan dalam harga maupun indeks rata-rata dari valuta asing ini selama periode itu terutama disebabkan oleh naiknya harga maupun indeks semua valuta asing yaitu dollar Amerika, dollar Singapura, pounsterling Inggris dan dollar Australia. Kenaikan ini dimulai pada bulan September 1971 yang merupakan akibat dari tindakan Amerika Serikat dalam pertengahan bulan Agustus 1971. Keadaan ini agak berbeda jika dibandingkan dengan periode yang sama pada pelaksanaan Pelita tahun pertama dan kedua. dimana terdapat penurunan sebesar rata-rata Rp. 10,57 per satu valuta asing atau -2,34% pada pelaksanaan PELITA tahun pertama dan pada pelaksanaan PELIT A tahun kedua menunjukkan kenaikan sebesar rata-rata Rp. 3,83 per satu valuta asing atau naik dengan + 1,33%.

Indeks dan harga emas (Tabel 11.7.) selama periode Maret 1971 Oktober 1971 memperlihatkan fluktuasi sebagai berikut : Emas 24 karat naik dengan Rp. 90,- per gram atau + 17,65% yaitu dari indeks 255,00 pada akhir Maret 1971 menjadi indeks 300,00 pada akhir Oktober 1971. Demikian pula dengan harga dan indeks emas 23 karat yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 70,- per gram atau + 14,58%, yaitu dari indeks 274,28 pada akhir Maret 1971 menjadi indeks 314,29 pada akhir Oktober 1971. Untuk emas 22 karat naik sebesar Rp, 50,- per gram atau + 11,11%, yakni dari indeks 264,70 pada akhir Maret 1971 menjadi indeks 294,12 pada akhir Oktober 1971. Kenaikan indeks maupun harga emas 24 karat, 23 karat dan 22 karat tersebut diatas, dimulai akhir bulan Agustus 1971. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pergolakan moneter internasional yang pada akhirnya disusul oleh tindakan penyesuaian kurs rupiah

terhadap dollar oleh Pemerintah pada tanggal 23 Agustus 1971. Pola ini agak berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun 1970/ 1971 dimana indeks dan harga emas tidak begitu mengalami perubahan.

Tabel II.2.
INDEKS BIAYA HIDUP BERDASARKAN 62 MACAM BARANG DI JAKARTA
1969 - OKTOBER 1971
 (Oktober 1966 = 100)

	Waktu	Indeks Makanan (63%)	Indeks Perumahan (11%)	Indeks Pakaian (9%)	Indeks Lain 2 (17%)	Indeks Umum (100%)
1969	Maret	484,99	486,02	325,98	515,10	466,83
	Juni	434,13	473,00	325,62	524,82	438,42
	September	447,88	517,61	332,57	547,39	458,52
	Desember	503,05	504,69	328,25	537,41	483,39
1970	Januari	535,28	668,85	330,65	560,94	518,62
	Pebruari	528,90	660,64	344,76	572,64	518,84
	Maret	524,39	662,89	346,68	572,06	516,56
	April	509,34	662,89	346,68	576,14	508,68
	Mei	509,03	662,89	352,10	579,09	509,92
	Juni	501,72	722,14	360,05	592,70	513,79
	Juli	503,62	733,75	360,59	589,97	515,24
	Agustus	500,79	719,27	362,36	595,78	514,02
	September	485,29	702,90	362,36	600,07	504,76
	Oktober	484,07	702,90	362,36	597,65	503,57
	Nopember	503,96	750,66	387,94	601,10	523,02
	Desember	509,38	750,66	389,24	600,96	526,32
	Januari	531,61	761,57	389,54	608,57	541,49
	Pebruari	552,89	761,58	389,79	616,32	555,37
	Maret	554,95	761,58	390,09	617,02	556,75
	April	543,49	744,66	390,09	617,73	549,08
1971	Mei	525,93	711,51	388,29	617,73	536,32
	Juni	502,52	757,91	388,29	617,32	525,98
	Juli	501,71	757,91	388,29	617,79	526,19
	Agustus	495,01	750,81	388,29	619,14	521,51
	September	492,78	746,99	390,55	616,80	519,83
	Oktober	503,61	731,43	394,10	616,80	525,53

Samber : Biro Pusat Statistik.

Tabel II.3.
INDEKS BIAYA HIDUP, INDEKS 9 MACAM BAHAN POKOK DAN
INDEKS BERAS DI JAKARTA 1969 - OKTOBER 1971

Waktu		Indeks Biaya Hidup Oktober '66 = 100	Indeks 9 Bahan Pokok Oktober '66 = 100	Indeks Beras Rata2'66 = 100
1969	Maret	466,83	506,10	650,65
	Juni	438,42	436,10	524,10
	September	458,52	509,38	652,27
	Desember	483,39	549,24	134,59
1970	Januari	518,62	618,82	851,31
	Pebruari	518,84	602,67	828,61
	Maret	516,56	592,58	801,4J
	April	508,68	561,61	721,66
	M e i	509,92	551,86	116,15
	Juni	513,79	548,34	691,35
	Juli	515,24	546,85	690,30
	Agustus	514,02	542,61	692,60
	September	504,76	536,70	684,21
	Oktober	503,51	534,07	616,81
	Nopember	523,02	553,09	689,61
	Desember	526,32	562,46	695,96
	1971 Januari	541,49	589,40	738,99
	Pebruari	555,31	601,09	755,51
	Maret	556,75	601,80	153,48
	April	549,08	584,89	728,29
	Me i	536,32	549,26	664,10
	Juni	525,98	516,69	608,66
	Juli	526,19	516,58	611,18
	Agustus	521,51	522,69	626,29
	September	519,83	518,92	619,15
	Oktober	525,53	521,29	624,40

Sumber : Biro Pusat Statistik.

Tabel II.4.
HARGA DAN INDEKS 9 BAHAN POKOK DI JAKARTA
SEPTEMBER 1970 - OKTOBER 1971
HARGA RATA - RATA

Macam barang	Unit	1970							1971						
		Sept.	Okt	Nop.	Des.	Jan.	Peb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	August.	Sept.	Oktober
1. Beras	Liter	32,6	32,25	32,88	33,2	35,25	36,...	35,9	34,75	31,88	29,-'	29,--	29,8	29,5	29,75
2. Ikan asin	Kg	160,7	160,7	160,7	160,7	167,23	1112,23	189,29	189,29	187,5	183,71	176,25	172,86	172,86	172,86
3. Minyak Goreng	Botol	70,-	72,77	81,37	89,29	95,72	96,52	97,78	92,68	91,43.	91,43	91,43	89,35	90,--	90,-
4. Gula pasir	Kg	72,93	75	87,86	96,22	98,84	96,88	99,21	98,48	98,66	96,57	95,53	91,71	93,22	94,82
5. Garam bataan	Bata	15,-	15,-	15,-	III,...	15,...	15,-'	15,"	15,-	15,-	12,94	12,5	12,5	12,5	12,5
6. Minyak tanah	Botol	8,75	8,75	10,06	10,5	10,5	10,5	10,39	9,7	8,91	9,84	10,5	10,24	9,95	9,55
7. Sabun cuci	Batang	45,--	45,-	47,14	48,07	51,92	55,--	55,-	55,--	55,-	54,78	54,64	55,-'	55,"	55,"
8. Tekstil	Meter	105,71	105,71	108,39	107,85	105,71	105,71	105,71	105,71	105,71	104,43	103,57	103,57	103,57	104,64
9. B a t i k	Lembar	435,7	435,7	439,28	444,29	442,86	442,86	442,86	442,86	442,86	442,86	442,86	442,86	442,86	442,86
INDEKS RATA-RATA (OKTOBER 1966 = 100)															
1. Beras	Liter	566,96	560,87	571,82	577,39	613,04	626,09	624,35	604,55	554,45	504,55	504,55	518,26	513,04	517,39
2. Ikan asin	Kg	698,69	698,69	698,69	698,69	727,08	792	823	823	815,21	798,75	766,5	751,56	751,56	751,56
3. Minyak goreng	Botol	500	519,78	589,5	657,78	683,71	689,42	698,42	661,99	653,07	655,07	655,07	658,21	642,85	642,85
4. Gula pasir	Kg	729,5	800	878,6	962,16	988,4	968,80'	992,10	984,8	986,6	965,7	955,5	917,1	932,2	948,2
5. Guam bataan	Bata	993,38.	995,38	995,58	995,58	993,38	993,58	993,58	99 5,11S	995,58	856,95	827,81	827,81	827,81	827,81
6. Minyak tanah	Botol	625	625	718,57	750	750	750	142,14	692,86	656,45	702,86	750	731,45	710,71	682,14
7. Sabun cuci	Batang.	450	450	471,4	480,7	519,2	550	550	550	550	547,8	546,4	550	550	550
8. Tekstil	Meter	352,56	352,36	561,3	359,5	352,56	552,36	552,56	352,56	352,36	348,1	345,23	345,23	345,23	348,8
9. B a t i k	Lembar	193",63	193,63	195,22	197,44	196,81	196,81	196,81	196,81	196,81	196,81	196,81	196,81	196,81	196,81
INDEKS KESELURUHAN		536,7	534,07	553,09	562,46	589,4	601,09	601,8	584,89	549,26	516,69	516,58	522,69	518,92	521,29
KENAIKAN INDEKS (%)		-1,09	-0,49	5,56	1,69	4,79	1,98	0,12	-2,81	-6,09	-5,95	-0,02	1,18	-0,72	0,46

Sumber : Biro Pusat Statistik

PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA
GULA PASIR, TEPUNG TERIGU DAN TEKSTIL
DI BEBERAPA KOTA BESAR SELAMA TAHUN 1971

		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Bandung	Tepung Terigu	(Rp/kg)	44,37	41,66	46	45	45,5	46,18	47,24
	Gula pasir	(Rp/kg)	96,9	94,33	98,85	98,08	97,82	95,2	85
	Tekstil	(Rp/m)	117,29	118,54	117,17	116,46	119,16	119,83	123
Jogjakarta	Tepung Terigu	(Rp/kg)	45	46,25	52	57,92	58,75	55,17	55,33
	Gula pasir	(Rp/kg)	91,25	90,79	95,83	98,29	95,67	89,3	85,34
	Tekstil	(Rp/m)	140	136,67	133,34	137,5	137,08	136	137,33
Sernarang	Tepung Terigu	(Rp/kg)	40,42	40	41,9	49,33	49,96	50,42	51,67
	Gula pasir	(Rp/kg)	92,21	92,75	93,4	102,25	95	91	85
	Tekstil	(Rp/m)	112,08	94,16	90,67	103,34	105,42	106,67	96,67
Surabaya	Tepung Terigu	(Rp/kg)	49,17	46,88	47,25	51,25	50	58,6	54,25
	Gula pasir	(Rp/kg)	91,17	92,5	95	95,94	95,31	93,5	89,25
	Tekstil	(Rp/m)	147,5	140,62	125	124,37	123,75	131	140
Medan	Tepung Terigu	(Rp/kg)	50	50	50	50	50	50	52
	Gula pasir	(Rp/kg)	94,38	96,25	99	104,38	102,81	96	95
	Tekstil	(Rp/m)	138,12	136,25	137,5	137,5	138,13	138,5	134
Banjarasin	Tepung Terigu	(Rp/kg)	59,17	62,5	65	61,88	62,5	65	60
	Gula pasir	(Rp/kg)	108,33	118,75	11 7,50	113,75	116,25	113,33	95
	Tekstil	(Rp/m)	145	145	149,5	161,25	151,88	148,33	140
Makasar	Tepung Terigu	(Rp/kg)	43,75	45	45	45	47,5	56	56,67
	Gula pasir	(Rp/kg)	100	105,83	102,49	100	97,5	99	97,78
	Tekstil	(Rp/m)	133,33	133,33	133,33	133,33	131,25	131,67	148,33
Denpasar	Tepung Terigu	(Rp/kg)	51,56	54,17	54,5	57,5	57,5	59,5	60
	Gula pasir	(Rp/kg)	96,88	98,75	99,25	105	98,12	94	89,75
	Tekstil	(Rp/m)	145	142,5	143	142,5	150	142	136

Tabel II.6
HARGA RATA2 DAN INDEKS BEBERAPA VALUTA ASING DI JAKARTA

W a k t u	US \$		Singapore \$		f Inggris		Australia \$		Rata - Rata	
	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks
1969 Maret	333,5	273,93	122,4	306	887,44	295,82	413,92	306,61	451,82	293,87
Juni	378	270	122,5	306,25	864,5	288,17	404,5	299,63	442,38	287,73
Sept.	378	270	122,5	306,25	862,--	278,33	403,5	298,87	441,5	287,15
Des.	379	270,71	123	307,5	858,5	286,17	404,5	299,63	441,25	287
1970 Jan.	380	271,43	123	307,5	858,5	286,17	404,5	299,63	441,5	287,15
Peb.	380	271,43	123	307,5	858,5	286,17	404,5	299,63	441,5	287,15
Maret	379	270,71	123	307,5	858,5	286,17	404,5	299,63	441,25	286,99
April	379	270,71	122	305	858,5	286,17	404,5	299,63	441,--	286,83
Md	380	271,43	123	307,5	881,--	293,67	412,--	305,19	449,--	292,03
Juni	380	271,43	123	307,5	881,--	293,67	412,--	305,19	449,-	292,03
Juli	379	270,71	123	307,5	880,--	293,34	411,5	304,82	448,38	291,63
Agust.	379	270,71	123	307,5	880,--	293,34	411,5	304,82	448,38	291,63
Sept.	378	270	122,5	306,25	878,--	292,67	410,--	303,7	447,13	290,82
Okt	378	270	122,5	306,25	878,--	292,67	410,--	303,7	447,13	290,82
Nap-	378	270	122,5	306,25	878,--	292,67	410,--	303,7	447,13	290,82
Des.	378	270	122,5	306,25	878,--	292,67	410,--	303,7	447,13	290,82
1971 Jan.	379	270,71	123	307,5	882,--	294	412,--	305,19	449,--	292,03
Peb.	378	270	123	307,5	882,--	294	412,--	305,19	448,75	291,87
Maret	378	270	123	307,5	882,--	294	412,--	305,19	448,75	291,87
April	378	270	123	307,5	882,--	294	412,--	305,19	448,75	291,87
Mei	378	270	123	307,5	882,--	294	412,--	305,19	448,75	291,87
Juni	378	270	123	307,5	882,--	294	412,--	305,19	448,75	291,87
Juli	378	270	124	310	882,--	294	412,--	305,19	449	292,03
Agust.	378	270	123,5	308,75	882,--	294	410,--	303,7	448,38	291,63
Sept.	413	295	137	342,5	1.000,--	333,33	455,--	337,04	501,25	326,02
Okt	413	295	137	342,5	1.000,--	333,33	455,--	337,04	501,25	326,02

Sumbel : Biro Pusat Statistik.

Tabel II.7
DEVISA KREDIT DAN DEVISA UMUM DI JAKARTA 1969 - OKTOBER 1971

Waktu	Emas 24		Emas 23		Emas 22		Devisa Kredit		Devisa Umum	
	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks
1969 Maret	629,-	314	629,-	359,43	588,-	345,88	326,-	384	382,75	402,89
Juni	600,-	300	580,-	331,43	560,-	329,41	326,-	384	379,-	399
Sept.	590,-	295	570,-	325,71	550,-	323,53	326,-	384	379,-	399
Des.	540,-	270	520,-	299,14	500,-	294,12	326,-	384	378,3	398,21
1970 Jan.	565,-	282,5	545,-	311,43	525,-	308,82	326,-	384	378,3	398,21
Peb.	520,-	260	500,-	285,71	480,-	282,35	326,-	384	378,45	398,37
Maret	490,-	245	470,-	268,57	450,-	264,7	326,-	384	378,5	398,42
April	510,-	255	490,-	280	470,-	276,47	326,-	384	378,35	398,26
Mei	510,-	255	490,-	280	470,-	276,47	326,-	384	378,-	397,89
Juni	500,-	250	480,-	274,28	460,-	270,59	326,-	384	378,-	397,89
Juli	500,-	250	480,-	274,28	460,-	270,59	326,-	384	378,-	397,89
Agust.	500,-	250	480,-	274,28	460,-	270,59	326,-	384	378,-	397,89
Sept.	480,-	240	460,-	262,86	440,-	258,83	326,-	384	378,-	397,89
Okt.	500,-	250	470,-	268,57	450,-	264,7	326,-	384	378,-	397,89
Nop.	500,-	250	470,-	268,57	450,-	264,7	326,-*	384	378,-	397,89
Des.	500,-	250	470,-	268,57	450,-	264,7	378,-)	444,71	378,-	397,89
1971 Jan.	500,-	250	470,-	268,57	440,-	258,83	378,-	444,71	378,-	397,89
Peb.	510,-	255	480,-	274,28	450,-	264,7	378,-	444,71	378,-	397,89
Maret	510,-	255	480,-	274,28	450,-	264,7	378,-	444,71	378,-	397,89
April	510,-	255	480,-	274,28	450,-	264,7	378,-	444,71	378,-	397,89
Mei	530,-	265	500,-	285,71	480,-	282,35	378,-	444,71	378,-	397,89
Juni	530,-	265	500,-	285,71	480,-	282,35	378,-	444,71	378,-	397,89
Juli	520,-	260	500,-	285,71	480,-	282,35	378,- **	444,71	378,-	397,89
Agust.	550,-	275	530,-	302,86	500,-	294,12	415,-)	488,24	415,-)	436,84
Sept.	600,-	300	580,-	331,43	560,-	329,41	415,-	488,24	415,-	436,84
Okt.	600,-	300	550,-	314,29	500,-	294,12	415,-	488,24	415,-	436,84

Sumber: Biro Pusat Statistik.

*) Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan tanggal 10 Desember 1970, kurs devisa kredit dan devisa umum ditetapkan menjadi Rp. 378,- per US \$.

**) Pengumuman Bursa Valuta Asing tanggal 23 Agustus 1971.

Selama periode Maret - Oktober 1971 dari pelaksanaan PELITA tahun ketiga perkembangan kurs devlsa kredit dan devisa umum adalah sebagai berikut : Sampai dengan bulan Juli 1971 baik kurs devisa kredit maupun kurs devisa umum telah ditetapkan sama yaitu Rp. 378,- per satu dollar Amerika. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Desember 1970. Kemudian dengan kebijaksanaan Pemerintah tanggal 23 Agustus 1971, tentang penyesuaian kurs rupiah terhadap dollar, telah ditetapkan bahwa kurs devisa kredit dan devisa umum ialah Rp. 415,- per satu dollar Arnerika, yang merupakan kurs tengah atas dasar :

- a. Kurs beli M.T.(*mail transfer*)Rp. 414,- per US \$ 1,
- b. Kurs beli T.T. (*telegraphic transfer*) Rp. 414,50 per US \$ 1,
- c. Kurs jual M.T. (*mail transfer*) Rp. 415,50 per US \$ 1,
- d. Kurs jual T.T. (*telegraphic transfer*) Rp. 416,- per US \$ 1,

Dengan kebijaksanaan Pemerintah ini ternyata dapat diatasi kegoncangan moneter internasional dimana kestabilan harga terutama harga-harga kebutuhan pokok seperti harga biaya hidup (62 macam barang) dan harga 9 bahan pokok dapat tetap dipertahankan.

2.1.5. Harga Hasil Bumi Ekspor Golongan A

Selama periode Maret - Oktober 1971 dari pelaksanaan PELITA tahun ketiga, harga beberapa jenis barang hasil bumi ekspor golongan A di Jakarta memperlihatkan kenaikan, seperti lada putih, kopi robusta dan kopra. Dilain pihak harga daripada barang seperti karet RSS I dan kopi robusta rnemperlihatkan penurunan.

Harga lada putih di Jakarta selama periode Maret - Oktober 1971 tersebut naik dengan Rp.47,94 per kg atau + 24,06%. Penurunan yang terjadi pada harga karet demikian pula dengan harga kopi satu dan lain hal adalah disebabkan oleh pengaruh perdagangan luar negeri (pelepasan stock pile oleh Amerika Serikat) dan pengaruh musiman.

Perkembangan harga beberapa hasil bumi ekspor golongan A dipasar internasional selama periode Maret 1971 - Oktober 1971 pada umumnya mengalami penurunan kecuali harga lada putih. Harga karet jenis RSS III selama periode Maret 1971 - Oktober 1971 di New York turun dengan US \$ ct 2,23/1b (- 13,06) yaitu dari harga US \$ ct 17,08/1b pada akhir Maret 1971 menjadi US \$ ct 14,85/1b pada akhir Oktober 1971. Di London karet jenis yang sama pada periode tersebut telah turun

dengan Brp 1,97 lb (- 13 .49%). Demikian pula di Singapura karet jenis ini pada periode tersebut diatas turun dengan Str \$ 8 ct 16,43/1b (- 16,43%). Penurunan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari penurunan yang telah terjadi pada tahun yang lalu. Keadaan ini antara lain disebabkan adanya pelepasan stock pile yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Pada periode yang sama, Maret 1971 - Oktober 1971, harga kopra di Manila telah turun dengan US \$ 27,15/lt (- 15,40%) demikian pula halnya dengan di London, harga kopra inipun turun dengan US \$ 37,95/lt (- 18,20%).

Keadaan yang sama terjadi pula dengan harga timah, minyak sawit dan biji sawit dipasar London. Selama periode Maret 1971 - Oktober 1971 timah mengalami penurunan dengan E£ 69,56/mt (- 4,73%), minyak sawit ex Malaysia sebesar E£ 14,08/lt (- 11,97%) biji sawit ex Negeria sebesar E£ 11,75/lt (- 17,02%). Demikian pula keadaannya dengan harga kopi robusta balk dipasar Singapura maupun dipasar New York. Selama periode tersebut masing-masing mengalami penurunan sebesar - Str \$ 18,95/pic untuk kopi robusta ex Lampung dipasar Singapura dan turun sebesar - US \$ ct 0,34/1b untuk kopi robusta ex Palembang dipasar New York. Akhirnya selama periode Maret 1971 - Oktober 1971 harga lada hitam dipasar New York juga mengalami penurunan sebesar - US \$ ct 12,27/1b (- 22,07%). Sedangkan harga lada putih dipasar London menunjukkan kenaikan sebesar + Brp 10,56/1b (+ 24,71%).

2.2. Perkembangan Gaji dan Upah

Selama periode Juli 1970 - Januari 1971 gaji dan upah mengalami kenaikan baik dalam bentuk uang maupun dalam arti ojala. Gaji dalam hal ini adalah upah uang ditambah catu-catunya seperti beras, gula dan sebagainya, ditambah lagi lain-lain tunjangan untuk satu orang pekerja dengan tanggungan seorang isteri dan dua orang anak. Rata-rata upah dan gaji minimum naik dengan Rp. 478,99 (+ 5,59%) untuk setiap pekerja, sedangkan upah maksimum rata-rata untuk seluruh sektor naik dengan Rp. 8.642,67 (+ 21,55%) untuk setiap pekerja pada periode tersebut diatas.

Perkembangan kenaikan upah baik dalam rupiah maupun dalam arti nyata dapat diikuti pada **Tabel II.10. dan II.11.**

Pada umumnya hampir seluruh sektor memperlihatkan prosentase kenaikan baik dalam aninomial maupun dalam arti nyata. Hanya sektor pertambangan memperlihatkan sedikit prosentase penurunan yaitu - 17,34% untuk upah nyata dan - 13,12% untuk upah dalam rupiah.

Politik gaji dan upah yang dijalankan Pemerintah tetap diusahakan agar secara bertahap dan didalam batas-batas kemampuan Pemerintah tingkat upah yang cukup bagi pegawai dapat dicapai.

Dalam usaha untuk menaikkan gaji dan upah ini Pemerintah selalu memperhatikan agar kenaikan itu tidak akan mempengaruhi tingkat kestabilan harga yang telah dicapai.

Tabel II.8.
PERKEMBANGAN HARGA LOKAL BEBERAPA HASIL BUMI GOLONGAN A
D1 JAKARTA 1969-OKTOBER 1971
(dalam rupiah per kg)

Waktu		RSS I		KOPRA (Sulawesi)		LADA PUTIH		KOPI ROBUSTA	
		Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks	Harga	Indeks
1969	Maret	155,54	673,92	50,38	694,90	151,56	358,04	115,--	283,04
	Juni	150,82	653,47	51,-	703,45	190,62	450,32	75,40	159,98
	September	161,34	699,05	47,06	649,10	240,62	568,44	111,59	274,65
	Desember	130,13	563,82	67,--	924,14	330,--	779,59	145,--	356,88
1970	Januari	147,46	638,91	54,48	751,45	301,--	711,08	149,17	367,14
	Pebruari	139,96	606,41	52,3!	721,52	290,--	685,09	117,53	289,27
	Maret	125,66	543,59	50,18	692,14	295,--	696,91	126,57	311,52
	April	120,74	523,14	50,80	700,69	288,50	681,55	149,17	367,14
	Mei	125,27	1142,77	49,86	687,73	287,50	679,19	126,57	311,52
	Juni	126,16	546,62	47,70	657,93	283,13	668,84	131,09	322,64
	Juli	119,39	517,28	42,13	581,10	265,-.	626,02	140,13	344,89
	Agustus	112,96	499,12	45,55	628,27	259,38	612,74	149,17	367,14
	September	110,42	478,41	46,11	636,--	251,88	595,04	174,48	429,44
	Oktober	107,24	464,64	46,37	639,59	237,--	559,88	171,77	422,77
	Nopember	11 7,29	508,19	54,21	747,72	226,25	534,49	176,29	433,89
	Desember	118,53	513,56	55,36	763,58	222,50	525,63	176,29	433,89
1971	Januari	113,67	492,50	70,61	973,93	215,62	509,38	142,50	350,73
	Rebruari	106,83	462,87	72,63	1.001,79	208,75	493,15	148,64	365,84
	Maret	106,10	459,71	65,40	902,07	199,25	470,71	156,-	383,95
	April	106,46	461,27	60,78	838,34	226,25	534,49	157,23	386,98
	Mei	108,39	469,63	60,75	837,93	240,00	566,97	152,32	374,90
	Juni	101,81	441,12	63,81	880,14	214,75	507,32	147,41	362,81
	Juli	96,02	416,03	58,05	800,69	208,78	493,22	142,50	350,73
	AgllStus	91,37	395,88	58,12	801,66	228,17	539,03	144,75	356,26
	September	97,20	421,14	65,64	905,38	241,59	570,73	150,94	371,49
	Oktober	97,14	420,88	65,64	905,38	247,19	583,96	137,84	339,26

Sumber Biro Pusat Statistik.

Tabel II.9.
PERKEMBANGAN HARGA BEBERAPA HASIL BUMI EKSPOR GOLONGAN A
DI PASAR INTERNASIONAL 1969 - OKTOBER 1971

	Karet	RSS	III	Kopra	Kapi Robusta			Lada		Timah	Minyak	Biji
Waktu	US\$ Ct/lb (New York)	Brp./ lb (Singa- don)	Str. \$ Ct/lb (Singa- pore)	US \$/ lt (Ma- nila)	us \$/ lt (Lon- don)	Str \$/ pic (Lam- pung) (Singa- pore)	US \$ Ct/lb (Palem- bang) (New- York)	Putih Brp/lb (Lon- don)	Hitam US\$ Ct/lb (New York)	E£/mt (London)	Sawit E£/lt (London) (Malaysia)	Sawit E£/lt (London) (Nigeria)
1969 Maret	24,15	24,49	69,04	198,72	200,26	89,13	28,84	32,50	29,91	1.372,--	174,6	67,9
Juni	24,47	24,47	70,04	187,34	190,1	75,27	25,15	34,56	34,02	1.436,--	160,27	59,46
September	26,35	25,95	74,58	204,14	205,57	76,95	28,99	51,49	50,77	1.470,63	-	60,65
Desember	22,83	22,28	64,37	242,07	245,31	92,48	32,85	52,45	55,53	1.617,88	-	75,28
1970 Januari	23,93	23,79	68,03	226,--	235,84	97,09	34,55	62,75	57,55	1.599,38	108,08	74,93
Pebruari	22,99	22,95	65,64	203,44	227,4	89,26	33,45	54,79	57,44	1.569,60	108,5	72,85
Maret	20,88	20,65	59,35	205,--	240,53	82,38	33,65	49,77	57,72	1.578,54	109,58	73,86
April	20,25	19,9	56,72	--	242,57	85,--	34,45	41,4	53,4	1.604,80	113,4	74,12
Mei	19,89	19,49	55,83	192,87	225,59	97,51	36,47	42,6	49,48	1.545,41	118,-	71,32
Juni	19,64	19,47	55,44	187,11	218,1	99,79	36,24	47,01	59,66	1.472,05	116,95	69,5
Juli	18,48	18,26	51,82	183,94	222,95	102,11	36,69	52,29	62,55	1.454,45	112,75	68,--
Agustus	17,94	17,43	49,26	171,61	204,71	110,46	38,31	49,55	61,8	1.503,77	102,56	64,77
September	17,35	16,88	47,36	167,27	207,22	113,25	38,69	48,88	63,85	1.517,15	97,3	64,49
Oktober	16,11	15,88	44,48	174,49	215,23	114,46	39,--	46,23	64,--	1.528,90	104,25	65,5
Nopember	17,39	17,28	48,45	192,41	231,63	114,2	37,34	46,44	57,7	1.503,79	113,2	69,6
Desember	17,53	17,36	49,26	191,38	231,83	109,88	36,18	46,19	55,96	1.453,83	115,--	75,75
1971 Januari	16,99	16,55	46,57	192,36	230,56	116,31	38,16	45,87	53,52	1.442,60	117,16	76,09
Pebruari	16,41	14,86	97,86	188,29	214,91	118,--	38,95	42,75	54,35	1.442,65	119,--	71,54
Maret	17,08	14,6	98,83	176,28	208,55	117,13	39,28	42,73	55,6	1.472,20	117,6	69,03
April	17,22	14,92	100,38	172,86	204,6	116,--	38,72	42,3	58	1.486,93	114,75	68,3
Mei	17,74	U,60	104,61	161,67	195,69	111,77	38,49	43,46	55,54	1.464,00	104,05	67,88
Juni	16,54	14,53	96,33	165,54	196,48	102,33	37,93	44,5	51,9	1.436,05	101,05	58,66
Juli	15,58	13,49	89,11	173	201,78	102,5	37,2	46,15	47	1.440,56	112,15	60,84
Agustus	15,84	13,04	85,84	156,18	180,63	103,67	37,9	48,32	47,48	1.420,49	117,40	60
September	15,38	13	85,58	151,63	174,15	98,08	38	49	43	1.415,90	113,2	56,85
Oktober	14,85	12,63	82,59	149,13	170,6	98,18	38,94	53,29	43,33	1.402,64	103,52	57,28

Sumber : Departemen Perdagangan R.I.

Tabel II.10.
PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM DAN MAKSIMUM
UNTUK BERBAGAI SEKTOR
JULI 1970 - JANUARI 1971

Sektor	Juli 1970 (dalam rupiah)	Oktober 1970 (dalam rupiah)	Januari 1971 (dalam rupiah)	Perubahan Juli 1970 - Jan.1971 (dalam %)
UPAH RATA2 MINIMUM				
1. Perkebunan	4.349,25	3.966,-	4.466,-	+ 2,64
2. Pertambangan	23,427,33	18.415,-	19,736,50	- 15,76
3. Industri	8.079,-	7.927,-	9.831,-	+ 21,69
4. Bangunan	6.573,67	6.787,33	6.817,33	+ 3,71
5. Listrik	6.918,50	7.480,50	8.103,50	+ 17,13
6. Perdagangan	7.780,75	8.715,40	8.905,60	+ 14,46
7. Perhubungan	8.770,-	7.154,-	9.225,50	+ 5,19
8. Jasa-jasa	7.580,-	9.583,-	10.485,-	+ 38,32
9. Lain2/Pegawai Negeri	3.590,-	3.809,-	3.809,-	+ 6,10
UPAH RATA2 MAKSIMUM				
1. Perkebunan	49.125,75	40.704,-	61.856,-	+ 25,91
2. Pertambangan	108.035,-	92.415,-	96.715,50	- 10,48
3. Industri	41.244,43	42.236,63	45.883,88	+ 11,25
4. Bangunan	23.160,-	33.494,-	33.494,-	+ 44,62
5. Listrik	27.246,50	30.332,-	33.533,-	+ 23,07
6. Perdagangan	39.214,-	49.118,80	49.465,-	+ 26,14
7. Perhubungan	33.516,67	52.814,50	54.051,50	+ 61,27
8. Jasa-jasa	22.726,50	39.604,-	39.604,-	+ 74,26
9. Lain2/pegawai Negeri	16.650,-	24.100,-	24.100,-	+ 44,74

Sumber : Departemen Tenaga Kerja.

Diolah kembali oleh Departemen Keuangan.

Tabel II.11.
**PERKEMBANGAN UPAH NYATA, UPAH MINIMUM DAN MAKSIMUM
 UNTUK BERBAGAI SEKTOR
 JULI 1970 - JANUARI 1971**

Sektor	Juli 1970 (dalam rupiah)	Oktober 1970 (dalam rupiah)	Januari 1971 (dalam rupiah)	Perubahan Juli 1970-Jan.1971 (dalam %)	
UPAH MINIMUM					
1. Perkebunan	710	662	693	-	2,40
2. Pertambangan	3.823	307	3.064	-	19,85
3. Industri	1.31'8	1.323	1.526	+	15,78
4. Bangunan	1.073	1.133	1.058	-	1,40
5. Ustrik	1.129	1.249	1.258	+	11,43
6. Perdagangan	1.270	1.455	1.383	+	8,90
7. Perhubungan	1.431	1.194	1.432	+	0,07
8. Jasa-jasa	1.237	1.600	1.628	+	31,61
9. Lain2/pegawai Negeri	586	636	591	+	0,85
UPAH MAKSIMUM					
1. Perkebunan	8.016	6.795	9.603	+	19,80
2. Pertambangan	17.628	15.428	15.01'6	-	14,82
3. Industri	6.730	7.051	7.124	+	5,85
4. Bangunan	3.779	5.592	5.200	+	37,60
5. Listrik	4.446	5.064	5.206	+	17,09
6. Perdagangan	6.398	8.200	7.680	+	20,04
7. Perhubungan	5.469	8.817	8.392	+	53,45
8. Jasa-jasa	3.708	6.612	6.149	+	65,83
9. Lain2/pegawai Negeri	2.717	4.023	3.742	+	37,73

Sumber: Departemen Tenaga Kerja.

Diolah kembali oleh Departemen Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN APBN 1971/1972

3.1. Umum

Dalam tahun anggaran 1971/1972, program-program pembangunan ekonomi tetap dilaksanakan melalui kebijaksanaan APBN yang berimbang. Walaupun berimbang, fleksibilitas APBN memungkinkan pelaksanaan yang selalu meningkat dan lebih baik daripada yang direncanakan.

Program utama daripada pelaksanaan APBN 1971/1972 dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi adalah mendorong dan merangsang usaha serta kegiatan masyarakat bersama-sama dengan meningkatkan penerimaan pajak-pajak negara bagi dana pembangunan.

Untuk mendorong usaha dan kegiatan masyarakat, telah dijalankan berbagai usaha dibidang perpajakan yaitu antara lain penyempurnaan peraturan-peraturan dan prosedur yang ada penyempurnaan dan penurunan tarif-tarif bea masuk, pajak pendapatan, pajak perseroan dan pajak penjualan; perbaikan administrasi dan cara membayar pajak; pemberian fasilitas-fasilitas baru dibidang perpajakan dan lain-lain sebagainya.

Dilain pihak, usaha-usaha meningkatkan penerimaan negara yang dilaksanakan melalui penyempurnaan dan penmgkatan disiplin aparat perpajakan; perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak dan tunggakan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar. Disamping itu secara menjeluruh diharapkan hasil-hasil positif daripada penurunan tarif-tarif pajak yaitu berupa perluasan perdagangan dan kegiatan masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan penerimaan pajak yang lebih besar kepada negara.

Peningkatan penerimaan negara berhubungan langsung dengan pelaksanaan REPELITA oleh karena penerimaan dalam negeri berupa pajak-pajak bersama-sama dengan pengeluaran rutin akan membentuk tabungan pemerintah. Oleh karena tabungan pemerintah merupakan sumber bagi pembiayaan pembangunan, maka peningkatan penerimaan negara sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan REPELITA.

Kebijaksanaan dibidang pengeluaran negara masih tetap menggambarkan usaha-usaha menekan pengeluaran rutin tanpa menimbulkan hambatan-hambatan bagi aparat Pemerintah dan mengalokasikan dana-dana pembangunan yang terkumpul sesuai dengan rencana dan prioritas yang telah ditetapkan untuk berbagai sektor ekonomi. Hal

itu dicapai melalui perbaikan prosedur pembiayaan, peningkatan efisiensi dan pengawasan pembiayaan.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran negara dibandingkan dengan rencana-rencana REPELITA I, secara garis besar dapat dilihat dalam **Tabel III.1** dibawah ini.

Tabel III.1.
PERBANDINGAN REALISASI APBN DENGAN REPELITA,
1969/1970 - 1971/1972¹⁾
(dalam miliar rupiah)

	1969/1970		1970/1971		1971/1972		
	Repelita	Realisasi APBN	Repelita	Realisasi APBN	Repelita	APBN	Realisasi Semester I ²⁾
Penerimaan dalam negeri	228,0	243,7	276,0	344,6	324,0	415,9	198,9
Penerimaan pembangunan	63,0	65,7	75,0	78,9	85,0	103,1	30,2
Jumlah penerimaan	291,0	309,4	351,0	423,5	409,0	519,0	229,1
Pengeluaran rutin	204,0	216,5	243,0	288,2	281,0	343,3	155,4
Pengeluaran pembangunan	87,0	92,9	108,0	128,1	128,0	175,7	66,3
Jumlah pengeluaran	291,0	309,4	351,0	416,3	409,0	519,0	221,7

Sumber: Departemen Keuangan R.I.

¹⁾ tidak termasuk bantuan proyek.

²⁾ angka sementara.

Dari angka-angka tersebut, terlihat perkembangan yang meyakinkan daripada penerimaan dan pengeluaran negara yang selalu melampaui rencana-rencana dalam REPELITA I. Jika melihat peningkatan-peningkatan yang terjadi dari tahun 1969/1970 ke tahun 1970/1971, maka terdapat peningkatan sebesar 41,4% dalam penerimaan dalam negeri, 20,1% dalam penerimaan pembangunan, 33,1% dalam pengeluaran rutin dan 37,9% dalam pengeluaran pembangunan.

Realisasi penerimaan dalam negeri semester I - 1971/1972 yaitu yang terdiri dari pajak-pajak langsung, pajak-pajak tidak langsung maupun penerimaan non-tax, mencapai jumlah sebesar Rp. 198,9 miliar; sedangkan pengeluaran rutin yang diperuntukkan belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran

bunga & cicilan hutang dan lain-lainnya berjumlah sebesar Rp. 155,4 miliar sehingga dalam semester I tahun anggaran 1971/1972 dapat terbentuk tabungan Pemerintah sebesar Rp. 43,5 miliar.

Dibandingkan dengan APBN 1971/1972, jumlah tersebut berarti mencapai 47,8% daripada rencana penerimaan dalam negeri; 45,3% daripada rencana pengeluaran rutin dan 59,9% daripada rencana tabungan pemerintah.

Penerimaan pembangunan yang berupa hasil penjualan devisa kredit dan bantuan pangan serta bukan pangan dalam semester I-1971/1972 mencapai Rp. 30,2 miliar. Bersama-sama dengan tabungan pemerintah, maka terbentuklah dana pembangunan sebesar Rp. 73,7 miliar bagi pembangunan proyek-proyek Pusat maupun Daerah baik dibidang ekonomi, bidang sosial maupun dibidang umum.

Akan tetapi dana pembangunan untuk seluruh tahun 1971/1972, disamping diperoleh dari tabungan pemerintah dan penanaman pembangunan juga diperbesar oleh saldo anggaran lebih (surplus 1970/1971) sebesar Rp. 7,2 miliar.

Realisasi daripada penerimaan pembangunan tersebut adalah mencapai 29,3% dari rencana APBN. Akan tetapi realisasi tersebut belum mencerminkan perkembangan seluruh tahun, karena perhitungan seluruhnya baru dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Dengan dana pembangunan sebesar itu, pengeluaran pembangunan semester I-1971/1972 sebesar Rp. 66,3 miliar dapat dibiayai. Garis besar daripada uraian diatas dapat dilihat dalam **Tabel III.2.** yang menunjukkan perkembangan APBN sejak tahun 1968 hingga 1971/1972.

Dalam perkembangan APBN 1971/1972, kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang mempengaruhinya adalah :

- (a) penyamaan kurs devisa umum dengan kurs devisa kredit sebesar Rp. 378,- per US \$. 1,- pada bulan Desember 1970.
- (b) peraturan tentang kurs beli dan kurs jual valuta asing yang menetapkan kurs beli dan kurs jual yang baru dengan kurs tengah Rp. 415, per US \$. 1,-.
- (c) penurunan-penurunan tarif bea masuk, pajak penjualan dan pajak penjualan impor.
- (d) peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut bidang penerimaan dan pengeluaran negara.

3.2. Penerimaan Dalam Negeri

Usaha-usaha Pemerintah dibidang penerimaan negara dalam semester I tahun

1971/1972 menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 198,9 miliar yaitu yang terdiri dari :

- (a) penerimaan pajak-pajak langsung sebesar Rp. 79,0 miliar (39,7%)
- (b) penerimaan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp. 105,4 miliar (53,0%),
- (c) penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 14,5 miliar (7,3%).

Oleh karena penerimaan Negara tidak saja berhubungan erat dengan kebutuhan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin tetapi terutama juga untuk dana pembangunan maka peningkatan penerimaan negara merupakan kewajiban pokok yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini kebijaksanaan-kebijaksanaan dan usaha-usaha Pemerintah tersebut terutama ditujukan untuk :

- (1) menyempumakan tarif-tarif pajak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan untuk mencapai keseimbangan yang sebaik-baiknya baik dalam harga barang-barang produksi dalam negeri maupun antara barang-barang produksi dalam negeri dan barang-barang dari luar negeri;
- (2) menyempumakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan dan perdagangan masyarakat untuk lebih mendorong kegiatan masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan hasil pajak yang lebih besar lagi
- (3) penyempurnaan aparat dan administrasi perpajakan yaitu berupa perbaikan administrasi pembayaran pajak, penyempurnaan organisasi dan kantor-kantor perpajakan, peningkatan disiplin petugas pajak dengan sanksi-sanksi yang berat, peningkatan keahlian petugas-petugas pajak dan lain -sebagainya;
- (4) intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, khususnya untuk mengimbangi berkurangnya penerimaan dengan diturunkannya tariff-tarif pajak, maka dilakukan ekstensifikasi pemungutan pajak. Dibandingkan dengan potensi pembayaran pajak, masih sangat banyak wajib pajak yang belum terdaftar ataupun belum tertagih.

Dengan demikian perkembangan daripada penerimaan negara baik berupa pajak-pajak langsung, ataupun pajak-pajak tidak langsung akan dipengaruhi oleh keempat pokok kebijaksanaan tersebut.

Perkembangan daripada pajak langsung tetap menunjukkan kenaikan-kenaikan, walaupun belum dapat ditingkatkan sebagai penerimaan yang utama. Hal tersebut terutama disebabkan karena lebih sulitnya pemungutan pajak langsung dengan terbatasnya petugas pajak dan perlu diberikannya dorongan untuk pemupukan modal dalam masyarakat.

Dilain pihak peningkatan-peningkatan yang cukup besar dalam penerimaan pajak tidak langsung dimungkinkan karena masih sangat besarnya potensi pajak dibandingkan dengan

yang dapat dipungut, retarif lebih mudah cara pemungutannya dan berkembangnya sektor perdagangan yang menjadi sumber utama daripada pajak-pajak tidak langsung.

Tabel III.2.
IKHTISAR APBN, 1968 S/D 1971/1972 1)
(dalam miliar rupiah)

	1968	Jan-Mar 1969	1969/'70	1970/'71	1971/1972	
					APRIL	Realisasi Semester I ³⁾
Penerimaan dalam negeri	149,7	45,9	243,7	344,6	415,9	198,9
Pengeluaran rutin	149,7	45,9	216,5	288,2	343,3	155,4
Tabungan pemerintah	-	-	27,2	56,4	72,6	43,5
Tabungan pemerintah	-	-	27,2	56,4	72,6	43,5
Penerimaan pernbangunan	35,5	12,9	65,7	78,9	103,1	30,2
Dana pembangunan	35,5	12,9	92,9	135,3	175,7	73,7
Dana pembangunan	35,5	12,9	92,9	135,3	175,7	73,7
Pengeluaran pernbangunan	35,5	12,7	92,9	128,1	175,7	66,3
Saldo anggaran lebih/kurang	-	+ 0,2	-	+722)	-	+ 7,4

Sumber : Departemen Keuangan R.I

1) diluar bantuan Proyek.

2) saldo anggaran lebih (surplus APBN) 1970/1971 aebesar 7,2 miliar, ditambahkan dan digunakan kepada dana pembangunan 1971/1972.

3) Angka sementara.

Tabel III. 3.
PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1971/1972
(dalam miliar rupiah)

Jenis penerimaan	1970/1971		1971/1972		
	APBN	Realisasi Semester I	APBN	Realisasi Semester I ^{*)}	% daripada APBN
Pajak langsung	117,1	55,7	144,0	79,0	54,8
Pajak tidak langsung	200,8	94,9	267,7	105,4	39,4
Bukan pajak	2,7	5,0	4,2	14,5	340,8
JUMLAH	320,6	155,6	415,9	198,9	47,8

Sumber : Departemen Keuangan R.I.

^{*)} angka sementara.

Dari **Tabel III. 3.** diatas dapat dilihat perkembangan daripada pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak dalam tahun 1971/1972. Dilihat dari realisasi semester I, perkembangan pajak langsung menunjukkan hasil-hasil yang positif yaitu telah mencapai 54,8% dari APBN; sedangkan pajak tidak langsung baru mencapai 39,4% dari APBN. Penerimaan bukan pajak (penerimaan non-tax) menunjukkan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan APBN oleh karena didalamnya termasuk sebagian anggaran pembangunan tahun yang lalu yang belum sempat dikeluarkan SPD-nya.

Perkembangan semester I tersebut tidak dapat mencerminkan seluruh tahun anggaran 1971/1972 oleh karena pola penerimaan yang tidak sama untuk tiap triwulannya. Pada umumnya penerimaan pajak-pajak semakin meningkat didalam triwulan III dan triwulan IV. Oleh karena itu diharapkan peningkatan-peningkatan yang cukup besar dalam semester II akan memungkinkan dicapainya rencana-rencana dalam APBN 1971/1972. Khususnya dalam penerimaan pajak tidak langsung, agak rendahnya realisasi semester I terutama disebabkan penurunan-penurunan tarif bea masuk, pajak penjualan dan pajak penjualan impor disamping adanya perubahan komposisi impor, makin rendahnya laju inflasi, penyesuaian kurs devisa dan sebagainya.

Jika dibandingkan realisasi antara semester I-1971/1972 dengan realisasi semester I- 1970/1971, maka diperkirakan terjadi peningkatan sebesar Rp. 23,3 miliar (41,8%) dalam penerimaan pajak langsung, peningkatan sebesar Rp. 10,5 miliar (11,1 %) dalam penerimaan pajak tidak langsung dan peningkatan sebesar Rp. 9,5 miliar (190,0%) dalam penerimaan bukan pajak.

Pajak pendapatan dalam semester I-1971/1972 menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 9,1 miliar yaitu 58,0% daripada yang direncanakan dalam APBN dan 44,4% lebih tinggi daripada realisasi pajak pendapatan semester I-1970/1971. Pajak pendapatan tersebut sebagian besar terdiri dari pajak pendapatan buruh yaitu yang dipungut dan disetorkan oleh majikan/pengusaha, dan sebagian lainnya berupa pajak pendapatan usahawan. Dalam rangka merangsang kegiatan masyarakat, pajak pendapatan khususnya pajak pendapatan usahawan belum dapat dijadikan penerimaan yang utama. Akan tetapi usaha-usaha ekstensifikasi dalam bentuk memperluas jumlah wajib pajaknya tetap dilaksanakan.

Dua kebijaksanaan pokok dalam tahun yang lampau yang masih mempengaruhi perkembangan penerimaan pajak pendapatan 1971/1972, yaitu dinaikkannya B.P.B.P.

(Batas Pendapatan Bebas Pajak) lebih kurang 140% dan diturunkannya tarif pajak pendapatan dari 1 persen - 50% menjadi 10 - 50%. Kedua kebijaksanaan tersebut mempengaruhi jumlah wajib pajak maupun setoran pajak pendapatan. Akan tetapi arah yang hendak dicapai adalah lebih luas lagi yaitu merangsang kegiatan dan usaha masyarakat sehingga pengaruh berupa peningkatan setoran pajak pendapatan akhirnya akan dirasakan.

Dalam bulan Juli 1971 telah diambil kebijaksanaan untuk mengenakan kembali pemungutan pajak atas bunga, dividen dan royalti serta atas bunga deposito berjangka. Juga dalam semester I - 1971/1972 telah diambil keputusan untuk tidak menagih pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak atas bunga, dividen dan royalti serta bea meterai atas bunga, modal pokok dan tanda bukti tabungan pembangunan nasional (Tabanas) dan tabungan asuransi berjangka (Taska).

Pajak perseroan dalam semester I - 1971/1972 menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 12,8 miliar. Jumlah tersebut merupakan 59,3% dari jumlah yang direncanakan dalam APBN dan menunjukkan peningkatan sebesar 28,0% dari realisasi pajak perseroan semester I - 1970/1971.

Pajak perseroan dapat digolongkan dalam pajak perseroan perusahaan-perusahaan negara dan pajak perseroan perusahaan-perusahaan swasta. Perkembangan sampai saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari penerimaan pajak perseroan dipungut dari perusahaan-perusahaan negara yang disebabkan lebih mudahnya memungut pajak dari perusahaan-perusahaan negara dengan makin baik administrasinya. Fasilitas-fasilitas bebas pajak dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta, serta masih sedikitnya wajib pajak perusahaan-perusahaan swasta yang telah terdaftar menyebabkan masih sulitnya meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Untuk hal itu sebagaimana juga halnya dengan pajak pendapatan, maka usaha-usaha ekstensifikasi telah dan akan lebih ditingkatkan lagi.

Berhubungan dengan pajak perseroan, dalam bulan Juli telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep-508/MK/III7 / 1971 tentang penilaian kembali aktiva tetap badan-badan usaha. Kebijakan ini memberi kesempatan yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya sehingga mengbilangkan kepintyangan-kepintyangan dalam perhitungan pajak dan penghapusan akibat inflasi masa lalu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk merangsang kegiatan dan usaha masyarakat dan lebih menumbuhkan kesadaran

membayar pajak, meskipun kebijaksanaan ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak perseroan.

Untuk lebih menyempumakan administrasi dan setoran pajak, telah diambil kebijaksanaan yang menetapkan dan mengatur tarif MPS - Pajak Perseroan dan MPS - masa bagi perusahaan-perusahaan penerbangan luar negeri dan perusahaan-perusahaan pelayatan luar negeri.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep-592/MK/II/8/1971 telah ditetapkan pembatasan keringanan perpajakan ex pasal 14 Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri terhadap perusahaan-perusahaan negara tertentu. Kebijaksanaan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijaksanaan umum dibidang keuangan negara dalam rangka mengamankan pembiayaan Repelita, akan tetapi dilain pihak perusahaan-perusahaan negara perlu juga mendapat kesempatan secara wajar untuk melakukan investasi.

Untuk membantu perkembangan bank-bank swasta yang dirasakan akan lebih bermanfaat bila melakukan penggabungan, maka dalam bulan Agustus telah diambil kebijaksanaan untuk memberikan kelonggaran perpajakan kepada bank-bank swasta nasional yang melakukan penggabungan (*merger*). Dengan jalan demikian diharapkan potensi bank-bank swasta dalam mengumpulkan dana pembangunan dan kemampuan memberi kredit akan bertambah. .

Kebijaksanaan lain yang antara lain menyangkut masalah pajak persewaan adalah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemberian fasilitas /kelonggaran perpajakan dan bea masuk dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan asing bagi usaha-usaha yang bergerak dibidang pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran.

Pajak perseroan minyak dalam semester I-1971/1972 menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 45,4 miliar. Jumlah tersebut berarti 52,1% dari rencana penerimaan pajak langsung dalam APBN 1971/1972 dan 49,3% lebih besar dari realisasi semester 1-1970/1971.

Pajak perseroan minyak ini diperoleh dalam bentuk bagian Pemerintah dari *Operating Income* perusahaan-perusahaan minyak asing dan PN Pertamina. Penerimaan dari sektor minyak makin menduduki posisi yang penting sebagai penerimaan negara dengan selalu meningkatnya produksi minyak.

MPO, yaitu sistim pemungutan pajak yang menghasilkan penerimaan berupa pajak-pajak yang dipungut oleh Wapu (wajib pungut), dalam semester I - 1971/1972

mencapai jumlah Rp. 11,3 miliar atau 59,2% daripada yang direncanakan dalam APBN 1971/1972 dan menunjukkan peningkatan sebesar 27,0% dari realisasi semester I - 1970/1971.

Sistim MPO ini dimaksudkan untuk meratakan pembayaran pajak-pajak yaitu pajak pendapatan dan pajak perseroan sepanjang tahun anggaran berdasarkan terjadinya transaksi-transaksi. Dengan demikian beban pajak tidak tertumpuk pada akhir tahun buku. Sistim pembayaran pajak dengan sistim MPO sangatlah berhubungan erat dengan kesadaran membayar pajak. Dengan makin besarnya kesadaran membayar pajak daripada masyarakat, peranan sistim MPO diharapkan akan bertambah penting.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep-402/MK/II/6/1971 telah ditetapkan bendaharawan sebagai wajib pungut pajak-pajak negara dalam transaksi antara Pemerintah dan masyarakat, yang dilanjutkan dengan ketentuan tentang pemungutan pajak-pajak negara oleh KBN/KPBN.

Juga dalam rangka membantu kelancaran pemungutan MPO pajak pendapatan dan MPO pajak perseroan telah ditunjuk Badan Urusan Logistik/Depot Logistik dan Bank Indonesia sebagai wajib pungut pajak-pajak negara.

Berhubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam hal *merchant's L/C*, maka diambil kebijaksanaan untuk menaikkan besarnya tarif MPO dari 3% menjadi 6% bagi importir yang menggunakan *merchant's L/C*.

Lain-lain pajak langsung antara lain berupa pajak kekayaan, pajak dividen dan lain-lainnya hanya merupakan jumlah-jumlah yang kecil. Dalam semester I - 1971/1972 realisasinya berjumlah Rp. 0,4 miliar. Pajak kekayaan sampai saat ini belum dapat menjadi penerimaan yang penting oleh karena kesulitan pemungutannya, sedangkan pajak dividen belum berkembang dengan banyaknya pembebasan-pembebasan pajak dividen yang masih harus diberikan.

Pajak tidak langsung dalam semester 1-1971/1972 mencapai jumlah Rp. 105,4 miliar. Dari Tabel III.5. terlihat bahwa penerimaan bea masuk merupakan 32,2% dari seluruh pajak tidak langsung. Disamping itu cukai dan penerimaan minyak lainnya juga memberikan jumlah yang cukup besar. Realisasi semester I tersebut berarti 39,4% daripada angka APBN dan 11,1% lebih tinggi dari realisasi semester 1-1970/1971.

Pajak penjualan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 10,9 miliar yang berarti 52,7% daripada rencana dalam APBN dan merupakan peningkatan sebesar 39,7% dari realisasi semester 1-1970/1971. Kebijakan yang ditempuh dalam hal ini adalah penurunan dan penyempurnaan tarif-tarif pajak penjualan dengan maksud merangsang

kegiatan masyarakat. Dengan jalan demikian diharapkan tercapai keseimbangan harga-harga dan perkembangan usaha yang selanjutnya akan memberikan penerimaan pajak yang lebih besar kepada negara.

Dengan surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep-609/MK/II/8/ 1971 telah ditinjau kembali penggolongan-penggolongan hasil dalam negeri yang dikenakan pajak penjualan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk lebih mewajarkan harga barang-barang hasil dalam negeri, oleh karena cepatnya perkembangan barang-barang kebutuhan industri dalam negeri. Perubahan yang penting dalam penggolongan barang ini adalah diubahnya tarif umum pajak penjualan dari 20% menjadi 10% dan dihapuskannya penggunaan tarif 50%. Dengan demikian penggolongan ini menetapkan jenis-jenis barang yang dikenakan tarif 0%, 5% dan 20% sedang yang tidak disebutkan dalam penggolongan tersebut dikenakan tarif umum 10%.

Selanjutnya dalam bulan Agustus 1971 telah ditinjau kembali dasar perhitungan serta tarif pajak penjualan atas penyerahan kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya hasil assembling dalam negeri. Antara lain diputuskan bahwa dasar perhitungan pajak penjualan atas barang-barang assembling dalam negeri ditetapkan kembali sebesar harga jual sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) ke - 4 Undang-undang Pajak Penjualan 1951.

Pajak penjualan impor dalam semester 1-1971/1972 mencapai Rp. 10,7 miliar yaitu 36,1% daripada rencana APBN, yang masih sedikit lebih tinggi dari realisasi semester I-1970/1971. Kebijakan pajak penjualan impor yang mempengaruhi perkembangan tersebut adalah penyempurnaan dan penurunan tarif, khususnya tidak dipakainya lagi tarif 50%. Ditetapkannya tarif MPO bagi importir yang mempergunakan *merchant's L /C* untuk mendekatkan beban pajaknya dengan importir yang memakai L/C biasa, dan turunnya impor barang konsumsi juga telah menyebabkan peningkatan penerimaan pajak penjualan impor yang tidak begitu besar.

Cukai dalam semester I-1971/1972 menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 19,0 miliar yang berarti mencapai 41,7% dari yang direncanakan. Walaupun demikian realisasi tersebut adalah 8,0% lebih tinggi daripada realisasi semester I-1970/1971. Penerimaan cukai untuk sebagian terbesar Rp.19,0 miliar dipungut dalam bentuk cukai tembakau yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri rokok dan hasil-hasil tembakau lainnya.

Kesulitan bahan baku khususnya bahan baku cengkeh, mengakibatkan industri rokok dan hasil tembakau mengalami kesulitan dalam pemasaran barangnya dan

selanjutnya mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dalam jenis penerimaan ini.

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam hal ini adalah menetapkan perpanyangan masa berlakunya pembebasan cukai sebagian terhadap hasil tembakau, yaitu untuk membantu perkembangan industri rokok dan hasilhasil tembakau lainnya. Akan tetapi Pemerintah juga menjalankan usahausaha intensifikasi pengawasan, penertiban administrasi, pendaftaran uang perusahaan tembakau dalam rangka penertiban SIP, operasi terhadap rokok-rokok tidak berpita dan menyempumakan harga limit hasil tembakau.

Cukai lainnya seperti cukai gula, cukai bir dan cukai alkohol sulingan belum memberikan penerimaan yang cukup besar. Dalam rangka peningkatan penerimaan cukai maka dalam bulan April 1971 telah ditetapkan harga untuk memungut cukai bir yaituyang semula Rp.30,- per liter dinaikkan menjadi Rp. 40,- per liter. Kebijakan tersebut selaras dengan berkembangnya konsumsi bir didalam negeri.

Bea masuk yang merupakan penerimaan negara terbesar dalam semester I-1970/1971 baru mencapai realisasi sebesar Rp. 33,9 miliar, atau, 34,4 % dari yang direncanakan dalam APBN 1971/1972.

Perkembangan dari pada penerimaan bea masuk menunjukkan realisasi yang agak rendah yang disebabkan karena (a) penyesuaian dan penurunan tarif-tarif bea masuk, (b) makin kecilnya impor barang konsumsi walaupun volume impor selalu meningkat dan (c) makin rendahnya laju inflasi dengan makin stabilitasnya perekonomian.

Dalam bulan Juni dan September telah diadakan penyesuaian dan penurunan bea masuk yang dimaksudkan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan harga dan produksi dalam negeri .serta perkembangan pola pembangunan ekonomi. Juga hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pemasukan barang secara tidak wajar karena tingginya tarif. Sebanyak 721 pos tarif telah diturunkan tarifnya, dan 78 pos tarif dinaikkan. .

Dalam usaha meningkatkan pengawasan atas barang-barang impor yang diantar pulaukan telah diambil keputusan tentang pengawasan atas beberapa jenis barang ex luar negeri yang diantar-pulaukan dari satu tempat ketempat lain dalam daerah pabean. Kebijakan ini dijalankan oleh karena diperedaran terdapat barang-barang impor tertentu ex perdagangan antar-pulau yang diduga belum memenuhi syarat-syarat pabean. Disamping itu jenis-jenis barang tersebut sudah dapat diproduksi didalam negeri, ssehingga dapat mengakibatkan perdagangan yang tidak wayat dan mengganggu

produksi dalam negeri. Barang-barang tersebut antara lain berupa tekstil, susu, makanan dan minuman kaleng dan lain-lain.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bulan September 1971 telah ditetapkan ketentuan dan pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas Sabang.

Bersama-sama dengan penyempurnaan tarif dan peraturan-peraturan dibidang bea masuk tersebut, Pemerintah juga melaksanakan perbaikan organisasi dan personil aparat pabean dan peningkatan disiplin kerjanya dengan sanksi yang keras bagi pelanggarannya.

Pajak ekspor dalam semester I 1971/1972 menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 14,0 miliar yaitu 48,8% dari yang direncanakan atau 22,8% lebih tinggi dari realisasi semester I 1970/1971. Pungutan umum sebesar 10% terhadap nilai ekspor tersebut dipengaruhi perkembangan daripada volume ekspor keseluruhan yang selalu meningkat.

Kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekspor adalah berupa usaha yang memungkinkan berkembangnya sektor ekspor sebagai sektor utama penghasil devisa. Pungutan ekspor pada dewasa ini diperuntukkan pengganti ADO bagi pembangunan daerah-daerah otonom yang berarti juga menunjang pembangunan daerah-daerah penghasil barang ekspor. Hal ini sesuai dengan strategi dasar pembangunan yang mengutamakan sektor pedesaan bersama-sama sektor ekspor.

Penerimaan minyak lainnya mencapai realisasi sebesar Rp. 14,6 miliar yang berarti 37,3% daripada target APBN. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 33,9% dari realisasi semester I - 1970/1971.

Seperti diketahui, penerimaan minyak lainnya dipungut dari hasil penjualan bahan bakar minyak didalam negeri. Dengan kebijaksanaan perubahan kurs devisa pada tanggal 23 Agustus 1971, maka terjadi peningkatan dalam biaya produksi bahan bakar minyak bagi pengadaan dalam negeri. Oleh karena harga jual bahan bakar minyak tidak berubah maka penerimaan Pemerintah tidak mencapai jumlah yang direncanakan.

Lain-lain pajak tidak langsung adalah bea materai, bea lelang dan lain-lainnya yang keseluruhannya menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2,3 miliar.

Dalam tahun anggaran 1971/1972, penerimaan bukan pajak yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp. 4,2 miliar, dalam semester I-1971/1972 telah mencapai realisasi sebesar Rp. 14,5 miliar.

Penerimaan ini yang terdiri dari denda-denda, bagian Pemerimah dari laba bank-

bank pemerintah dan sebagainya sukar diperkirakan perkembangannya. Akan tetapi dengan makin sempurna administrasi dan pengawasan keuangan negara, diharapkan hal ini akan dapat ditingkatkan, khususnya bagian laba bank-bank pemerintah dan perusahaan negara serta penerimaan-penerimaan yang diterima oleh departemen-departemen lainnya.

Jumlah realisasi penerimaan bukan pajak yang agak besar tersebut adalah karena didalamnya termasuk sisa anggaran pembangunan 1970/1971 sebesar Rp. 11,0 miliar. Jumlah tersebut merupakan bagian daripada anggaran pembangunan 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran 1970/ 1971 belum sempat dikeluarkan SPD-nya (surat pertanggung jawaban). Bila dalam tahun anggaran 1971/1972 telah dikeluarkan SPD-nya, maka dipihak penerimaan dimasukkan sebagai penerimaan bukan pajak.

Dari **Tabel III.6.** dapat dilihat perkembangan penerimaan dalam negeri menurut sektor sebagai sumber penerimaan. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa penerimaan terutama dipungut dari sektor usaha/perdagangan, kemudian menyusul dan sektor minyak, sedang sektor ekspor dan penerimaan bukan pajak menunjukkan penerimaanyang tidak begitu besar.

Sektor usaha/perdagangan menghasilkan penerimaan yang terutama berbentuk cukai, pajak perseorangan dan pajak penjualan. Akan tetapi melihat perkiraan perkembangan dari tahun 1970/1971 ke tahun 1971/1972 terlihat perkembangan yang menaik dalam penerimaan pajak pendapatan dan pajak penjualan dan sebaliknya perkembangan yang agak lambat dalam penerimaan cukai.

Sektor impor menunjukkan perkembangan tidak secepat yang direncanakan semula. Baik bea masuk maupun pajak penjualan impor menunjukkan jumlah-jumlah realisasi dibawah yang diperkirakan. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh kebijaksanaan penurunan tarif-tarif bea masuk dan pajak penjualan impor, menurunnya impor barang konsumsi akibat perubahan komposisi impor kearah impor barang modal dan bahan baku, dan juga karena makin rendahnya laju inflasi.

Dibandingkan dengan semester I tahun anggaran yang lalu, sektor ekspor menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat. Dilihat dari prosentase kenaikan dari tahun 1970/1971, dapat dikatakan sama dengan perkembangan penerimaan sektor usaha/perdagangan.

Sektor minyak dalam tahun 1970/1971 merupakan sektor kedua terbesar dalam menghasilkan penerimaan negara, telah mengalami perkembangan yang menyolok Realisasi dalam semester I - 1971/1972 menunjukkan sektor minyak sebagai sektor

yang makin penting dalam menghasilkan penerimaan negara. Prosentase peningkatan dibandingkan realisasi semester II - 1970/1971 adalah 45,3% khususnya disebabkan perkembangan penerimaan pajak perseroan minyak.

Dilihat daripada perkembangan sektor-sektor tersebut sebagai sumber penerimaan negara dapatlah dikatakan bahwa sektor minyak dapat menjadi sektor yang utama dengan peningkatan-peningkatan yang cukup besar. Pada dewasa ini perusahaan-perusahaan minyak asing dalam rangka kebijaksanaan penanaman modal asing sebagian terbesar masih dalam tarat eksplorasi. Dengan dimulainya masa produksi beberapa tahun mendatang, penerimaan dari sektor minyak akan dapat lebih ditingkatkan lagi.

3.3. Pengeluaran Rutin

Untuk pembiayaan seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari serta kewajiban-kewajiban rutin lainnya maka dalam semester I - 1971/1972 telah dikeluarkan sejumlah Rp. 155,4 miliar yang meliputi pengeluaran untuk gaji pegawai, belanja barang, subsidi kepada daerah otonom, pembayaran hutang-hutang dan lain-lainnya. Besar rencana APBN dan realisasi semester I - 1971/1972 daripada jenis-jenis pengeluaran tersebut terlihat dalam **Tabel III.7**.

Dari seluruh pengeluaran rutin yang direncanakan dalam APBN 1971/1972 maka 48,7% berupa belanja pegawai. Dengan demikian maka jelas bahwa hampir separuh dari anggaran rutin dipergunakan untuk pembiayaan belanja pegawai.

Kebijaksanaan yang dijalankan dalam hal pengeluaran rutin adalah mengusahakan sejauh mungkin penghematan-penghematan dan efisiensi pengeluaran. Usaha-usaha tersebut khususnya meliputi penghematan belanja barang dalam batas-batas yang tidak menyebabkan timbulnya hambatan-hambatan dan penundaan daripada pembayaran hutang-hutang yang disesuaikan dengan kemampuan APBN.

Melihat kepada realisasi semester I - 1971/1972 maka hal itu berarti mencapai 45,3% daripada rencana APBN 1971/1972. Jumlah tersebut tetap dalam batasan yang direncanakan walaupun jika dibandingkan dengan realisasi semester I - 1970/1971, terdapat peningkatan sebesar Rp. 21,8 miliar (16,3%).

Belanja pegawai yang diperuntukkan pembayaran gaji, tunjangan beras dan sebagainya dalam semester I - 1971/1972 mencapai jumlah Rp. 70,1 miliar yaitu 42,3% dari yang direncanakan.

Belanja pegawai yang realisasinya dalam semester I -,1971/1972 sebesar Rp. 70,1 miliar, sebagian besar yaitu Rp. 46,8 miliar dipakai untuk pembayaran gaji dan

pensiun. Sesuai dengan kemampuan APBN, Pemerintah tiap tahun berusaha meningkatkan gaji pegawai dalam usaha memperbaiki taraf hidup para pegawai negeri. Diharapkan peningkatan gaji pegawai disertai dengan perbaikan organisasi dan peningkatan disiplin kerja akan dapat meningkatkan effektivitas dan kecepatan kerja aparat pemerintahan.

Tabel III.5.

PAJAK-PAJAK TIDAK LANGSUNG, 1971/1972

(dalam miliar rupiah)

Jenis penerimaan	1970/1971		1971/1972		
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	% daripada APBN
		Semester I		Semester I *)	
Pajak penjualan	19,0	7,8	20,7	10,9	52,7
Pajak penjualan impor	19,5	10,6	29,6	10,7	36,1
Cukai	39,5	17,6	45,6	19,0	41,7
Bea masuk	78,0	34,5	98,6	33,9	34,4
Pajak ekspor	7,0	11,4	28,7	14,0	48,8
Penerimaan minyak lainnya	33,6	10,9	39,1	14,6	37,3
Lain-lain	4,2	2,1	5,4	2,3	42,6
JUMLAH	200,8	94,9	267,7	105,4	39,4

Sumber: Departemen Keuangan R.I.

*) angka sementara.

Tabel III.6.

**PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1971/1972
MENURUT SEKTOR (dalam miliar rupiah,)**

Sektor/jenis penerimaan	1970/1971		1971/1972		
	APBN	Realisasi Semester I	APBN	Realisasi *) Semester I	Kenaikan terhadap Semester 1.70/71
(1) Sektor usaha/perdagangan	118,3	52,8	128,5	65,8	13,0 (24,6%)
a. pajak pendapatan	13,3	6,3	15,7	9,1	2,8
b. pajak perseroan	21,2	10,0	21,6	12,8	2,8
c.M.P.O.	20,9	8,9	19,1	11,3	2,4
d.cukai	39,5	17,6	45,6	19,0	1,4
e. pajak penjualan	19,0	7,8	20,7	10,9	3,1
f. lain-lain	4,4	2,2	5,8	2,7	0,5
(2) Sektor impor	97,5	45,1	182,2	44,6	- 0,5 (-1,1%)
a. bea masuk	78,0	34,5	98,6	33,9	- 0,6
b. pajak penjualan impor	19,5	10,6	29,6	10,7	0,1
(3) Sektor ekspor	7,0	11,4	28,7	14,0	2,6 (22,8%)
pajak ekspor	7,0	11,4	28,7	14,0	2,6
(4) Sektor minyak	95,1	41,3	126,3	60,0	18,7 (45,3%)
a. pajak perseroan minyak	61,5	30,4	87,2	45,4	15,0
b. penerimaan minyak lainnya	33,6	10,9	39,1	14,6	3,7
(5) Penerimaan bukan pajak	2,7	5,0	4,2	14,5	9,5 (190,0%)
JUMLAH	320,6	155,6	415,9	198,9	43,3 (27,8%)

Sumber: Departemen Keuangan R.I.

*) angka sementara.

Tabel III.7.
PENGELUARAN RUTIN, 1971/1972
 (dalam miliar rupiah)

Jenis pengeluaran	1970/1971		1971/1972		
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	% daripada
	Semester I		Semester I *)		APBN
Belanja pegawai	132,3	64,4	165,9	70,1	42,3
Belanja barang	55,8	25,0	67,2	31,2	46,4
Subsidi daerah otonom	53,2	25,7	66,8	29,6	44,3
Bunga & cicilan hutang	31,4	11,2	37,2	20,2	54,3
Pemilu dan lain-lain	10,8	7,3	6,2	4,3	69,4
JUMLAH	283,5	133,6	343,3	155,4	45,3

Sumber: Departemen Keuangan R.I.

*) angka sementara.

Tabel III.8.
BELANJA PEGAWAI, 1971/1972
 (dalam miliar rupiah)

Jenis pengeluaran	1970/1971		1971/1972		
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	% daripada
	Semester I		Semester I *)		APBN
Tunjangan beras	30,6	15,8	33,0	11,2	33,9
Gaji & pensiun	72,9	36,0	101,6	46,8	46,1
Biaya makan (lauk pauk)	12,8	6,1	12,1	4,0	33,1
Lain-lain belanya pegawai dalam negeri	11,8	4,1	14,2	5,7	40,1
Belanja pegawai luar negeri	4,2	2,4	5,0	2,4	48,0
JUMLAH	132,3	64,4	165,9	70,1	42,3

Sumber: Departemen Keuangan R.I.

*) angka sementara.

Tunjangan beras sampai dengan saat ini masih kerap diberikan baik dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk uang. Dalam semester I - 1971/ 1972 realisasi pengeluaran untuk tunjangan beras, adalah sebesar Rp. 11,2 miliar.

Biaya makan yang merupakan belanja sektor HANKAM mencapai jumlah Rp. 4,0 miliar. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri adalah sebesar Rp. 5,7 miliar yang merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat digolongkan sebagai gaji dan pensiun ataupun uang makan.

Belanja pegawai luar negeri yang realisasinya dalam semester 1 - 1971/ 1972 sebesar Rp.2,4 miliar adalah pengeluaran untuk membiayai pegawai-pegawai yang ditugaskan diluar negeri. Pengeluaran ini sedikit dipengaruhi oleh kenaikan kurs devisa karena berhubungan dengan devisa yang diperlukan.

Belanja barang dalam semester I - 1971/1972 mencapai realisasi sebesar Rp. 31,2 miliar yaitu terbagi dalam belanja barang dalam negeri sebesar Rp. 29,6 miliar dan belanja barang luar negeri sebesar Rp. 1,6 miliar.

Walaupun usaha-usaha penghematan dan efisiensi berhasil dilaksanakan tetapi kebutuhan perlengkapan kerja juga meningkat baik dalam rangka rehabilitasi perlengkapan yang lama maupun dalam rangka penyempurnaan dan modernisasi. Hal tersebut berhubungan erat dengan makin luasnya tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan tuntutan gerak yang lebih cepat dan efisiensi yang lebih tinggi.

Pengeluaran untuk belanja barang dalam negeri dimaksudkan untuk pembelian barang-barang yang dilaksanakan didalam negeri sedangkan belanja barang luar negeri adalah untuk pembelian barang-barang diluar negeri dengan memakai valuta asing. Baik bagi belanja barang dalam negeri maupun belanja barang luar negeri pemerintah mengusahakan sejauh mungkin dilaksanakannya standardisasi dan pengawasan mutu barang.

Subsidi daerah otonom mencapai realisasi sebesar Rp. 29,6 miliar yaitu untuk daerah Irian Barat sebesar Rp. 3,8 miliar dan untuk daerahdaerah otonom lainnya sebesar Rp 25,8 miliar.

Pemberian subsidi kepada daerah otonom pada umumnya didasarkan kepada belum berhasilnya pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhankebutuhan rutinnya. pada pokoknya pemerintah daerah dapat mengusahakan sumber-sumber keuangan didaerahnya sendiri, akan tetapi kerap dalam batas-batas tertentu yaitu an tara lain tidak bertentangan dengan peraturan peraturan pusat.

Subsidi kepada daerah Irian Barat yang agak besar adalah karena masih perlu dikembangkannya daerah ini disamping belum terdapatnya sumber-sumber keuangan sendiri.

Bunga dan cicilan hutang mencapai Rp. 20,2 miliar, yaitu antara lain pembayaran bunga dan cicilan hutang-hutang luar negeri sebesar Rp 8.5 miliar.

Lain-lain pengeluaran rutin adalah sebesar Rp. 4,3 miliar yaitu untuk pembiayaan Pemilihan Umum. Pengeluaran untuk Pemilu meliputi pembelian barang-barang dan perlengkapannya, gaji petugas-petugas dan penyelesaian Pemilu.

3.4. Tabungan Pemerintah

Dengan realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 198,9 miliar dan pengeluaran rutin sebesar Rp. 155,4 miliar, maka dalam semester I - 1971/1972 terjadi tabungan pemerintah sebesar Rp. 43,5 miliar, yang dipakai sepenuhnya untuk pembiayaan anggaran pembangunan.

Usaha peningkatan tabungan pemerintah merupakan hasil daripada usaha menyingkirkan penerimaan dalam negeri dan usaha penghematan dalam pengeluaran rutin.

Melihat jumlah realisasi tersebut maka terdapat peningkatan bila dibandingkan dengan yang direncanakan maupun bila dibandingkan dengan realisasi tabungan pemerintah 1970/1971.

3.5. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan terdiri dari (a) bantuan program berupa devisa kredit, bantuan pangan (beras, terigu dsb) dan bukan pangan (pupuk, beras dsb) dan (b) bantuan proyek berupa peralatan (mesin-mesin dsb) bagi proyek-proyek pembangunan

Dalam semester I - 1971/ 1972 telah direalisasi penerimaan pembangunan sebesar Rp.30,2 miliar (tidak termasuk bantuan proyek sebesar Rp. 30,2 miliar). Jumlah tersebut berarti 29,3% daripada rencana APBN 1971/1972.

Realisasi bantuan program dalam semester I 1971/1972 tersebut terdiri dari nilai lawan devisa kredit sebesar Rp. 19,6 miliar, bantuan pangan sebesar Rp. 6,6 miliar dan bantuan bukan pangan sebesar Rp.4,0 miliar.

Nilai lawan devisa kredit tersebut diperoleh dari hasil penjualan devisa kredit di Bursa Valuta Asing. Bantuan pangan diperoleh dari hasil penjualan beras, terigu dan sebagainya yang didatangkan sebagai bagian dari kredit luar negeri. Hasil rupiah

penjualan tersebut merupakan penerimaan negara bagi dana-dana pembangunan.

Dalam usaha lebih menyempumakan administrasi dan prosedur bantuan luar negeri, telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep-300/MK/IV/5/1971 tentang penata usahaan bantuan ekonomi luar negeri yang antara lain mengharuskan dipakainya prosedur pembukaan L/C bagi semua impor dalam rangka bantuan ekonomi luar negeri.

Bantuan proyek merupakan kegiatan pembangunan yang semakin penting dalam rangka pelaksanaan PELITA. Bantuan proyek tersebut didatangkan dalam bentuk peralatan proyek seperti mesin-mesin, spareparts dan sebagainya yang khususnya ditujukan kepada proyek-proyek disektor perhubungan, pekerjaan umum, tenaga listrik, komunikasi, pengairan dasar, pertambangan, dan sebagainya.

Dalam semester I - 1971/1972 telah direalisir bantuan proyek sebesar Rp. 30,2 miliar. Bantuan proyek, disamping merupakan penerimaan APBN, juga merupakan pengeluaran pembangunan dalam jumlah yang sama. Sedang peralatan-peralatan proyeknya langsung diteruskan kepada departemen-departemen yang bersangkutan,

3.6. Pengeluaran Pembangunan

Dalam semester I-1971/1972 direalisir anggaran pembangunan sebesar Rp. 66,3 miliar. Dilihat daripada jenis-jenis pengeluaran pembangunan realisasinya dapat dibagi dalam :

- (a). pengeluaran-pengeluaran pembangunan melalui KBN sebesar Rp. 54,0 miliar;
- (b). pengeluaran-pengeluaran pembangunan melalui perbankan sebesar Rp. 12,3 miliar.

Realisasi tersebut adalah 37,8% dari seluruh rencana anggaran pembangunan 1971/1972, akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi semester I-1970/1971, terdapat peningkatan sebesar Rp. 15,1 miliar (29,4%). Pengeluaran pembangunan melalui KBN adalah berbagai pengeluaran pembangunan yang pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan melalui Kantor Bendahara Negara (KBN) yang sebagian besar meliputi pembiayaan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan departemen-departemen/lembaga negara. Akan tetapi disamping itu juga termasuk pembiayaan pembangunan Irian Barat, bantuan desa dan bantuan kabupaten.

Pengeluaran pembangunan melalui perbankan dotard lain berupa sumbangan pembangunan daerah tingkat I, kredit investasi dan sebagainya. Pembiayaan pembangunan melalui KBN sebesar Rp. 54,0 miliar tersebut berarti 41,2% dari rencana APBN, dan bila dibandingkan dengan realisasi semester I-1970/1971, terdapat

peningkatan sebesar Rp. 20,9 miliar (58,8%).

Pembiayaan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan oleh departemen-departemen sebesar Rp. 43,8 miliar menyangkut baik bidang-bidang ekonomi, sosial maupun umum, Dalam hal ini kelancaran daripada pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh masalah administrasi dan prosedur pembuatan DIP, penerbitan SKO dan penguangan SPM oleh departemen-departemen yang bersangkutan. Sistem DIP yang merupakan alat untuk perencanaan dan pengawasan sering kali masih memerlukan revisi oleh departemen-departemen sehingga mempengaruhi kelancaran daripada pembiayaannya.

Tabel III. 9.
PELAKSANAAN APBN 1971/1972 : SEMESTER I
(dalam miliar rupiah)

Jenis penerimaan	APBN	R ealisasi *) Semester I	Jenis pengeluaran	APBN	R ealisasi *) Semester I
I. PENER. DALAM NEGERI	415,9	198,9	I. PENGELUARAN RUTIN	343,3	155,4
A. Pajak Langsung	144	79	1. Belanja Pegawai	165,9	70,1
1. P. Pendapatan	15,7	9,1	2. Belanja Barang	67,2	31,2
2. P. Perseroan	21,6	12,8	3. Subsidi Daerah Otonom	66,8	29,6
3. P. Ps. Minyak	87,2	45,4	4. Cicilan Hutang	37,2	20,2
4. M.P.O.	19,1	11,,3	5. Lain - lain	6,2	4,3
5. Lain-lain	0,4	0,4			
			II. PEN GEL. PEMBANGUNAN	241,8	96,5
B. Pajak Tdk Langsung	267,7	105,4	A. Melalui KBN	131,2	54
1. P. Penjualan	20,7	10,9	1. Departemen/Lembaga	109,9	43,8
2. P. Pendj. Impor	29,6	10,7	2. Bantuan Desa	5,3	2,5
3. Cukai	45,6	19	3. Bantuan Kabupaten	8,8	3,7
4. Bea Masuk	98,6	33,9	4. Irian Barat	3,5	1,8
5. Pajak Ekspor	28,7	14	5. Lain - lain	3,7	2,2
6. Pen. Minyak Lain	39,1	14,6			
7. Lain-lain	5,4	2,3			
C. Penerimaan Non-tax	4,2	14,5	B. Melalui perbankan	44,5	12,3
II. PEN. PEMBANGUNAN	169,2	60,4	1. Hankam	5	0,9
1. Bantuan Program	103,1	30,2	2. Sumb.Pemb. DARI- I	20,8	10,2
2. Bantuan Proyek	66,1	30,2	3. Kredit Investasi	11,5	0,9
			4. B i mas	7,2	--
			5. Lain - lain		0,3
			C. Bantuan Proyek	66,1	302
Jumlah	585,1	259,3	Jumlah	585,1	251,9
Saldo-anggaran-lebih 1970/1971	--	7,2			
JUMLAH SELURUHNYA	585,1	266,5	JUMLAH SELURUHNYA	585,1	251,9

Sumber : Departemen Keuangan R.I.

*) angka sementara.

Bantuan desa dan bantuan kabupaten yang masing-masing realisasinya sebesar Rp. 2,5 miliar dan Rp. 3,7 miliar adalah merupakan program pembangunan daerah yang dianggap menjadi landasan bagi pembangunan seluruh perekonomian. Dengan pengeluaran itu diharapkan akan terbentuk lapangan-lapangan kerja baru, peningkatan produksi dan mempersiapkan desa untuk pembangunan selanjutnya. Dasar perhitungan

bagi pembiayaan tersebut adalah Rp. 100,- ribu untuk desa dan menurut jumlah penduduk bagi bantuan kabupaten.

Realisasi pembiayaan pembangunan Irian Barat sebesar Rp. 1,8 miliar dimaksudkan untuk mendirikan proyek-proyek di daerah Irian Barat dalam usaha mengejar tertinggalnya dari daerah-daerah lain. Dalam hal ini telah diambil ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran berhubung dengan berlakunya mata uang rupiah di wilayah Irian Barat.

Pengeluaran lain-lainnya sebesar Rp. 2,2 miliar antara lain untuk sensus penduduk, keluarga berencana, peningkatan data-data statistik dan sebagainya.

3.7. Pengawasan

Dalam waktu yang sangat singkat volume anggaran negara ternyata telah meningkat dengan sangat cepat. Dalam tahun 1968 besarnya anggaran masih berjumlah Rp. 185,3 miliar. Dalam tahun anggaran 1972/1973 volumenya telah meningkat dengan lebih dari empat kali sehingga sudah mencapai Rp. 751,6 miliar.

Pengeluaran pembangunan yang demikian besarnya dan yang pasti akan meningkat makin cepat lagi dalam tahun-tahun yang akan datang, mengharuskan adanya pengawasan. Kekacauan di bidang keuangan negara dimasa yang lampau menunjukkan adanya kenyataan tidak adanya atau kurangnya pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Dengan diabaikannya pengawasan, maka berbagai hal seperti : tata kerja anggaran, prosedur penggunaan uang dan disiplin keuangan mendjelma menjadi kekacauan yang mempunyai akibat yang jauh. Akibat tersebut tidak saja dirasakan didalam tubuh Pemerintah sendiri tetapi akhirnya juga dirasakan oleh perekonomian nasional sebagai keseluruhan.

Pengawasan keuangan terutama ditujukan terhadap beberapa hal pokok :

- (a) Untuk memberikan pertanggung-jawab dari pada setiap uang anggaran yang dikeluarkan mengingat uang ini berasal dari masyarakat.
- (b) Untuk mengetahui apakah suatu pengeluaran memang dilakukari sesuai dengan rencana yang ditentukan.
- (c) Untuk mengetahui apakah besarnya suatu pengeluaran tidak melampaui jumlah yang ditentukan.
- (d) Untuk mencegah terjadinya penghamburan dan mengharuskan suatu kegiatan dilakukan seefisien mungkin.
- (e) Untuk mengetahui apakah penggunaan uang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan

ketentuan yang berlaku.

(f) Untuk dapat mengamankan kekayaan negara.

Suatu anggaran, bagaimanapun baik dan sehatnya direncanakan, jika tidak disertai ketentuan-ketentuan yang cukup mengenai pengawasan keuangan yang efektif, akan besar kemungkinannya untuk menyimpang dari rencana, menyimpang dari prosedur yang ditentukan, atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang merugikan negara.

Pengawasan yang efektif, memerlukan informasi yang selengkap mungkin untuk melaksanakannya. Informasi yang lengkap hanya dapat diperoleh bila terdapat sistem keuangan dan administrasi keuangan yang baik. Administrasi keuangan yang baik pada dasarnya dapat diperoleh dengan memberikan ketentuan dan pedoman yang jelas dan baik pula.

Informasi yang lengkap, cepat dan mutakhir merupakan alat pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara agar dapat diambil tindakan yang tepat dan segera. Pada hakekatnya setiap tindakan yang menuju kepada perbaikan administrasi dan memaksakan ditaatinya peraturan-peraturan keuangan, mempunyai arti pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang merugikan negara.

Pengawasan keuangan negara dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pengawasan preventif dan represif. Kedua jenis pengawasan ini pada hakekatnya saling mengisi satu sama lain dan saling pengaruh mempengaruhi, sehingga kedua-duanya merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh diabaikan. Melaksanakan salah satu jenis pengawasan berarti menjamin efektivitas pengawasan yang lainnya.

Pengawasan preventif yang karena sifatnya dilakukan sebelum suatu tindakan dijalankan biasanya tercermin didalam tata-cara yang harus ditempuh untuk melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya merupakan pemisahan dari serangkaian fungsi-fungsi yang ada yang berhubungan dengan tindakan tersebut.

Sebaliknya pengawasan represif dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan, yakni dengan cara menilai pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu pengawasan represif hanya akan mempunyai arti jika bermula dari pengawasan preventif disusun dengan baik.

Pengawasan preventif keuangan negara pada waktu ini dilakukan melalui berbagai macam cara : penggunaan Daftar Isian Proyek (DIP), keharusan memenuhi ketentuan-ketentuan pelaksanaan APBN, penatausahaan kas milik negara, penjelenggaraan buku kas umum, keharusan menggunakan kantor lelang dalam

penjualan kekayaan negara, dan lain-lain ketentuan pengawasan keuangan negara..

Disamping itu juga dilakukan tindakan penertiban didalam bidang kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka usaha pengawasan preventif. Untuk itu telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan negara yang keadaannya pada waktu itu sudah sangat mengkhawatirkan dengan membedakan perusahaan-perusahaan negara dalam bentuk Perjan, Perum dan Persero.

Dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 1969, yang kemudian menjadi Undang-undang No.9 tahun 1969, dari pada bentuk-bentuk perusahaan negara diadakan modifikasi dan diatur kembali perusahaan-perusahaan negara berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960 yang menjadi Persero dan Perjan. Khusus bagi perusahaan dalam bentuk Persero telah dikeluarkan ketentuan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 sebagai kelanjutan dari Perpu No.1 tahun 1969.

Penilaian dari pada pengalihan bentuk perusahaan menjadi Persero dilakukan secara ketat agar dapat dijamin kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut dari segi kemampuan untuk menumpuk keuntungan dan dengan demikian menghasilkan pendapatan bagi negara.

Pada waktu ini dari 139 perusahaan-perusahaan negara yang terdapat dalam tahun 1967, 13 buah diarahkan menjadi Perusahaan Jawatan, 35 buah diarahkan untuk menjadi Perusahaan Umum dan 91 buah untuk dijadikan Perusahaan Perseroan. Dari 91 buah perusahaan tersebut baru 45 buah dapat dijadikan Persero.

Bila dalam pengawasan preventif tekanan diletakkan pada penciptaan ketentuan dan peraturan mengenai pelaksanaan keuangan negara, mengenai pembinaan tertib administrasi dan mengenai disiplin keuangan negara, maka dalam pengawasan represif tekanan diarahkan pada pemeriksaan dan penilaian fisik terhadap suatu pelaksanaan yang telah dilakukan. Pengawasan preventif bersifat pencegahan sedang pengawasan represif bersifat penyelidikan terhadap suatu fakta.

Dalam rangka pemeriksaan terhadap pelaksanaan keuangan negara dilakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus.

Objek pemeriksaan rutin selain mencakup bidang pelaksanaan APBN juga mencakup bidang pelaksanaan APBD yang meliputi pemeriksaan terhadap : bendaharawan rutin pusat (APBN), bendahara penerima, proyekproyek PELITA, bendaharawan rutin daerah (APBD), dan proyek-proyek daerah. Sasaran pemeriksaan rutin pada dasarnya ditujukan kepada :

- (a) Kelengkapan dan kebenaran dari pada administrasi keuangan yang diselenggarakan bendaharawan rutin, bendahara penerimaan maupun bendaharawan proyek.
- (b) Kebenaran dari pada penggunaan uang.
- (c) Kelancaran pembiayaan.
- (d) Kebenaran dari fisik pembelian dan fisik pekerjaan.

Mengingat banyaknya objek-objek pemeriksaan yang harus dilakukan maka dalam suatu periode tertentu tidak mungkin dilakukan pemeriksaan terhadap semua objek tetapi dilakukan secara bertahap.

Dari hasil pemeriksaan rutin tersebut biasanya diketahui adanya gejala penyimpangan-penyimpangan tertentu. Untuk menilai apakah gejala penyimpangan tersebut merupakan gejala insidental atau gejala umum, maka dilakukan pemeriksaan khusus. Selain dari pada itu pemeriksaan khusus juga dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu fakta tertentu pada saat tertentu.

Pemeriksaan khusus terutama ditujukan pada proyek-proyek PELITA. Hasil dari pemeriksaan khusus yang telah diadakan pada bulan Oktober 1970 dan Maret 1971 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 10.
HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS PROYEK PELITA, 1970/1971

Pemeriksaan	Mar-71	Okt-70
1. Proyek PELITA yang di-periksa	952 proyek	992 proyek
2. Nilai berita acara fiktif	Rp. 1.150.827.956,0	Rp247.914.882,00
3. Pembelian dan pemborongan pekerjaan Rp. 1.000.000,0 keatas yang dilakukan tanpa kontrak	9% dari seluruh 5% dari seluruh kejadian penyimpangan	5% dari seluruh kejadian penyimpangan
4. Pemberian uang muka yang melebihi 20% dari nilai kontrak	28% dari seluruh kejadian penyimpangan	15% dari seluruh kejadian penyimpangan

Sumber: Departemen Keuangan.

Pada waktu ini pelaksanaan pemeriksaan khusus terus ditingkatkan dan dalam bulan Oktober 1971 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1253 proyek PELITA dengan sasaran pemeriksaan sebagai berikut :

- (a) Penilaian terhadap kelancaran pembiayaan, mulai dari pengesahan DIP sampai dengan pembayaran kepada pihak ketiga (pemborong dan leveransir).
- (b) Penilaian terhadap kemungkinan penyimpangan prosedur, pembiayaan dan prosedur pelaksanaan pekerjaan atau pembelian.
- (c) Pemeriksaan fisik pekerjaan dan pembelian.
- (d) Pemeriksaan terhadap posisi kas.
- (e) Pemeriksaan kebenaran angka sisa anggaran pembangunan 1970/ 1971 per 30 September 1971.

Disamping adanya ketentuan-ketentuan tersebut yang sebagian besar meliputi tata-cara pelaksanaan keuangan negara, telah dilakukan tindakan, tindakan pemyempurnaan pengerjaan administrasi yang diperlukan bagi penyusunan Perhitungan

Anggaran. Pada saat ini Perhitungan Anggaran tahun 1967 telah menjadi Undang-undang, sedang Perhitungan Anggaran tahun 1968 dan triwulan I - 1969 tda selesai dipersiapkan.

Berbeda dengan penyusunan Perhitungan Anggaran tahun 1967, maka perhitungan Anggaran tahun 1968 dan triwulan I - 1969 didasarkan atas penelitian terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan kebenaran dari bahan-bahan dan angka-angka untuk penyusunan perhitungan anggaran.

Mengenai Perhitungan Anggaran 1969/1970 pada saat ini sebagian besar telah dapat diselesaikan. Sedangkan mengenai Perhitungan Anggaran tahun 1970/1971 persiapannya juga telah dimulai.

Pengalaman dibidang pengawasan selama ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya administrasi yang baik dan tertib. Berhasilnya usaha mencapai administrasi yang tertib sangat tergantung pada tersedianya tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dan kemampuan.

Dalam rangka ini telah dilakukan pemugaran para bendaharawan (pemugaran A) yang hingga kini telah menghasilkan 11.456 bendaharawan yang telah menjalani pemugaran. Dimaksudkan untuk memugarkan 28.000 orang bendaharawan.

Selanjutnya juga akan diadakan pemugaran tenaga administrasi pada biro-biro keuangan (pemugaran B) yang akan meliputi 24.000 orang. Pada waktu ini telah diselesaikan 480 orang.

Didalam rangka pemugaran pengawasan keuangan negara yang diikuti oleh tenaga pemeriksa pada departemen-departemen (pemugaran C), telah dihasilkan 32 tenaga pemeriksa. Direncanakan untuk mengadakan pemugaran terhadap sejumlah 3.000 tenaga pemeriksa.

BAB IV

Rencana APBN 1972/1973

4.1. U m u m

APBN 1972/1973 meningkat baik dalam jumlah maupun dalam volume kegiatan dibandingkan dengan APBN 1971/1972. Dalam tahun 1972/1973 seluruh anggaran berjumlah Rp. 751,6 miliar sedangkan dalam tahun 1971/1972 berjumlah Rp. 585,1 miliar. Hal ini berarti peningkatan sebesar Rp. 166,5 miliar. Peningkatan ini mencerminkan pula kegiatan Pemerintah yang semakin bertambah besar dan luas dibidang rutin maupun dibidang pembangunan.

Kegiatan pemerintah dibidang rutin akan meningkat dengan + 27,4% sedangkan dibidang pembangunan dengan + 31,5%.

Adalah sangat penting agar didalam situasi dan proses pembangunan yang sedang berlangsung dengan meningkat dan meluas itu, dapat tetap dijaga ketetapan arahnya seperti telah direncanakan. Setiap langkah yang ditempuh haruslah lebih mendekatkan kepada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Harus dihindarkan langkah-langkah yang pada hakekatnya hanya akan mengalihkan penggunaan sumber dan tenaga pembangunan yang telah dengan susah padah dihimpun dan dikerahkan.

Disamping tetap menjaga ketepatan arah pembangunan, tidak kalah pentingnya adalah usaha untuk tetap meningkatkan volume pembangunan. Pengerahan yang tepat dan volume pembangunan yang terus ditingkatkan merupakan faktor-faktor yang essensiil didalam usaha mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Bersamaan dengan itu haruslah pula diperhatikan penggunaan sumber dan tenaga dengan efisiensi setinggi mungkin. Efisiensi dalam hal ini bukanlah hanya mengenai efisiensi dari satu proyek atau satu unit kegiatan saja, tetapi juga mengenai pembangunan sebagai keseluruhan.

Hal-hal tersebut harus dijalankan sebaik-baiknya agar dapat dihindarkan penggunaan sumber dan tenaga pembangunan dari usaha-usaha yang kurang ataupun tidak perlu. Dengan demikian maka penerimaan negara yang berasal dari rakyat berupa pajak, bea masuk, cukai dan lain-lain sumber penerimaan harus digunakan menurut tujuan dan cara yang sebaik-baiknya.

Jelaslah bahwa pembangunan menghendaki bahkan menuntut suatu disiplin tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini lebih dirasakan lagi bila dipahami bahwa pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan mempunyai banyak segi yang

menyangkut berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.

Oleh karena itu harus dapat ditentukan prioritas pembangunan secara saksama. Ini berarti bahwa harus didahulukan hal-hal yang paling mendesak yang menjadi kepentingan rakyat banyak dan membuka kemungkinan pembangunan pada tahap berikutnya.

Penentuan prioritas ini adalah mutlak karena setiap usaha pembangunan memerlukan sarana-sarana seperti biaya, kemampuan kerja, kecakapan skill dan lain-lain yang pada waktu ini masih sangat terbatas.

Pembangunan dalam arti yang luas harus dilakukan melalui serangkaian pembangunan yang bertahap. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan itu yang dituangkan dalam REPELITA setiap lima tahun dapat diciptakan landasan yang kuat bagi tercapainya sasaran pembangunan.

Dengan adanya pentahapan tersebut dan dengan memperhatikan prioritas dalam setiap tahap, maka faktor waktu adalah penting. Percepatan pembangunan ini lebih berasa sangat mendesak karena banyak masalah-masalah dalam masyarakat yang memerlukan tanggapan segera : kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, kebutuhan perumahan, keperluan pendidikan, perbaikan kesehatan dan peningkatan kebutuhan kehidupan lainnya.

Dalam pada itu perlu disadari bahwa peningkatan volume dan percepatan pembangunan hanya akan memberikan hasil sebaik-baiknya bila kemampuan stabilitas perekonomian tetap dipelihara bahkan lebih diteguhkan. Kebijakan *budgeter* yang dijalankan pemerintah adalah kebijakan yang mendorong pembangunan. Hal ini berarti kebijakan yang menimbulkan kegairahan menabung serta mendorong usaha-usaha penanaman modal yang produktif. Jelas keadaan seperti demikian hanya dapat berlangsung dalam kestabilan ekonomi yang semakin teguh kemantapannya.

Kebijakan pokok perpajakan dalam arti seluas-luasnya juga dilandaskan pada hal yang sama yaitu mendorong pembangunan. Penurunan dan penyesuaian tarif yang selama ini dilakukan adalah dimaksudkan untuk mengarahkan pajak kepada struktur pentarifan yang normal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dipihak pengeluaran, sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan mengingat dana dan sarana yang terbatas, harus dijaga keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan rutin dengan kebutuhan pembangunan. Didalam masyarakat yang sedang membangun kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan akan terus meningkat mengikuti pola yang berpusat pada pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan strategi pembiayaan menurut REPELITA, secara bertahap tetapi pasti tabungan pemerintah harus ditingkatkan sehingga dalam waktu yang tidak lama mampu menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. Dengan demikian kebijaksanaan umum dibidang penerimaan dan pengeluaran juga diarahkan kepada usaha untuk menghasilkan tabungan pemerintah semaksimal mungkin. Dalam tahun 1972/1973 telah diperkirakan bahwa tabungan Pemerintah dapat mencapai jumlah Rp. 136,1 miliar. Hal ini berarti telah melampaui jumlah bantuan luar negeri yang diperkirakan bernilai Rp. 95.0 miliar berupa devisa kredit, pupuk, barang-barang modal, kapas, beras dan bantuan bahan pangan lainnya. Jumlah tabungan pemerintah yang diperkirakan sebesar Rp. 136,+ miliar itu juga berarti suatu kenaikan dengan +87,5% bila dibandingkan jumlahnya dalam tahun 1971/1972.

Untuk dapat mencapai tabungan pemerintah sebesar jumlah tersebut, maka penerimaan dalam negeri dalam tahun 1972/1973 ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 573,6 miliar atau kenaikan sebesar + 37,9% dibandingkan tahun 1971/1972. Dipihak lain, walaupun harus memenuhi begitu banyak kewajiban-kewajiban yang jumlahnya masing-masing cukup besar, pengeluaran rutin diperkirakan dapat dipertahankan pada tingkat Rp. 437,5 miliar. Hal ini berarti kenaikan sebesar + 27,4% dibandingkan tahun 1971/1972.

Dengan tabungan pemerintah sebesar Rp. 136,1 miliar dan dana pembangunan yang berasal dari penerimaan pembangunan, maka dalam tahun 1972/1973 pengeluaran pembangunan diperkirakan dapat mencapai jumlah Rp. 231,1 miliar. Hal ini berarti kenaikan sebesar + 31,5% bila dibandingkan tahun 1971/ 1972.

Pembidangan jumlah pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 231,1 miliar adalah Rp. 184,9 miliar untuk bidang ekonomi, Rp. 32,0 miliar untuk bidang sosial dan Rp. 14,2 miliar untuk bidang umum. Bila dibandingkan tahun 1971/1972, maka untuk bidang ekonomi terdapat kenaikan sebesar + 31,8% untuk bidang sosial kenaikan sebesar + 30,1% dan untuk bidang umum kenaikan sebesar + 31,5%.

Dalam pengeluaran pembangunan untuk bidang ekonomi sebesar Rp. 184,9 miliar itu termasuk sejumlah Rp. 54,8 miliar untuk daerah yang berupa bantuan desa, bantuan kabupaten, pengeluaran pembangunan untuk Irian Barat, sumbangan pembangunan untuk DATI I dan IPEDA. Dengan demikian sebesar 29,6% daripada anggaran bidang ekonomi diperuntukkan bagi pembangunan daerah.

Disamping itu perlu pula diketahui bahwa proyek-proyek pembangunan lainnya seperti irigasi, pembuatan jalan dan lain-lain prasarana pada hakekatnya juga berupa

pembangunan yang dilaksanakan di daerah.

4.2. **Penerimaan Dalam Negeri**

Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan yang berasal dari hasil pungutan berbagai jenis pajak, bea masuk, cukai, penerimaan minyak dan penerimaan non-tax. Penerimaan dalam negeri ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti: keadaan dan perkembangan perdagangan dalam negeri, situasi perdagangan luar negeri, tingkat produksi dalam negeri, tingkat konsumsi dalam negeri, tingkat harga, keadaan dan kemampuan aparaturnya pemungutan pajak pada umumnya dan yang tidak kalah pentingnya ialah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya. Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa keadaan perekonomian pada umumnya, kemampuan aparaturnya pemungutan serta kesadaran pajak dari masyarakat adalah faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi besarnya hasil pemungutan penerimaan dalam negeri.

Keadaan perekonomian didalam negeri dan tingkat harga umum yang semakin mantap dengan sendirinya mempengaruhi peningkatan penerimaan dalam negeri. Semakin mantap tingkat harga maka semakin berat pula tugas untuk menaikkan penerimaan. Namun di pihak lain, perekonomian yang stabil memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan semakin besar dan luas pula "*tax-base*" dari berbagai macam penerimaan dalam negeri. Pada hakekatnya, juga usaha pembangunan yang dilaksanakan tentu akan memperbesar dan memperluas secara riil "*tax-base*" daripada berbagai macam penerimaan dalam negeri.

Dalam pada itu, perkembangan hubungan ekonomi internasional juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi didalam negeri. Perkembangan yang semakin meningkat di bidang ekspor tentu mempunyai pengaruh yang positif bagi perekonomian. Begitu pula halnya dengan perkembangan dan perubahan komposisi impor yang semakin menuju kepada perimbangan yang lebih produktif. Mengenai pengaruh perkembangan impor ini, komposisi yang semakin bergeser kepada bahan-bahan baku dan penolong serta spare-parts dan alat-alat produksi lainnya secara langsung memang dapat mengurangi tingkat kenaikan bea masuk. Tetapi dengan komposisi impor yang demikian perekonomian dapat tumbuh secara riil sehingga secara tidak langsung berbagai jenis penerimaan lainnya, seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, dan sebagainya, dapat diperbesar.

Dibidang minyak, perkembangan produksi minyak menyebabkan penerimaan

dari bidang ini dapat melampaui penerimaan tahun sebelumnya.

Mengenai kemampuan aparatur pemungutan, didalam tahun-tahun terakhir ini telah dapat menunjukkan prestasi yang semakin meningkat. Berbagai tindakan perbaikan dibidang perlengkapan kerja, administrasi, prosedur tehnik, kelengkapan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, kepegawaian dan pelayanan serta penerangan kepada masyarakat telah diambil. Khusus dibidang kepegawaian peningkatan disiplin kerja serta sanksi yang berat terhadap pelanggaran disiplin telah dapat menaikkan prestasi kerja.

Tabel IV.1.
PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI,
1966 - 1972/1973
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (+ %)
1966	13,1	-
1967	60,2	+ 359,5
1968	149,7	+ 148,7
1969/1970	243,7	+ 62,8
1970/1971	344,6	+ 41,4
1971/1972	415,9 *)	+ 20,7
1972/1973	573,6 *)	+ 37,9

Sumber : Departemen Keuangan.

*) Perkiraan APBN.

Usaha-usaha perbaikan kemampuan kerja daripada aparatur pemungutan ini tentu akan lebih ditingkatkan lagi didalam tahun anggaran 1972/1973.

Mengenai kesadaran pajak masyarakat diusahakan agar hal ini dari tahun ketahun meningkat. Khusus kesadaran pajak pegawai negeri dan ABRI, maka sebagai tindakan permulaan telah diambil kebijaksanaan yang antara lain berupa Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1971 dimana para pejabat Pemerintah diwajibkan setiap tahun melaporkan pembayaran pajak pribadi atas kekayaan dan pendapatannya.

Namun demikian juga dirasakan bahwa masih banyak lagi yang harus dilakukan dibidang ini sehingga dapat meningkatkan kesadaran-pajak dari masyarakat. Gambaran yang tidak tepat mengenai pajak dan perpajakan dikalangan masyarakat harus dapat

dibilangkan dan diganti dengan suatu penilaian yang sehat serta konstruktif. Sebab itu ditahun yang akan datang akan lebih ditingkatkan lagi secara sistimatis dan menjeluruh pelajanan kepada masyarakat serta penerangan tentang pajak dan perpajakan. Secara nyata masyarakat seharusnya menyadari bahwa perbaikan dan pembangunan dibidang kesehatan rakyat, pendidikan, jalan, perhubungan dan telekomunikasi, listrik, irigasi, desa dan kabupaten, dan sebagainya, tidak akan dapat dilaksanakan tanpa pemasukan penerimaan berbagai jenis pajak, bea masuk, cukai dan sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa berhasilnya peningkatan kesehatan, perbaikan pendidikan, perluasan jalan dan perhubungan, penambahan tenaga listrik, penyediaan kendaraan umum dan sebagainya tergantung pada kesadaran pajak. Hal ini disebabkan karena sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang riil berada didalam tangan dan kemampuan masyarakat sendiri.

Harus selalu disadari bahwa seperti halnya masalah pembangunan tidak dapat dilepaskan daripada persoalan pembiayaannya, maka hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan juga tidak dapat dilepaskan daripada kewajiban untuk turut didalam pembiayaan pembangunan. Kesadaran seperti ini sangat perlu ditanamkan didalam masyarakat.

4.2.1 Pajak Langsung

Kebijaksanaan pokok dibidang perpajakan didasarkan pada kebijaksanaan yang mendorong pembangunan agar dapat memperkembangkan kegairahan masyarakat untuk melaksanakan investasi yang produktif disamping rnenghasilkan penerimaan bagi pembiayaan pernbangunan pemerintah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak langsung, selain melanjutkan dan memperkembangkan usaha-usaha yang telah dijalankan hingga saat ini, maka kebijaksanaan didalam tahun anggaran 1972/1973 adalah sebagai berikut :

- (1) Usaha untuk memperbesar jumlah wajib pajak.
- (2) Intensifikasi pemungutan pajak.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pembangunan aparat perpajakan yang lebih terarah.
- (4) Meningkatkan hubungan dan kerja-sama dengan instansi-instansi Pernerintah lainnya..
- (5) Mengadakan perjanjian internasional dibidang perpajakan guna mengamankan penerimaan.

ad. (1). Memperbesar jumlah wajib pajak

Untuk memperbesar penerimaan, perlu ditempuh beberapa macam tindakan oleh pihak aparaturnya. Macam tindakan tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua kategori utama : (1) intensifikasi dan (2) ekstensifikasi.

Ekstensifikasi pemungutan pajak berarti usaha memperbesar penerimaan dengan cara memperluas dasar pengenaan pajak. Memperluas pengenaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara : (1) menambah atau memperluas "*tax base*" dari sesuatu macam pajak dan (2) memperbesar jumlah wajib pajak. Cara yang pertama menghendaki diadakan perubahan didalam Undang-undang atau ketentuan dari jenis pajak yang bersangkutan. Menambah atau memperluas "*tax-base*" berarti merubah dasar-pengenaan pajak yang ada didalam Undang-undang yang berlaku.

Pengertian ekstensifikasi lainnya adalah usaha untuk memperbesar jumlah wajib pajak. Hal ini merupakan suatu usaha yang tidak mudah karena instansi perpajakan harus dapat menemukan wajib pajak baru. Kesulitannya terletak didalam cara yang harus ditempuh untuk menemukan wajib pajak baru, jadi bukan mengenai calon-calon wajib pajak itu sendiri. Beberapa cara yang akan ditempuh untuk dapat memperbesar jumlah wajib pajak adalah :

- (a) Pembaharuan dari bentuk surat pemberitahuan (SPT) yang mencerminkan isi dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, disertai penuntun yang jelas dan penyebaran yang meluas. Seperti diketahui SPT adalah alat komunikasi pertama antara instansi perpajakan dengan para wajib pajaknya. Dengan demikian adalah penting sekali agar formulir SPT dapat dimengerti dan diisi dengan benar oleh para wajib pajak. Pengisian SPT itu diusahakan semudah mungkin sehingga. dapat dihindarkan rasa enggan atau rasa masa bodoh dari pihak wajib pajak.
 - (b) Menambah kegiatan usaha penerangan dan pelajanan kepada masyarakat yang dilakukan langsung oleh para petugas pajak atau melalui berbagai mass-media. Dengan perkataan lain, frekwensi kontak antara instansi perpajakan dengan masyarakat akan, ditingkatkan.
 - (c) Menambah jumlah petugas pajak yang ditugaskan khusus untuk
 - (d) membina suatu wilayah perpajakan tertentu dimana diperkirakan terdapat potensi pajak. Untuk wilayah-wilayah tersebut akan diberikan perhatian harus antara lain dengan cara menambah jumlah petugas pajak diwilayah tersebut.
 - (e) Menaikkan jumlah wajib pajak yang benar-benar memenuhi kewajiban pajaknya.
- Seorang atau sesuatu perusahaan merupakan wajib pajak bila telah terdaftar pada

instansi perpajakan. Namun terdaptarnya suatu perusahaan sebagai wajib pajak belumlah berarti bahwa perusahaan itu merupakan wajib pajak yang efektif, artinya wajib pajak yang benar-benar memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan berbagai atasan wajib pajak yang terdaptar masih selalu berusaha menghindarkan diri menjadi wajib pajak yang efektif. Berhubung dengan itu akan dilakukan pelaksanaan sanksi pajak terhadap para wajib pajak yang demikian itu sesuai dengan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

ad (2). Intensifikasi Pemungutan Pajak

Intensifikasi berarti tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan-pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti dengan perkataan lain, lebih intensif. yang menjadi ciri utama daripada tindakan seperti ini adalah usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam .batas-batas ketentuan yang ada. Jadi yang lebih dipentingkan adalah kedalamannya, bukan luasnya.

Intensifikasi masih harus ditingkatkan, sebab berdasarkan pengalaman belum dapat diperoleh sepenuhnya hasil pajak yang seharusnya dilunasi oleh seseorang atau sesuatu wajib pajak. Berhubungan dengan itu, didalam tahun anggaran 1972/1973, instansi perpajakan akan lebih meningkatkan usahanya agar para wajib pajak melunasi sepenuhnya kewajiban-kewajiban pajaknya.

ad. (3). Pembinaan Dan Pembangunan Aparat Perpajakan Secara Lebih Terarah

Untuk dapat melaksanakan tugas yang semakin berat diperlukan suatu aparatatur perpajakan yang tangguh. Dalam rangka ini akan dijalankan usaha-usaha sebagai berikut :

- (a) Memperbesar kemampuan dan prestasi kerja melalui peningkatan efisiensi didalam tata-kerja dan tata administrasinya.
- (b) Meningkatkan kemampuan teknis daripada para petugas pajak. Sesuai.dengan .kemampuan yang ada, maka selama ini telah dilakukan berbagai mata jam pendidikan yang dimaksudkan mempertinggi kemampuan teknis dari petugas-petugas pajak. Disamping itu, pendidikan seperti itu juga dimaksudkan untuk lebih menanamkan rasa tanggung jawab, pengertian dan disiplin kerja yang tinggi didalam menjalankan tugas.
- (c) Dalam batas-batas kemampuan maupun ketentuan-ketentuan yang ada akan diusahakan memperbesar jumlah petugas pajak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi

didalam masa pembangunan.

ad. (4). Meningkatkan Hubungan dan Kerja Sama Dengan Instansi-Instansi Pemerintah

Lainnya.

Mengingat keterbatasan jumlah petugas pajak dan luasnya tugas perpajakan itu sendiri, maka peningkatan pemungutan pajak akan dilaksanakan dengan lebih meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi perintah lainnya. Hal ini antara lain dapat berupa : memberikan data dan informasi yang diperlukan guna kepentingan pengenaan pemungutan pajak; memperluas dan memperketat syarat Surat Keterangan Fiskal penunjukan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk bertindak sebagai wajib pungut pajak negara. Sebagai langkah permulaan telah ditunjuk bendaharawan sipil dan ABRI sebagai wajib pungut MPO dan pajak penjualan didalam semester I - 1971/1972.

ad. (5). Perjanjian Intemasinnal Dibidang Perpajakan

Dalam rangka pengamanan penerimaan negara, maka diusahakan perjanjian internasional dibidang perpajakan dengan beberapa negara. Hal ini juga dilakukan untuk kepentingan para wajib pajak sendiri agar terhindar dari kemungkinan terkena pajak-dua-kali dan lain-lain perlakuan yang dirasakan tidak memenuhi unsur keadilan didalam perpajakan.

Dalam pada itu perlu dicatat bahwa kenyataan adanya pendekatan kearab perjanjian internasional dibidang perpajakan menandakan bahwa ketentuan pelaksanaan perpajakan telah dirasakan pengaruhnya sampai diluar perbatasan negara.

Seperti telah dijelaskan, aspek lain kebijaksanaan pokok perpajakan adalah memupuk kemampuan masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi yang produktif. Berhubung dengan itu penting sekali adanya kebijaksanaan tarif yang rasional.

Pemerintah selalu berusaha agar tarif perpajakan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi Sebagai salah satu kelanjutan dari usaha tersebut dalam bulan Nopember -1971 telah dikeluarkan sam kebijaksanaan tarif yang baru. Sesuai kebijaksanaan tarif yang baru itu maka lapisan-lapisan pendapatan sisa kena pajak (PSKP) telah diturunkan sehingga pengenaan tarif secara umum lebih meringankan para wajib pajak pendapatan. Dengan demikian diharapkan kemampuan masyarakat untuk membentuk tabungan akan lebih. meningkat. Tabungan yang meningkat tentu akan.

lebih menggiatkan pula investasi yang pada akhirnya tentu akan pula berakibat naiknya pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, didalam tahun anggaran 1972/19'73 diperkirakan dapat dihasilkan pajak langsung, diluar pajak perseroan minyak, sebesar Rp. 90,9 miliar. Didalam angka ini termasuk Rp. 12,0 miliar hasil IPEDA. pencantuman IPEDA didalam APBN sekedar merupakan pencatatan, karena hasil IPEDA tidak dimasukkan sebagai penerimaan pemerintah pusat. .

Dibandingkan dengan penerimaan pajak langsung tahun 1971/1972, maka kenaikan penerimaan pajak langsung 1972/1973 merupakan suatu kenaikan yang berarti yaitu sebesar + 38,9% (tanpa IPEDA). Didalam tahun-tahun yang akhir ini, kenaikan tersebut hanya mencapai + 22,2%' untuk 1970/1971 dan + 7,6 untuk tahun 1971/1972. Perincian lebih lanjut dari perkiraan dimaksud dapat dilihat didalam **Lampiran 1** dari Nota Keuangan ini.

4.2.2. Pajak Tidak Langsung

Penerimaan pajak tidak langsung, seperti juga penerimaan pajak langsung, semakin lama semakin dirasakan berat pemasukannya. Kestabilan ekonomi yang semakin mantap menyebabkan kenaikan hasil penerimaan pajak tidak langsung tidak sebesar dalam tahun-tahun 1966-1968, dalam periode mana tingkat inflasi masih tinggi.

Tabel IV.2.
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK LANGSUNG, 1966 -1972/1973
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (+ %)
1966	1,2 1)	---
1967	9,4 1)	+ 683,3
1968	25,5	+ 171,3
1969/1970	43,2	+ 69,4
1970/1971	52,8	+ 22,2
1971/1972	56,8 2)	+ 7,6
1972/197	390,9 1) 2)	+ 38,9 3)

Sumber : Departemen Keuangan

1) Termasuk penerimaan IPEDA

2) Perkiraan APBN

3) Tanpa IPEDA. Termasuk IPEDA : + 60,0 %

Didalam masa kestabilan ekonomi yang semakin mantap, usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung akan semakin tergantung kepada kemampuan aparaturnya pemungutan dan kesadaran pajak dari masyarakat.

Didalam melaksanakan tugasnya., aparaturnya pemungutan dibidang pajak tidak langsung selalu berpegang pada kebijaksanaan pokok yang mendorong pembangunan, yaitu yang dalam hal ini berarti menjaga hubungan yang dinamis antara kepentingan produksi dan industri didalam negeri, kepentingan konsumsi pada umumnya dan kepentingan penerimaan.

Didalam tahun anggaran 1972/1973 peningkatan penerimaan pajak tidak langsung akan didasarkan kepada beberapa kebijaksanaan yang yang antara lain adalah:

- (1) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan seperti juga halnya dengan pajak langsung.
- (2) Mengenai bea masuk dan pajak penjualan impor, berdasarkan pengalaman selama ini, kebijaksanaan tarif saja kurang sepenuhnya dapat menjamin peningkatan penerimaan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh sebab itu, didalam tahun anggaran 1972/1973 usaha untuk lebih menertibkan lalu-lintas barang dan dokumen dipelabuhan-pelabuhan akan lebih diintensifkan.
- (3) Dibidang cukai, kebijaksanaan untuk lebih mensesuaikan harga dengan cukainya akan terus disempurnakan. Khusus dibidang cukai tembakau, operasi pemberantasan rokok yang tidak berpita cukai akan semakin digiatkan.
- (4) Mengenai padaiak penjualan, bea meterai dan bea balik nama pemasukannya akan lebih besar dengan adanya pengertian dan kesadaran yang lebih baik dari dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, usaha-usaha pendekatan dengan dunia usaha akan lebih ditingkatkan. Dari pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat ditentukan cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pemungutan pajak.
- (5) Dibidang pajak ekspor, kebijaksanaan untuk tidak melakukan pungutan atas ekspor barang-barang jadi dan setengah jadi akan tetap berlaku. Hal ini diharapkan dapat terus memberikan dorongan bagi ekspbr.
- (6) Akhirnya, sebagaimana juga halnya dengan pajak langsung, usaha-usaha untuk lebih mengintensifkan pembinaan dan pembangunan aparaturnya pemungutan akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 1972/1973. Begitu juga dengan usaha-usaha

untuk lebih membangkitkan kesadaran-pajak masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang disebut itu, pemasukan pajak tidak langsung dalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan dapat mencapai Rp. 232,7 miliar. Perkiraan ini berada sekitar +1,8% diatas jumlah perkiraan pajak tidak langsung dalam APBN 1971/1972. Hal ini disebabkan karena dibidang bea masuk dan pajak penjualan impor terdapat peningkatan yang tidak begitu besar. Berubahnya komposisi maupun volume impor yang dapat dikenakan bea masuk dan pajak penjualan impor merupakan sebab-sebab yang utama dalam penerimaan dibidang ini.

Perkiraan lebih terperinci dari pajak tidak langsung ini dapat dibaca didalam lampiran dari Nota Keuangan ini.

Tabel IV.3.
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK TIDAK LANGSUNG
1966-1972/1973
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (%)
1966	10,5	
1967	40,5	+ 285,7
1968	86,3	+ 113,1
1969/1970	131,6	+ 52,5
1970/1971	179,4	+ 36,3
1971/1972	228,6 *)	+ 27,4
1972/1973	232,7 *)	+ 1,8

Sumber: Departemen Keuangan.

*) Perkiraan APBN

4.2.3. Penerimaan Minyak

Penerimaan minyak terdiri dari pajak perseroan minyak dan penerimaan minyak lainnya.

Penerimaan minyak ini terganrung pada perkembangan volume produksi

minyak, biaya produksi minyak, hasil jual minyak dan juga volume konsumsi minyak.

Didalam tahun anggaran 1972/1973, diperkirakan volume produksi akan meningkat. Produksi yang berasal dari perusahaan-perusahaan minyak yang bekerja dalam rangka "*production sharing*" sudah akah mulai menghasilkan dalam tahun depan. Diperkirakan dalam tahun anggaran 1972/1973 dapat dihasilkan penerimaan minyak sebesar Rp. 241,2 milyar.

Perincian selanjutnya daripada penerimaan minyak ini dapat dilihat di dalam lampiran dari Nota Keuangan ini.

Tabel IV.4.
PERKEMBANGAN PENERIMAAN MINYAK, 1966 - 1972/1973
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (%)
1966	0,7	
1967	9,0	+ 1.185,7
1968	33,2	+ 268,9
1969/1970	65,8	+ 98,2
1970/1971	99,2	+ 50,7
1971/1972	126,3 *)	+ 27,3
1972/1973	241,2 *)	+ 91,0

Sumber: Departemen Keuangan.

*) Perkiraan APBN

4.2.4. Penerimaan non-tax

Penerimaan non-tax terdiri dari penerimaan-penerimaan yang diperoleh departemen-departemen karena memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga

yang diperoleh Pemerintah karena turut mengambil bagian didalam aktivitas dunia usaha. Didalam kelompok yang pertama termasuk berbagai macam denda dan juga retribusi, royalti, hasil lelang, uang N.T.R dan sebagainya. Didalam kelompok yang kedua termasuk bagian Pemerintah dari laba perusahaan-perusahaan negara, termasuk bank-bank Pemerintah, laba yang dimaksud disini adalah laba sesudah dipotong dengan pajak perseroan.

Penertiban serta perbaikan administratif yang dilakukan oleh departemen-departemen diperkirakan akan berpengaruh positif kepada penerimaan non-tax.

Tabel IV.5.

PERKEMBANGAN PENERIMAAN NON-TAX, 1966 - 1972/1973
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (%)
1966	0,8	
1967	1,3	+ 62,5
1968	4,7	+ 261,5
1969/1970	3,2	- 31,9
1970/1971	961)	+ 200,0
1971/1972	4,2 2)	- 56,2
1972/1973	8,82)	+ 109,5

Sumber : Departemen Keuangan.

- 1). Tidak termasuk pembukuan kembali uang UUDP 1969/1970 yang SPD-nya diterima KBN/KPBN sesudah berakhirnya tahun anggaran 1969/1970 sebesar Rp. 3,5 miliar.
- 2). Perkiraan APBN.

Untuk tahun anggaran 1972/1973 penerimaan non-tax diperkirakan berjumlah sebesar Rp.8,8 miliar. Didalam perkiraan ini belum diperhitungkan pembukuan kembali jumlah UUDP 1971/1972 yang SPD-nya belum diterima KBN/KPBN pada akhir tahun anggaran 1971/1972. Jumlah ini baru diketahui bila tahun anggaran 1971/1972 telah berakhir.

4. 3. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan berasal daripada bantuan luar negeri yang diterima dari berbagai negara seperti antara lain Australia, Jepang, Negeri Belanda, Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, Kanada dan Perancis.

Berhubung dengan ketentuan mengenai penjualan devisa semenjak tanggal. 23

Agustus 1971, maka nilai-lawan daripada devisa kredit dari negaranegara tersebut berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian penerimaan dari sumber devisa kredit tidak diperoleh sepenuhnya atas dasar kurs Rp.415,0 per US \$.

Untuk tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan dapat diterima bantuan luar negen sebesar US \$ 670,0 juta, terdiri dari US \$ 320,0 juta bantuan program dan US \$ 350,0 juta bantuan proyek.

4.3 1. Bantuan Program

Bantuan program pada umumnya terdiri dari bantuan-bantuan yang berupa devisa kredit, barang-barang modal, pupuk, beras, tepung terigu, kapas kasar dan benang tenun.

Dalam hal devisa kredit dan barang-barang modal, penerimaan pembangunan yang diperhitungkan didalam APBN adalah nilai-lawan dalam rupiah daripada bantuan dimaksud. Mengenai bantuan-bantuan lainnya, penerimaan pembangunan yang diperhitungkan didalam APBN adalah selisih daripada hasil jualnya dengan subsidi yang diberikan Pemerintah.

Realisasi jumlah bantuan program 1972/1973 diperkirakan sebesar US \$ 320,0 juta terdiri dari US \$ 210,0 juta yang berupa bantuan CVIS& kredit, barang-barang modal, pupuk dan kapas sejumlah US \$ 110,0 juta berupa bahan makanan. Seluruh bantuan program tersebut diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan pembangunan sebesar Rp.95,0 miliar. Jumlah tersebut merupakan dana pembangunan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Berkurangnya penerimaan tersebut dibandingkan dengan penerimaan tahun yang lampau disebabkan karena devisa kredit tidak sepenuhnya diterima atas dasar kurs yang berlaku dan perbedaan dalam jumlah bantuan program.

Perincian selanjutnya dari penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan program ini dijelaskan didalam **Lampiran 1** dari Nota Keuangan ini.

Tabel IV.6.
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN,
 1967 - 1972/1973 1)
 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (%)
1967	24,7	—
1968	35,5	+43,7
1969/1970	65,8	+ 85,4
1970/1971	78,9	+ 19,9
1971/1972	103,1 2)	+ 30,7
1972/1973	95,02)	- 7,8

Sumber : Departemen Keuangan.

1) Diluar bantuan proyek.

2) Perluraan APBN.

4.3.2. Bantuan Proyek

Bantuan proyek adalah bantuan yang langsung diterima dalam bentuk proyek maupun bantuan teknis lainnya. Jadi didalam APBN sebenarnya tidak ada penerimaan dalam bentuk nilai-lawan; yang ada ialah nilai dalam rupiah dari bantuan proyek tersebut. Pencatatan sedemikian itu juga dilakukan pada pengeluaran pembangunan.

Didalam pelaksanaan bantuan proyek ini, harus disediakan pula pembiayaan rupiahnya. Hal ini diperlukan untuk berbagai keperluan seperti biaya pengangkutan dari pelabuhan ketempat (lokasi) daripada proyek itu, biaya buruh yang dipergunakan dan juga biaya pendirian proyek tersebut dilokasinya. Pembiayaan rupiah ini diperoleh dari sumber-sumber penerimaan. dalam negeri. Dari tahun ketahun jumlahnya terus meningkat sesuai dengan perkembangan pelaksanaan bantuan proyek itu sendiri.

Disamping kewajiban-kewajiban untuk keperluan belanja Pemerintah masih ada kewajiban pemberian subsidi kepada pemerintah daerah otonom termasuk bantuan untuk daerah Irian Barat.

Tabel IV.8.
PERKEMBANGAN PENGELUARAN RUTIN, 1966-1972/1973
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (+%)
1966	22,5	
1967	70,0	+211,1
1968	149,7	+ 113,9
1969/1970	216,5	+ 44,4
1970/1971	288,2	+ 33,1
1971/1972	343,3 *)	+ 19,1
1972/197	3437,5 *)	+ 27,4

Sumber :Departemen Keuangan.

*) Perkiraan APBN.

Dalam batas-batas kemampuan penerimaan negara, dalam tahun anggaran 1972/1973 akan diusahakan adanya peningkatan pengeluaran rutin ini. Pengeluaran rutin tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan akan berjumlah Rp. 437,5 miliar. Dibandingkan dengan anggaran tahun 1971/1972, maka jumlah ini berarti + 27,4% diatas perkiraan APBN 1971/1972.

4.4 1. Belanja Pegawai

Dengan asumsi tingkat harga beras dalam tahun 1972/1973 tidak akan mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan tingkatnya dalam tahun anggaran 1971/1972, maka diperkirakan pengeluaran bagi tunjangan beras untuk tahun anggaran 1972/1973 tidak akan mengalami perubahan yang berarti pula.

Pengeluaran untuk gaji/upah/pensiun diperkirakan akan meningkat, disebabkan oleh rencana Pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri dan ABRI dengan tunjangan yang besarnya adalah 100,0% daripada gaji pokok.

Pengeluaran untuk belanja lauk pauk perlu dinaikkan antara lain untuk biaya makan pasien rumah-rumah sakit, nara pidana dan sebagainya.

Lain-lain pengeluaran untuk belanja pegawai dalam negeri diperkirakan dalam jumlah keseluruhan tidak begitu meningkat.

Pengeluaran untuk belanja pegawai luar negeri untuk tahun anggaran 1972/1973 akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan pengeluaran tahun 1971/1972 disebabkan oleh adanya penyesuaian kurs rupiah terhadap valuta asing dan juga sebagai akibat adanya penyesuaian kurs diantara valuta-valuta asing tersebut.

Dengan demikian perincian pengeluaran untuk belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel IV.9.

PERINCIAN BELANJA PEGAWAI, 1972/1973
(dalam miliar rupiah)

	Jumlah
.	
1. Tunjangan beras	33,6
2. Gaji/upah/pensiun	137,4
3. Lain-lain belanja pegawai dalam negeri	20,9
4. Lauk – pauk	15,4
5. Belanja pegawai luar negeri	6,9
Jumlah	214,2

Sumber: Departemen Keuangan.

4.4.2. Belanja Barang

Belanja barang dapat digolongkan dalam beberapa kelompok :

- (a) Belanja barang : Dalam pengeluaran ini termasuk misalnya pembelian inventaris kantor guna mengganti yang sudah tua/rusak dan tak dapat dipergunakan lagi; ongkos kantor pada umumnya, misalnya untuk pembelian alat-alat tulis, barang-barang cetak, biaya langganan listrik, air, telpon dan sebagainya; biaya pendidikan dinas; belanja barang luar negeri, yaitu untuk biaya kantor dan biaya operasi perwakilan-perwakilan diluar negeri serta biaya keanggotaan Republik Indonesia pada berbagai organisasi internasional.
- (b) Belanja pemeliharaan : Termasuk dalam karegori ini adalah pengeluaran untuk pemeliharaan gedung-gedung kantor, rumah-rumah sakit, rumah dinas, kendaraan bermotor, kapal-kapal laut dan udara, inventaris kantor, jalan-jalan dan jembatan, alat-alat besar, lapangan udara, stasiun-stasiun radio, kebun-kebun, taman-taman, cagar-alam dan sebagainya.
- (c) Belanja perjalanan dinas : Perjalanan dinas dalam negeri maupun
- (d) perjalanan dinas luar negeri.

(e) Subsidi dan bantuan : Subsidi dan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan dan badan-badan sosial. Subsidi dan bantuan ini berlainan dengan subsidi kepada daerah-daerah otonom.

Seperti telah dijelaskan, selama ini sebenarnya belanja barang belum mendapatkan penyediaan anggaran yang cukup. Dalam tahun anggaran 1972/1973 belanja barang tersebut perlu ditingkatkan dan diperkirakan akan mencapai jumlah Rp. 87,1 miliar.

Dalam tahun anggaran 1972/1973 penyusunan belanja barang (belanja rutin non-belanja pegawai) digabungkan dengan anggaran pembangunan. Hal ini dilakukan guna menjamin keserasian antara kegiatan rutin dengan kegiatan pembangunan.

4.4.3. Subsidi Daerah Otonom

Subsidi kepada daerah otonom adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom untuk membantu meringankan beban pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran rutin-nya. Pada umumnya bantuan ini adalah untuk menutup biaya-biaya yang berhubungan dengan belanja pegawai.

Seluruh pengeluaran untuk subsidi kepada daerah otonom dalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan akan berjumlah Rp. 83,5 miliar. Jumlah ini merupakan 19,1 % dari seluruh anggaran rutin.

4.4.4. Pembayaran Kembali Hutang Beserta Bunganya

Mengingat besarnya hutang-hutang pemerintah yang berasal dari masa sebelum tahun 1966 dan mengingat kemampuan keuangan negara serta kebutuhan yang semakin besar akan dana untuk pembangunan, pemerintah telah berusaha mencapai suatu persetujuan untuk menunda pembayaran kembali hutang-hutang tersebut. Hal ini juga perlu untuk meringankan tekanan pada neraca pembayaran dalam masa pembangunan ini. Atas dasar pertimbangan tersebut telah diadakan persetujuan dengan negara-negara kreditor untuk menunda pembayaran hutang-hutang sebelum tahun 1966 selama jangka waktu 30 tahun.

Sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, dalam tahun anggaran 1972/1973 pemerintah perlu menjedikan anggaran untuk pembayaran kembali hutang luar negeri beserta bunganya yang diperkirakan akan berjumlah Rp. 38,7 miliar.

Mengenai hutang-hutang dalam negeri, sebagian merupakan hutang pemerintah kepada perusahaan-perusahaan negara dan sebagian kepada pihak ketiga. Dalam tahun

anggaran 1972/1973 pembayaran kembali hutang-hutang dalam negeri diperkirakan akan berjumlah Rp. 9,0 miliar.

Dengan demikian jumlah seluruh pembayaran kembali hutang-hutang beserta bunganya dalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan berjumlah Rp. 47,7 miliar.

4.4.5. Lain-Lain Pengeluaran Rutin

Disamping pengeluaran-pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom dan pembayaran kembali hutang-hutang beserta bunganya, masih perlu disediakan dalam anggaran tahun 1972/1973 sejumlah Rp. 5,0 miliar. Jumlah ini antara lain diperlukan untuk menamrung pengeluaran-pengeluaran dari tahun anggaran yang lalu. Dalam tahun anggaran 1971/1972 jumlah lain-lain pengeluaran rutin ini adalah Rp. 6,2 miliar.

4.5. Tabungan Pemerintah

Dengan perkiraan penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 573,6 miliar dan perkiraan pengeluaran rutin sebesar Rp. 437,5 miliar, tabungan pemerintah dalam tahun anggaran 1972/1973 dapat mencapai jumlah sebesar Rp. 136,1 miliar.

Dalam tahun anggaran 1972/1973 barulah untuk pertama kalinya tabungan pemerintah melampaui penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan program. Hal ini berarti suatu kemajuan didalam usaha untuk menjadikan tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan utama didalam pelaksanaan pembangunan. Jumlah sebesar Rp. 136,1 miliar (termasuk IPEDA sebesar Rp. 12,0 miliar) inipun telah jauh melampaui perkiraan tabungan pemerintah dalam tahun terakhir dari REPELITA I (lihat Tabel IV.12). Dibandingkan dengan tabungan pemerintah tahun anggaran 1971/1972, ini berarti suatu kenaikan sebesar + 70,9% (tanpa IPEDA).

Tabel IV.10.
PERKEMBANGAN TABUNGAN PEMERINTAH,
1969/1970 - 1972/1973
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (+ %)
1969/1970	27,2	
1970/1971	56,4.	+ 107,3
1971/1972	72,6*)	+ 28,7(124,1)**)
1972/1973	136,1 *)	+ 87,5 (+ 70,9)**)

Sumber : Departemen Keuangan.

*) Perkiraan A.P.B.N.

***) Tanpa IPEDA.

4.6. Pengeluaran Pembangunan

Dalam tahun anggaran 1972/1973 pengeluaran pembangunan direncanakan sebesar Rp.231,1 miliar (tidak termasuk bantuan proyek yang diperkirakan sebesar Rp. 83,0 miliar). Jumlah ini berarti peningkatan sebesar + 31,5% diatas jumlah yang direncanakan dalam anggaran pembangunan tahun 1971/1972.

Tabel IV.11.

PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 1969/1970 - 1972/19731)
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Jumlah	Kenaikan (+ %)
1969/1970	92,8	
1970/1971	128,2	+ 38,1
1971/1972	175,72)	+ 37,1
1972/1973	231,12)	+ 31,5

Sumber : Departemen Keuangan.

1) Diluar bantuan proyek

2) Perkiraan APBN.

Pengeluaran pembangunan dengan jumlah sebesar Rp. 231,1 miliar tersebut akan diarahkan kepada :

- (a) Peningkatan produksi bahan pangan (antara lain BIMAS, irigasi, transmigrasi dan koperasi).
- (b) peningkatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana (antara lain jalan, perhubungan laut, perhubungan udara, pas dan telekomunikasi, listrik dan kereta api).
- (c) Perluasan lapangan kerja (antara lain bantuan kabupaten, bantuan desa dan usaha-usaha padat-karya),
- (d) Peningkatan pembangunan sosial (antara lain dibidang pendidikan dengan rencana pembentukan SMA pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah kejuruan, keluarga berencana, usaha-usaha preventif dibidang kesehatan, pemberantasan penyakit menular, rehabilitasi rumah-rumah sakit dan usaha peningkatan pendidikan di pesantren menjurus kepada partisipasi dalam usaha pembangunan).

Mengenai bantuan desa dapat dijelaskan bahwa didalam tahun anggaran 1972/1973 jumlahnya menjadi Rp. 5,7 miliar. Berhubung dengan hasil-hasil nyata yang diperoleh maka bantuan kabupaten yang dalam tahun anggaran 1971/1972 disediakan Rp, 75,0 per kapita, didalam tahun anggaran 1972/1973 ditingkatkan jumlahnya menjadi Rp. 100,0 per kapita, Dengan demikian maka dalam tahun anggaran 1972/1973 jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 12,8 miliar.

Untuk daerah Irian Barat dan sumbangan pembangunan untuk DATI-I masing-masing disediakan Rp. 3,5 miliar dan Rp. 20,8 miliar.

Dalam pada itu, mulai dengan tahun anggaran 1972/1973 pembangunan daerah dengan IPEDA kembali dimasukkan kedalam anggaran pembangunan setelah sejak tahun 1968 berada diluar APBN. Jumlah didalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan sebesar Rp. 12,0 miliar.

Dengan demikian seluruh jumlah dana yang tersedia bagi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- bantuan desa	Rp. 5,7 miliar
- bantuan kabupaten	Rp. 12,8 miliar
- Irian Barat	Rp. 3,5 miliar
- Sumbangan pembangunan DARI - I	Rp. 20,8 miliar
- IPEDA	Rp. 12,0 miliar
Jumlah	Rp. 54,8 miliar

Jumlah ini merupakan 23,7% atau hampir seperempat daripada seluruh jumlah pengeluaran pembangunan 1972/1973 (diluar bantuan proyek).

Perlu diketahui bahwa sebenarnya proyek-proyek pembangunan lainnya pada hakekatnya dilaksanakan didaerah-daerah. Kegiatan pembangunan seperti; irigasi, pertanian, pembuatan jalan dan lain-lain prasarana dilakukan sepenuhnya didaerah.

Didalam menyusun rencana pembiayaan pembangunan tahun anggaran 1972/1973 telah ditentukan pula prioritas pembiayaannya. Hal ini perlu untuk menjaga keserasian perkembangan diantara proyek-proyek pembangunan tersebut dan juga untuk memperoleh efisiensi semaksimal mungkin dari dana pembangunan yang tersedia. Urutan prioritas yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- (I) Kebutuhan pembiayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek lanjutan dari tahun anggaran 1971/1972.
- (II) Kebutuhan pembiayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang menurut rencana harus selesai dalam tahun 1972/1973.
- (III) Kebutuhan pembiayaan untuk menyelesaikan proyek lanjutan lainnya yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran 1972/1973.
- (IV) Kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan proyek-proyek dalam rangka bantuan proyek bantuan teknis.
- (V) Kebutuhan pembiayaan untuk proyek-proyek yang menunjang proyek-proyek tersebut

diatas.

Jumlah pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 231,1 miliar tersebut dapat diperinci menurut bidang-bidangnya :

I. Bidang ekonomi	:	Rp. 184,9 miliar
II. Bidang sosial	:	Rp. 32,0 miliar
III. Bidang umum	:	Rp. 14,2 miliar
Jumlah	:	Rp. 231,1 miliar

Perincian selanjutnya adalah didalam sektor-sektor, tiap sektor dibagi lagi dalam berbagai sub-sektor, tiap sub-sektor diperinci lagi didalam program-program dan setiap program didalam proyek-proyek.

Perlu kiranya dikemukakan disini bahwa berbeda dengan penyusunan APBN tahun anggaran yang lalu, dalam tahun anggaran 1972/1973 penyusunan anggaran pembangunan digabungkan dengan belanja barang (belanja rutin non-belanja pegawai). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinkronisasi antara kegiatan rutin dengan kegiatan pembangunan. Dengan demikian diharapkan akan dapat dicapai keseimbangan yang lebih serasi antara kebutuhan rutin dan kebutuhan pembangunan.

4.6.1. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi dibagi dalam enam sektor :

1. Sektor pertanian dan irigasi	Rp 39,6 miliar
2. Sektor industri dan pertambangan	Rp 4,7 miliar
3. Sektor tenaga listrik	Rp 16,2 miliar
4. Sektor perhubungan dan pariwisata	Rp 44,0 miliar
5. Sektor pembangunan daerah dan desa	Rp 55,7 miliar
6. Sektor penyertaan modal pemerintah	Rp 24,7 miliar
Jumlah	Rp184,9 miliar

4.6.2. Bidang Sosial

Bidang sosial dibagi dalam tujuh sektor :

Sektor agama	: Rp. 0,8 miliar
Sektor pendidikan dan kebudayaan	: Rp. 16,2 miliar
Sektor tenaga kerja dan penduduk	: Rp. 0,3 miliar
Sektor kesehatan dan keluarga berencana	: Rp. 7,3 miliar
Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	: Rp. 4,4 miliar
Sektor penerangan	: Rp. 1,2 miliar
Sektor tertib hukum	: Rp. 1,8 miliar
Jumlah	: <u>Rp. 32,0 miliar</u>

4.6.3. Bidang Umum

Bidang Umum dibagi dalam empat sektor :

1. Sektor pemerintahan Umum	Rp 5,0 miliar
2. Sektor pertahanan dan keamanan	Rp 6,0 miliar
3. Sektor badan-badan perwakilan	Rp 0,7 miliar
4. Sektor pengurusan keuangan negara	<u>Rp 2,5 miliar</u>
Jumlah:	Rp. 14,2 miliar

Perincian lebih lanjut dari sektor-sektor tersebut terdapat didalam Lampiran 3 dari Nota Keuangan ini.

4.6.4. Bantuan Proyek

Seperti telah dijelaskan dalam sub bagian 4.3.2., besarnya bantuan proyek diperkirakan berjumlah US \$ 200,0 juta; atau Rp. 83,0 miliar.

Realisasi bantuan proyek Pada umumnya memerlukan waktu yang lama, meskipun sudah diberikan commitment. Sebelum suatu proyek dilaksanakan diperlukan penelitian, *survey*, *feasibility study* dan lain-lain persyaratan *administratif-terms* yang memerlukan waktu.

Didalam Lampiran 4 dari Nota Keuangan ini diperinci lebih lanjut bantuan proyek yang termasuk didalam tahun anggaran 1972/1973.

4.7. Perbandingan RAPBN 1972/1973 dengan REPELITA I

Perbandingan RAPBN 1972/1973 dengan REPELITA I dapat dilihat pada **Tabel IV.12**. Dari tabel tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- (1) Perkiraan penerimaan dalam negeri 1972/1973 telah jauh melampaui perkiraan tahun keempat REPELITA I bahkan telah melampaui perkiraan tahun terakhir REPELITA I. Perkiraan penerimaan dalam negeri 1972/1973 adalah Rp. 145,6 miliar lebih besar daripada perkiraan tahun terakhir REPELITA I. Bila tidak diperhitungkan penerimaan IPEDA sebesar Rp. 12,0 miliar, maka perkiraan penerimaan dalam negeri 1972/1973 menjadi sebesar Rp. 561,6 miliar. Jumlah inipun sudah melampaui perkiraan tahun terakhir REPELITA I dengan kelebihan sebesar Rp. 133,6 miliar.
- (2) Perkiraan pengeluaran rutin 1972/1973 juga melampaui, perkiraan tahun terakhir REPELITA I dengan kelebihan sebesar Rp 80,5 miliar. Dibandingkan tahun keempat REPELITA I, maka jumlah ini dilampaui dengan Rp. 118,5 miliar.
- (3) Pengeluaran pembangunan (diluar bantuan proyek) yang didayakan tahun anggaran 1972/1973 berjumlah Rp. 231,1 miliar melampaui perkiraan tahun terakhir REPELITA I dengan kelebihan sebesar Rp. 75,1 miliar atau dengan Rp. 91,1 miliar bila dibandingkan tahun keempat REPELITA I. Bila sumbangan pembangunan DATI I sebesar Rp.20,8 miliar tidak diperhitungkan, pengeluaran pembangunan 1972/1973 tersebut . juga masih jauh melampaui perkiraan tahun terakhir REPELITA I yaitu masih lebih besar sejumlah Rp. 54,3 miliar.
- (4) Perkiraan realisasi bantuan proyek dalam tahun anggaran 1972/1973 berada dibawah perkiraan REPELITA I. Seperti diketahui, realisasi pelaksanaan bantuan proyek ternyata memerlukan jangka waktu yang lama.
- (5) Perkiraan penerimaan pembangunan (nilai-lawan bantuan program) tahun anggaran 1972/1973 juga melampaui perkiraan REPELITA I untuk tahun ketiga, keempat dan kelima.
- (6) Akhirnya perkiraan tabungan Pemerintah dalam tahun anggaran 1972/ 1973 telah melampaui perkiraan tahun terakhir REPELITA I dengan kelebihan sebesar Rp. 65,1 miliar (bila penerimaan IPEDA diperhitungkan) atau kelebihan sebesar Rp. 53,1 miliar (bila penerimaan IPEDA tidak diperhitungkan). Kelebihan ini berjumlah Rp.69,1 miliar bila dibandingkan tahun keempat REPELITA I (tanpa IPEDA).

Tabel IV.12.
PERBANDINGAN R.A.P.B.N. 1972/1973 DENGAN REPELITA I
(dalam miliar rupiah)

	1969/1970		1970/1971		1971/1972		1972/1973		1973/1974
	REPELITA	Realisasi A.P.B.N	REPELITA	Realisasi A.P.B.N	REPELITA	Perkiraan A.P.B.N	REPELITA	Perkiraan A.P.B.N	REPELITA
		.		.		.		.	
1. Penerimaan dalam negeri	228,0	243,7	276,0	344,6	324,0	415,9	374,0	573,6	428,0
2. Pengeluaran rutin	204,0	216,5	143,0	288,2	281,0	343,3	319,0	437,5	357,0
3. Pengeluaran pembangunan	123,0	118,1	153,0	169,8	223,0	241,8	264,0	314,1	296,0
(pembiayaan rupiah)	(87,0)	(92,8)	(108,0)	128,2)	(128,0)	(175,7)	(140,0)	(231,0)	(156,0)
(Bantuan proyek)	(36,0)	(25,3)	(45,0)	(41,6)	(95,0)	(66,1)	(124,0)	(83,0)	(140,0)
4. Nilai-lawan bantuan program	63,0	65,8	75,0	78,9	85,0	103,1	85,0	95,0	85,0
5. Tabungan Pemerintah	24,0	27,2	33,0	56,4	43,0	72,6	55,0	136,1	71,0

Sumber: Departemen Keuangan.

BAB V

PERKEMBANGAN MONETER DAN PERKREDITAN 1971/1972

5.1. Perkembangan Jumlah Uang Beredar dan Sebab-Sebab Perubahannya

Perkembangan jumlah uang beredar merupakan juga salah satu indikator dari maju mundurnya suatu perekonomian. Semakin banyak kegiatan perekonomian biasanya dibutuhkan pula jumlah uang yang beredar yang semakin meningkat, terutama sekali didalam periode pembangunan yang sedang berjalan ini. Tetapi dilain pihak Pemerintah sesuai dengan politik pembangunan yang dianutnya, benisaha agar pertarnbahan jumlah uang yang beredar itu tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang telah dicapai.

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam sektor moneter selama ini diusahakan agar tidak mengganggu tingkat kestabilan ekonomi yang telah dicapai. Keadaan ini tercermin apabila dibandingkan antara tingkat pertambahan jumlah uang yang beredar dan tingkat kenaikan harga selama beberapa tahun. Pada tahun 1966 tingkat kenaikan harga sebesar + 650% sedang tingkat pertambahan jumlah uang beredar adalah + 764%. Pada tahun 1967 tingkat kenaikan harga sebesar + 120% dan tingkat pertambahan jumlah uang beredar adalah + 131%. Tahun 1968 tingkat kenaikan harga + 85%, tingkat pertambahan jumlah uang beredar + 121%. Tahun 1969/1970 tingkat kenaikan harga + 10,6% dan tingkat pertambahan jumlah uang beredar + 61%. Tahun 1970/1971 tingkat kenaikan harga + 7,8% sedang tingkat pertambahan jumlah uang beredar + 28%. Kemudian pada tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 tingkat kenaikan harga adalah - 5,6% sedangkan tingkat pertambahan jumlah uang beredar adalah + 9,8%. Berdasarkan keadaan itu jelaslah bahwa kenaikan dalam jumlah uang yang beredar meskipun memungkinkan terus tidaklah begitu mempengaruhi tingkat kestabilan ekonomi yang tdah dicapai.

Selama tahun anggaran 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 jumlah uang beredar telah bertambah dengan + Rp. 26,6 miliar atau + 9,8% (lihat **Tabel V.1.**). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 1970/1971 yang lalu maka untuk tahun ini, kenaikan jumlah uang beredar adalah Rp.9,6 miliar lebih besar atau 1,7% lebih besar dari kenaikan pada tahun lalu. Dilihat menurut jenis uang, maka dari kenaikan jumlah uang beredar sebesar + Rp. 26,6 miliar (+ 9,8%) sebesar + Rp. 18,6 miliar (+ 11,1%) berasal dan kenaikan uang kartal dan sebesar + Rp. 8,0 miliar (+ 7,7%) berasal dari kenaikan uang giral. Dibandingkan dengan penode yang sama pada

tahun yang lalu maka kenaikan uang kartal memperlihatkan sedikit penurunan. Sebaliknya pertambahan uang giral menunjukkan kenaikan yang menggembirakan. Keadaan ini berarti bahwa masyarakat sudah mulai lebih banyak mempergunakan uang giral dalam pelbagai aktivitas perekonomiannya sehingga dengan demikian proses pembangunan akan menjadi lebih dinamis. Sehubungan dengan ini Pemerintah telah mengambil pelbagai langkah yang positif antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971 yaitu pencabutan kembali berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang tjek kosong. Dengan demikian diharapkan penggunaan uang giral sebagai alat pembayaran dalam aktivitas ekonomi menjadi lebih efektif lagi.

Kenaikan jumlah uang beredar sebesar + Rp. 26,6 miliar (+ 9,8%) selama tahun anggaran 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971, sebagian besar terjadi pada tiga bulan pertama yaitu untuk bulan-bulan April, Mei dan Juni 1971 dengan jumlah kenaikan sebesar + Rp. 18,9 miliar atau + 71,7% dari seluruh kenaikan. Pola ini berbeda dengan pola yang terjadi pada periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu dimana jumlah kenaikan yang terbesar justru terjadi pada empat bulan terakhir yaitu 66,5% dari seluruh kenaikan. Perbedaan pola ini akan menjadi lebih jelas kalau kenaikan tersebut dilihat menurut faktor-faktor penyebab berubahnya jumlah uang beredar, lihat **Tabel V.2.**

Selama tiga bulan pertama dari tahun anggaran 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 kenaikan jumlah uang beredar sebesar + Rp. 18,9 miliar adalah berasal dari perubahan yang terjadi pada sektor Pemerintah sebesar + Rp. 4,0 miliar, sektor kegiatan perusahaan + Rp.25,1 miliar, sektor luar negeri - Rp. 20,9 miliar, kemudian oleh perubahan yang terjadi pada sektor deposito berjangka dan tabungan serta sektor lain-lain masing-masing Rp. 14,6 miliar dan + Rp. 25,3 miliar. Sektor pemerintah pada periode tersebut diatas telah menambah jumlah uang yang beredar dengan + Rp. 4,0 miliar. Peranan sektor pemerintah tidaklah begitu penting dibandingkan dengan peranan kegiatan perusahaan yang pada periode itu telah menambah jumlah uang beredar dengan + Rp. 25,1 miliar. Meningkatnya kegiatan perusahaan sebagai penyebab jumlah uang beredar adalah sebagai refleksi daripada semakin meningkatnya volume perkreditan bank terutama kredit investasi. Dilain pihak sektor luar negeri sebagai pencerminan dari kegiatan perdagangan luar negeri demikian pula dengan sektor tabungan dan deposito sebagai pencerminan dari pengerahan dana, masing-masing pada periode tersebut telah menjedot jumlah uang beredar dengan - Rp. 20,9 miliar dan - Rp. 14,6 miliar.

Secara keseluruhan selama tahun anggaran 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 sektor pemerintah telah menjedot jumlah uang beredar dengan - Rp. 1,6 miliar, sektor kegiatan perusahaan menambah dengan + Rp. 24,0 miliar, sektor lainnya dengan + Rp. 38,4 miliar. Seterusnya sektor luar negeri dan sektor deposito dan tabungan masing-masing telah menyedot jumlah uang beredar dengan - Rp. 18,0 miliar dan - Rp. 16,2 miliar.

Walaupun disini sektor pemerintah menyebabkan berubahnya jumlah uang yang beredar tapi pengaruhnya terhadap kenaikan harga tidaklah begitu berarti. Demikian pula dengan akibat penambahan jumlah uang beredar oleh sektor yang lain. Pola ini sedikit agak berbeda dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 1970/1971 yang lalu dimana perubahan jumlah uang yang beredar pada saat itu masing-masing berasal dari sektor pemerintah sebesar Rp. 24,5 miliar, sektor kegiatan perusahaan dengan + Rp. 71,7 miliar, sektor luar negeri dengan Rp. 9,8 miliar, sektor deposito dan tabungan dengan Rp. 16,3 miliar dan sektor lain-lain dengan Rp. 23,2 miliar.

Pada akhir Oktober 1971 jumlah uang beredar telah mencapai posisi Rp. 296,8 miliar dimana sebesar Rp. 185,4 miliar berupa uang kartal (63%) dan Rp. 111,4 miliar berupa uang giral (37%). Kalau pengaruh kenaikan harga dihilangkan maka dari posisi tersebut diatas secara riil jumlah uang beredar adalah sebesar Rp. 255,9 miliar. Hal ini berarti bahwa selama tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 nilai riil jumlah uang yang beredar telah naik dengan + Rp. 43,2 miliar atau + 20,3% dimana kenaikan ini adalah 9,6% diatas kenaikan pada periode yang sama tahun yang lalu, lihat **Tabel V.3.**

Dalam pada itu nilai riil jumlah uang yang beredar dan deposito selama periode tersebut diatas telah bertambah dengan + Rp. 77,3 miliar atau + 26,9% yaitu dari posisi Rp. 287,4 miliar pada akhir Maret 1971 menjadi Rp. 364,7 miliar pada akhir Oktober 1971. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu maka kenaikan nilai riil jumlah uang beredar dan deposito pada periode ini adalah lebih tinggi dengan 11,6%. Peningkatan nilai riil uang beredar serta deposito ini berarti akan meningkatkan pula daya beli masyarakat yang pada gilirannya tentu akan menaikkan pula nilai riil daripada pendapatan nasional.

5.2. Perkembangan Dana Perkreditan

Perkembangan dana perkreditan bank mempunyai hubungan yang erat sekali dengan operasi kredit dari lembaga-lembaga perbankan. Semakin besar dana yang

dimilikinya berarti semakin besar pula kemampuan bank untuk memberi kredit. Dana perkreditan bank berasal dari masyarakat dan umum nya dalam bentuk giro, deposito dan lain-lain.

Pada akhir Oktober 1971 posisi dana perkreditan bank seluruhnya tidak termasuk Bank Indonesia telah mencapai jumlah Rp. 267,8 miliar atau suatu kenaikan sebesar + Rp. 44,1 miliar (+ 19,7%) jika dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1971. Kenaikan sebesar jumlah tersebut diatas selama tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 adalah + Rp. 5,6 miliar diatas kenaikan pada periode yang sama tahun yang lain. Dari posisi dana sebesar Rp. 267,8 miliar seperti tertera pada **Tabel V.4.** sebesar Rp. 133,1 miliar adalah berwujud giro, kemudian sebesar Rp. 118,6 miliar berwujud deposito dan akhirnya sebesar Rp. 16,1 miliar adalah dana lain-lain. Demikian pula dilihat dari sudut lembaga perbankan maka dari jumlah tersebut sebesar Rp. 197,8 miliar adalah dana bank-bank umum pemerintah dan selebihnya sebesar Rp. 70,0 miliar adalah dana bank-bank umum swasta.

Pada periode yang sama dana giro telah meningkat dengan + Rp. 11,4 miliar (+ 9,4%), dana deposito dengan + Rp. 28,8 miliar (32,1%) dan dana lain-lain dengan + Rp. 3,9 miliar (+ 31,9%). Kenaikan dana giro sejumlah tersebut diatas adalah berasal dari kenaikan dana giro bank-bank umum pemerintah sebesar + Rp. 5,5 miliar dan kenaikan dana giro bank-bank umum swasta sebesar + Rp. 5,9 miliar. Kenaikan dalam dana giro ini sedikit agak lambat, satu dan lain hal disebabkan masyarakat belum begitu banyak menggunakan giro sebagai alat pembayaran disamping bunganya yang relatif kecil dibandingkan dengan bentuk titipan uang yang lain. Walaupun begitu seperti dijelaskan dimuka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971 Pemerintah berusaha agar masyarakat lebih banyak menggunakan giro dalam lalu lintas pembayarannya, dan kelihatannya sudah mulai memperhatikan hasil-hasil yang cukup meyakinkan.

Selanjutnya kenaikan dana deposito sebesar + Rp. 28,8 miliar (+ 32,1%) selama tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 adalah berasal dari kenaikan dana deposito bank-bank umum pemerintah sebesar + Rp. 25,7 miliar dan kenaikan dana deposito bank-bank umum swasta sebesar + Rp. 3,1 miliar. Kenaikan yang begitu besar dalam dana deposito ini, satu dan lain hal disebabkan masih besarnya minat masyarakat terhadap gerakan deposito berjangka, disamping itu juga memperlihatkan bahwa masyarakat sudah lebih mempercayai lembaga perbankan sebagai tempat penitipan uang mereka. Dalam pada itu lembaga perbankan juga semakin lebih giat dalam

mengumpulkan dana melalui gerakan deposito berjangka, Tabanas, Taska dan berbagai usaha lainnya, seperti penggabungan (merger) pada beberapa bank-bank umum swasta. Diharapkan dengan penggabungan ini kedudukan bank-bank umum swasta menjadi lebih kuat sehingga dengan demikian kepercayaan masyarakat menjadi lebih besar.

Akibatnya dana yang dapat mereka himpun juga menjadi lebih banyak. Dalam hal ini untuk mendorong bank-bank umum swasta kearah penggabungan, Pemerintah telah memberikan berbagai keringanan dan kelonggaran perpajakan antara lain, bebas bea meterai, penurunan tarif pajak likwidasi dan sebagainya.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 1970/1971 yang lalu maka kenaikan dana giro seluruhnya pada tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 adalah Rp. 5,7 miliar dibawah kenaikan tahun lalu. Dilain pihak kenaikan dana deposito seluruhnya pada periode ini adalah Rp. 14,5 miliar diatas kenaikan tahun lalu, sebaliknya kenaikan dana lain-lain pada tahun ini berada Rp. 3,2 miliar dibawah tahun lalu. Perkembangan dana perkreditan bank seluruhnya dapat diikuti pada **Tabel V.2.**

5.3. Perkembangan Pengerahan Dana

5.3.1. Deposito Berjangka

Sampai dengan bulan Oktober 1971 gerakan deposito berjangka telah berlangsung selama tiga tahun dan sudah mengalami beberapa kali penurunan suku bunga. Semula gerakan ini dimaksudkan untuk memantapkan stabilisasi dan juga untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Pada tahun anggaran 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 deposito berjangka bank-bank umum pemerintah telah meningkat dengan + Rp. 33,-0 miliar atau suatu kenaikan sekitar 55,3%, yakni dari posisi Rp. 59,7 miliar pada akhir Maret 1971 menjadi posisi Rp. 92,7 miliar pada akhir Oktober 1971. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu maka kenaikan deposito berjangka pada tahun ini adalah 23,7% diatas kenaikan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun suku bunga deposito berjangka relatif sudah menurun namun perhatian masyarakat terhadap gerakan ini cukup besar. Dilain pihak dengan Keputusan Dewan Moneter No.02/Kep/DM/1971 maka fasilitas perpajakan yang telah diberikan kepada deposito berjangka ditinjau kembali dan semenjak 24 Juli 1971 untuk deposito berjangka yang didepositokan sesudah tanggal tersebut dikenakan pajak atas bunga yang diterima oleh pemilik deposito berjangka.

Kenaikan deposito berjangka sebesar + Rp. 33,0 miliar pada tahun 1971/1972

sampai dengan bulan Oktober 1971 sebagian besar berasal dari kenaikan deposito yang berjangka waktu 12 bulan yaitu + Rp. 26,5 miliar atau 80,3% dari seluruh kenaikan, kemudian menyusul kenaikan dari deposito yang berjangka waktu 6 bulan dan 3 bulan masing-masing + Rp. 4,8 miliar dan + Rp. 1,7 miliar. Pada akhir Oktober 1971 deposito yang berjangka waktu 12 bulan mencapai jumlah Rp. 71,5 miliar, deposito yang berjangka waktu 6 bulan sebesar Rp. 11,6 miliar dan Rp. 9,6 miliar untuk deposito yang berjangka waktu 3 bulan. Perkembangan seluruhnya dari deposito berjangka bank-bank umum pemerintah dapat diikuti pada **Tabel V.5**.

Tabel V.1.
PERKEMBANGAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR,
1966 - 1971/1972 (dalam miliar rupiah)

	Waktu	Uang Kartal	%	Uang Giral	%	Jumlah	Mutasi	Kenaikan
1966		14,4	65	7,9	35	22,3	19,6	763,5
1967		34,1	66	17,4	54	51,5	29,2	151,8
1968		74,7	66	39,2	34	113,9	62,4	121,3
1969/1970	Juni	88,6	61	57,8	39	146,4	32,5	2,5
	September	101,9	60	67,6	40	169,5	23,1	15,8
	Desember	114,2	63	65,7	37	179,9	10,4	6,1
	Maret	126,3	60	84,4	40	210,7	50,8	17,1
	Kumulatif	-	-	-	-	-	96,8	85
1970/1971	Juni	131,7	61	84,7	39	216,4	5,7	2,7
	September	135,9	60	91	40	226,9	10,5	4,9
	Oktober	140,2	62	87,5	38	227,7	0,8	0,4
	Desember	152,8	63	88,3	37	241,1	13,4	5,9
	Maret	166,8	62	105,4	38	270,2	29,1	12,1
	Kumulatif	-	-	-	-	-	59,5	28,2
1971/1972	April	169,5	62	105,7	58	275,2	5	11
	Mei	171,1	61	107,9	59	279,1	5,9	2,2
	Juni	178,5	62	110,6	38	289,1	10	5,6
	Juli *)	180,5	62	111,8	58	292,1	5	1
	Agustus *)	181,4	62	109,1	58	290,5	-1,6	-0,5
	September)	182,1	62	109,9	58	292	+ 1,5	0,5
	Oktober *)	185,4	65	111,4	57	296,8	4,8	1,6

Sumber: Bank Indonesia.

*) Angka. sementara.

Tabel V.2.

SEBAB-SEBAB PERUBAHAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR, 1969/1970 - 1971/1972
(dalam miliar rupiah)

Akhir Periode	Pemerintah	Kegiatan		Luar		Deposito		Lainnya	Mutasi
		Perusahaan		Negeri		Berjangka dan Tabungan			
1969/1970	Juni	-6,5	44	+	44,1	-	26,2	-	32,5
	September	-16,4	42,1	-	11	-	7,6	+	23,1
	Desember	12,2	31,7	-	29,2	-	3,9	-	10,4
	Maret	7,6	+	47,7	+	14,3	-	33,5	+
	Kumulatip	-3,1	+	165,5	+	18,2	-	40,8	+
1970/1971	Juni	-19,1	+	29,6	+	12,8	6	-	5,7
	September	-10,7	+	47,1	-	3,0	-	15,8	+
	Oktober	5,3	-	5,6	+	0,0	-	4,2	+
	Desember	8,2	+	19,1		0,5	-	4,6	+
	Maret	-2,6	+	38,2	+	7,6	-	0,7	+
	Kumulatip	-18,9	+	128,4	+	16,9	-	27,1	+
1971/1972	April	18,6	-	3,8	-	27,2	-	18,3	+
	Mei	5,8	+	6,5	+	1,8	-	1,3	+
	Juni *)	-20,4	+	22,4	+	4,5	-	8,3	+
	Juli *)	2,9	+	2,7	+	4	-	3	+
	Agustus *)	7,9	-	2,3	+	1	+	9,2	-
	September *)	-16,5	+	0,1	+	1	+	15,6	+
	Oktober *)	0,1	-	1,6		3,1	-	9,7	+

Sumber : Bank Indonesia.
sementara .

Tabel V.3.

PERKEMBANGAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR DAN DEPOSITO DALAM ARTI RIIL
1969/1970 - 1971/1972
(dalam miliar rupiah)

Akhir Periode	Indeks 62 Macam barang di Jakarta Juni 69 = 100	Jumlah		Nominal Dang beredar dan uang kuasi	Riil Uang beredar dan uang kuasi	Riil Uang Yang beredar
		Uang yang beredar	Uang kuasi			
1969/1970	Juni	100	146,4	38,2	184,6	146,4
	September	104,6	169,5	45,8	215,3	162
	Desember	110,3	179,9	49,7	229,6	163,1
	Maret	117,8	210,7	55	265,7	178,8
1970/1971	Juni	117,2	216,4	61	277,4	184,6
	September	115,1	226,9	68,1	295	197,1
	Oktober	115	227,7	71,2	298,9	198
	Desember	120	241,1	80,1	321,2	200,9
	Maret	127	270,2	94,9	365,1	212,7
1971/1972	Juni	119,9	289,1	109,5	398,6	241,1
	Juli *)	120	292,1	113,2	405,3	243,4
	Agustus *)	118,9	290,5	120	410,5	244,3
	September *)	118,6	292	124,5	416,5	246,2
	Oktober *)	116	296,8	126,3	423,1	255,9

Sumber : Bank Indonesia, diolah kembali oleh Departemen Keuangan R.I.

*) Angka-angka sementara kecuali indeks 62 mat jam barang.

Tabel V.5.
PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA BANK-BANK PEMERINTAH
DAN TABUNGAN BERHADIAH 1969, 1969/1970 - 1971/1972

	1969 / 1970				1970/1971					1971/1972				
	Jun	Sept.	Des.	Maret	Jun	Sept.	Okt.	Des.	Maret	Jun	Juli	Agust*)	Sept.*)	Okt. *)
Deposito berjangka:														
Bank-2 Pemerintah														
(miliar rupiab)	24,5	29,8	33,6	34,8	36,5	40,7	45,8	50,4	59,7	73,7	78,8	85,8	90,3	92,7
12 bulan	17,6	22,1	25,1	29,5	30,3	33,1	34,3	38,3	45,0	53,5	57,4	65,6	70,3	71,5
6 bulan	5,3	6,1	6,7	3,6	3,8	4	6,7	6,8	6,8	8,6	9,1	9,2	10,1	11,6
3 bulan	1,6	1,6	1,8	1,7	2,4	3,6	4,8	5,3	7,9	11,6	12,3	11	9,9	9,6
Tabungan berhadiah 1969														
(dalam jutaan rupiah)	74,8	222,6	371,1	853,6	979,2	1.084,20	1.137,80	1.252,10	1.441,00	1.497,20	1.535,70	1.600,00	1.650,-	1.700,00
12 bulan	55,2	173,5	294,1	684,9	873,2	952,8	1.002,90	1.136,90	1.292,20	1.377,70	1.427,90	1.480,00	1.520,-	1.550,-
6 bulan	16,2	33,7	45,6	78	87,6	82,9	89	92,7	120,3	104,9	93,4	100	110	120
3 bulan	3,4	15,4	31,4	90,7	18,4	48,5	45,9	22,5	28,5	14,6	14,4	20	20	30

Sumber : Bank Indonesia

*) Angka-angka sementara.

Tabel V.4.
PERKEMBANGAN DANA PERKREDITAN BANK, 1968 - 1971/1972

(dalam miliar rupiah)															
	1968			1969/1970		1970/1971				1971/1972					
	Des.	Jun	Sept.	Des.	Maret	Jun	Sept.	Okt.	Des.	Maret	Jun	Juli	Agust.	Sept *)	Okt. *)
I. Rank-bank Pemerintah	34,7	68,9	85,5	89,7	105,9	112,6	132,3	138,6	141,9	165,1	179,9	187,3	195,4	194,7	197,8
Gir o	29,1	42,7	52,1	54,1	69,2	72	82,3	83,8	79,6	94,6	95,3	95,9	98,5	99,4	100,1
Deposito	4,7	24,5	29,9	33,5	34	37,1	40,3	45,7	50,1	60,9	74,8	80,8	85,7	84,7	86,6
Lain-lain	0,9	1,7	3,5	2,1	2,7	3,5	9,7	9,1	12,2	9,6	9,8	10,6	11,2	10,6	11,1
II. Bank-bank Swasta	14,2	21,2	23	27,1	30,5	31,1	33,3	34,9	34,3	42,3	41,1	43,8	49,4	68,8	70
Gir o	7,8	8,9	8,8	13,7	15,1	15,1	15,9	17,4	16,6	18,7	18,9	20,6	21	32,5	33
Deposito	6	11,8	13,6	13	14,8	15,5	16,2	16,4	16,3	21,4	18,8	19,6	18	31,5	32
Lain-lain	0,4	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	1,2	1,1	1,4	2,2	3,4	3,6	3,4	4,8	5
III. Cabang Rank-bank															
Asing	1,9	3,8	5,6	6,2	9,2	8,5	10,7	10,6	13,6	16,3	18,4	20,5	21,3	-	-
Giro	1,5	2,5	3,5	4,2	6,5	5,6	6,9	6,7	8,8	8,4	9,8	9,6	9,9	-	-
Deposito	0,4	1,3	2,1	2	2,7	2,9	3,8	3,7	4,6	7,5	7,9	10,3	10,6	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,4	0,7	0,6	0,8	-	-
Sub. Total II + III	16,1	25	28,6	33,3	39,7	39,6	44	45,5	47,9	58,6	59,5	64,3	63,7	68,8	70
Giro	9,3	11,4	12,3	17,9	21,6	20,7	22,8	24,1	25,4	27,1	28,7	30,2	30,9	32,5	33
Deposito	6,4	13,1	15,7	15	17,5	18,4	20	20,1	20,9	28,9	26,7	29,9	28,6	31,5	32
Lain-lain	0,4	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	1,2	1,3	1,6	2,6	4,1	4,2	4,2	4,8	5
Jumlah besar	50,8	93,9	114,1	123	145,6	152,2	176,3	184,1	189,8	223,7	239,4	251,6	259,1	263,5	267,8
Giro	38,4	54,1	64,4	72	90,8	92,7	105,1	107,9	105	121,7	124	126,1	129,4	131,9	133,1
Deposito	11,1	37,6	45,6	48,5	51,5	55,5	60,3	65,8	71	89,8	101,5	110,7	114,3	116,2	118,6
Lain-lain	1,3	2,2	4,1	2,5	3,3	4	10,9	10,4	13,8	12,2	13,9	14,8	15,4	15,4	16,1

Sumber : Bank Indonesia.

*) Angka-angka sementara.

5.2.2. Tabungan Berhadiah 1969

Pembangunan yang sedang berjalan membutuhkan dana-dana sebagai sumber pembiayaan. Sebagian dari dana tersebut berasal dari pemerintah dalam bentuk tabungan pemerintah (*public saving*), dan sebagian lagi dari masyarakat (*personal saving ataupun corporate saving*). Peranan lembaga perbankan dalam penggerakan dana ini sangatlah berani sehingga mulai 1 Pebruari 1969 disamping deposito berjangka dimulailah gerakan tabungan berhadiah 1969 yang diikuti oleh bank-bank umum pemerintah dan bank-bank umum swasta yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Pada akhir Oktober 1971 tabungan berhadiah 1969 mencapai jumlah Rp. 1.700,0 juta berarti selama tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 jumlah ini telah meningkat dengan + Rp. 259,0 juta atau + 18,0%. Dibandingkan dengan periode yang

sama pada tahun 1970/1971 maka kenaikan tabungan berhadiah pada tahun ini adalah sedikit lebih kecil daripada tahun yang lalu, walaupun begitu jumlahnya secara keseluruhan selalu memperlihatkan kenaikan, lihat **Tabel V.5**. Keadaan ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat masih cukup tertarik terhadap gerakan ini meskipun suku bunganya sudah diturunkan berkali-kali. Suku bunga yang berlaku dewasa ini adalah 11,4% sebulan untuk tabungan berhadiah dengan jangka waktu 3 bulan, 1 % sebulan untuk tabungan berhadiah yang berjangka waktu 6 bulan dan 21,4% sebulan untuk tabungan berhadiah yang berjangka waktu 12 bulan. Dari posisi tabungan berhadiah sebesar Rp. 1.700,0 juta pada akhir Oktober 1971, sebesar Rp.1.550,0 juta berwujud tabungan berhadiah 12 bulan, kemudian sebesar Rp. 120,0 juta untuk tabungan berhadiah 6 bulan dan akhirnya sebesar Rp. 30,0 juta untuk yang berjangka waktu 3 bulan.

5.3.3. Tabungan Pembangunan Nasional dan Tabungan Asuransi Berjangka

Pelaksanaan Repelita sudah memasuki tahun ketiga dan dalam suasana pembangunan yang semakin meningkat ini sudah tentu dibutuhkan pembiayaan yang semakin meningkat pula. Dalam pada itu Pemerintah sudah menjalankan berbagai usaha, namun disadari pula bahwa masih banyak dana yang terdapat dalam masyarakat yang masih belum dimanfaatkan untuk pembangunan. Untuk itu diperkenalkan pula dua jenis bentuk baru dari tabungan, yaitu Tabungan Pembangunan Nasional disingkat dengan "TABANAS" dan Tabungan Asuransi Berjangka yang disingkat dengan "TASKA". Diharapkan dengan bentuk tabungan baru ini seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam mensukseskan pembangunan.

Tabanas diselenggarakan oleh bank-bank umum pemerintah serta bankbank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berdasarkan syarat-syarat tertentu, sedangkan pada Taska disamping diselenggarakan oleh lembaga perbankan yang telah tertentu, mengingat sifatnya juga sebagai asuransi maka lembaga-lembaga asuransipun diikutsertakan. Suku bunga Tabanas adalah 18% setahun untuk tahun 1971, sedangkan sebagai perangsang kepada penabung akan disediakan hadiah, disamping beberapa fasilitas perpajakan dan tabungan dapat pula dipakai sebagai dijaminkan untuk kredit bank. Taska karena pada prinsipnya dikaitkan dengan asuransi jiwa, kepada penabung diberikan pula perangsang berwujud premi dan dijaminkan terhadap jumlah tabungannya.

Semenjak dimulainya gerakan Tabanas dan Taska ini pada tanggal 20 Agustus 1971 hingga saat ini memperlihatkan perkembangan yang meyakinkan. Tabanas sampai

dengan 13 Oktober 1971 telah mencapai jumlah Rp. 1.334,6 juta sedangkan Taska pada saat yang sama telah mencapai jumlah Rp. 6,3 juta, masing-masing untuk 218.226 penabung dan 5.547 penabung.

5.3.4. Sertifikat Bank

Dalam rangka merintis kearah tertijptanya pasar uang dan modal yang merupakan salah satu perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengumpulan dana, Bank Indonesia sejak 1 April 1970 telah mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia yang didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-116/MKIIIV/3/1970 tanggal 12 Maret 1970 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 2134/Kep.Dir. tanggal 12 Maret 1970. Untuk mendorong masyarakat agar membeli sertifikat Bank Indonesia, Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas antara lain bebas pajak pendapatan bebas pajak kekayaan dan sebagainya.

Sertifikat Bank Indonesia ini sejenis surat berharga jangka pendek dengan jangka waktu 90 hari dan juga dapat digunakan sebagai dijaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Semenjak dikeluarkannya surat berharga ini sampai dengan bulan Desember 1970 sudah terjual sejumlah Rp. 10,68 miliar. Kemudian sejak Januari 1971 sertifikat Bank Indonesia ini dijual dengan sistem tender, dimana pembeli dapat menentukan sendiri harga yang bersedia dibayarnya atas dasar diskonto, sehingga diharapkan dengan sistem penjualan yang baru ini minat masyarakat terhadap surat berharga ini menjadi lebih besar. Sebagai hasil dari sistem penjualan yang baru ini selama periode Januari 1971- Agustus 1971 telah terjual sertifikat Bank Indonesia sejumlah Rp.7,5 miliar.

Selanjutnya karena dirasakan maksud dan tujuan semula sudah mulai kelihatan agak berhasil, maka Bank Indonesia buat semen tara menghentikan pengeluaran sertifikatnya dan untuk melanjutkan kegiatan pembimbingan kearah terciptanya pasar uang dan modal maka kegiatan ini diteruskan oleh beberapa bank-bank umum pemerintah dengan mengduarkan sertifikat deposito (*Certificate of Deposit*) dari bank yang bersangkutan.

5.4. Perkembangan Kredit Perbankan

5.4.1. Perkembangan Pemberian Kredit Menurut Sektor Perbankan

Dalam suasana pembangunan yang semakin meningkat ini sudah tentu peranan perkreditan bank cukup berarti baik melalui kredit jangka pandyang (kredit investasi)

ataupun kredit jangka pendek. Perkreditan bank yang semakin meningkat dan semakin lancar sudah terang mempunyai andil yang cukup besar pula dalam menggerakkan roda produksi menjadi lebih bergairah dan Pada gilirannya pula akan menaikkan tingkat kemakmuran sebagai salah satu tujuan akhir dari pembangunan. Dewasa ini di Indonesia terdapat tiga jenis lembaga perbankan yang aktif menjalankan operasinya yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat serta kemudian menyalurkannya kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Ketiga lembaga perbankan itu ialah Bank Indonesia, bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta. Disamping itu perlu pula dicatat bahwa peranan dari bank sekunder seperti bank desa, bank pasar, dan sebagainya cukup pula berarti dalam menggerakkan produksi terutama untuk sektor-sektor yang belum terjangkau oleh operasi bank-bank primer. Dalam hal ini Pemerintah telah mengambil pelbagai langkah yang positif sementara menunggu dikeluarkannya undang-undang tentang bank-bank pasar, bank-bank desa dan yang sejenis dengan itu.

Sampai dengan akhir Oktober 1971 posisi perkreditan bank seluruhnya mencapai jumlah Rp. 448,1 miliar, berarti selama periode Maret 1971 - Oktober 1971 telah terjadi kenaikan volume perkreditan bank seluruhnya sejumlah + Rp. 67,5 miliar atau + 17,7%. Dibandingkan dengan periode yang sama Pada tahun yang lalu maka kenaikan volume perkreditan bank seluruhnya Pada tahun ini secara absolut berada Rp. 13,3 miliar dibawah tahun yang lalu, demikian pula secara prosentuil sedikit dibawah tahun yang lalu yaitu sekitar 13,1 %. Dari posisi perkreditan bank seluruhnya sebesar Rp. 448,1 miliar sebesar Rp. 235,0 miliar berupa kredit Bank Indonesia, kemudian sebesar Rp. 173,3 miliar berupa kredit bank-bank umum pemerintah dan akhirnya sebesar Rp. 39,8 miliar berupa kredit bank-bank umum swasta, lihat **Tabel V.6**.

Selanjutnya dari kenaikan perkreditan bank seluruhnya sebesar + Rp. 67,5 miliar (+ 17,7%) selama tahun 1971/1972 sampai dengan Oktober 1971, adalah berasal dari kenaikan kredit Bank Indonesia sebesar + Rp. 32,2 miliar (+ 15,9%). Kemudian menyusul kenaikan kredit bank-bank pemerintah umum sebesar + Rp. 10,8 miliar (+ 21,6%) dan akhirnya berupa kenaikan dari kredit bank-bank umum swasta sebesar + Rp. 4,5 miliar (+ 12,7%). Hal ini mempunyai pola yang agak berbeda sedikit dengan pola yang terjadi pada periode yang sama tahun lalu. Dari kenaikan volume perkreditan bank seluruhnya pada masa itu sebagian besar berasal dari kenaikan kredit bank-bank umum pemerintah, kemudian menyusul kenaikan kredit Bank Indonesia dan kenaikan kredit bank-bank umum swasta. Kenaikan kredit Bank Indonesia sebesar Rp. 32,2 miliar (+ 15,9%) pada periode tersebut diatas adalah berasal dari kenaikan kredit langsung Bank

Indonesia sebesar + Rp. 10,6 miliar (+ 12,0%) dan kenaikan kredit likuiditas Bank Indonesia sebesar + Rp. 21,6 miliar (+18,9%). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu kenaikan kredit likuiditas pada tahun ini sekitar 9,4% lebih tinggi dari tahun yang lalu, dilain pihak kredit langsungnya lebih kecil sekitar 21,6% dari tahun yang lalu. Kenaikan kredit likuiditas Bank Indonesia sejumlah tersebut diatas selama periode Maret 1971 - Oktober 1971 antara lain digunakan untuk pembiayaan kredit investasi. Demikian pula kenaikan kredit langsung sejumlah tersebut diatas pada periode yang sama, terutama dalam rangka pembiayaan program pengadaan pangan dan impor terigu PL 480. Sampai saat ini Bank Indonesia masih tetap memberikan kredit langsung satu dan lain hal disamping merupakan sisa-sisa kredit yang diberikan pada masa yang lalu, juga untuk pembiayaan kredit yang membutuhkan jumlah yang besar dan segera untuk pengadaan dimana dirasakan bank-bank lain belum sanggup melaksanakannya.

Kenaikan kredit bank-bank umum pemerintah sebesar + Rp. 30,8 miliar (+ 21,6%) selama periode Maret 1971 - Oktober 1971 adalah sedikit menurun dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada tahun lalu. Demikian pula halnya dengan kenaikan kredit bank-bank umum swasta sejumlah + Rp. 4,5 miliar (+ 12,7%) pada tahun ini adalah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kenaikannya pada tahun yang lalu. Dalam pada itu untuk lebih menambah kemampuan bank-bank umum dalam pemberian kreditnya maka telah diadakan pelbagai perubahan dalam penghitungan cash ratio sehingga sebagai akibatnya bank-bank akan sedikit lebih leluasa dalam mengalokasikan dana yang dihimpunnya. Disamping itu untuk bank-bank umum swasta semenjak 8 Januari 1971 diberi pula beberapa keringanan antara lain dengan penurunan suku bunga kredit likuiditas darurat menjadi 1 %.

5.4.2. Perkembangan Pemberian Kredit Menurut Sektor Pemerintah dari Swasta

Dari posisi kredit sebesar Rp. 448,1 miliar pada akhir Oktober 1971 sebesar Rp. 164,7 miliar (36,8%) diarahkan kesektor pemerintah dan sebesar Rp. 283,4 miliar (63,2%) diarahkan kesektor swasta. Demikian pula dari kenaikan volume perkreditan bank sebesar + Rp. 67,5 miliar (+ 17,7%) selama tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 sejumlah + Rp. 19,5 miliar (+ 13,4%) berasal dari kenaikan kredit yang terjadi pada sektor pemerintah, dan kemudian sebesar + Rp. 48,0 miliar (+ 20,4%) berupa kenaikan kredit tersebut pada sektor swasta. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu maka kenaikan kredit disektor pemerintah sedikit lebih besar,

demikian pula halnya dengan kenaikan kredit disektor swasta.

Kenaikan kredit disektor pemerintah sejumlah tersebut diatas selama periode itu adalah berasal dari kenaikan kredit langsung . Bank Indonesia kesektor tersebut sebesar + Rp. 10,8 miliar (+ 12,7%), juga .dari kenaikan kredit likuiditasnya kesektor itu dengan + Rp. 13,8 miliar (+ 35,6%), sedangkan kredit bank-bank umum pemerintah kesektor tersebut memperlihatkan sedikit penurunan dengan -Rp. 5,1 miliar (- 24,2%). Kemudian kenaikan kredit disektor swasta sebesar + Rp. 48,0 miliar (+ 20,4%) adalah berasal dari penurunan kredit langsung Bank Indonesia - kesektor itu sebesar - Rp. 0,2 miliar diikuti pula dengan kenaikan kredit likuiditas Bank Indonesia sebesar + Rp. 7,8 miliar (+ 10,3%), setelah itu kenaikan - kredit" bank-bank umum pemerintah dengan likuiditas sendiri sebesar + Rp. 35,9 miliar (+ 29,6%) dan juga kenaikan kredit bank-bank umum swasta sebesar + Rp. 4,5 miliar (+ 12,7%).

Jelaslah bahwa selama tahun anggaran 1971/1972 sampai bulan Oktober 1971 sebagian besar dari volume dan kenaikan perkreditan bank seluruhnya adalah berasal dan digunakan oleh sektor swasta. Hal ini untuk menggiatkan kegiatan perusahaan dan sebagainya sehingga diharapkan sebagai hasilnya nanti sektor ini akan lebih bergairah dalam meningkatkan produksi.

5.4.3. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor ekonomi

Effektivitas penggunaan kredit dalam rangka pelaksanaan REPELITA I dapat pula dilihat dari perkembangan perkreditan bank seluruhnya menurut sektor ekonomi. Umumnya kredit yang diberikan oleh suatu bank dapat dibedakan atas sektor produksi, sektor ekspor dan sektor lain-lain. Kredit kesektor produksi terutama digunakan untuk menggerakkan sarana-sarana produksi. Demikian pula kredit kesektor ekspor terutama dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan devisa yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan barang modal. Dilain pihak kredit kesektor lain-lain masih tetap diperlukan pula, terutama dalam rangka pengadaan pangan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi.

Pada akhir Oktober 1971 dari jumlahposisi perkreditan bank seluruhnya sebesar Rp.448,1 miliar, diarahkan kesektor produksi sebesar Rp. 220,5 miliar (49,2%), kemudian diarahkan kesektor ekspor dan sektor lain-lain masing-masing sebesar Rp. 32,2 miliar (7,2%) dan Rp. 195,4 miliar (43,6%). Dibandingkan dengan pola yang terjadi pada saat yang sama tahun lalu maka bagian kredit yang disalurkan kesektor produksi meningkat dengan: 4,3%. Dilain pihak bagian kredit kesektor lain-lain

menurun dengan 3%, sedangkan bagian kredit kesektor ekspor juga memperihalkan sedikit penurunan. Selanjutnya dari kenaikan volume perkreditan bank seluruhnya sebesar +Rp. 67,5 miliar (+ 17,7%), sebesar + Rp. 38,0 miliar (+ 20,9%) berupa kenaikan kredit kesektor produksi, kemudian sebesar + Rp. 2,3 miliar (+ 8,1%) adalah kenaikan kredit kesektor ekspor dari akhirnya berupa kenaikan kredit kesektor lain-lain sebesar + Rp. 27,2 miliar (+16,2%). Jelaslah terlihat bahwa baik volume maupun kenaikan perkreditan bank seluruhnya selama tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 terutama sekali berasal dan ditujukan kepada sektor produksi, kemudian menyusul sektor lain-lain dan sektor ekspor, lihat **Tabel V.6**.

Kenaikan kredit kesektor produksi sebesar + Rp. 38,0 miliar (+ 20,9%) selama periode tersebut adalah disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kredit langsung dan kredit likuiditas Bank Indonesia kesektor tersebut masing-masing sebesar + Rp. 1,0 miliar dan + Rp. 22,5 miliar. Juga oleh perubahan yang terjadi pada pemberian kredit bank-bank umum pemerintah dengan likuiditas sendiri dan bank-bank umum swasta masing-masing + Rp. 11,3 miliar dan + Rp. 2,8 miliar. Selanjutnya kenaikan kredit kesektor ekspor sejumlah tersebut diatas adalah berasal dari perubahan-perubahan kredit yang terjadi disektor itu yakni ; kredit likuiditas sendiri, kredit bank-bank umum pemerintah dengan likuiditas sendiri, kredit bank umum swasta masing-masing - Rp. 1,4 miliar, + Rp. 3,2 miliar dan + Rp. 0,5 miliar. Demikian pula kenaikan kredit kesektor lain-lain sebesar + Rp. 27,2 miliar (+ 16,2%) selama periode tersebut diatas adalah disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada kredit likuiditas dan kredit langsung Bank Indonesia masing-masing + Rp. 0,5 miliar dan + Rp. 9,2 miliar. Juga oleh kenaikan kredit bank-bank umum pemerintah dengan likuiditas sendiri dan kenaikan kredit bank-bank swasta masing-masing + Rp. 16,3 miliar dan + Rp. 1,2 miliar. Masih besarnya volume maupun kenaikan perkreditan bank seluruhnya kesektor lain-lain dalam periode tersebut, terutama dalam rangka pembiayaan program pengadaan pangan dan impor barang-barang penting untuk menjamin stabilisasi.

5.4.4. Perkembangan Pemberian Kredit Menurut Daswati I

Secara keseluruhan pemberian kredit ini ditujukan kepada 24 Daswati, belum termasuk Irian Barat. Sampai dengan akhir Juni 1971 posisi pemberian kredit menurut Daswati I ini, mencapai jumlah Rp. 277.342,47 juta. Hal ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar + Rp. 111.227,10 juta atau + 67,0% dibandingkan dengan posisi akhir Maret 1970, lihat Tabel V.8. Kenaikan yang terjadi dalam periode Maret 1970 - Maret

1971 adalah sebesar + Rp. 87.492,47 juta, sedangkan kenaikan untuk periode Maret 1971 - Juni 1971 adalah + Rp. 23.734,63 juta.

Posisi kredit tersebut diatas sebesar Rp. 277.342,47 juta pada akhir Juni 1971, sebesar Rp. 172.370,60 juta (62,2%) ditujukan ke sektor produksi sebesar Rp. 77.455,15 juta (27,9%) ditujukan ke sektor lain-lain dan sisanya sebesar Rp. 27.516,72 juta (9,9%) ditujukan ke sektor ekspor. Dari keadaan tersebut, jelaslah bahwa pemerintah dalam kebijaksanaan kreditnya senantiasa mengutamakan sektor produksi, sedangkan besarnya volume kredit ke sektor lain-lain disebabkan terutama oleh kredit dalam rangka pengadaan pangan dan kredit perdagangan. Demikian pula dari kenaikan sebesar + Rp. 111.227,10 juta selama periode Maret 1970 - Juni 1971 sebahagian besar berasal dari kenaikan kredit tersebut di sektor produksi sebesar + Rp. 73.350,00 juta, kemudian menyusul kenaikan di sektor lain-lain sebesar + Rp. 30.735,60 juta, dan akhirnya kenaikan di sektor ekspor sebesar + Rp. 7.141,50 juta. Kenaikan kredit di sektor produksi selama periode tersebut diatas terutama dalam rangka pembiayaan perindustrian, produksi bahan pangan dan prasarana. Kenaikan kredit untuk pembiayaan perindustrian dan produksi bahan pangan terutama terjadi di Jatim dan Jabar, sedangkan kenaikan kredit tersebut untuk pembiayaan prasarana terutama terjadi di daerah khusus Jakarta Raya.

a. Jakarta Raya

Pada akhir Juni 1971 posisi kredit yang disalurkan ke daerah khusus Jakarta Raya adalah Rp. 107.907,95 juta atau 38,9% dari seluruh posisi kredit pada waktu tersebut. Dengan demikian selama periode Maret 1970 - Juni 1971 terjadi kenaikan kredit di daerah ini sebesar + Rp. 19.227,49 juta (+ 21,7%). Kenaikan yang terbesar selama periode tersebut, terutama terjadi di sektor produksi sebesar + Rp. 11.224,24 juta, kemudian menyusul sektor lain-lain sebesar + Rp. 8.251,81 juta, sedangkan sektor ekspor mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengembalian kredit tersebut. Kenaikan yang besar di sektor produksi terutama disebabkan kenaikan yang berarti dalam pembiayaan prasarana.

Perlu pula diketahui bahwa besarnya volume kredit yang disalurkan di daerah Jakarta, antara lain disebabkan pula banyaknya kredit yang sesungguhnya dipergunakan untuk Daswati I lainnya tapi penyalurannya dilakukan melalui Jakarta.

b. Untuk Daswati I lainnya, kredit yang disalurkan ke daerah-daerah ini yang besarnya agak berarti ialah daerah Djatim, Jabar, Djateng dan Sumatra Utara. Umumnya kredit yang disalurkan ke daerah tersebut terutama dalam rangka pembiayaan sektor

produksi, dalam hal ini produksi bahan pangan, perindustrian, sandang dan barang ekspor.

- c. Untuk Daswati I selain yang disebut diatas umumnya dalam periode tersebut, memperlihatkan perkembangan dan pembagian yang agak merata.

Tabel V.6.
PERKEMBANGAN PERKREDITAN BANK MENURUT SEKTOR EKONOMI
1968 - 1971/1972
(dalam miliar rupiah)

	1968			1969/1970			1970/1971			1971/1972		
	Des.	Juni	Sept.	Des.	Maret	Juni	Sept.	Okt.	Des.	Maret	Juni	Agust.
Bank Indonesia	92	101,2	133,1	166,9	167,6	177,1	202,9	200,8	209,6	202,8	225,9	233,5
Kredit langsung	61,9	48,4	69,9	87,4	71,8	79	101	95,9	96,8	83,3	98	103,8
Produksi	17	4,4	3,5	4,6	5,6	7,3	16,1	16,9	19,8	24,1	25,5	25,3
Ekspor	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lain-lain	44,4	43,6	66	82,3	65,8	71,3	84,4	78,6	76,6	63,8	72,1	78,1
Kredit Likuiditas	30,1	52,8	63,2	79,5	95,8	98,1	101,9	104,9	112,8	114,5	127,9	129,7
Produksi	22,5	42,4	43,4	51,8	56,3	66,2	71,2	72,8	76,7	78,5	95,2	98,1
Ekspor	2,9	2,3	3,4	7,9	9,5	9,4	9	9,1	9,4	9,3	8,2	7,5
Lain-lain	4,7	8,1	16,4	19,8	30	22,5	21,7	23	26,7	26,7	24,5	24,1
Bank-bank Umum Pemerintah	26,2	43,2	58,3	58,9	70,3	87,4	111,4	111,5	122,5	142,5	154,5	161,1
Produksi	13,4	25	32,4	32,7	42,7	45,7	53,9	53	59,8	67,7	77,2	77,9
Ekspor	6,1	8,7	12,1	11,2	10,9	14,5	16,1	17,5	16,9	18,3	19,4	21,2
Lain-lain	6,7	9,5	13,8	15	16,7	27,2	41,4	41	45,8	56,5	57,9	62
Bank bank Umum Swasta	8,6	13,5	16,2	17,2	20,6	21,9	22,1	22,5	22,1	24,1	28,1	29,7
Produksi	2,5	4,7	-5,8	6,8	8,5	9,2	9,4	9,6	9,9	10,7	12,6	12,9
Ekspor	1,7	1,3	1,3	1,2	1,7	1,7	1,4	1,5	1,5	1,7	2,1	2,1
Lain-lain	4,4	7,5	9,1	9,2	10,4	11	11,3	11,4	10,7	11,7	13,5	13,7
Cabang Bank bank Asing	1,1	1,8	2	2,4	3,5	4,8	6,9	8	8,2	11,2	12	12,3
Produksi		0,3	0,5	0,5	0,9	1	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	2
Ekspor	-	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
Lain-lain	1,1	0,8	1,4	1,8	2,5	3,7	5,2	5,9	6,4	9,5	10	10,1
JUMLAH:	126,8	159,7	209,6	245,4	262	291,2	343,3	342,8	362,4	380,6	420,5 *)	435,6*)
Produksi	55,4	76,8	85,6	96,4	114	129,4	152,1	154,2	167,8	182,5	212,2	216,2
Ekspor	10,1	13,4	17,3	20,9	22,6	26,1	27,2	28,7	28,4	29,9	30,2	31,4
Lain-lain	61,3	69,5	106,7	128,1	125,4	135,7	164	159,9	166,2	168,2	178,1	188

Sumber : Bank Indonesia
*) Angka-angka sementara
1) Termasuk cabang Bank-bank Asing.

Tabel V. 7
PERKEMBANGAN PERKREDITAN BANK MENURUT SEKTOR PEMERINTAH
DAN SEKTOR SWASTA 1968 - 1971/1972
(dalam miliar rupiah)

	1968		1969/1970		1970/1971		1971/1972							
	Des.	Juni	Sept.	Des.	Juni	Sept.	Okt.	Des.	Maret	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.
Bank Indonesia	92	101,2	133,1	166,9	177,1	202,9	200,8	209,6	202,8	225,9	233,5	240,1	243,8	235
Kr. langsung	61,9	48,4	69,9	87,4	79	101	95,9	96,8	88,3	98	103,8	109,2	110	98,9
Sektor Pemerintah	58,8	43,4	64,5	81,3	76	98,1	93	93,9	85,3	95,1	100,6	106,1	107,1	96,1
Sektor Swasta	3,1	5	5,4	6,1	3	2,9	2,9	2,9	3	2,9	3,2	3,1	2,9	2,8
Kr. Likuiditas	30,1	52,8	63,2	79,5	98,1	101,9	104,9	112,8	144,5	127,9	129,7	130,9	133,8	136,1
Sektor Pemerintah	20,2	38	40,2	44,1	48,2	49,2	48	48,4	38,8	51	50,7	50,6	51,6	52,6
Sektor Swasta	9,9	14,8	23	35,4	49,9	52,7	56,9	64,4	75,7	76,9	79	80,3	82,2	83,5
Bank-bank Umum Pemerintah														
Likuiditas sendiri	26,2	43,2	58,3	58,9	87,4	111,4	111,5	122,5	142,5	154,5	161,1	168,9	169,7	173,3
Sektor Pemerintah	2,7	4,6	6	5,7	10,2	15,2	13,9	15,4	21,1	19	24,2	24,6	15	16
Sektor Swasta	23,5	38,6	52,3	53,2	77,2	96,2	97,6	107,1	121,4	135,5	136,9	144,3	154,7	157,3
Likuiditas B.I.	30	51,7	61,2	78,4	96,6	100,2	102,8	110,3	111,1	122,8	124,1	124,8	127,7	130
Sektor Pemerintah	20,2	38	40,2	44,1	48,2	49,2	48	48,4	38,8	51	50,7	50,6	51,6	52,6
Sektor Swasta	9,8	13,7	21	34,3	48,4	51	54,8	61,9	72,3	71,8	73,4	74,2	76,1	77,4
Bank-bank Umum Swasta														
Likuiditas sendiri														
Sektor Swasta	7,5	13,5	16,2	17,2	21,9	22,1	22,5	22,1	24,1	28,1	28,7	26,2 ¹⁾	39,1 ¹⁾	39,8 ¹⁾
Likuiditas B.I.														
Sektor Swasta	0,1	1,1	2	1,1	1,5	1,7	2,1	2,5	3,4	5,1	5,6	6,1	6,1	6,1
Cabang Bank-bank Asing														
Likuiditas sendiri														
Sektor Swasta	1,1	1,8	2	2,4	4,8	6,9	8	8,2	11,2	12	12,3	12,6	-	-
JUMLAH:	126,8	159,7	209,6	245,4	291,2	343,3	342,8	362,4	380,6	420,5 *)	435,6 *)	447,8 *)	452,6 *)	448,1 *)
Pemerintah	81,7	86	110,7	131,1	134,4	162,5	154,9	157,7	145,2	165,1	175,5	181,3	173,7	164,7
Swasta	45,1	73,7	98,9	114,3	156,8	180,8	187,9	204,7	235,4	255,4	260,1	266,5	278,9	283,4

Sumber : Bank Indonesia.
*) Angka-angka sementara.
¹⁾ Termasuk cabang Bank-bank Asing

Tabel V.8a.
PERKEMBANGAN PEMBERIAN KREDIT MENURUT DASWATI
TIDAK TERMASUK KREDIT LANGSUNG BI , 1970 - 1971
(dalam jutaan rupiah)

DASWATI I	PRODUKSI						EKSPOR	Lain-lain	JUMLAH
	Bahan Pangan Ekspor	Barang	Sandang	Perindustrian Pertambangan	Prasarana	JUMLAH I			
	JUMLAH II	JUMLAH III	I.II.III						
Mar-70									
Jakarta Raya	24.145,43	535,34	16.206,41	8.400,97	1.094,71	50.382,86	4.388,70	33.908,90	88.680,46
Jatim	7.110,64	1.565,30	298,27	1.411,82	0,09	10.387,78	2.057,69	1.858,14	14.303,00
Jateng	4.633,64	1.642,68	1.139,95	1.041,58	-	8.517,20	778,58	1.682,40	10.978,18
Jabar	4.632,11	168,24	2.222,09	611,19	0,5	7.648,49	220,12	1.676,22	9.544,83
Sumut	2.702,01	3.853,21	45,76	1.421,19	19,68	8.100,83	1.381,74	1.125,53	10.608,10
Daswati I Lainnya	5.832,35	6.453,01	204,04	1.209,78	-	13.983,44	11.548,40	6.488,36	32.000,20
JUMLAH	49.056,18'	14.217,78	20.116,52	14.096,53	20,27	99.020,60	20.375,22	46.719,55	166.115,37
Mar-71									
Jakarta Raya	21.200,38	1.368,07	8.167,94	9.834,89	337,39	45.856,62	4.306,73	52.268,92	102.432,27
Jatim	9.955,42	2.703,19	755,08	10.101,00	-	23.660,28	2.583,92	4.294,05	30.538,25
Jabar	9.460,17	551,07	4.111,12	4.200,19	0,37	20.379,72	201,29	3.264,82	23.845,83
Jateng	5.598,83	2.016,86	3.167,72	4.972,92	0,94	16.309,66	725,05	3.997,97	21.032,68
Sumut	5.406,99	4.671,14	74,16	2.571,10	11,48	13.320,45	1.758,89	2.916,26	17.995,60
Daswati I Lainnya	11.590,33	10.315,62	372,17	2.965,88	0,23	26.607,06	17.932,88	13.223,27	57.763,21
JUMLAH	63.212,10	21.625,95	16.648,19	34.695,98	350,41	146.133,79	27.508,76	79.965,29	253.607,84

Sumber: Bank Indonesia.

5.4.5. Kebijakan Kredit dan Suku Bunga Perkreditan

Selama tahun anggaran 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 telah diadakan pelbagai kebijaksanaan kredit dan perbankan dalam rangka untuk lebih

meningkatkan sumbangan sektor perbankan dalam pembangunan ekonomi yang sedang berjalan ini. Untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan kredit, maka diadakan perubahan-perubahan terhadap perhitungan *cash ratio* sejak bulan Maret 1971. Dengan keluarnya ketentuan baru ini lembaga perbankan mendapat sedikit kelonggaran dalam penggunaan dana-dana yang dihimpunnya dari masyarakat. Dalam pada itu telah pula diselesaikan masalah penggolongan, wewenang perizinan serta pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi simpan pinjam dan bank desa dan bank-bank sejenis lainnya yang berbentuk hukum koperasi melalui surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Transmigrasi dan Koperasi serta Gubernur Bank Indonesia No. Kep-668/MK/IV/8/1971 tanggal 31 Agustus 1971. Demikian pula dalam rangka usaha Pemerintah untuk membimbing bank-bank swasta nasional maka telah pula diberikan perangsang berupa keringanan pajak untuk bank-bank yang mengadakan penggabungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep 614/MK/II/8/1971 tanggal 12 Agustus 1971.

Selanjutnya sejak tanggal 1 April 1971 kredit likuiditas Bank Indonesia untuk bank-bank umum pemerintah untuk tujuan distribusi gula diturunkan dari 40% menjadi 20% dari harga gula. Dengan demikian sekurangnya 30% dari jumlah kredit tersebut haruslah dibiayai sendiri dan 50% lagi dibiayai dengan kredit dari bank-bank umum pemerintah dengan likuiditasnya sendiri. Pada saat yang sama telah pula diturunkan oleh Bank Indonesia bagian kredit likuiditas untuk pelbagai golongan suku pinjaman yang dapat diperoleh oleh bank-bank umum pemerintah. Kredit likuiditas untuk produksi barang ekspor diturunkan dari 60% menjadi 40% dari jumlah kredit yang diperoleh. Demikian pula halnya kredit likuiditas untuk golongan II B dan III A, kecuali untuk distribusi gula diturunkan dari 60% menjadi 30%. Seterusnya dari 60% dan 50% menjadi 20% untuk semua bagian pada golongan III B dan IV. Sejak saat itu ditiadakan kredit likuiditas untuk golongan V. Dalam pada itu Bank Indonesia juga telah mengurangi bagian kredit likuiditasnya dari 80% menjadi 50% untuk pendirian pabrik *crumb rubber*. Begitu pula dari 90% menjadi 50% untuk pembiayaan produksi tembakau Jawa.

Sebagai akibat daripada kebijaksanaan penyesuaian kurs devisa dari Rp. 378,- menjadi Rp.415,- persatu dollar Amerika maka semenjak tanggal 24 Agustus 1971 yang lalu kepada bank-bank devisa diperkenankan untuk memberi *pre-financing* kredit dalam rangka membantu pembiayaan impor dengan devisa kredit. Dalam pada itu kepada bank devisa pemerintah diperbolehkan meminta kredit likuiditas kepada Bank Indonesia jika

likuiditasnya sendiri tidak cukup dan untuk ini dikenakan bunga 11/4% sebulan, jumlah kredit likuiditas ini maksimal 26% dari nilai lawan dalam rupiah dari devisa kredit untuk impor yang bersangkutan. Kepada bank devisa tidak diperkenankan memberikan kredit impor dengan devisa umum.

Sesuai dengan tingkat stabilitas ekonomi yang telah dicapai maka dia akan pula beberapa perubahan dalam kredit investasi yaitu memperbesar pembiayaan kredit yang harus disediakan oleh nasabah yaitu menjadi 25% untuk proyek-proyek yang prioritas dan 50% untuk proyek-proyek yang non prioritas. Sedangkan suku bunga kredit investasi tetap 1% sebulan atau 12% setahun.

Suku bunga pinjaman selama tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Oktober 1971 dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yaitu antara 1/2% - 4% perbulan. Demikian pula penggolongannya kurang lebih sama seperti keadaan pada tahun yang lalu. Dalam pada itu bank-bank umum swasta bebas dalam menentukan suku bunga pinjamannya dan biasanya disesuaikan dengan suku bunga pinjaman dari bank-bank umum pemerintah. Kemudian sehubungan dengan kewajiban memelihara likuiditas minimum dan saldo giro minimum pada Bank Indonesia maka sejak 1 Nopember 1971 telah ditetapkan bahwa bunga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut adalah 3% sebulan.

5.5. Perkembangan Kredit Investasi

Program kredit investasi yang dimulai sejak 1 April 1969 pada akhir September 1971 sudah mencapai jumlah yang disetujui oleh perbankan sebesar Rp.100,4 miliar atau suatu kenaikan sebesar + Rp. 22,7 miliar (+ 29,2%) jika dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1971. Kenaikan sejumlah tersebut diatas adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (lihat **Tabel V.9**).

Dari jumlah kredit investasi yang disetujui oleh perbankan sebesar Rp. 100,4 miliar pada akhir September 1971 sebesar Rp. 66,6 miliar sudah direalisasi. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar + Rp. 17,4 miliar atau + 35,4% jika dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1971, dan jumlah ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Dilihat menurut sektor ekonomi maka sebahagian besar dari kredit investasi tersebut baik yang disetujui oleh perbankan maupun realisasinya terarahkan ke sektor-sektor industri, perhubungan/pariwisata dan pertanian.

Realisasi kredit investasi ke sektor industri pada periode ini telah mengalami

kenaikan sebesar +Rp. 7,9 miliar (+ 39,3%). Demikian pula realisasinya kesektor perhubungan/pariwisata dan kesektor pertanian masing-masing mengalami kenaikan sebesar + Rp. 5,7 miliar (+ 38,5%) dan + Rp. 3,5 miliar (+ 25,9%). Realisasi kredit kesektor lain-lain juga mengalami sedikit kenaikan. Sebagian besar dari kredit investasi kesektor pertanian digunakan untuk ekspansi perkebunan-perkebunan, pendirian pabrik crumb rubber dan peningkatan produksi makanan. Demikian pula sebagian besar dari kredit investasi kesektor industri terutama digunakan untuk pembiayaan pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik tekstil dan pabrik kertas. Pemberian kredit investasi kesektor perhubungan dan pariwisata dipergunakan untuk memperbaiki sarana perhubungan dan meningkatkan sarana pariwisata.

5.6. Perkiraan Jumlah Uang Yang Beredar dan Perkreditan 1972/1973

Perkiraan jumlah uang yang beredar dan perkreditan bank seluruhnya untuk tahun anggaran 1972/1973 dibuat berdasarkan anggapan-anggapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kepada perkembangan dari data-data jumlah uang yang beredar dan perkreditan bank sebelumnya;
2. Tingkat kenaikan harga untuk tahun 1972/1973 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga pada tahun 1971/1972;
3. Pada akhir tahun anggaran 1971/1972 diperkirakan jumlah uang yang beredar akan mencapai posisi sejumlah Rp. 326,1 miliar sedangkan perkreditan bank seluruhnya diperkirakan mencapai jumlah Rp. 459,4 miliar.

Selama tahun anggaran 1971/1972 jumlah uang yang beredar diperkirakan bertambah dengan + Rp. 55,9 miliar atau + 20,7% sedangkan perkreditan bank seluruhnya diperkirakan bertambah dengan + Rp. 78,8 miliar atau + 20,7%. Berdasarkan anggapan-anggapan tersebut diatas maka selama tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan jumlah uang yang beredar bertambah dengan Rp. 64,1 miliar atau + 19,7% dan perkreditan bank seluruhnya dengan + Rp.100,1 miliar atau + 21,8%. Hal ini berarti pada akhir tahun 1972/1973 diperkirakan jumlah uang yang beredar mencapai posisi Rp. 390,2 miliar dan perkreditan bank seluruhnya Rp. 559,5 miliar, lihat **Tabel V.10.**

Tabel V.9.
PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI, 1969/1970-1971/1972
(dalam miliar rupiah)

	1969/1970		1970/1971			1971/1972		
	Maret	Juni	Sept.	Okt.	Des.	Juni	Juli	Agustus*)
Yang disetujui oleh								
Perbankan	31,6	41,8	50,2	54,8	63,9	87	88,6	94,8
Pertanian	8,1	11	12,6	14,7	16,3	21,4	22	26,2
Industri	10,8	14,6	18,9	21,3	27,4	38,6	39,5	40,3
Pertambangan	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
Perhubungan & Pariwisata	11,4	14,6	17,7	17,8	19,1	25,5	25,7	26,9
Lain -lain	0,4	0,7	0,7	0,7	0,8	1,2	1,3	1,3
Realisasi	16,6	24,3	33,1	34,9	40,4	58,7	61,6	63,5
Pertanian	5,6	7,8	10,7	10,9	11,6	15,1	15,9	16,1
Industri	4,9	7,8	10,7	11,7	15,1	25,8	26,1	27,1
Pertambangan	0,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Perhubungan & Pariwisata	5,4	8,5	10,9	11,5	13	16,8	18,7	19,4
Lain - lain	0,1	0,1	0,6	0,5	0,6	0,9	0,8	0,8

Sumber : Bank Indonesia

*) Angka-angka semen tara

Tabel V. 10.
PROGNOSA JUMLAH UANG YANG BEREDAR DAN
PERKREDITAN BANK SELURUHNYA 1972/1973
(dalam miliar rupiah)

	Waktu	Jumlah uang yang beredar	Perkreditan bank seluruhnya
1969/1970	Juni	146,4	159,7
	September	169,5	209,6
	Desember	179,9	245,4
	Maret	210,7	262,0
1970/1971	Juni	216,4	291,2
	September	226,9	343,3
	Desember	241,1	362,4
	Maret	270,2	380,6
1971/1972	Maret	326,1	459,4
1972/1973	Maret	390,2	559,5

Sumber : Departemen Keuangan.

BAB VI

PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN DAN LALU LINTAS DEvisa

6.1. U m u m

Didalam dunia moneter internasional akhir-akhir ini telah terjadi berbagai macam perubahan yang perlu diperhatikan dan diikuti perkembangannya. Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai suatu sistim ekonomi terbuka mau tidak mau pada akhirnya akan merasakan pula akibat daripada perubahan-perubahan tersebut pada ekonomi nasionalnya. Sektor pertama yang akan segera merasakan pengaruh tersebut adalah sektor perdagangan internasionalnya, baik melalui impor maupun eksportnya. Pada dirinya hal ini tentunya akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya didalam bidang ekonomi. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang sedang maupun yang akan terjadi didalam dunia moneter internasional harus diawasi secara seksama agar dapat dihindarkan pengaruh-pengaruhnya yang negatif.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia moneter internasional ini tercermin didalam tindakan negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang untuk mengadakan perubahan daripada kurs mala uangnya.

Gejala perubahan ini sudah dapat dilihat semenjak kira-kira tahun 1965. Kemudian mulai tampak dengan jelas pada tahun 1967 pada waktu pemerintah Inggris mengadakan devaluasi daripada poundsterling-nya, untuk kemudian disusul dengan Perancis dan Jerman Barat.

Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1968, keadaan ini disusul dengan timbulnya krisis emas internasional. Pasaran emas di London dan di Zurich pada waktu itu telah mengalami tekanan-tekanan berat daripada para spekulan emas, sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga emas yang jauh melampaui harga resminya. Untuk mengatasi keadaan ini, beberapa negara di Eropa dan Amerika telah mengambil suatu kebijaksanaan untuk menentukan dua macam harga emas : harga resmi dan harga pasaran. Penentuan dua macam harga emas dikenal dengan istilah "*two tier system*" atau dua cabang dalam penentuan harga emas.

Sementara itu keadaan moneter internasional terus bergejolak dan .belum tampak gejala mereda, bahkan pada pertengahan bulan Agustus telah mencapai titik kulminasinya dengan diumumkannya beberapa tindakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi kesulitan ekonominya maupun keadaan moneter internasional.

6.1.1. Latar Belakang Krisis Moneter Internasional

Sebab pokok terjadinya perubahan-perubahan tersebut diatas adalah karena timbulnya gejala inflasi yang terjadi dinegara-negara Eropa, Amerika dan Jepang yang sumbernya dinegara-negara tersebut berbeda-beda:

- a) Di Perancis, Inggris dan Amerika Serikat inflasi tersebut disebabkan karena kenaikan tingkat upah, sehingga menyebabkan naiknya biaya produksi dan akhirnya mengakibatkan harga hasil produksinya menjadi lebih tinggi. Gejala ini dikenal sebagai "*cost push inflation*".
- b) Di Jerman Barat dan Jepang inflasi disebabkan karena investasi-investasi yang dilakukan secara besar-besaran dikedua negara tersebut yang melampaui kekuatan ekonomi nasionalnya, sehingga harga-harga mulai meningkat. Gejala ini lazim dikenal sebagai suatu "*overheated economy*".

Setiap inflasi dalam suatu negara pasti akan menimbulkan tekanan-tekanan kepada neraca perdagangannya dan dengan demikian juga akhirnya kepada neraca pembayarannya. Inflasi ini telah mendorong impor yang lebih besar dari negara-negara yang lebih murah, sehingga volume impornya mengembang dengan cepat. Sementara itu karena harga-harga dalam negeri naik, maka daya saing ekspor negara-negara tersebut dipasaran internasional juga mulai mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi disatu pihak impor makin menjadi besar, sedang sebaliknya ekspor makin lama makin menurun.

Proses ini jika terus-menerus berlangsung. untuk beberapa tahun lamanya dapat menimbulkan suatu defisit didalam neraca pembayaran. Inilah sebenarnya yang telah dialami beberapa negara didunia semenjak tahun 1967. Tekanan-tekanan dalam neraca pembayaran tersebut demikian besarnya, sehingga inggris misalnya telah terpaksa mengambil tindakan-tindakan drastis untuk mengamatkannya dengan mengadakan tindakan moneter dan fiskal didalam negeri maupun dalam bidang kurs valuta asing. Setiap tindakan yang diambil untuk mengkoreksi neraca pembayaran selalu ditujukan untuk disatu pihak mengerem impor dan dilain pihak mendorong ekspor. .

Salah satu cara yang selalu dipergunakan dalam mengerem impor adalah merubah kurs menjadi lebih tinggi; artinya mengadakan suatu depresiasi daripada nilai mata uang. Dengan kurs yang lebih tinggi diharapkan ekspor dapat didorong karena hal ini merupakan perangsang yang lebih besar bagi ekspor.

Kalau dilihat dari segi luar negerinya, tindakan ini berarti membuat barang-barang dinegara yang merubah kursnya tadi menjadi lebih murah, sehingga lebih

menarik untuk membeli atau mengimpor dari negara tersebut. Dengan demikian perubahan daripada kurs selalu merupakan tindakan pertama yang dilakukan didalam mencapai keseimbangan kembali dari neraca pembayaran.

Tindakan kedua untuk mengekang inflasi biasanya dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga. Hal ini dimaksudkan untuk membuat kredit menjadi lebih mahal sehingga pertambahan uang beredar didalam masyarakat dapat dikendalikan.

Penyesuaian dalam neraca pembayaran melalui perubahan kurs pertama kali dilakukan oleh Inggris yang terpaksa mengadakan devaluasi daripada poundsterlingnya, dan disusul kemudian oleh Perancis dan Jerman Barat.

Setelah negara-negara Eropa mengambil tindakan-tindakan demikian maka semenjak tahun 1969 neraca pembayarannya bertambah lama bertambah baik sehingga akhirnya negara-negara tersebut, terutama negaranegara di Eropa Barat, berhasil menciptakan suatu surplus didalam neraca pembayarannya.

Akan tetapi pada waktu negara-negara Eropa telah dapat memperbaiki keadaan ekonominya, sebaliknya neraca pembayaran Amerika Serikat kerap menunjukkan defisit. Bahkan defisit tersebut semakin lama semakin besar sedang tingkat inflasinya juga semakin lama semakin bertambah besar.

Bagi Amerika Serikat, tindakan penyesuaian atau depresiasi daripada maca uangnya untuk menghapuskan defisit pada neraca pembayarannya rupa-rupanya agak sulit. Hal ini disebabkan karena beberapa hal :

Pertama, didalam dunia perdagangan internasional, dollar merupakan mata uang cadangan atau *reserve currency* yang telah diterima sebagai alat likuiditas internasional dan pula sebagai patokan antara marl uang asing yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian maka setiap perubahan daripada dollar akan jelas mengakibatkan perubahan-perubahan kurs mata uang asing lainnya yang dapat menimbulkan kegontyangan-kegontyangan dalam perdagangan internasional.

Kedua, suatu perubahan nilai daripada dollar harus dilakukan terhadap emas. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain dimana perubahan nilai suatu marl uang dilakukan terhadap dollar. Mengingat bahwa di Amerika Serikat nilai dollar terhadap emas dilakukan melalui undang-undang, maka pelaksanaan perubahan nilai dollar menyangkut masalah yang rumit seperti persetujuan kongres, akibat-akibat spekulasi emas kalau diketahui bahwa akan ada perubahan harga emas, naiknya claim dollar daripada negara-negara yang mempunyai cadangan emas yang besar (perancis, Negeri Belanda, dsb.), dan sebagainya.

Dengan demikian maka di Amerika Serikat terlihat suatu gejala dimana inflasi terus bertambah besar tetapi keadaan ekonominya mengalami suatu kelesuan. Didalam dua tahun akhir ini tingkat pengangguran telah naik dari 3,6% menjadi 6,1%. Disamping itu *idle capacity* daripada alat-alat produksinya juga terus meningkat sehingga pada waktu ini mencapai 27% daripada kapasitas penuh. Untuk suatu ekonomi yang efisiensinya sudah tinggi seperti Amerika Serikat, angka ini merupakan angka yang agak tinggi. Disatu pihak pengangguran naik, dilain pihak *idle capacity* daripada barang-barang modalnya bertambah besar dibarengi dengan suatu keadaan dimana harga-harga terus menaik. Timbullah suatu gejala yang dikenal sebagai keadaan "*stagflation*", yaitu kombinasi dari "*stagnation*" dan "*inflation*".

Untuk menanggulangi keadaan ini pada mulanya pemerintah, Amerika Serikat mempertahankan tingkat bunga bank pada tingkat yang tinggi. Hal ini dimaksudkan agar inflasi dapat direm dengan membatasi pertambahan kredit. Kebijakan ini ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan, bahkan jumlah pengangguran kerap bertambah besar sehingga akhirnya menimbulkan kecaman-kecaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Menjelang tahun 1970 kebijakan tersebut diroboh dan diganti dengan menurunkan suku bunga. Dengan kebijakan baru tersebut, yang kemudian juga dilengkapi dengan penurunan pajak, diharapkan dapat menggairahkan ekonomi kembali dan dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam neraca pembayaran.

Kebijakan untuk mengbilangkan defisit neraca pembayaran ternyata tidak dapat dicapai bahkan kesulitan tersebut menjadi lebih tajam. Dollar yang mengalir ke Eropa Barat justru bertambah besar pada waktu diadakan perubahan kebijakan tersebut.

Dalam periode tersebut negara-negara Eropa Barat pada umumnya sedang menjalankan suatu "*tight money policy*" dalam mengatasi masalah inflasi dalam negerinya. Hal ini antara lain dilakukan melalui suatu tingkat bunga yang tinggi guna membatasi perluasan kreditnya.

Dengan demikian maka terdapatlah dua struktur suku bunga yang berbeda, yaitu suku bunga yang tinggi dinegara-negara Eropa Barat dan suku bunga yang rendah di Amerika Serikat. Keadaan inilah yang justru telah menyebabkan makin deras mengalirnya modal jangka pendek dari Amerika Serikat ke Eropa Barat.

Mengalirnya dollar ke Eropa ternyata disertai juga dengan gejala lain dibidang perdagangan emas internasional.

Sebelum tahun 1933 Amerika Serikat telah menganut suatu sistem emas dimana pemerintahnya selalu bersedia menukar setiap dollar dengan emas. Hal ini dikenal dengan sistem standar emas. Artinya siapa saja, baik itu perorangan, bank ataupun Pemerintah, dapat menukarkan mata uang dollar dengan emas yang ekuivalen dengan nilai dollar tersebut.

Pada bulan April 1933 pemerintah Amerika Serikat telah memutuskan untuk tidak lagi mengadakan penukaran emas terhadap dollar untuk perorangan. Setelah April 1933 sistem tersebut dikenal sebagai "*gold exchange standard*", dimana hanya Bank Sentral dan Pemerintah saja yang dapat menukar dollar dengan emas.

Perubahan tersebut diadakan karena sistem lama telah mempengaruhi cadangan emas Amerika Serikat sedemikian rupa hingga telah mulai banyak emas mengalir keluar Amerika Serikat. Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1970 cadangan emas Amerika Serikat telah merosot dalam jumlah yang besar, yaitu dari kurang lebih \$ 21 miliar menjadi sekitar \$ 10,5 miliar. Sebaliknya negara-negara diluar Amerika Serikat dalam jangka waktu yang sama cadangan emasnya telah meningkat dari kurang lebih \$ 13 miliar menjadi \$ 26 miliar.

Gejala berkurangnya cadangan emas Amerika Serikat ini dalam tahun 1968 telah menyebabkan adanya spekulasi dalam pasaran emas. Para spekulasi emas pada waktu itu memperkirakan bahwa pemerintah Amerika Serikat pasti akan menaikkan harga emas untuk melindungi cadangan emasnya. Hal ini telah menyebabkan terjadinya suatu *rush* untuk membeli emas secara besar-besaran di beberapa pasaran emas internasional. Pada waktu itu harga emas telah meningkat menjadi sekitar \$ 45 per *troy ounce*, yang resminya harganya hanya \$ 35 per *troy ounce*.

Oleh negara-negara yang mempunyai cadangan emas yang besar kemudian diambil suatu kebijaksanaan untuk menentukan dua harga emas, yaitu untuk transfer resmi tetap dipergunakan harga \$ 35, tetapi untuk pasaran bebas diserahkan kepada kekuatan pasar. Sistem ini, yang disebut "*two tier system*" dalam bidang emas, ternyata dapat meredakan spekulasi emas yang terjadi pada waktu itu.

6.1.2. Perkembangan di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang

Sementara itu neraca pembayaran Amerika Serikat terus menerus mengalami defisit, yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. adanya kewajiban pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada negara-negara lain.

2. adanya pengeluaran untuk keperluan pertahanannya, baik di Eropa, Asia maupun Jepang.

Hal ini telah menyebabkan neraca pembayarannya mengalami tekanan yang berat. Namun demikian defisit tersebut selama itu masih belum mempengaruhi neraca perdagangannya, yang masih tetap dapat dipertahankan untuk menghasilkan suatu surplus.

Keadaan ini ternyata tidak dapat dipertahankan sehingga akhirnya dalam bulan April 1971 juga neraca perdagangan Amerika Serikat telah mengalami defisit untuk pertama kalinya sejak tahun 1893, yaitu sebesar \$ 215 juta. Defisit ini dalam bulan-bulan berikutnya telah meningkat sedemikian rupa hingga akhirnya perini diambil tindakan pengamanannya. Pada tanggal 15 Agustus 1971 Presiden Nixon telah mengambil beberapa tindakan guna mengatasi keadaan ini berupa :

A. Tindakan keluar :

1. Penghapusan konvertibilitas dollar terhadap emas;
2. Pengenaan bea masuk 10% terhadap semua barang impor;
3. Pemotongan bantuan luar negeri sebesar 10%.

B. Tindakan kedalam :

1. Pembekuan gaji dan upah
2. Pembekuan harga-harga dalam negeri
3. Penurunan pajak penjualan bagi kendaraan bermotor.

Tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan tidak saja untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran, tetapi juga sekaligus untuk menekan inflasi.

Pada permulaan tahun 1971 mengalirnya dollar dari Amerika Serikat ke Eropa terus meningkat sehingga tidak dapat dipertahankan lagi oleh beberapa negara di Eropa.

Dalam bulan Mei pemerintah Jerman Barat memutuskan pengambangan dari kurs DM, diikuti kemudian dengan floating mata uang Belanda. Swiss dan Austria langsung mengadakan revaluasi, masing-masing sebesar 5% dan 7% daripada mata uangnya. Akan tetapi sementara itu Perancis dan Belgia tidak bersedia merubah kursnya, melainkan mengadakan perbedaan kurs, yaitu untuk *commercial transactions* tetap mempertahankan kurs yang lama, sedang untuk *capital transactions* kursnya dilepaskan kepasar. Adanya dua mata uang harga ini dikenal sebagai "*two tier exchange system*".

Tidak lama kemudian yen Jepang terpaksa mengikuti dengan mengambangkan kursnya mengingat derasnya pemasukan dollar yang sulit dipertahankan atas dasar kurs lama.

Revaluasi atau pengembangan kurs berarti apresiasi daripada mata uang, atau membuat mahal mata uangnya terhadap mata uang lain. Ini berarti bahwa setiap revaluasi selalu akan memukul ekspor. Berkurangnya ekspor berarti menurunnya kegiatan ekonomi dan hal ini akhirnya akan menimbulkan bertambahnya pengangguran. Keadaan ini sebaliknya akan dapat mengakibatkan tekanan-tekanan politik didalam negeri yang sulit dielakkan.

Oleh karena itu setiap *floating at au revaluasi* daripada mata uang dijaga betul oleh negara-negara tersebut agar tidak terlampau tinggi. Semakin tinggi revaluasi atau *floatingnya*, semakin besar pula pengorbanan yang harus dilakukan terhadap ekonominya.

Khusus mengenai Jepang yang paling berkeberatan mengadakan revaluasi atau *floating system* - sebabnya ialah karena ekspor Jepang baik ke Amerika Serikat maupun ke Eropa Barat adalah besar, sehingga Amerika Serikat mempunyai defisit sebesar \$ 1,4 miliar dalam perdagangannya dengan Jepang pada tahun 1969 dan \$ 1,2 miliar pada tahun 1970. Untuk tahun 1971 dikhawatirkan defisit ini akan menjadi lebih tinggi dari tahun 1969. . Komitmen daripada industri baja, industri perkapalan, elektronika, dan sebagainya terhadap pihak ketiga telah mencapai bermiliar-miliar dollar.

Mengingat bahwa komitmen tersebut dinyatakan dalam dollar, maka suatu revaluasi beberapa persen saja berarti suatu kerugian yang dapat mencapai beratus-ratus juta dollar. Oleh karena itu Jepang selalu berusaha untuk sejauh mungkin mempengaruhi perkembangan pengembangan kurs mata uangnya dengan jalan intervensi. Bahkan pada waktu ditentukan untuk mengembangkan yen, keadaan neraca pembayarannya adalah demikian rupa sehingga banjirnya dollar ke Jepang tidak dapat tertahan lagi. Pada waktu pemerintah Jepang mengambil keputusan untuk mengadakan *floating* daripada yen, jumlah daripada surplus dollar yang ada di Jepang sudah sama dengan surplus dollar yang masuk ke Jerman Barat.

Nyatalah bahwa disatu pihak negara-negara ini bertahan untuk tidak mengadakan revaluasi karena hal ini berarti merugikan ekonominya, dilain pihak pemerintah Amerika Serikat telah mengambil tindakan-tindakan yang sangat mempengaruhi ekonomi negara-negara lain yang untuk perbaikan ekonominya memang sebenarnya merupakan tindakan-tindakan yang mutlak harus dilakukan.

Dengan demikian maka krisis moneter internasional dewasa ini masalahnya tidak hanya sekedar masalah perubahan kurs, tetapi mempunyai latar belakang kepentingan-kepentingan ekonomi yang sangat dalam.

6.1.3. Pengaruh Krisis Moneter Internasional

Keadaan moneter internasional tersebut pada suatu ketika pasti akan menimbulkan keresuan dalam perdagangan internasional. Resesi yang sekarang sudah terlihat secara kecil-kecilan (*mini-recession*) akan mempengaruhi pula ekspor Indonesia. Dengan terjadinya resesi maka permintaan akan barang-barang, terutama bahan baku, bahan mentah, dan sebagainya akan menjadi berkurang. Bahkan pada waktu ini para pedagang di Eropa, Amerika maupun Jepang pada umumnya sudah tidak bersedia lagi mengadakan kontrak-kontrak penjualan untuk jangka panjang. Semua kontrak didasarkan atas kontrak jangka pendek mengimbat bahwa keadaan yang tidak menentu didalam dunia moneter internasional membawa risiko kerugian bila terjadi perubahan kurs mata uang asing.

Agar ekspor Indonesia tetap dapat mempertahankan daya saingnya di pasaran internasional dan harga barang-barang ekspornya tetap menarik maka perlu diberikan perangsang dalam bentuk kurs yang lebih menguntungkan bagi eksportir. Dalam rangka inilah maka pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus yang lalu telah mengambil tindakan untuk segera mengadakan penyesuaian daripada kurs rupiah terhadap mata uang asing.

6.2. Perkembangan Neraca Pembayaran

Gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1971/1972 dapat diperoleh dengan membandingkan angka-angka realisasi tahun 1970/1971, angka perkiraan 1971/1972 dan realisasi sementara tahun 1971/1972.

Realisasi sementara transaksi berjalan dalam tahun anggaran 1971/ 1972 diperkirakan mengalami defisit sebesar US \$ 475 juta. Dalam pada itu defisit transaksi berjalan dalam perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 adalah sebesar US \$ 560 juta. Ini berarti bahwa defisit transaksi berjalan berdasarkan realisasi sementara lebih kecil sebesar US \$ 85 juta atau 15,2%. Bila dibandingkan dengan realisasi transaksi berjalan tahun 1970/1971 dimana terdapat defisit sebesar US \$ 368 juta, maka defisit transaksi berjalan didalam realisasi sementara tahun 1971/1972 meningkat sebesar US \$ 107 juta atau 29,1 %.

Defisit transaksi berjalan dalam tahun 1971/1972 tersebut diimbangi dengan pemasukan modal netto yang diperkirakan akan mencapai jumlah US \$ 495 juta.

Dengan memperhatikan adanya kesalahan yang tidak terduga didalam realisasi sementara tahun 1971/1972 sebesar US\$56 juta maka neraca pembayaran diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US \$ 36juta.

6.2.1. Transaksi Berjalan

Ekspor

Realisasi sementara nilai ekspor tanpa minyak dalam tahun 1971/1972 diperkirakan sebesar US \$ 790 juta, sedang perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 nilai ekspor diperkirakan mencapai US \$ 800 juta.

Bila realisasi sementara nilai ekspor tanpa minyak tahun 1971/1972 dibandingkan dengan realisasi tahun 1970/1971 terdapat kenaikan sebesar US \$ 29 juta atau 3,8%. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya ekspor tembakau, lada, kayu dan sebagainya.

Dalam pada itu realisasi sementara ekspor minyak dalam tahun 1971/1972 berjumlah US \$574 juta, sedang menurut perkiraan neraca pembayaran dalam tahun anggaran 1971/1972 ekspor minyak ini berjumlah US \$ 500 juta. Kalau dibandingkan realisasi sementara ekspor minyak dalam tahun 1971/1972 dengan realisasi tahun 1970/1971 yang jumlahnya US \$ 443 juta terdapat kenaikan sebesar US \$ 131 juta atau 29,6%. Berdasarkan ini maka realisasi sementara ekspor minyak dan tanpa minyak berjumlah US \$ 1.364 juta, sedang realisasi tahun 1970/1971 sebesar US \$ 1.204 juta berarti ada kenaikan sebesar 13,3% dalam tahun 1971/1972.

Impor

Realisasi sementara nilai impor tanpa minyak dalam tahun 1971/1972 berjumlah US \$ 1.149 juta, sedang menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 sebesar US \$ 1.235 juta.

Bila realisasi sementara tahun 1971/ 1972 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 1970/1971 sebesar US \$ 1.012 juta, maka terdapat kenaikan sebesar US \$ 137 juta atau 13,5%. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya impor modal swasta, impor dengan devisa kredit, impor dengan bantuan proyek dan impor dengan merchant's L/C

Sedangkan realisasi sementara impor minyak tahun 1971/1972 berjumlah US \$ 133 juta. Adapun menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 impor minyak ini akan mencapai US \$ 130 juta.

Dalam pada itu realisasi impor minyak tahun 1970/1971 berjumlah US \$ 94 juta, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi sementara tahun 1971/1972 terdapat kenaikan dalam tahun ini sebesar US \$ 39 juta atau 41,5%. Dengan demikian maka realisasi impor minyak dan tanpa minyak tahun 1971/1972 berjumlah US \$ 1.282 juta, sedangkan realisasi tahun 1970/1971 berjumlah US \$ 1.106 juta berarti ada kenaikan sebesar 15,9% dalam tahun 1971/1972.

Jasa - Jasa

Realisasi sementara pengeluaran jasa-jasa tanpa minyak dalam tahun anggaran 1971/1972 berjumlah US \$ 308 juta, sedang menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 jasa-jasa tanpa minyak ini berjumlah US \$ 270 juta.

Bila dibandingkan antara realisasi sementara tahun 1971/1972 dengan realisasi tahun 1970/1971 yang jumlahnya US \$ 252 juta, maka terdapat kenaikan pengeluaran jasa-jasa sebesar US \$ 56 juta atau 22,2%.

Dalam pada itu realisasi sementara pengeluaran jasa-jasa minyak tahun 1971/1972 berjumlah US \$ 249 juta, sedang menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 sebesar US \$ 225 juta.

Bila realisasi sementara pengeluaran jasa-jasa minyak dalam tahun 1971/1972 yang jumlahnya US \$ 249 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 1970/1971 yang besarnya US \$ 214 juta terdapat kenaikan sebesar US \$ 35 juta atau 16,4%.

Jadi pengeluaran jasa-jasa minyak dan tanpa minyak menurut realisasi sementara tahun 1971/1972 berjumlah US \$ 557 juta, sedang menurut realisasi tahun 1970/1971 mencapai US \$ 446 juta, berarti terdapat kenaikan dalam tahun 1971/1972 sebesar 19,5%.

Minyak

Seperti diuraikan diatas maka menurut realisasi sementara dalam tahun anggaran 1971/1972 perkembangan ekspor, impor dan jasa-jasa minyak masing-masing adalah sebesar US \$ 574 juta, US \$ 133 juta dan US \$ 249 juta. Berdasarkan hal-hal ini maka penerimaan minyak bersih dalam tahun anggaran ini berjumlah US \$ 192 juta.

Menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 perkembangan ekspor, impor dan jasa-jasa minyak masing-masing sebesar US \$ 500 juta, US \$ 130 juta dan US \$ 270 juta, sehingga penerimaan minyak bersih diperkirakan mencapai US \$ 145 juta.

Sedang perkembangan realisasi tahun 1970/1971 masing-masing untuk ekspor, impor dan jasa-jasa minyak berjumlah US \$ 443 juta, US \$ 94 juta dan US \$ 214 juta, sehingga penerimaan minyak bersih sebesar US \$ 135 juta.

Kalau dibandingkan antara realisasi sementara tahun 1971/1972 dengan realisasi tahun 1970/1971 ternyata terdapat kenaikan ekspor, impor dan jasa-jasa minyak serta penerimaan minyak bersih masing-masing sebesar 29,6%, 41,5% dan 16,1 % serta 42,2%.

Dengan diketahuinya hal-hal diatas maka realisasi sementara transaksi berjalan tahun 1971/1972 mengalami defisit sebesar US \$ 475 juta, dimana sebesar US \$ 667 juta berasal dari tanpa minyak dan US \$ 192 juta berasal dari penerimaan minyak bersih. Sedang menurut perkiraan neraca pembayaran tahun 1971/1972 transaksi berjalan mengalami defisit sebesar US \$ 560 juta dimana US \$ 705 juta berasal dari tanpa minyak dan penerimaan minyak bersih sebesar US \$ 145 juta. Dalam pada itu menurut realisasi tahun 1970/1971 maka transaksi berjalan mengalami defisit sebesar US \$ 368 juta, dimana US \$ 503 juta berasal dari tanpa minyak dan US \$ 135 juta dari penerimaan minyak bersih. Kalau dibandingkan defisit transaksi berjalan antara realisasi sementara tahun 1971/1972 dengan realisasi tahun 1970/1971 maka dalam realisasi sementara tahun 1971/1972 terdapat kenaikan sebesar US \$ 107 juta atau 29,1%. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya impor tanpa minyak dan pengeluaran jasa-jasa.

Tabel VI.1.
NERACA PEMBAYARAN, 1970/1971 - 1971/1972
(dalam jutaan US \$)

	1970/1971 (realisasi)	1971/1972 (perkiraan)	1971/1972 sementara)	% terhadap
I. Barang2 dan jasa2				
1. Ekspor, f.o.b.	+ 1.204	+ 1.300	+ 1.364	+
M i n y a k	+ 443	+ 500	+ 574	+
Tanpa minyak	+ 761	+ 800	+ 790	+
2. Impor, f.o.b.	- 1.1 06	- 1.365	- 1.282	+
Minyak	- 94	- 130	- 133	+
Tanpa minyak	- 1.012	- 1.235	- 1.149	+ 13,5
3. Jasa2	- 466	- 495	- 557	+ 19,5
Minyak	- 214	- 225	- 249	+ 16,4
Tanpa minyak	- 252	- 270	- 308	+ 22,2
4. Transaksi ber jalan	- 368	- 560	- 475	+ 29,1
Minyak	+ 135	+ 145	+ 192	+ 42,2
Tanpa minyak	- 503	- 705	- 667	+ 32,6
SDR	+ 28	p.m.	p.m.	-
III. Lalu lintas modal dan transfer	+ 484	+ 671	+ 598	+ 23,5
1. Pemerintah	+ 373	+ 545	+ 445	+ 19,3
2. Swasta	+ 111	+ 126	+ 153	+ 37,8
IV. Pembayaran kembali hutang	- 68	- 95	- 103	+ 51,5
V. JUMLAH (I s/d IV)	+ 76	+ 16	+ 20	- 73,7
VI. Kesalahan tak terduga	- 55	-	- 56	-
VII. Lalu lintas moneter	- 21	- 16	+ 36	-
1. Posisi IMF	+ 29)			
2. Hutang jangka pendek	- 50)	- 16	+ 36	
3. Piutang jangka pendek	-)			

Samber : Bank Indonesia.

6.2.2. Pemasukan Modal

Menurut realisasi sementara tahun 1971/1972 pemasukan modal netto berjumlah US \$ 495 juta, dimana pemasukan modal sektor pemerintah dan sektor swasta masing-masing berjumlah US \$ 445 djuia dan US \$ 153 juta. Pembayaran kembali hutang-hutang dalam periode tersebut berjumlah US \$ 103 juta.

Dalam pada itu pemasukan modal sektor pemerintah dan sektor swasta menurut perkiraan neraca pembayaran 1971/1972 masing-masing berjumlah US \$ 545 juta dan US \$ 126 juta. Sedangkan pembayaran kembali hutang-hutang dalam masa tersebut adalah sebesar US \$ 95 juta.

Bila dibandingkan dengan pemasukan modal berdasarkan perkiraan neraca pembayaran 1971/1972 dimana pemasukan modal netto berjumlah US \$ 576 juta, maka pemasukan modal netto didalam realisasi semmentaranya lebih kecil US \$ 81 juta atau 14,1 %.

Realisasi pemasukan modal netto tahun 1970/1971 termasuk penerimaan S D R sejumlah US \$ 28 juta adalah sebesar US \$ 444 juta, dimana pemasukan modal sektor pemerintah dan sektor swasta serta pembayaran hutang dalam periode tersebut masing-masing adalah sebesar US \$ 373 juta dan US \$ 111 juta serta US \$ 68 juta. Ini berarti bahwa pemasukan modal netto berdasarkan realisasi sementara tahun 1971/1972 mengalami kenaikan sebesar US \$ 51 juta atau 11,5%.

Pemasukan modal netto tersebut digunakan untuk menutup defisit transaksi berjalan masing-masing dalam periode yang bersangkutan, sehingga dengan memperhatikan adanya pos kesalahan-kesalahan yang tidak terduga dalam realisasi sementara tahun 1971/1972 sebesar US \$ 56 juta, maka neraca pembayaran diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US \$ 3.6 juta.

Menurut perkiraan tahun 1971/1972 neraca pembayaran akan surplus sebesar US \$ 16 juta.

6.3. Perkembangan Realisasi Ekspor

Gambaran yang lebih jelas tentang realisasi perkembangan ekspor barang-barang golongan utama dan barang-barang lainnya tahun 1971/1972 bila dibandingkan perkembangan ekspor barang-barang tersebut dengan realisasi perkembangan ekspor tahun 1970/1971 adalah sebagai berikut.

Realisasi perkembangan ekspor barang-barang golongan utama tahun 1971/1972 dan 1970/1971 masing-masing sampai dengan bulan Agustus berjumlah US \$ 184,6 juta dan US \$ 205,7 juta. Dengan demikian maka realisasi ekspor tahun 1971/1972 ini mengalami penurunan

US \$ 21,3 juta atau 10,3%. Hal ini disebabkan antara lain karena turunnya ekspor karet dan kopra. Menurunnya ekspor karet tersebut disebabkan antara lain karena harga dipasar internasional menurun sebagai akibat dilepaskannya *stock-pile* karet Amerika Serikat. Disamping itu karena data dari beberapa barang-barang ekspor golongan utama ini belum tercatat maka nilai total sampai dengan Agustus 1971/1972 tersebut belum lengkap.

Dalam pada itu realisasi ekspor barang-barang golongan lainnya dalam tahun 1970/1971 sampai dengan bulan Agustus berjumlah US \$ 123,9 juta. Sedangkan realisasi ekspor barang-barang yang sama tahun 1971/1972 sampai dengan Agustus adalah sebesar US \$ 80,5 juta. Dengan demikian maka realisasi ekspor barang-barang tersebut dalam tahun 1971/1972 mengalami kenaikan sebesar US \$ 43,4 juta atau

53,9%. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya ekspor kayu, yaitu dari US \$ 43,7 juta tahun 1970/1971 menjadi US \$ 67,8 juta tahun 1971/1972 atau meningkat dengan 58,8%.

Tabel V1.2.

**REALISASI PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR
BARANG-BARANG UTAMA DAN BARANG-BARANG LAINNYA**
(dalam jutaan US \$)

		1970/1971* (realisasi)	1971/1972* (sementara)	Pertumbuhan dalam %	
I.	Barang2 utama	205,7	184,6	-	10,3
	Karet	117,5	93,0	-	20,8
	Kopra	13,5	5,1	-	62,2
	Ko pi	24,0	22,5	-	6,3
	Tembakau	4,7	11,4	+	142,6
	Minyak sawit	15,3	10,7	-	30,1
	Biji sawit	2,0	1,9	-	5,0
	Lada	1,2	8,5	+	608,3
	Timah	27,5	31,5	+	14,5
II.	Barang2 ainnya	SO,S	113,9	+	53,9
	Kayu	42,7	67,8	+	58,8
	Teh	8,7	11,8	+	35,6
	Bungkil kopra	1,9	2,8	+	47,4
	Sisal	-	-	-	-
	Kulit kering	2,5	3,2	+	28,0
	Rotan	0,8	0,3	-	62,5
	Bunga & Biji pala	1,2	0,7	-	41,7
	Lainnya	22,7	37,3	+	64,3
III.	Jumlah (I+II)	286,2	308,5	+	7,8

Sumber : Bank Indonesia.

6.3.1 Realisasi Ekspor Barang-Barang Utama Karet

Sampai dengan bulan Agustus 1971/1972 nilai ekspor karet berdjurnlab US \$ 93,0 juta sedangkan realisasi ekspor karet sampai dengan bulan Agustus 1970/1971 berjumlah US \$ 117,5 juta.

Dengan demikian maka dalam tahun 1971/1972 nilai ekspor karet mengalami penurunan sebesar US \$ 24,5 diuta atau 20,8%. Turunnya ekspor karet tahun 1971/1972 ini disebabkan karena harga barang tersebut di pasar internasional menurun sebagai akibat dari dilepaskannya *stock-pile* karet. Untuk rnendapat garnbaran yang lebih jelas

ten tang perkembangan harga karet dipasar internasional ini dapat diikuti didalam **Tabel VI. 3.**

Kopra.

Realisasi ekspor kopra tahun 1971/1972 dan 1970/1971 masingmasing sampai dengan bulan Agustus tahun yang bersangkutan berjumlah US \$ 5,1 juta dan US \$ 13,5 juta. Dengan demikian maka nilai ekspor kepra dalam tahun 1971/1972 tersebut mengalami penurunan sebesar US \$ 8,4 juta atau 62,2%. Turunnya ekspor kopra ini antara lain disebabkan karena menurunnya harga kopra dipasar internasional sebagai akibat dari bertambah baiknya persediaan kopra dipasar dunia. Disamping itu karena data mengenai ekspor kopra belum lengkap, maka nilai ekspor untuk 1971/1972 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1970/1971.

K o p i

Sampai dengan bulan Agustlis 1971/1972 realisasi sernentara ekspor kepi berjumlah US \$ 22,5 juta. Sedangkan nilai ekspor kopi didalam periode yang sama rahun 1970/1971 berjumlah US \$ 24,0juta. Hal ini berarti bahwa didalam tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Agustus nilai ekspor kopi mengalami penurunan sebesar *US \$ 1,5 juta* atau 6,3%. Menurunnya ekspor kepi tahun 1971/1972 disebabkan karena antara lain dikurangnya quota ekspor kopi, sedangkan ekspor kenegara-negara non quota kurang berkermbang dengan baik.

Tembakau

Realisasi ekspor ternbakau dalam tahun 197111972 dan 1970/1971 masingmasing sampai dengan bulan Agustus tahun yang bersangkutan berjumlah *US \$ 11,4 juta* dan *US \$ 4,7 juta*. Dengan demikian maka nilai ekspor ternbakau dalam tahun *1971/1972* mengalami kenaikan sebesar *US \$ 6,7 juta* atau 142,6%. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena panen ternbakau yang baik dalam tahun 1971/1972 dibandingkan dengan tahun 1970/1971.

Minyak sawit

Dalam tahun 1971/1972 realisasi ekspor minyak sawit sampai dengan bulan Agustus berjumlah *US \$ 10,7 juta*. Sedangkan untuk periode yang sama tahun 1970/1971 nilai ekspornya sebesar *US \$ 15,3 juta*. Dengan demikian maka realisasi

ekspor minyak sawit tahun 1971/1972 tersebut mengalami penurunan sebesar US \$ 4,6 juta atau 30,1%. Menurunnya ekspor ini disebabkan antara lain karena harga minyak sawit dipasar internasional menurun sebagai akibat dari bertambahnya persediaan minyak sawit dipasar dunia.

Biji sawit

Nilai ekspor biji sawit dalam tahun 1971/1972 dan 1970/1971 masing-masing sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berjumlah US \$ 1,9 juta dan US \$ 2,0 juta. Ini berarti bahwa nilai ekspor biji sawit didalam tahun 1971/1972 mengalami penurunan sebesar US \$ 0,1 juta atau 5%. Menurunnya ekspor ini disebabkan antara lain karena harga barang tersebut dipasar internasional mengalami penurunan.

Lada

Realisasi ekspor lada tahun 1971/1972 dan 1970/1971 masing-masing sampai dengan bulan Agustus berjumlah US \$ 8,5 juta dan US \$ 1,2 juta. Hal ini berarti bahwa dalam tahun 1971/1972 mengalami peningkatan sebesar US \$ 7,3 juta atau 608,3%. Kenaikan ini disebabkan karena panen lada didalam tahun 1971/1972 mengalami peningkatan yang besar sekali dan *carry over* tahun yang lalu.

Timah

Perkembangan nilai ekspor timah dalam tahun 1971/1972 dan 1970/1971 masing-masing sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berjumlah US \$ 31,5 juta dan US \$ 27,5 juta. Dengan demikian maka nilai ekspor timah tahun 1971/1972 tersebut mengalami kenaikan sebesar US \$ 4,0 juta atau 14,5%. Meningkatnya ekspor timah ini antara lain disebabkan karena volume ekspor menunjukkan kenaikan.

6.3.2. Realisasi Ekspor Barang-Barang Golongan Lainnya

K a y u

Nilai ekspor kayu sampai dengan bulan Agustus tahun 1971/1972 berjumlah US \$ 67,8 juta. Bila dibandingkan dengan tahun 1970/1971 sampai dengan periode yang

sama dimana nilai ekspor kayu sebesar US \$ 42,7 juta, maka didalam tahun 1971/1972 ini nilai ekspor kayu mengalami peningkatan sebesar US \$ 25,1 juta atau 58,8%. Naiknya nilai ekspor kayu ini antara lain karena volume ekspor kayu dalam periode tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat pesat.

Teh

Realisasi ekspor teh dalam tahun 1971/1972 dan 1970/1971 masingmasing sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan berjumlah US \$ 11,8 juta dan US \$ 8,7 juta. Dengan demikian maka dalam tahun 1971/1972 realisasi ekspor teh mengalami kenaikan sebesar US \$ 3,1 juta atau 35,6%. Meningkatnya nilai ekspor teh ini disebabkan karena meningkatnya volume ekspor barang-barang tersebut, meskipun harganya menunjukkan keadaan yang konstan didalam periode tersebut diatas.

Golongan Lainnya Diluar Kayu

Realisasi ekspor barang-barang golongan lainnya diluar kayu dan teh tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran tersebut berjumlah US \$ 44,3 juta, sedangkan tahun 1970/1971 sampai dengan bulan Agustus berjumlah US \$ 29,1 juta. Dengan demikian maka realisasi ekspor barang-barang lainnya diluar kayu dalam tahun 1971/1972 menunjukkan kenaikan sebesar US \$ 15,2 juta atau 52,2%. Meningkatnya nilai ekspor golongan barang lainnya diluar kayu dan teh disebabkan antara lain karena disamping volume dari berbagai barang ekspor mengalami peningkatan juga harganyapun menunjukkan keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1970/1971.

6.4. Perkembangan Realisasi Impor

Perkembangan realisasi impor tahun 1971/1972 dapat dijelaskan dengan mengadakan perbandingan antara realisasi impor dalam periode tersebut dengan realisasi impor tahun 1970/1971.

Realisasi impor tahun 1971/1972 sampai dengan bulan Juli periode tersebut berjumlah US \$ 306,0 juta dimana impor barang-barang konsumsi, bahan baku/penolong dan impor barang modal masing-masing sebesar US \$ 73,4 juta atau 24,0%, US \$ 135,5 juta atau 44,3% dan US \$ 97,1 juta atau 31,7%.

Dalam pada itu realisasi impor 1970/1971 sampai dengan bulan yang sama

berjumlah US \$ 369,3 juta dimana impor barang-barang konsumsi, baku/penolong dan impor barang-barang modal masing-masing sebesar 28,0%, 36,9% dan 35,1%. Dengan demikian maka realisasi impor tahun 1971/1972 terjadi pergeseran ke impor bahan baku/penolong dan barang-barang modal. Hal ini disebabkan karena didalam tahun 1971/1972 ini kegiatan pembangunan ekonomi semakin meningkat.

6.5. Hutang-Hutang Luar Negeri

Dalam bulan April 1970 tercapai persetujuan dengan negara-negara yang bergabung dalam apa yang disebut "*Paris Club*" yakni negara-negara Perancis, Belanda, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Jerman Barat dan Italia, mengenai penundaan pembayaran hutang-hutang lama.

Berdasarkan hal ini kemudian diadakan persetujuan-persetujuan bilateral dengan pemerintah Belanda, Perancis, Jerman Barat, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan dua negara lainnya yang tergabung dalam "*Paris Club*" yaitu Inggris dan Italia diharapkan dalam waktu dekat akan ditanda tangani persetujuan yang sama. Penanda tangian persetujuan dengan rumusan yang sama mengenai pembayaran hutang telah dilaksanakan pula terhadap negara-negara Sosialis, yaitu negara Uni Sovyet, Jerman Timur, Cekoslovakia, Polandia dan Rumania.

Kebijakan didalam masalah bantuan luar negeri, Pemerintah selalu mengusahakan agar dapat diperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang seringan mungkin baik dalam jangka waktu pembayaran kembali maupun dalam tingkat bunganya. Juga diusahakan agar *grace period* sepanjang mungkin. Perini ditambahkan bahwa bantuan luar negeri hanyalah merupakan pelengkap didalam pembiayaan pembangunan nasional.

6.6. Perkembangan Bantuan Luar Negeri

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan bantuan luar negeri, maka diadakan suatu perbandingan antara penerimaan bantuan luar negeri tahun 1971 dengan 1970.

Dalam **tabel VI.5.** dapat dilihat bahwa dalam tahun 1971 jumlah komitmen yang diadakan sampai dengan bulan September 1971 adalah sebesar US \$ 594,7 juta. Dalam pada itu dari jumlah tersebut yang telah disetujui untuk direalisasikan berjumlah US \$ 594,8 juta. Dari jumlah yang telah disetujui ini maka yang telah digunakan adalah sebesar US \$ 328,8 juta.

Dalam tahun 1970 komitmen berjumlah US \$ 488 juta. Dalam pada itu yang telah disetujui berjumlah US \$ 433,3 juta. Dari jumlah yang telah disetujui ini maka yang telah digunakan adalah sebesar US \$ 387,7 juta.

Perincian dari bantuan luar negeri ini adalah sebagai berikut.

6.6.1. Bantuan program

Sampai dengan bulan September 1971 komitmen dari bantuan program berjumlah US \$ 341,0 juta. Dari jumlah ini yang telah disetujui adalah sebesar US \$ 356,0 juta (termasuk grant), sedang dari jumlah yang telah disetujui ini telah dapat digunakan sebesar US \$ 333,1 juta. Dalam tahun 1970 jumlah komitmen sebesar US \$ 257,4 juta. Dari jumlah ini telah disetujui berjumlah US \$ 236,5 juta yang dapat digunakan seluruhnya.

Perincian dari bantuan program ini adalah sebagai berikut :

Devisa kredit

Jumlah komitmen dalam tahun 1971 adalah sebesar US \$ 141,3 juta. Dari jumlah ini yang telah disetujui berjumlah US \$ 156,3 juta atau 110,6%. Yang telah digunakan berjumlah US \$ 146,5 juta atau 93,7%.

Dalam tahun 1970 jumlah komitmen adalah sebesar US \$ 135,7 juta. Dari jumlah ini yang telah disetujui berjumlah US \$ 118,4 juta atau 87,2% yang seluruhnya telah digunakan.

PL-480

Dalam tahun 1971 komitmen PL-480 berjumlah US \$ 171,7 juta. Jumlah ini telah disetujui seluruhnya. Dari yang telah disetujui ini telah digunakan sebesar US \$ 160,5 juta atau 93,5%.

Pada tahun 1970 komitmen PL-480 berjumlah US \$ 94,5 juta, dimana jumlah ini telah disetujui dan telah digunakan seluruhnya.

Bantuan pangan

Komitmen bantuan pangan tahun 1971 berjumlah US \$ 28,0 juta, dimana seluruhnya disetujui. Dari jumlah yang telah disetujui ini maka telah digunakan US \$ 26,1 juta atau 93,3%. Dalam tahun 1970 komitmen bantuan pangan ini berjumlah US \$ 27,1 juta, sedang dari yang telah disetujui (US \$ 23,6 juta) seluruhnya telah digunakan.

6.6.2. Bantuan proyek

Untuk tahun 1971 komitmen bantuan proyek berjumlah US \$ 253,8 juta. Dari jumlah ini yang telah disetujui berjumlah US \$ 237,3 juta atau 93,5%, sedang dari jumlah ini belum ada yang digunakan.

Dalam tahun 1970 komitmen bantuan proyek berjumlah US \$ 231,0 juta. Dari jumlah ini yang telah disetujui adalah sebesar US \$ 196,8 juta atau 85,2%, sedang yang telah digunakan berjumlah US \$ 45,6 juta atau 23,2%.

6.7. Perkiraan Neraca Pembayaran 1972/1973

6.7.1. Perkiraan Ekspor

Nilai ekspor tanpa minyak tahun 1971/ 1972 adalah sebesar US \$ 790 juta. Jumlah ini diperkirakan berdasarkan realisasi sampai bulan Agustus 1971.

Seperti diketahui pada 23 Agustus 1971 pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu penyesuaian kurs tadinya Rp. 378,- per US \$ menjadi Rp. 415,- per US \$ atau kenaikan sebesar 10%. Kurs ini berlaku baik untuk Devisa Kredit maupun Devisa Umum. Disamping itu pemerintah juga menghapuskan atau mengurangi berbagai beban ekspor.

Jumlah nilai ekspor tanpa minyak sebesar US \$ 790 juta untuk tahun 1971/ 1972 ini dipakai sebagai pegangan untuk memperkirakan nilai ekspor tahun 1972/1973. Beberapa asumsi yang dijadikan pegangan untuk memperkirakan nilai ekspor tanpa minyak untuk tahun 1972/1973 adalah :

1. Komposisi dari ekspor masih tetap pada bahan-bahan seperti kafer, kopra, minyak dan biji sawit, tembakau, teh, kepi, lada, timah, kayu dan beberapa barang ekspor lainnya. Peranan dari ekspor barang kerajinan akan meningkat tapi belum besar;
2. Diperkirakan harga dari ekspor barang-barang utama akan meningkat atau paling tidak tetap. Hal ini berlaku juga bagi ekspor kafer, walaupun Amerika Serikat masih melepaskan *stock-pile*-nya;
3. Volume daripada barang-barang yang diekspor akan meningkat (terutama kayu). Begitu pula dengan karet dimana dengan makin banyaknya *crumb rubber* mutu daripada karet menjadi baik sehingga diharapkan ekspor juga meningkat;
4. Peremajaan dalam berbagai tanaman ekspor telah mulai menunjukkan hasilnya

Tab e l VI.4.
REALISASI PERKEMBANGAN NILAI IMPOR TANPA MINYAK
MENURUT GOLONGAN EKONOMI

(dalam jutaan US \$)

C & F

	1970/1971*)		1971/1972 *)	
	Realisasi	% dari jumlah	Realisasi sementara	% dari jumlah
I. Barang2 konsumsi	103,4	28	73,4	24
Beras	17,7		2,9	
Tepung terigu	27,9		32,3	
Tekstil jadi	12,3		8	
Barang2 konsumsi lain	45,5		30,2	
II. Bahan baku/penolong	136,4	.36,9	.135,5	44,3
Cengkeh	10		4,2	
Bahan kimia	18		11,3	
Hasil & prepara t kimia	3,5		3,9	
Bahan2 tjat	4,9		6,1	
Pupuk	9,8		6	
Kertas	9,6		9,3	
Benang tenon	12,7		17,8	
Cambric shirting	1,4		0,6	
Semen	4,4		3,3	
Hasi12 dari besi & badja	13		14,7	
Bahan baku/penolong lain	49,1		58,3	
III. Barang2 modal	129,5	35,1	97,1	31,7
Pipa besi/badja	2,4		1,9	
Mesin & pesawat	11,7		14,9	
Mobil biasa	2,8		8,5	
Bis & mobil barang	8		14	
Barang modallainnya	104,6		57,8	
IV. JUMLAH (I s.d. III)	369,3	100	306	100

Sumber : Bank Indonesia.

*) Sampai dengan bulan Juli.

Tabel VI. 6b.
BANTUAN LUAR NEGERI, 1970 *)
(dalam ribuan US \$)

	Persetujuan telah ditanda tangani			Tidak/belum terlaksana s.d. 30 September 1971					Jumlah
	Proyek	DK	PL. 480	K.R.	Proyek	D.K.	PL. 480	K.R.	
1. A.D.B.	20.110	-	-	-	20.110	-	-	-	20.110
2. Amerika Serika	31.400	45.000	157.300	-	47.898	1.890	11.225	-	61.013
3. Australia	4.045	7.437	-	6.563	2.416	598	-	155	3.169
4. Bel gi a	800	1.700	-	1.148	23	25	-	-	48
5. Canada	-	2.000	-	3.000	-	1.679	-	-	1.679
6. Jepang	60.600	55.000	14.400	10.000	60.250	-	-	-	60.250
7. Jerman Barat	18.770	15.027	-	1.687	18.770	-	-	945	19.715
8. I.D.A.	74.900	-	-	-	72.457	-	-	-	72.457
9. Inggris	2.760	7200	-	1.440	470	210	-	-	680
10. Italia	-	-	-	894	-	-	-	-	-
11. Nederland	16.666	16.250	-	1.666	13.602	-	-	-	13.602
12. New Zealand	-	560	-	-	-	3	-	-	3
13. Perancis	7.202	6.121	-	1.578	7.202	5.386	-	763	13.351
JUMLAH	237.253	156.295	171.700	27.976	243.198	9.791	11.225	1.863	266.077

Bank Indonesia

*) Menurut keadaan s/d 30 September 1971

Tabel VI.6a.
KOMITMEN BANTUAN LUAR NEGERI, 1970 *)
(dalam ribuan US \$)

Negara	Proyek	D.K	PL. 486	K.R.	Jumlah
1. A.D.B.	20.110	-	-	-	20.110
2. Amerika Serikat	47.900	30.000	157.300	-	235.200
3. Australia	4.045	7.437	-	6.563	18.045
4. Belgia	800	1.700	-	1.148	3.648
5. Canada	-	2.000	-	3.000	5.000
6. Jepang	60.600	55.000	14.400	10.000	140.000
7. Jerman Barat	18.770	15.027	-	1.687	35.484
8. I.D.A.	74.900	-	-	-	74.900
9. Inggris	2.760	7.200	-	1.440	11.400
10. Italia	-	-	-	894	894
11. Nederland	16.666	16.250	-	1.666	34.582
12. New Zealand	-	560	-	-	560
13. Perancis	7.202	6.121	-	1.578	14.901
Jumlah	253.753	141.295	171.700	27.976	594.724

Sumber : Bank Indonesia

*) Menurut keadaan s/d 30 September 1971.

Dengan berbagai asumsi seperti diatas maka diperkirakan nilai ekspor tanpa minyak akan naik sebesar 11 % atau US \$ 875 juta.

Sedangkan ekspor minyak menurut realisasi sementara tahun 1971/1972 berjumlah US\$ 574 juta. Untuk tahun 1972/1973 sumber-sumber minyak beras pantai

diharapkan sudah mulai menghasilkan, sehingga produksi minyak seluruhnya diperkirakan akan meningkat. Karena itu maka dalam tahun 1972/1973 ekspor minyak diperkirakan akan mencapai US \$ 1.014 juta atau 76,7% lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan ini maka nilai ekspor secara keseluruhan (minyak dan tanpa minyak) dalam tahun 1972/1973 diperkirakan mencapai US \$ 1.889 juta atau 38,5% lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya US \$ 1.364 juta.

6.7.2. Perkiraan Impor

Dalam tahun 1971/1972 nilai impor tanpa minyak c & f diperkirakan sebesar US \$ 1.299 juta. Dengan memperkirakan ongkos angkut sebesar US \$ 150 juta maka nilai impor (fob) berjumlah US \$ 1.149 juta.

Untuk memperkirakan nilai impor tanpa minyak tahun 1972/1973 maka nilai impor tahun 1971/1972 digunakan sebagai titik tolak. Adapun asumsi yang digunakan adalah :

1. Impor bahan makanan diperkirakan tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya;
2. Pemasukan modal asing dan bantuan proyek diperkirakan akan lebih besar dari tahun 1971/1972;
3. Impor pupuk diperkirakan meningkat karena peningkatan program pengadaan pangan BIMAS;
4. Kapas dan benang tenun diperkirakan akan meningkat berhubung perkembangan industri tekstil dalam negeri;
5. Barang modal diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya.

Berpegang pada berbagai asumsi ini maka nilai impor tanpa minyak (c&f) diperkirakan sebesar US \$ 1.568 juta. Dengan mempertimbangkan ongkos angkut maka nilai impor (fob) berjumlah US \$ 1.397 juta.

Sedangkan realisasi sementara impor minyak tahun 1971/1972 berjumlah US \$ 133 juta. Untuk tahun 1972/1973 maka impor minyak ini diperkirakan sebesar US \$ 216 juta atau 62,4% lebih besar dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan maka impor (minyak dan tanpa minyak) untuk tahun 1972/1973 berjumlah US \$ 1.613 juta atau 19,5% lebih besar dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan nilai ekspor dan impor.

6.7.3. Perkiraan Penerimaan Minyak Bersih.

Berdasarkan perkiraan semen tara nilai ekspor, impor dan jasa-jasa minyak dalam tahun 1971/1972 yang masing-masing besarnya adalah US \$ 574,0 juta, US \$ 133,0 juta dan US \$ 249,0 juta, maka penerimaan minyak bersih berjumlah US \$ 192,0 juta.

Untuk tahun 1972/1973 berdasarkan perkiraan ekspor dan impor minyak maka dapat diperkirakan penerimaan minyak bersih sebesar US \$ 395,0 juta atau 105,7% lebih besar dari tahun sebelumnya.

6.7.4. Perkiraan-perkiraan lain

Pengeluaran jasa-jasa tanpa minyak untuk tahun 1972/1973 diperkirakan sebesar US \$ 381,0 juta atau lebih besar dengan 23,7% dari tahun sebelumnya yang berjumlah US \$ 308,0 juta.

Pembayaran kembali hutang-hutang pada tahun 1972/1973 diperkirakan sebesar US \$ 100,0 juta, yang berarti US \$ 3,0 juta lebih kecil dari tahun sebelumnya.

BAB VII

PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI *)

7.1. Pendahuluan

Berhasilnya tugas pembangunan yang dilaksanakan tergantung dari hasil produksi dan faktor-faktor yang menunjangnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditinjau perkembangan produksi daripada beberapa sektor yang vital serta diikuti perkembangan pendapatan nasional serta penanaman modal dalam negeri dan asing.

7.2. Perkembangan Pendapatan Nasional

Untuk mengetahui perkembangan ekonomi yang berlangsung pada suatu negara perlu diikuti perkembangan pendapatan nasionalnya (**Tabel VII.2.**).

Agar terdapat kesamaan pengertian, maka yang dimaksud dengan produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) adalah hasil-hasil dari semua aktivitas produksi dalam negeri didalam berbagai sektor ekonomi. Pengertian ini tidak sama dengan jumlah produksi secara keseluruhan sebab dalam jumlah yang terakhir ini ada kemungkinan terjadi perhitungan dua kali atau lebih, yaitu untuk barang-barang yang digunakan didalam proses produksi sebagai bahan baku dan penolong untuk memproduksi barang-barang disektor lainnya.

Oleh sebab itu sering juga didefinisikan Produk Domestik Bruto sebagai jumlah dari nilai tambahan bruto dari semua sektor. Nilai tambahan bruto ini diperoleh sebagai selisih antara nilai produksi bruto (dinilai atas dasar harga yang diterima oleh produsen) dikurangi dengan pemakaian bahan baku dan penolong serta biaya-biaya produksi (dinilai atas dasar harga pembelian). Komponen-komponen yang termasuk dalam nilai tambahan bruto yaitu: penyusutan barang-barang modal, pajak tak langsung setelah dikurangi subsidi, upah dan gaji serta surplus usaha.

Perhitungan Produk Domestik Bruto dinyatakan atas dasar harga tahun 1960 yang pada umumnya telah dihitung dengan cara mempergunakan indeks produksi sebagai indikatornya.

Dengan memperhatikan **Tabel VII.1.** dengan angka sementara tahun 1970 dapat dicatat bahwa kenaikan Produk Domestik Bruto (GDP) dari tahun 1969 ketahun 1970 adalah sebesar 6,9%.

Dalam Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha jelas tampak bahwa

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai peranan yang terbesar. Setelah sektor pertanian, menyusul sektor perdagangan besar dan etjeran yang pada tahun 1969 mencapai 16,9 %. Sektor industri mencapai 9,2%. Pada kedua sektor ini terlihat bahwa peranannya semakin naik bila dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1968.

*) Angka-angka yang dalam bab ini hanya sampai dengan tahun 1970 disebabkan karena angka-angka tahun 1971 belum tersedia.

Tabel VII.1.
PRODUK DOMESTIK BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA, 1968 - 1970
(miliar rupiah)

LAPANGAN USAHA	atas dasar harga yang berlaku			atas dasar harga - 1960		
	1968	1969 ¹⁾	1970 ²⁾	1968	1969 ¹⁾	1970 ²⁾
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan lain-lain	1.037,70	1.287,80	1.522,00	248,2	251	261,8
a. Tanaman Bahan Makanan	689,5	780,2	918,5	160,2	161,9	168,3
b. Tanaman Perdagangan Rakyat	133	200,2	227,7	35,4	35,8	36,3
c. Tanaman Perkebunan	46,6	69,1	81,3	11,7	13	13,7
d. Peternakan dan hasil-hasilnya	68,1	88,4	101,5	23,6	21,1	22
e. Hasil Kehutanan	25,1	47,2	79,3	5,6	6,8	8,6
f. Hasil Perikanan	75,4	102,7	113,6	11,7	12,4	12,8
2. Pertambangan dan penggalan	75,2	129,2	172,6	19,7	27,7	32,2
3. Industri	178,6	250,7	311,8	40,8	46,6	51,1
a. Perusahaan Besar	119,1	175,1	223,2	26,7	32	36
b. Perusahaan Sedang	-	-	-	-	-	-
c. Perusahaan kecil	59,5	75,6	88,6	14,1	14,6	15,1
4. Bangunan	41	64,9	90,4	8,8	11,5	14,1
5. Listrik dan Gas	9	12,6	14,6	2,3	2,6	2,9
6. Pengangkutan & Komunikasi	45	60	81,7	15,9	16,5	17,4
a. Pengangkutan kereta api	3,2	4,6	5,2	0,6	0,6	0,6
b. Pengangkutan udara	1,9	3,6	6,5	0,7	0,9	1,2
c. Komunikasi	3,2	3,9	4,5	0,3	0,4	0,4
d. Pengangkutan lainnya	36,7	47,9	65,5	14,3	14,6	15,2
7. Perdagangan besar & etjeran	345	459,3	593,1	76,2	87	96,8
8. Bank & Lembaga Keuangan lainnya	9,9	11,6	13	3,4	3,4	3,4
a. Bank	6,6	7,7	8,8	2,3	2,3	2,3
b. Koperasi Kredit	0	0	0	0	0	0
c. Asuransi	3,1	3,6	3,8	1	1	1
d. Lain-lainnya	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1
9. Sewa rumah	39,1	50,9	62,7	9,4	10	10,8
10. Pemerintah & Pertahanan	88	119,7	163	24,7	26,6	27
II' Jasa-jasa	125,4	147,2	171,3	29,4	30,1	30,9
a. Jasa perseorangan	88,3	95,2	111,1	19	19,4	20
b. Jasa sosial	34,6	49,1	56,9	9,8	10	10,3
c. Jasa hiburan	2,5	2,9	3,3	0,6	0,6	0,6
12. Produk Domestik Bruto	1.993,90	2.593,90	3196,2	478,8	513	548,4

Sumber Biro Pusat Statistik
1) Angka diperbaiki
2) Angka sementara.

Tabel VII.2.

PENGUNAAN DARI PRODUK DOMESTIK BRUTO, 1968 - 1970
(dalam miliar rupiah)

Perincian	Atas dasar harga yang berlaku			Atas dasar harga 1960		
	1968	1969 ¹⁾	1970 ²⁾	1968	1969 ¹⁾	1970 ²⁾
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	1.771,2	2.301,8	2630,8	396,3	426,4	446,0
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah	143,5	179,0	251,7	37,2	38,0	42,2
3. Pembentukan modal domestik bruto	177,9	270,5	422,4	46,3	53,1	63,2
4. Ekspor barang dan jasa	227,9	245,2	427,6	61,3	69,9	82,3
5. Dikurangi: Impor barang & jasa	326,6	402,6	536,3	62,3	74,4	85,3
6. Produk Domestik Bruto	1.993,9	2.593,9	3196,2	478,8	513,0	548,4
7. Pendapatan netto terhadap luar negeri dari faktor produksi	- 28,8	- 34,9	- 50,3	- 4,0	- 4,1	- 4,5
8. Produk Nasional Bruto	1.965,1	2.559,0	3.145,9	474,8	508,9	543,9
9. Dikurangi: Pajak tak langsung	94,0	134,8	188,3	29,2	31,3	33,3
10. Dikurangi : Penyusutan	124,6	168,2	209,4	28,2	30,2	32,2
11. Produk Nasional Netto (pendapatan Nasional) atas dasar biaya faktor produksi	1.746,5	2.256,0	2.748,2	417,4	447,4	478,4

Sumber : Biro Pusat Statistik.

1) Angka perbaikan.

2) Angka sementara

7.3. Pangan

7.3.1. Beras

Prioritas utama dalam pembanguilan pertanian ditujukan kepada peningkatan produksi beras, antara lain karena pentingnya peranan beras dalam memantapkan stabilisasi dan menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Disamping itu peranannya penting sekali dalam memperbaiki gizi pola konsumsi serta pentjiptaan kesempatan bekerja didaerah-daerah pedesaan.

Produk beras tahun 1970 diperkirakan mencapai 11.994 ribu ton yang berarti 564 ribu ton lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan (target Pelita produksi beras tahun 1970 adalah 11.430 ribu ton).

Peningkatan produksi beras yang dicapai pada tahun 1970 disebabkan antara lain oleh luas areal panen yang meningkat dan kenaikan produksi per hektar. Luas areal

ternyata 9 persen lebih dari target yang telah ditetapkan yang disebabkan antara lain oleh berhasilnya usaha-usaha rehabilitasi prasarana (pengairan, dan sebagainya), meningkatnya program Bimas dan tercapainya stabilisasi di bidang ekonomi. Namun demikian ternyata bahwa sampai sekarang kebutuhan akan beras masih lebih besar bila dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Berhubung dengan itu masih diperlukan impor beras.

Produksi jagung tahun 1970 berada 5,8 persen diatas produksi 1969 yang terutama disebabkan karena adanya pertambahan areal pertanaman. Disamping itu ternyata terdapat kemunduran produksi rata-rata per hektar di beberapa daerah produksi utama (Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara) yang disebabkan antara lain adanya serangan hama.

Produksi ubi-ubian menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh berkurangnya areal pertanaman akibat terdesak oleh pertanaman bahan pangan lain. Areal pertanaman ubi-ubian memperlihatkan gejala terus menurun sejak 1965.

Selanjutnya mengenai produksi kacang-kacangan pada tahun 1970 meningkat 5 persen dari tahun 1969 tetapi masih dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 1970. Hama penyakit yang menyerang di beberapa daerah seperti Jawa Timur (55.678 Ha) dan Jawa Tengah (10.817 Ha) belum sepenuhnya dapat diberantas. Produksi kacang tanah yang menonjol terutama terdapat di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. Perkembangan ekspor dan harga dalam negeri yang menarik, merupakan perangsang didalam kegiatan peningkatan produksi di daerah tersebut.

Perkiraan produksi palawija untuk tahun 1971 pada umumnya memperlihatkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 1970. Ramalan produksi palawija tahun 1971 menunjukkan kenaikan 9,51 persen untuk jagung, 2,57 persen untuk ketela pohon, 12,75 persen untuk ketela rambat dan 1,56 persen untuk kacang-kacangan dibandingkan dengan tahun 1970. Karena kurang mendapat pasaran, maka hasil palawija dirasakan oleh petani kurang menguntungkan untuk usaha-usaha peningkatan produksi, kecuali kalau pemasaran hasil palawija didalam negeri dan ekspor dapat diperbaiki khusus untuk tanaman jagung dan kacang kedele maka luas areal terdesak oleh padi yang lebih menguntungkan. Akan tetapi karena adanya usaha intensifikasi hasil per Ha dapat ditingkatkan.

Tabel VII.4.
PERKEMBANGAN SUPPLY BERAS 1965 -1970
(dalam 1. 000 ton)

Tahun	Produksi	Impor	Supply
1965	8.877	193	9.070
1966	9.339	306	9.645
1967	9.047	347	9.394
1968	10.166	600	10.766
1969	10.641	414	11.055
1970	11.9941)	956	12.950

Sumber : Departemen Pertanian.

1) Angka sementara BPS.

7.3.2 Palawija dan hortikultura

Perkembangan produksi palawija tahun 1969 - 1970 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VII.5.
PRODUKSI PALAWIJA, 1969 – 1970
(dalam ribu ton)

Bahan makanan	Realisasi 19691)	1970	
		Targ et	Realisasi 2)
Jagung	2.292,8	3.510,0	2.425,0.
Ubi-ubian	14.055,0	15.980,0	11.901,6
Kacang-kacangan	696,5	990,0	731,6

Sumber : Departemen Pertanian.

1) Angka revisi.

2) Angka sementara.

7.3.3. Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan

Perkiraan produksi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk tahun 1970 adalah 2.062.845 ton dan 2.200.583 ton. Perkiraan produksi sayur-sayuran 1971 lebih baik dari pada tahun sebelumnya karena iklim yang lebih basah dan pengaruh rangsangan ekspor. Produksi beberapa buah-buahan seperti rambutan, duren dan mangga akan mengalami penurunan tetapi lain-lain buah-buahan diharapkan meningkat khususnya pisang.

Tabel VII.6.
RAMALAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN, 1971
(dalam ton)

Jenis produksi	Semester I (Jan. - Juni)	Semester II (Juli - Des.)	Jumlah (Jan - Des.)
1. Padi	18.973.746	6.554.728	24.528.474
2. Jagung	1.805.780	849.780	2.665.560
3. Ubi kayu	3.031.030	6.153.910	9.184.940
4. Ubi djalat	1.210.070	1.974.330	3.184.400
5. Kacang tanah	83.310	122.209	305.519
6. Kedelai	87.301	309.530	396.831
7. Kacang penyakit	8.975	31.813	40.788

Sumber: Departemen Pertanian.

Usaha mempertinggi hasil produksi padi antara lain dengan jalan mengadakan pembinaan intensifikasi melalui sistim Bimas/Inmas dalam MT. 1969/1970 dan MT. 1970 yang mencapai 2.048.155 Ha. Walaupun areal intensifikasi tersebut kurang dari target yang telah ditetapkan dan hanya memberikan kenaikan produksi sebesar 3.124.910 ton (63% dari rencana), sebaliknya areal tanam lainnya telah melampaui rencana sehingga sasaran produksi beras tahun 1970 dapat dicapai bahkan dapat dilampaui.

Untuk mencapai sasaran areal intensifikasi diperlukan pengetrapan 3 syarat pokok pemilihan areal dan lokasi Bimas, yaitu :

- a. adanya jaminan air irigasi yang cukup dan teratur;
- b. letaknya yang menjamin kelancaran distribusi sarana produksi, kredit dan kegiatan pengawasan;
- c. iklim berproduksi yang merangsang petani untuk melakukan usaha intensifikasi.

Selanjutnya mengenai perkembangan areal intensifikasi untuk MT 1970/1971 adalah sebagai berikut :

Tabel VII.7.
PERKEMBANGAN PEMBINAAN AREAL INTENSIFIKASI MT. 1970/1971 *)

Uraian	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
a. Bimas Biasa	722.350	651.548	90
b. Bimas Baru	580.000	380.954	66
Bimas Biasa + Baru	1.302.350	1.032.502	79
c. Inmas Biasa	478.813	73 5 .586	153
d. Inmas Baru	245.845	312.533	127
Inmas Biasa + Baru	724.658	1.048.119	145
BIMAS + INMAS	2.027.008	2.080.621	102,64

Sumber : Departemen Pertanian

*) Angka sementara.

Usaha penyempurnaan penyaluran kredit Bimas dilakukan dalam bentuk pelajanan kredit sistem perorangan melalui unit desa B.R.I., Bank Desa dan mobil-mobil unit. Tanggapan yang positif dari petani terhadap pola perkreditan yang baru ini antara lain disebabkan oleh sifat pelajanan langsung sehingga petani menerima sepenuhnya jumlah kredit yang disetujui.

7.3.4. Ekspor

Dibandingkan dengan ekspor tahun 1969, maka didalam tahun 1970 terdapat kenaikan ekspor untuk beberapa komoditi seperti jagung, kacang tanah, kacang kedelai dan gaplek sedangkan untuk kacang penyakit dan tapioka menunjukkan penurunan. Demikian pula dengan ekspor sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan penurunan.

Perkembangan ekspor bahan makanan tahun 1968-1970 adalah sebagai berikut :

Tabel VII.8.
EKSPOR BAHAN MAKANAN .1968 - 1970
(dalam ribu ton)

Komoditi	1968	1969	1970
1. Jagung	65,9	154,9	252,5
2. Kacang tanah (biji)	16,2	19,6	22,7
3. Kacang kedelai	8,3	0,70	3,7
4. Kacang penyakit	4,5	0,079	0,005
5. Gaplek/tepung gaplek	160,3	299,7	312,5
6. Tapioka	0,6	1,6	0,6

Sumber : Biro Pusat Statistik.

7.4. Produksi

7.4.1. Pertanian

Produksi beras yang mencapai 11.994.006 ton menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan produksi 1969 serta telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 1970 (11.430 ribu ton). Produksi perikanan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan produksi 1969 yaitu masing-masing untuk perikanan darat dan perikanan laut adalah 4,2 persen dan 2,2 persen dari produksi 1969. Dalam bidang produksi bahan-bahan ekspor terdapat kenaikan-kenaikan dibandingkan dengan tahun 1969, yaitu terutama untuk karet perkebunan besar/rakyat dan kelapa sawit (minyak).

Peningkatan hasil devisa dari ekspor komoditi pertanian dengan 10 persell setahun, telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Beberapa komoditi (terutama karet) menunjukkan penurunan harga, sebaliknya beberapa komoditi lain seperti teh dan minyak sawit menunjukkan kenaikan harga. Disamping itu maka hasil devisa dari ekspor kayu telah meningkat secara melonjak.

Dibidang pengawetan tanah maka usaha penghijauan kembali tanah-tanah rakyat yang gundul (kritis), penghutanan kembali dan pengamanan sumber-sumber air belum mencapai sasaran sepenuhnya, karena masih belum dapat dihentikannya sistem ladang dan masih adanya penggunaan secara liar tanah-tanah kehutanan. Perkembangan produksi pertanian dapat dilihat pada **Tabel VII.9**.

Pada **Tabel VII.11**. dapat dilihat perkembangan ekspor dari komoditi-komoditi hasil pertanian. Perkembangan ekspor tersebut menunjukkan bahwa bila dibandingkan nilai ekspor semester 1-1971 dengan semester 1-1970 dapat dikatakan bahwa pada umumnya mengalami kenaikan dan kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi pada semester 11-1971.

Tabel VII. 9.
PRODUKSI PERTANIAN, 1969 -1970
(dalam ribuan ton)

Komoditi	1969 1)	1970 2)
Beras	10.641	11.994
Jagung	2.293	2.425
Ubi kayu	11.034	8.955
Ubi djalat	3.021	2.947
Kedelai	389	390
Kacang tanah	267	301
Perikanan		
Perikanan laut	785	802
Perikanan dara t	429	447
Perkebunan besar		
Karet	230	238
Kelapa sawit (minyak)	200,3	207
Inti sawit	40,5	43,3
T e h	63	65
Gula kristal	661,8	650,4
Perkebunan rakyat		
Karet	558	571
Gula mangkok	220	230
Kehutanan		
Kayu pertukangan (djati + rimba)	6.206.000 M3	10.100.000 M3
Peternakan		
Susu	28.923.000 L	29.306.000 L
Daging	309.301,5	313.620,5
Telor	64.988,9	65.933

Sumber : Departemen Pertanian.

1) Angka revisi.

2) Angka sementara.

7.4.1.1. Perkebunan

a. Produksi perkebunan rakyat

Produksi perkebunan rakyat. pada tahun 1970 umumnya telah meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 1969, kecuali untuk tembakau rakyat dan tembakau virginia. Perkembangan produksi perkebunan rakyat tahun 1969 dan tahun 1970 dapat dilihat pada **Tabel VII.10**.

Penurunan produksi tembakau disebabkan oleh karena faktor iklim yang kurang menguntungkan pada tahun 1969/1970 disamping segi pemasaran yang kurang baik. Terutama untuk tembakau virginia, maka gagalnya paten tahun 1968 mengakibatkan dalam tahun 1969 telah diimpor sejumlah tembakau virginia.

Dari segi perluasan areal, maka perluasan areal disektor perkebunan rakyat retarif tidak banyak artinya, sekalipun liar tahun terjadi perluasan. Beberapa jenis tanaman menunjukkan sedikit peningkatan areal sebagai akibat perluasan dalam beberapa tahun akhir-akhir ini. Penambahan areal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor pemasaran (kopi dan cengkeh) dan faktor penyakit (lada). Peningkatan produksi perkebunan rakyat pada tahun 1970 terutama adalah disebabkan peningkatan intensitas panen atau hasil perhektar.

Mengenai perkiraan tahun 1971 dibandingkan dengan tahun 1970, beberapa komoditi diharapkan mengalami kenaikan produksi antara lain karet, kelapa, kopi, teh, kapok dan cassia vera. Untuk karet, kelapa, kopi disebabkan adanya tambahan areal yang menghasilkan, sedangkan kenaikan produksi teh karena adanya intensifikasi. Kapuk dan cassiavera mengalami kenaikan produksi karena perbaikan pemasaran.

Penurunan produksi terjadi pada lada karena belum pulihnya penyakit dan iklim yang kurang menguntungkan. Mengenai cengkeh, produksi tahun 1971 bertepatan dengan tahun buah kecil. Perkembangan terakhir menunjukkan produksi karetakan sangat dipengaruhi oleh pelepasan *stock pile* Amerika. Serikat.

Akibat iklim yang tidak menguntungkan maka ada kemungkinan produksi tembakau virginia akan menurun.

b. Produksi perkebunan besar (PNP dan Swasta)

Produksi perkebunan besar tahun 1970 pada umumnya menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan keadaan tahun 1969 kecuali produksi kopi. Adanya penurunan produksi kopi disebabkan karena faktor iklim dan mungkin sekali karena tahun buah rendah.

Produksi karet tidak banyak mengalami kenaikan. Sekalipun ada peremajaan namun komposisi umur belum memberikan kemungkinan kenaikan produksi yang menjolok. Pertanaman kelapa sawit pada tahun 1969 dengan penggunaan bibit unggul dan pengembangan teknik pertanaman ternyata telah memberikan harapan baik dikemudian hari. Perkembangan produksi beberapa komoditi dari perkebunan besar dapat terlihat pada **Tabel VII.12**.

Tabel VII. 10.
PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT, 1969 -1971
(dalam ribuan ton)

Komoditi	Produksi 1969 ¹⁾	Produksi 1970 ²⁾	Taksiran prod.1971	Realisasi s.d. Semester 1-1971 ³⁾
1. Karet	558,1	571,0	599,0	290,0
2. Kelapa	1.220,6	1.200,0	1.300,0	650,0
3. Teh (penyakit)	21,8	24,0	25,0	12,0
4. Kopi	161,5	169,0	178,0	17,0
5. Gula (mangkok)	219,8	230,0	220,0	22,0
6. Kapok (serat bersih)	29,0	30,0	3 ³⁾ 3,0	- 4)
7. Tembakau rakyat	55,9	37,0	54,0	- 4)
8. Tembakau virginia	17,0	14,0	11,0	- 4)
9. Lada	16,6	17,5	12,0	- 4)
10. Pala	3,0	8,0	9,0	- 4)
11. Cengkeh	13,8	14,0	9,0	5,0
12. Cassia Vera	6,8	8,0	9,0	- 4)
13. Kapas	0,6	1,3	1,5-	- 4)
14. Lain-lain	3,1	3,5	- 4)	- 4)

Sumber : Departemen Pertanian..

1) Angka revisi.

2) Angka sementara.

3) s.d. Mei 1971.

4) Belum tersedia

Tab e I VII.11.
NILAI EKSPOR HASIL PERTANIAN, 1970 - 1971
(dalam ribuan US \$)

Hasil yang diekspor	1 9 70	1970		1971
		Semester I	Semester II	Semester I
1. Karet	259.454	104.941	149.513	117.115
Karet rakyat	(187.453)	(76.021)	(111.432)	(82.667)
Karet Perkebunan	(72.001)	(28.920)	(43.081)	(34.448)
2. K o P r a	29.327	11.643	17.684	10.898
3. Bungkil kopra	5.794	1.047	4.747	4.914
4. K o P i	70.327	24.4 71	45.856	28.740
5. Te h	17.633	5.101	12.532	13.393
6. Tembakau	11.462	6.938	4.524	13.835
7. Minyak kelapa sawit	36.498	11. 798	24.700	18.656
8. Biji kelapa sawit	4.988	1.673	3.315	2.796
9. Lad a	3.052	1.993	1.059	10.444
10. Tapioka	10-		10	10*)
11. Sisal	115	42	73171	
12. K a p 0 k	170	30	140	120*)
13. Kulit kina	230	230	-	10*)
14. Kayu	100.511	30.722	69.789	84.750
15. Hasil hutan non kayu	1.021	140	881	210*)
16. Binatang hidup dan hasil-hasilnya	11. 794	4.848	6.946	4.713*)

Sumber: Departemen Pertanian.

*) Angka triwulan 1-1971.

Tabel VII.12.

PRODUKSI PERKEBUNAN BESAR, 1969 - 1970
(dalam ribuan ton)

Komoditi	1969 ¹⁾	1970 ²⁾
1. Karet	230,6	238,7
2. Teh	40,8	41,3
3. K o p i	14,3	13,9
4. Tjoklat	0,92	1,0
5. Minyak sawit	200,2	207,0
6. Inti sawit	40,4	43,3
7. G u l a	630,0	602,6
8. Kin a	1,0	1,2
9. Serat agave	4,0	4,2

Sumber:

Departemen Pertanian.

1) Angka revisi.

2) Angka sementara.

c. Pemasaran

Pasaran internasional pada tahun 1970/1971 untuk beberapa komoditi (karet, tembakau, lada) menunjukkan penurunan harga. Walaupun volume ekspor praktis tidak terpengaruhi, namun nilai ekspor (devisa) telah menurun. Adapun perkembangan ekspor perkebunan (perkebunan rakyat dan perkebunan besar) adalah sebagai berikut :

Tabel VII.14
NILAI EKSPOR PERKEBUNAN-PERKEBUNAN RAKYAT
DAN PERKEBUNAN BESAR), 1968 - 1970
(dalam jutaan US \$)

Komoditi	1968	1969	1970
1. Karet rakyat	116,6	163,1	187,4
2. Karet perkebunan	68,8	57,5	72,0
3. Kopra	40,1	18,7	29,3
4. K O P i	44,3	51,3	70,7
5. Tembakau	21,7	13,7	11,4
6. Biji sawit	4,6	4,0	4,9
7. Minyak sawit	20,8	22,1	36,4
8. Lad a	13,5	10,4	3,0
9. Te h	16,9	9,7	17,6
10. Bungkil kopra	2,3	1,8	5,7
11. Sisal	0,1	0,1	0,1
12. Bunga dan biji pala	2,0	1,6	2,1
13. Rempah-rempah lain	5,3	3,5	4,2
Jumlah	347,5	358,0	445,4

Sumber :

Departemen Pertanian.

7.4.1.2. Kehutanan

Produksi kayu tahun 1970 telah mencapai 10,1 juta M³. Hal ini berarti 308 persen dan target yang telah ditetapkan, dimana target tahun 1970 adalah 3,3 juta M³. Produksi kayu dalam tahun 1969 adalah sebesar 6,2 juta M³ sedangkan tahun 1970 terdapat kenaikan sebesar 3,9 juta M³ atau 62 persen. Produksi kayu tahun 1971 diperkirakan mencapai 13 juta M³. Dalam pada itu dapat dinyatakan bahwa jumlah dan nilai ekspor tahun 1971 adalah naik. Realisasi ekspor kayu tahun 1970 adalah sebesar 7,4 juta M³, sedangkan dalam semester 1 tahun 1971 telah mencapai 4.956.000 M³ dengan nilai sebesar US \$ 73,2 juta. Ini berarti realisasi dalam semester 1-1971 mengalami kenaikan

sebesar 146,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1970 yaitu sebesar 3,1 juta M³. Dilihat dari perkiraan maka terjadi kenaikan 5% dalam kuantita (estimate semester 1-1971 adalah 4,8 juta M³). Menurut perkiraan, target ekspor tahun 1971 seluruhnya adalah 9,5 juta M³

Sebelum adanya krisis moneter internasional masih diperkirakan target ekspor semester II sebesar 4,8 juta M³ dapat tercapai. Ekspor kayu terutama ditujukan ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Eropa dan Singapore.

Suatu gejala alam yang kurang menguntungkan dalam bulan Agustus - Oktober adalah keadaan cuaca yang buruk sehingga menyebabkan pengiriman kapal terlambat dan pemakaian logpond terbatas.

7.4.1.3. Peternakan

Tingkat produksi. dari hasil-hasil peternakan yang meliputi daging, telur dan susu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat produksi hasil-hasil pertanian lainnya. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi hal tersebut diatas adalah :

- a. Faktor iklim di Indonesia yang terletak didaerah tropik, dimana terdapat suhu rata-rata yang tinggi disertai kelembaban yang tinggi. Hal itu merupakan faktor yang menguntungkan bagi pertumbuhan penyakit.
- b. Usaha pemeliharaan ternak di Indonesia pada umumnya masih bersifat tradisional dan merupakan usaha sampingan.
- c. Daya beli masyarakat juga mempengaruhi kemajuan peternakan. Dalam tarat sekarang pada umumnya masih dipentingkan primer karbohydrat dari pada protein hasil-hasil peternakan.

Tabel VII.16.
PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU, 1969 - 1971
(dalam ribuan)

		1969	1970 1)	1971 2)
Daging	(kg)	309.301,5	313.620,5	318.046
Telur	(kg)	64.988,7	65.933	67.001
Susu	(liter)	28.923	29.306	29.693

Sumber : Departemen Pertanian.

1) Angka sementara;

2) Angka perkiraan.

Tabel VII.17.
EKSPOR SAPI DAN KERBAU, 1969 - 1971

	1969	1970	Januari -Juni 1971 *)
Sapi	37.547 ekor,	52.098 ekor	15.004 ekor
Kerbau	17.868 ekor	13.247 ekor	9.278 ekor

Sumber : Departemen Pertanian

*) Angka sementara.

7.4.1.4. Perikanan

Produksi perikanan dalam tahun 1970 mencapai 80,3 persen dari target. Dibandingkan dengan produksi tahun 1969, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,8 persen. Kurangnya peningkatan produksi antara lain disebabkan karena :

- a. Musim ikan yang retarif lebih pendek dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Cara penangkapan perikanan oleh rakyat masih dilaksanakan secara tradisional, dimana dipergunakan alat-alat penangkapan yang pada umumnya sudah tua dan dengan efisiensi yang rendah.
- c. Adanya kekurangan sarana produksi, pemasaran dan ketrampilan.
- d. Penangkapan dibidang perikanan darat mengalami hambatan sebagai akibat musim hujan yang lebih pandyang dan adanya banjir dibeberapa daerah.

7.4.2. Industri

Perindustrian merupakan sektor yang diarahkan untuk menunyang dan mendorong pembangunan sektor pertanian, sambil mempersiapkan diri untuk berkembang secara lebih luas dimasa depan.

Pembangunan perindustrian secara garis besar dibagi dalam dua tahap : pertama, tahun 19670 - 1971 sebagai tahap rehabilitasi dan peningkatan penggunaan kapasitas produksi, disertai dengan kegiatan-kegiatan persiapan untuk tahap pttilangunan selanjutnya; kedua, tahun 1971 - 1974 adalah sebagai tahap pengembangan dan pembangunan selanjutnya.

Tabel VII.18
PRODUKSI PERIKANAN
(dalam ton)

	Produksi 1)	Produksi 2)	Perkiraan 3)	Perkiraan
Perikanan	1969	1970	1971	Semester I - 1971
Darat	429.055	446.993	447.000	260.000
Laut	785.344	802.000	828.000	350.000
Jumlah	1.214.399	1.248.993	1.275.000	610.000

Sumber : Departemen Pertanian.

- 1) Angka revisi;
- 2) Angka sementara;
- 3) Angka perkiraan.

Sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Repelita disektor industri masa dua tahun pertama ini diarahkan untuk mengadakan rehabilitasi pabrik-pabrik industri j:mg ada dan peningkatan kapasitas produksi masingmasing pabrik. Usaha rehabilitasi ini pada umumnya telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dart peningkatan volume sebagian besar hasil produksi dalam negeri; Bersamaan dengan usaha rehabilitasi ini telah dilakukan pula usaha perluasan pabrik-pabrik yang ada dan pendirian pabrik-pabrik ban terutama dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan asing.

Guna menunjang pembangunan industri dalam negeri Pemerintah telah melakukan usaha-usaha antara lain menjehalkan iklim berusaha dibidang industri serta menjediakan sarana-sarana pokok produksi. Dalam hal ini antara lain telah diadakan penurunan tarif bea masuk atas bahan bahan baku dan bahan-bahan penolong industri,penyesuaian pajak penjualan serta proteksi atas barang-barang yang telah dapat dibuat didalam negeri.

Guna mengatasi masalah permodalan yang dihadapi para pengusaha industri nasional, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang kecil dan milik perseorangan, maka Pemerintah telaih menjediakan fasilitas kredit investasi dan modal kerja. Pembentukan PT. Asuransi Kredit Indonesia juga dimaksudkan antara lain untuk membantu para pengusaha industi kecil dalam mengatasi kesulitan akan modal, kerja dan pemasaran hasilhasil produksinya.

Dikalangan pengusaha industri nasional sendiri dewasa ini semakin disadari pentingnya untuk tmengadakan perbaikan-perbaikan didalam perusahaan masing-

masing yang mencakup bidang administrasi, organisasi dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu dilakukan pula usaha-usaha untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja guna dapat meningkatkan mutu dari barang-barang yang dihasilkan didalam negeri, serta untuk mencapai efisiensi kerja yang lebih tinggi.

Bila dibandingkan hasil produksi yang dicapai dalam tahun kedua dengan tahun pertama PELITA I maka terlihat adanya kenaikan-kenaikan. (lihat Tabel VII.20).

Tabel VII.20
PRODUKSI BEBERAPA HASIL INDUSTRI, 1969/1970- 1970/1971

Jenis Produksi	Satuan x 1000	Prosentase		
		1969/1970	1970/1971	Kenaikan
1. Tekstil	meter	449.800,0	598.400,0	33,04
2. Benang tenun	Bal	177,0	217,0	22,54
3. Kertas	Ton	17,0	22,0	29,41
4. Pupuk/urea	Ton	84,0\	103,0	22,62
5. Semen	Ton	542,0	577,4	6,53
6. Gel a s	Ton	11,0	11,0	0
7. Ban kendaraan	Buah	368,0	400,0	8,70
8. Accu	Buah	32,0	56,0	75,00
9. Televisi	Buah	4,5	4,7	4,44
10. Radio	Buah	123,0	393,0	219,51
11. Plaat seng	Ton	8,5	34,4	304,71
12. Assembling mobil	Buah	4,4	2,9	-34,09
13. Assembling sepeda motor	Buah	21,3	31,0	45,54
14. Minyak kelapa	Ton	263,0	258,2	- 1,83
15. Minyak goreng	Ton	26,6	26,8	0,75
16. S a bun	Ton	132,5	132,2	0,23
17. Rokok putih	Juta/Batang	10,6	13,6	28,10
18. Rokok kretek	Juta/Batang	19,2	20,5	6,84
19. Korek api	Ribu/Batang	269	288	7,06
20. Tapal gigi	Ribu/Batang	15	25	66,67

Sumber: Departemen Perindustrian.

Disamping adanya peningkatan volume produksi industri ini, dapat pula dirasakan kemajuan secara kwalitatif (mutu) dari berbagai macam barang buatan dalam negeri seperti rokok, korek api, makanan dalam kaleng, bahan pencuci, beberapa jenis tekstil termasuk konpeksi, serta alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

Disamping kemajuan kwantitatif. dan kwalitatif telah berhasil pula dilakukan pembuatan jenis-jenis produk industri baru dalam negeri. Dibidang pertekstilan telah dapat dihasilkan kain dengan serat buatan seperti tetoron, trevira dan tjampuran antara serat buatan dan kapas. Telah dapat pula dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri dalam negeri barang-barang seperti plaat seng, ashes gelombang, susu kental, vetsin, detergent, hairwig, asam sulfat, aluminium sulfat, barang-barang cetakan offset, bahan pembungkus dan lain-lain.

Semen tara itu telah diusahakan pula untuk mulai mengekspor beberapa jenis produksi industri dalam negeri seperti hasil kerajinan rakyat, kain batik, makanan dalam kaleng, barang-barang elektronika, ban kendaraan bermotor dan lain-lain.

Ketjenderungan sementara para konsumen dalam negeri untuk lebih menjukai barang-barang asal impor secara berangsur-angsur akan berkurang mengingat usaha industri dalam negeri meningkatkan mutu dari pada barang-barang yang dihasilkan. Pada waktu ini telah dapat dihasilkan barang-barang buatan dalam negeri seperti tekstil, rokok, ban, cat, batu baterai, alat-alat elektronika, sepatu, makanan dalam kaleng dan lain-lain yang tidak kalah mutu maupun designnya dengan barang-barang asal impor.

7.4.2.1. Sandang

Sebagaimana diketahui kebutuhan akan tekstil dipenuhi dari produksidalam negeri dan dari impor, dimana produksi dalam negeri makin lama makin baik. Kalau dalam semester I - 1970/1971 penyediaan tekstil terdiri dari produksi dalam negeri 237,1 juta meter dan dari impor 112,1 juta meter, maka seJama semester I - 1971/1972 terdiri dari 313,5 juta meter produksi dalam negeri dan 143,3 juta dari impor.

Produksi tekstil dalam negeri selama semester I - 1971/1972 adalah sebesar 313,5 juta meter atau 46,4% dari target PELITA - 1971/1972. Benang tenun hasil produksi patal-patal didalam negeri selama semester I - 1971/1972 berjumlah 110.400 E atau kurang lebih 42,4% dari target. Dibandingkan dengan produksi selama semester I - 1970/1972, maka produksi tekstil dalam negeri baik.

- Tekstil	: Semester I - 1970/1971	237,1 juta m
	Semester I - 1971/1972	313,5 juta m.
- Benang tenun	: Semester I - 1970/1971	101,914 B

Kenaikan produksi tekstil tersebut disebabkan telah diadakannya rehabilitasi beberapa perusahaan tekstil dan juga makin bertambahnya peralatan dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun asing. Dapat ditambahkan, bahwa produksi tekstil selama semester II - 1970/ 1971, berjumlah 361,2 juta meter dan benang tenun 115.576 S. Produksi tekstil tahun 1970/1971 berjumlah 598,3 juta meter dan benang tenun 217.490 B. Hal ini ternyata telah dapat menjamin stabilitas harga tekstil pada umumnya.

7.4.2.2. Industri Ringan dan Kerajinan Rakyat

Selama tahun ketiga PELITA perkembangan industri ringan dan kerajinan rakyat menunjukkan angka-angka kenaikan, meskipun masih terus mengalami berbagai kesulitan . dan hambatan. Beberapa hasil industri menunjukkan perbaikan mutu maupun peningkatan volume produksinya. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya usaha-usaha perbaikan dalam kebijaksanaan impor dan bea masuk, perpajakan, prasarana industri dan lain-lain. Dalam usaha memajukan perindustrian ringan dan kerajinan rakyat, Pemerintah selalu berusaha untuk menciptakan iklim berproduksi yang lebih baik.

Selama tahun 1971/1972 dan tahun-tahun sebelumnya telah didirikan proyek-proyek induk perusahaan kerajinan rakyat disentral-sentral kerajinan, pilot proyek dan bantuan mekanisasi untuk daerah-daerah minus serta menjediakan tenaga-tenaga ahli untuk daerah-daerah yang industri kerajinannya sedang berkembang. Proyek-proyek induk tersebut antara lain adalah induk pandai besi, tenun songket dan lain-lain yang memerlukan pembinaan dan pemupukan lebih lanjut.

7.4.2.3. Industri Alat Angkutan, Logam dan Alat-Alat Listrik /Elektronik

Dalam bidang assembling kendaraan bermotor telah disempurnakan ketentuan-ketentuan tentang CKD sehingga pada waktu ini 16 macam merk yang meliputi +/- 51 type telah dapat diassembling di Indonesia. Disamping itu beberapa bagian dari kendaraan-kendaraan ini telah pula dapat dibuat di Indonesia antara lain body bus/jeep, leaf spring, mufler, tail pipe dan lain-lain. Bagian-bagian mobil lainnya yang telah dapat dibuat didalam negeri antara lain adalah ban, accu, alat-alat listrik, barang-barang plastik/bout, asbest sealing dan lain-lain.

Mengenai pembuatan komponen automotif ini pada dasarnya diarahkan pada keperluan penggantian dan cadangan agar segera terbentuk pasaran yang cukup luas dan

besar untuk memungkinkan volume produksi yang cukup besar dan ekonomis. Juga didorong. kearah produksi dengan lisensi untuk menjamin kualitas dan kepercayaan dari pemakai.

Sementara ini pemakaian komponen dan parts dalam assembling line masih bersifat sukarela. Jika volume produksi sudah cukup besar, kualitas terjamin dan harga bersaing, penggunaan komponen dan parts dalam assembling line dapat dilaksanakan secara bertahap.

Dalam pada itu telah dilaksanakan pembangunan proyek-proyek besi beton dan GI - sheet yang beberapa diantaranya telah berproduksi. Dalam taraf pembangunan adalah antara lain 10 pabrik besi beton, 8 pabrik seng, 7 pabrik pipa, 2 pabrik drum, 2 pabrik body kendaraan bermotor.

7.4.2.4. Industri Kimia

a. Pupuk

Penyediaan pupuk dari produksi dalam negeri tergantung dari PT. Pupuk Sriwidiaja (PT. Pusri) yang menghasilkan pupuk urea (N). Proyek petrokimia merupakan tambahan unit produksi pada PELITA I tahun ketiga akan tetapi terpaksa mengalami penundaan karena adanya sebagian mesin yang belum bekerja dengan baik dan memerlukan perbaikan-perbaikan. Produksi PT. Pusri dalam tahun 1971 menunjukkan kenaikan yaitu untuk semester I tahun 1971 berjumlah 49.051 ton. Jumlah tersebut adalah diatas produksi tahun 1970 untuk periode yang sama (46.198 ton). Dapat pula ditambahkan bahwa proyek perluasannya sudah memasuki tarat persiapan dan akan dilanjutkan ketaraf pelaksanaannya.

b. Kertas

Dalam tahun kedua PELITA I telah selesai pekerjaan perluasan pabrik kertas P.N. LECES sehingga kapasitasnya menjadi 9.000 ton per tahun. Dengan penambahan kapasitas tersebut maka produksi kertas pada semester I tahun 1971 mengalami kenaikan. Jumlah tersebut adalah 12.192 ton, jadi menunjukkan kenaikan +/- 23%. Pada tahun ketiga PELITA I jumlah produksi tersebut diharapkan bertambah lagi dengan selesainya usaha rehabilitasi pabrik kertas Goa pada semester I tahun ketiga PELITA I.

c. Semen

Produksi semen pada semester I - 1971 menunjukkan penurunan dari periode yang sama dalam tahun 1970, yaitu 261.258 ton untuk tahun 1971 dan 267.641 ton untuk tahun

1970. Hal ini disebabkan adanya kesibukan perluasan dipabrik semen Gresik yang akan selesai pembangunannya pada bulan April 1972.

Selanjutnya dapat ditambahkan pula bahwa rehabilitasi dan modernisasi P.N. Semen Padang akan selesai pada tahun 1973. Dengan selesainya kedua perluasan tersebut kapasitasnya masing-masing akan menjadi 500.000 ton per tahun dan 220.000 ton per tahun.

d. Industri kimia lainnya

Produksi dari beberapa P.N./ Pabrik industri kimia lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel VII.22.

**PRODUKSI BEBERAPA INDUSTRI KIMIA SEMESTER I - 1970
DAN SEMESTER I - 1971**

	Satuan x 1000	Semester I 1970	Semester I 1971
Soda (45%)	kg	441,0	1.645,3
Zat asam	M3	1.247,1	1.621,0
Asam arang	Ton	0,26	0,31
Ban luar kendaraan bermotor	Buah	177,7	208,8
Ban luar sepeda	Buah	967,7	1.046,3

Sumber: Departemen Perindustrian.

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa produksi semester I - 1971 umumnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka penanaman modal asing terlihat minat yang besar untuk mendirikan proyek-proyek kaca jendela, bahan plastik P.V.C. dan gelas/botol.

7.4.3. Pertambangan

Kegiatan-kegiatan dalam bidang pertambangan selama tahun kedua PELITA I dan semester I - 1971 pada umumnya menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai dalam tahun sebelumnya.

7.4.3.1. Minyak mentah

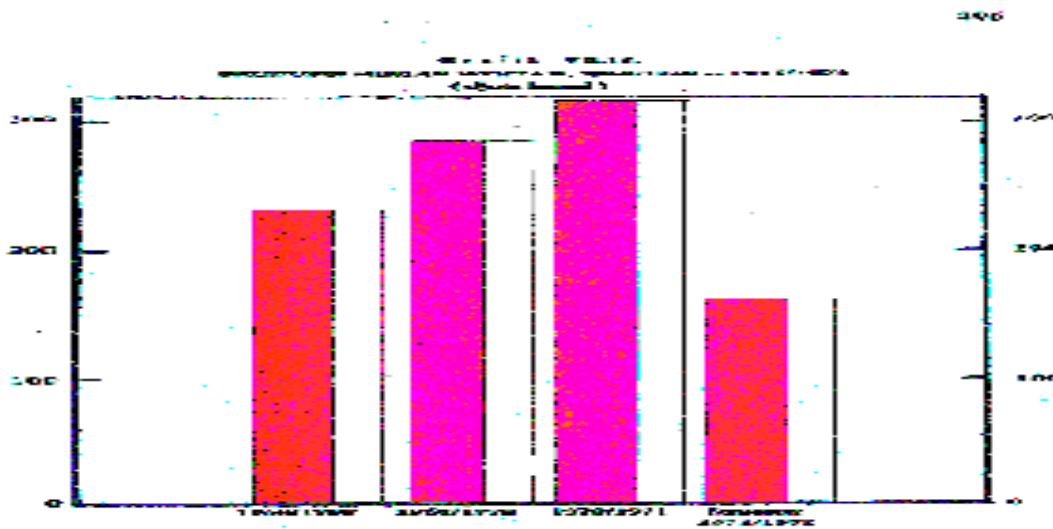
Kenaikan produksi minyak mentah dari tahun pertama ketahun kedua PELITA I ialah

10,55%. Produksi untuk tahun ketiga PELITA I ditaksir 355.000.000 barrels sehingga dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebanyak 12,98%.

Jika produksi semester I tahun 1971/1972 dibandingkan dengan semester I tahun 1970/1971 maka terdapat kenaikan sebesar 2,27 persen. Produksi untuk tahun 1972/1973 ditaksir mencapai 438 juta barrels.

Kenaikan volume ekspor dari tahun 1969/1970 ke 1970/1971 adalah sebesar 13,04 persen, sedangkan pertambahan jumlah hasil ekspor (f.o.b.) dalam waktu yang sama sebesar 15,32 persen.

Jika dibandingkan taksiran ekspor semester I tahun 1971/1972 dengan 1970/1971 maka terdapat penurunan volume ekspor sebesar 4,68% sedangkan hasil ekspornya diharapkan meningkat sebanyak 28,69%.



7.4.3.2. Hasil pertambangan

Realisasi produksi pertambangan dalam semester I - 1971/1972 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 1970/1971 menunjukkan kenaikan.

Tabel VII.25.

PERKEMBANGAN PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERTAMBANGAN 1969/1970 - 1971/1972.

2. Emas	ton	0,131	0,126	0,164	+30,1
3. Perak	ton	4,983	4,599	4,624	+0,5
Jenis Produksi	Berat	1969/1970	1970/1971	1971/1972	(%)
4. Nikel	ribu ton	119,8	262,6	492,4	+87,5
5. Timah	ribu ton	339,6	420,5	625,3	+48,8

6..Batu bara	ribu ton	111,5	79,1	98,7	+24,7
--------------	----------	-------	------	------	-------

Sumber: Departemen Pertambangan.

Dalam pada itu dapat pula dilihat perkembangan produksi selama periode yang sama pada tiga tahun terakhir yang memperlihatkan angka kenaikan yang terus-menerus.

Kenaikan produksi timah dari tahun 1969/1970 hingga 1970/1971 adalah sebesar 7,3 persen. Jika produksi semester I tahun 1971/1972 dibandingkan dengan semester I tahun 1970/1971 maka terdapat kenaikan sebesar hanya 0,9 persen. Produksi untuk tahun 1971/1972 ditaksir sebesar 200.000 kwintal sehingga terdapat kenaikan yang diharapkan ialah sebesar 4,71 persen. Kenaikan ini terutama disebabkan kegiatankegiatan rehabilitasi dilapangan telah selesai. Untuk tahun 1972/1973 ditaksir produksi akan mencapai 206.000 kwintal.

Tabel VII.26
REALISASI PRODUKSI PERTAMBANGAN
1968/1969 – 1970/1971

	Satuan	1968/1969	1969/1970	1970/1971	Kenaikan (%)
1. Minyak Bumi	Juta barel	229	284,2	314,2	10,5
2. Timah	ribu ton	16,9	17,8	19,1	7,3
3. Emas	ribu ton	836	901,1	1.206,7	33,9
4. Perak	ribu ton	268	310,6	689,1	121,8
5. Nikel	kilogram	199	261,0	254,6	-2,4
6. Bauksit	ton	11	9,6	9,2	-4,1
7..Batu bara	ribu ton	176	190,7	175,4	-8,0

Sumber: Departemen Pertambangan.

Produksi bauksit pada tahun kedua PELITA meningkat sebesar 33,92 persen dibandingkan dengan tahun kesaru PELITA, sedangkan produksi semester I tahun ketiga PELITA, 0,8 persen lebih besar daripada semester I-tahun kedua PELITA I.

Produksi nikel tahun 1970/1971 meningkat sebesar 121,80 persen dibandingkan dengan tahun 1969/1970 sedangkan produksi semester I tahun 1971/1972 dibandingkan dengan semester I -1970/1971 menunjukkan kenaikan sebesar 87,49 persen. Proguksi untuk tahun 197111972 diharapkan mencapai kira-kira sebesar 980.000 ton sehingga kenaikan ini besarnya ditaksir 42,21 persen. Untuk tahun 1972/1973 produksi ditaksir akan mencapai sekurang-kurangnya jumlah produksi tahun 1971/1972

Produksi emas 1970/1971 menunjukkan penurunan sebesar 2,45 persen dibandingkan dengan tahun 1969/1970 sebaliknya produksi emas semester I tahun 1971/1972 dibandingkan dengan semester I tahun 1970/1971 menunjukkan kenaikan kira-kira sebesar 30,1 persen. Untuk tahun 1971/1972 ditaksir produksi emas sebesar 300 kg. Untuk tahun 1972/1973 produksi emas ditaksir akan mencapai 325 kg.

Demikian pula produksi perak tahun 1970/1971 menunjukkan penurunan sebesar 4,1 persen dibandingkan dengan tahun 1969/1970. Produksi semester I tahun 1971/1972 dibandingkan dengan periode yang sama dari tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan kira-kira 0,54 persen. Produksi untuk tahun 1971/1972 diharapkan setidak-tidaknya sama besarnya dengan produksi 1970/1971. Produksi tahun 1972/1973 ditaksir akan mencapai 10 ton.

Mengenai produksi batu bara tahun 1970/1971 menunjukkan suaw' penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1969/1970 yakni sebesar 8 persen. Produksi semester I tahun 1971/1972 meningkat sebesar 24,76 persen dibandingkan dengan semester I tahun 1970/1971. Untuk tahun 1971/1972 ditaksir produksi mencapai ki5a-kira 180.000 ton. Dengan selesainya rehabilitasi sentral listrik Ombilin maka diharapkan produksi tahun 1972/1973 mencapai 185.000 ton.

Dengan berubahnya pola konsumsi bahan bakar dari batu bara ke minyak, maka tambang batu bara mengalami kemunduran. Walaupun demikian terus diusahakan agar permintaan dewasa ini akan batu bara dapat dipenuhi. Bila produksi batu bara masih dapat ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah, maka kemungkinan dapat diusahakan untuk ekspor.

Sejak bulan Januari 1971 tambang batubara Mahakam di Kalimantan sudah tidak berproduksi lagi karena sudah dilikwidir. Dalam tahun ketiga PELITA I ini batu bara mendapat biaya dari Pemerintah untuk pembiayaan pembangunan instatasi listrik (power plant) di Ombilin yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi. Selain daripada itu juga diperlukan biaya persiapan eksploitasi, dan biaya feasibility study mengenai batu bara dikemudian hari dan untuk biaya likwidasi tambang batu bara Mahakam.

Disamping itu untuk rehabilitasi tambang batu bara direncanakan pembiayaannya dari bantuan luar negeri.

Perkembangan realisasi ekspor dari beberapa barang tambang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VII.27

REALISASI EKSPOR BEBERAPA BARANG TAMBANG

1969/1970 – 1971/1972

	Satuan	1968/1969	1969/1970	1970/1971	Kenaikan (%)
1. Timah	Juta barel	229	284,2	314,2	10,5
2. Bauksit ²⁾	ribu ton	16,9	17,8	19,1	7,3
3. Nikel ²⁾	ribu ton	836	901,1	1.206,7	33,9

Sumber: Departemen Pertambangan.

Kenaikan ekspor timah dari tahun 1969/1970 ke 1970/1971 dalam jumlah long ton adalah 2,51 persen sedangkan nilainya meningkat sebesar 5,13 persen. Jika dibandingkan ekspor semester I tahun 1971/1972 dengan semester I tahun 1970/1971, maka terdapat penurunan dalam long ton. sebesar 4,6 persen sedangkan nilainya dalam valuta asing menurun sebanyak 10,37 persen. Hal ini disebabkan kegoncangan harga-harga timah dalam tahun 1970 dipasaran internasional. Untuk tahun 1971/1972 ditaksir jumlah ekspor sebesar 18.200 long ton dengan nilai ekspornya sebesar US \$60,6 juta. Dengan demikian diharapkan terdapat kenaikan 6,22 persen dalam long ton sedangkan hasil valuta asingnya meningkat sebanyak 1,11 persen. Dalam pola ekspor timah ini juga terdapat perubahan komposisi ekspor dimana akhir-akhir ini lebih banyak diekspor logam timah dari pada bijih timah sendiri.

Ekspor bauksit tahun kedua PELITA I dibandingkan dengan tahun kesatu mengalami kenaikan dalam ton sebesar 17,51 ,persen dan 14,54 persen dalam hasil-hasil ekspor valuta asingnya. Ekspor semester I tahun 1971/1972 dibandingkan dengan semester I tahun 1970/1971 mengalami kenaikan dalam tallage sebesar 5,38 persen sedangkan hasil ekspor menurun sebanyak 3,93 persen. Penurunan nilai ekspor bauksit ini disebabkan karena perbedaan "rejection point" yang mengakibatkan penurunan harga dari sejumlah ekspornya sehingga menghasilkan jumlah valuta asing yang lebih rendah daripada semester 1970/1971 sebelumnya.

Jumlah ekspor untuk tahun ketiga diharapkan berjumlah 1,2 juta long ton dengan taksiran nilai sebesar US \$ 5.600.000 sehingga kenaikan yang diharapkan sebesar 6,72 persen dalam tonage dan 0,56 persen dalam valuta asingnya.

Ekspor nikel dari tahun 1969/1970 ketahun 1970/1971 dalam tollage naik dengan 124,64 persen sedangkan pertambahan valuta asing adalah sebesar 153,25 persen. Jika dibandingkan ekspor semester I tahun 1971/1972 dengan semester I tahun 1970/1971 maka terdapat kenaikan dalam tonage sebesar 85,79 persen kenaikan valuta asingnya ditaksir sebesar 29,94 persen. Menurut hasil eksplorasi yang terakhir, bijih nikel berkadar

ekspor akan habis dalam waktu tiga tahun mendatang ini. Dari hasil eksplorasi tersebut diketahui pula adanya endapan bijih nikel berkadar rendah (non exportable grade) yang jumlahnya cukup besar. Apabila bijih nikel yang berkadar ekspor ini habis digali, maka akan diusahakan pendirian pabrik ferro nikel dalam tahun 1973. Pabrik ferro nikel ini dapat mengolah bijih nikel berkadar rendah (non exportable grade) menjadi nikel yang dapat diekspor,

Mengenai perkembangan produksi pasir besi dan ekspornya, dapat dilihat pada Tabel VII.28. Pasir besi ini merupakan usaha pertambangan baru yang masa percobaannya telah dimulai pada akhir tahun 1970. Produksi pasir besi secara komersial baru dimulai Januari 1971 dan ekspornya baru dimulai dalam bulan Mei 1971.

Tabel VII.28
PRODUKSI PASIR BESI, 1970/1971 – 1971/1972
 (dalam metrik ton)

BULAN	Produksi	
	1970/1971	1971/1972
April	-	33.506
Mei	-	21.664
Juni	-	32.346
Juli	-	36.959
Agustus	-	36.000 *)
September	-	36.000 *)
Oktober	-	
Nopember	-	
Desember	-	
Januari	6.911	
Februari	15.715	
Maret	31.191	
JUMLAH	53.817	196.475

Tabel VII.29
EKSPOR PASIR BESI, 1971/1972

BULAN	Metric ton	US \$
April	--	--
Mei	6.310	29.133,27
Juni	15.029	69.388,89
Juli	14.988	69.199,60
Agustus	28.277,8	130.563,30
September	46.638	207.596,87
JUMLAH	111.243,8	505.881,93

Sumber : Departemen Pertambangan

7.4.4. Pariwisata

Dunia kepariwisataan di Indonesia ditandai dengan kemajuan-kemajuan yang pesat sekali. Kenaikan wisatawan yang datang ke Indonesia pada tahun 1971 adalah rata-rata 45 persen bila dibandingkan tahun 1970.

Tabel VII.30
PERKEMBANGAN WISATAWAN, 1970/1971 – 1971/1972

Bulan	1970	1871	Kenaikan (%)
Januari	7.527	11.397	+ 51,41
Februari	9.589	13.139	+ 37,02
Maret	10.110	14.603	+ 44,44
April	9.942	14.417	+ 45,01

Sumber : Departemen Perhubungan

Tabel VII. 31.
PERKEMBANGAN WISATAWAN MENURUT NEGARA ASAL,
1967 -1970

Tahun	Amerika	Eropa	Asia	Australia	Lain-lain	Jumlah
1967	4.561	6.412	5.781	2.685	6.952	26.591
1968	12.646	11.068	12.186	3.358	13.135	52.595
1969	18.048	15.670	25.018	5.512	21.819	86.067
1970 *)	22.015	20.527	32.714	8.637	45.426	129.319

Sumber: Departemen Perhubungan.

*) Data triwulan 1-1970.

Meskipun perkembangan sarana-sarana tersebut menggembirakan, namun usaha-usaha harus terus ditingkatkan untuk dapat menampung kepesatan peningkatan arus wisatawan baik dalam bentuk sarana telekomunikasi angkutan dan lain-lain fasilitas.

7.5. Prasarana

Prasarana dalam bentuk jalan, jembatan, irigasi dan sarana lainnya adalah sangat penting dalam rangka meningkatkan hasil produksi.

7.5.1. Irigasi

Salah satu syarat untuk memungkinkan tercapainya hasil pertanian yang optimum ialah dengan sistem pengairan yang efisien. Dewasa ini pembangunan sektor irigasi ditekankan pada usaha perbaikan sistem irigasi dan perluasannya.

Tabel VII.32.
PELAKSANAAN IRIGASI, 1969/1970- 1970/1971

PROGRAM	Target PELITA I	1969/1970	1970/1971
1. Rehabilitasi irigasi	830.000 Ha	210.330 Ha	171.549 Ha
2. Extensifikasi irigasi	430.000 Ha	43.153 Ha	24.579 Ha
3. Perbaikan & Pengamanan sungai	-	73.259 Ha	62.406 Ha
4. Pembangunan pengairan lainnya	-	21.059 Ha	5.000 Ha
	1.260.000 + P.M	347.801 Ha	285.554 Ha

Sumber: Departemen P.U.T.L

Usaha-usaha rehabilitasi irigasi sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Demikian juga perbaikan dan pengamanan sungai yang terutama bertujuan untuk pengamanan areal produksi pangan/ persawahan dan perkebunan akibat banjir.

7.5.2. Perhubungan

7.5.2.1. Perhubungan darat

Kegiatan-kegiatan dalam perhubungan darat dibagi menjadi 3 bidang, ialah :

1. Angkutan sungai, danau dan ferry;
2. Angkutan kereta api;
3. Angkutan jalan pada.

Ad.1. Angkutan sungai, danau dan ferry

Masalah angkutan sungai, danau dan ferry merupakan masalah penting, karena dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dipedalaman dalam rangka pengembangan potensi ekonomi nasional.

Pada akhir bulan Juni 1971 telah diresmikan pembukaan hubungan ferry antara pulau Lombok (Ampenan) dan pulau Bali (Padang Besi) dengan kapasitas 300 penumpang dan 15

ton barang. Dengan demikian frekwensi angkutan antara kedua pulau ini telah dapat lebih ditingkatkan. Sebagai follow up dari pembukaan ferry antara Lombok dan Bali, maka dalam penggunaan ferry antara Pulau Jawa/Banyuwangi - Bali/Gilimanuk dapat ditingkatkan dengan lima jam sehari.

Ferry yang menghubungkan Sabang dengan Aceh/Ulee Lheue telah dimulai dan dalam rangka peningkatan hubungan ferry antara Ujung (Surabaya) dengan Kamal (Madura) akan dibangun sebuah terminal.

Selanjutnya terminal sungai di Banjarmasin dan Palangka Raya telah selesai dibangun. Dengan demikian produksi daerah-daerah pedalaman telah dapat diangkut secara teratur ke kota untuk diproses ataupun diekspor.

Dengan dibukanya hubungan ferry antara Belawan (Medan) dengan Penang (Malaysia), maka arus lalu lintas penumpang/barang antara kedua kota tersebut akan dapat ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara tetangga, sejak 6 Agustus 1971 telah dibuka hubungan ferry dengan nama Kuda Hitam yang melayani trajek: Pakan Baru-Singapore, Dumai-Singapore dan Dumai-Malaka.

Selanjutnya telah dibuka pula pelabuhan sungai di Tangga Builtung dan di Sekayu (Palembang), sehingga arus angkutan sungai di daerah tersebut makin baik dan lancar.

Sebelum akhir 1971 akan dibuka hubungan ferry antara daratan Kalimantan dengan Tarakan, yang dilanjutkan dengan hubungan ferry antara Tarakan-Nunukan dengan Tawao. Dengan dibukanya hubungan ferry ini, diharapkan akan merangsang masyarakat di daratan pulau Kalimantan untuk meningkatkan produksinya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan Tarakan-Nunukan dengan daratan Malaysia. Pada angkutan sungai telah pula dilakukan rehabilitasi/upgrading/penambahan dermaga. Dalam tahun 1969/1970 dan 1971/1972 telah dibangun 8 proyek dermaga antara lain di Pontianak, Riau dan Samarinda. Dalam tahun 1969/1970 telah dibangun proyek kapal kerja/inspeksi dimana dalam tahun 1970/1971 telah selesai untuk Samarinda, Jambi, Riau, Palembang dan Sumatera Utara. Pada waktu ini sedang dilaksanakan pembangunan 2 kapal angkut untuk Pontianak dan Samarinda.

Ad.2. Angkutan kereta api

Dalam rangka peningkatan pemberian service kepada masyarakat, baik angkutan penumpang maupun barang, maka frekwensi kereta api telah ditingkatkan dan lama perjalanan telah diperpendek seperti terlihat dalam lin-lin berikut:

Nama kereta api	Lintas	Keterangan
Blambangan	Surabaya Pasarturi - Banyuwangi p.p	Patas

Tumapel Tawangalun	Pattas. Malang - Surabaya p.p.	Patas
Purbaja	Surabaya - Djember p.p.	
Kuda putih	Surabaya - Purwokerto p.p	
Sriwidjaja	Djogja - Solo p.p.	
Rapih Daha	Kertapati - Pandyang p.p	
Parahiyangan	Bandung - Jakarta p.p	
Mutiara .	Jakarta - Surabaya - Pasarturi p.p	
Kabat Selatan	Jakarta - Surabaya p.p.	
KA Jakarta - Bogor	Jakarta - Bogor p.p	
Pandan Arang	Semarang - Solo p.p	

Perkembangan jumlah penumpang adalah sebagai berikut :

Tabel VII.33.
ANGKUTAN KERETA API, 1969 - 1971
(dalam jutaan)

Tahun	Jumlah Penumpang	Penumpang - Km
1967	74,079	4.739
1968	73,115	4.551
1969	55,126	3.340
1970	52,442	3.466
1971 *)	21,726	1.456

Sambcr : Departemen Perbubungan

*) Sampai bulan Mei dan angka sementara

Tabel VII.34.
ANGKUTAN BARANG, 1967 - 1971
(dalam jutaan)

Tahun	Ton Barang	Ton Km
1967	2,115	575,707
1968	2,539	643,872
1969	4,016	855,113
1970	3,958	855,118
1971 *)	1,666	374,954

Samber : Departemen Perhubungan

*) Sampai bulan Mei dan angka sementara

Ditingkatkannya frekwensi perjalanan kereta api dan diperpendeknya waktu perjalanan serta pelayanan yang lebih baik akan memungkinkan angkutan penumpang dan barang lebih tertib dan teratur.

Usaha rehabilitasi dan upgrading pada angkutan kereta api selalu diusahakan dan hasil yang dicapai sampai tahun 1970/1971 adalah sebagai berikut :

Ad. 3. Angkutan jalan raya

Angkutan jalan raya adalah salah satu sarana perhubungan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dalam pengangkutan penumpang dan barang.

Trajek antar propinsi dengan his-his dan mobil-mobil penumpang hanya terdapat di Jawa, Sumatera, Bali dan kota-kota besar tertentu. Daerah-daerah lainnya belum mempunyai fasilitas pengangkutan yang sedemikian karena belum adanya jalan-jalan raya yang menghubungkannya. Perkembangan alat angkutan jalan raya dalam tahun 1965 – 1970 adalah sebagai berikut :

Tabel VII.36

JUMLAH ALAT ANGKUTAN JALAN RAYA, 1965 – 1970

Jenis	1965	1966	1967	1968	1969	1970	Kenaikan rata2(%)
Bus	18.914	19.584	18.840	19.497	20.497	23.451	4,69
Mobil barang	86.864	92.891	94.892	93.417	95.660	99.814	3,41
Mobil Penumpang	166.854	179.494	184.954	201.125	212.123	235.816	7,29

Sumber : Departemen Perhubungan

Dalam tahun 1969/1970 dan 1970/1971 telah dirintis usaha rehabilitasi/up grading dan penambahan macam-macam fasilitas jalan raya. Dalam periode tersebut telah diselesaikan 10 proyek jembatan timbang 9 proyek alat-alat pengujian dan 4 proyek traffic light.

7.5.2.2. Perhubungan laut**A. Angkutan laut**

Kebijaksanaan angkutan laut dibidang pelayatan nusantara yang didasarkan atas sistim "Regular Liner Service" (RLS) keseluruh pendjuru tanah air, telah memperlihatkan pertumbuhannya yang lebih mantap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan terutama karena usaha penyempurnaan pengamanan operasionil yang selalu ditujukan untuk mencapai produktivitas armada yang lebih tinggi. Disamping itu telah pula dilakukan perbaikan dalam hal reparasi dan docking kapal serta peningkatan efisiensi dari pada terminal (pelabuhan), pengerukan alur-alur pelayatan dan rehabilitasi fasilitas keselamatan pelayatan. Gambaran perkembangan angkutan laut adalah sebagai berikut ;

- a. Dalam tahun 1969 armada nusantara berjumlah 182 kapal atau 184.350 DWT. Jumlah yang beroperasi hanya 130 kapal atau 138.004 DWT yang termasuk dalam jaringan RLS. Dapat dikemukakan pula bahwa masih banyak kapal-kapal yang belum menggabungkan diri kedalam RLS. Tetapi pada tahun 1970 jumlah armada yang termasuk dalam RLS meningkat menjadi 273 kapal atau 267.759 DWT, sedangkan yang beroperasi adalah sejumlah 232 kapal atau 234.684 DWT. Armada RLS ini merupakan sebagian besar dari armada nusantara. Dalam tahun 1971 hanya sedikit

sekali penambahan armada RLS yaitu menjadi 281 kapal atau 278.729 DWT. Jumlah armada ini sudah hampir mencakup seluruh armada nusantara. Hingga triwulan I tahun 1971 jumlah armada yang beroperasi adalah sebanyak 164 kapal atau 148.685 DWT. Tidak beroperasinya seluruh armada nusantara adalah disebabkan karena sebagian kapal-kapal dalam keadaan rusak berat, docking/reparasi dan sudah tua.

- b. Produksi armada nusantara dalam tahun 1969 berkapasitas 1.600.000 ton/m³ dimana armada RLS menghasilkan 1.022.663 ton/m³. Ini berarti efisiensi yang didasarkan pada armada yang beroperasi adalah 8,9. Dalam tahun 1970 hasil yang dicapai oleh armada RLS telah meningkat menjadi 1.623.160 ton/m³. Kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya armada RLS sedangkan efisiensi yang dicapai berdasarkan jumlah armada yang beroperasi yakni 6,92. Hal ini berarti adanya penurunan efisiensi dalam penggunaan kapal.

Dalam tahun 1971 triwulan I hasil yang dicapai adalah sebesar 371.096 ton/m³ yang berarti efisiensi dalam tahun ini diperkirakan dapat mencapai 10,4. Kenaikan efisiensi ini disebabkan adanya aturan-aturan yang lebih baik dalam organisasi armada RLS serta fasilitas pelabuhan yang semakin baik.

Demikian juga halnya dengan pelayatan samudra dimana telah diusahakan adanya jaringan pelayatan yang retap dan teratur Untuk ini Indonesia memasuki berbagai Conference, misalnya Indonesia-Jepang dan Jepang-Indonesia Conference serta Indonesia-Eropa dan Eropa-Indonesia Conference.

Dalam tahun 1969 jumlah armada samudra sebanyak 39 kapal atau 318.545 DWT., sedangkan dalam tahun 1970 jumlah tersebut meningkat menjadi 48 kapal atau 397.360 DWT. Produksi yang dicapai adalah sebesar 1.309.970 ton/m³ dalam tahun 1969 sedangkan dalam tahun 1970 sebesar 1.342.787 ton/m³ Sebagian dari armada pelayatan samudra ini adalah kapal milik nasional dan sebagian lagi merupakan sewa beli dan charter.

B. Pengerukan

Sampai tahun 1970 alat-alat pengerukan sedikit sekali bila dibandingkan dengan jumlah pelabuhan yang harus dikeruk pada saat-saat tertentu. Meskipun demikian pelayaran yang ada digunakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga target yang ditentukan dapat dicapai. Walaupun hasil yang dicapai sudah cukup besar, tetapi masih ada sebesar 37.000.000 m³ lumpur yang belum dikerjakan.

Tabel VII.37

REHABILITASI Pengerukan, 1969 – 1970

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase	Biaya tersedia (Rp)
1969	16.235.000 m3	16.046.898,5 m3	99 %	1.000.000.000
1970	10.160.000 m3	10.588.703,62 m3	104 %	724.000.000

Sumber : Departemen Perhubungan

C. Produksi dan jasa maritim

Sebagian besar kapal-kapal sudah tua sehingga memerlukan rehabilitasi ataupun penggantian. Kebutuhan angkutan semakin meningkat, sehingga produksi dan jasa maritim harus dapat menyesuaikan diri khususnya dalam pelayanan nusantara, disamping mengikuti modernisasi dalam pelayanan internasional pada umumnya.

Potensi yang dimiliki produksi jasa maritim hingga dewasa ini masih dalam keadaan minimal bila dibandingkan dengan kebutuhan tersebut diatas. Namun demikian potensi itu juga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Potensi pembuatan kapal-kapal baru adalah lebih kurang 14.700 DWT/thn. dan docking/reparasi adalah 1.046.000 DWT/thn. Hasil-hasil yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel VII.38

PRODUKSI DAN JASA MARITIM, 1969 – 1971

TAHUN	Pembuatan kapal baru		Reparasi
	Jumlah kapal	DWT	(DWT)
1969	59	5.000	221.000
1970	138	10.200	341.450
1971 *)	45	3.974	--

Sumber : Departemen Perhubungan

*) Angka sementara dan untuk reparasi belum ada data

Pembuatan kapal baru dalam tahun 1970 menunjukkan kenaikan 5.200. Apabila dibandingkan dengan tahun 1969. Dalam tahun 1971 diperkirakan akan dapat dicapai 101 buah kapal baru dengan ukuran 10.600 DWT. Hal ini menunjukkan kenaikan, walaupun masih dibawah kapasitas yang tersedia.

Dalam rangka peningkatan prasarana pelabuhan dan armada sampai dengan tahun 1970/1971 telah dapat diselesaikan untuk :

- Jakarta : Pembangunan 3 buah kapal type Rambu, 2 buah kapal type AE, 2 buah kapal type AC, 2 buah kapal type AP, 3 buah kapal type Higgins dan 1 buah motor boat, juga merehabilitateer 9 buah armada Pemerintah/Perambuan bermacam-macam type.
- Palembang : Rehabilitasi Km Rambu II.
- Surabaya : Pembangunan 2 buah kapal type AB serta rehabilitasi 1 buah kapal type Rambu.
- Ternate : Selesaikan 2 buah kapal type AE.

Peningkatan fasilitas pelabuhan meliputi rehabilitasi dan up grading mat jam-mat jam pekerjaan seperti : dermaga, instalasi listrik/air, gudang, penahan gelombang dll. yang dilaksanakan dipelbagai pelabuhan ,di Indonesia: Jakarta, Cirebon, Cilatjap, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Ulhelhe, Kuala Langsa, Belawan, Sibolga, Teluk Bajur, Bengkalis, Dumai, Pakan Baru, Jambi, Pandyang, Tg. Pandan, Tg. Pinang, Muara Sabah, Pontianak, Sampit, Banyarmasin, Samarinda, Bitung, Donggala, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Bali, Bima, Badar, Tenau, Maumere, Kupang dan Bengkulu.

Kegiatan-kegiatan pengerukan pelabuhan dan alur-alur pelayatan di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Belawan meliputi rehabilitasi perbengkelan, penyediaan sparepart, bahan baku dan sebagainya. Juga diadakan kegiatan-kegiatan pengerukan lumpur di pelabuhan-pelabuhan Tg. Priok, Pasar Ikan, Palembang, Samarinda, Banjarmasin, Sampit, Belawan, Teluk Bajur, Pandyang, Semarang, Tegal, Cirebon, Surabaya, Pasuruan, Jambi, Ketapang, Makasar, Menado dan Bitung.

7.5.2.3. Perbubungan udara

Kegiatan perkembangan dibidang perhubungan udara memperlihatkan kenaikan yang tercermin pada angkutan udara sipil yang teratur, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan negara maupun swasta.

Guna menampung meningkatnya permintaan akan pengangkutan udara maka beberapa lapangan terbang penting telah diperbaiki dan ditingkatkan fasilitas-fasilitasnya.

Tabel VII.39.
PRODUKSI ANGKUTAN UDARA, 1967 - 1970
(regional dan daerah)

Produksi	1967	1968	1969	1970
----------	------	------	------	------

1. Ton/kIn produksi	42.497.000	46.397.000	52.580.338	81.533.000
2. Ton/km penjualan	29.263.000	27.352.000	34.752.671	50.847.000
3. Penumpang diangkut	361.869	382.285	530.894	747.786
4. Jarak yang ditempuh	9.444.000	11.299.000	12.257.836	16.336.000
5. Djam terbang	27.294	34.231	43.300	52.746
6. % Berat	68,8%	58,9%	66,2%	62,3%

Sumber : Departemen Perhubungan.

Tabel VII.40.

PRODUKSI ANGKUTAN GARUDA, 1969 - 1970
(regional dan daerah)

Dalam negeri	1969	1970	Kenaikan
1. Ton/kIn produksi	47.329.000	64.490.000	36,4%
2. Ton/km penjualan	31.680.000	40.421.000	27,4%
3. Penumpang diangkut	403.236	545.382	35,3%
4. Jarak yang ditempuh	9.383.000	10.621.000	13,25%
5. Djam terbang	30.336	30.164	0,57%
6. % Berat	67%	63%	6,0%

Sumber : Departemen Perhubungan.

7.5.2.4. Pos dan telekomunikasi

A. Pos dan giro

Dalam hubungan ini terutama dengan bertambahnya djaringan-djaringan pos kilat/kilat khusus dan bertambah baiknya alat angkutan umum maka waktu tempuh dan surat-surat dapat dipercepat. Dengan demikian angka-angka lalulintas dibidang pos maupun giro menunjukkan kenaikan sebagai berikut :

Tabel VII.41

PERKEMBANGAN KEGIATAN POS DAN GIRO, 1968 – 1971

		1968	1969	1970	1971 (SMT-I)
1	Surat pos biasa/kilat/kilat khusus (000)	138.881	147.215	158.641	--
2	Uang BTN (juta Rp)	31.214	59.372	146.311	145.448
3	Wesel pos (miliar Rp)	9,5	14.912	20.805	12.527

4	Omzet giro dan cek pos (miliar Rp)	26.804	97.631	106.651	35.748
---	------------------------------------	--------	--------	---------	--------

Sumber : Departemen Perhubungan

Dengan terus meningkatnya modernisasi dan pelayanan yang sasarannya adalah kecepatan pengiriman dan pengamanannya, maka untuk waktu-waktu yang akan datang sejalan dengan keadaan ekonomi yang lebih mantap, angka-angka kenaikan ini diperkirakan akan lebih besar lagi.

B. Telekomunikasi

Perkembangan telekomunikasi sejak tahun 1968 hingga sekarang menunjukkan angka-angka kenaikan, lebih2 setelah dibukanya dan ditingkatkannya djaringan hubungan dengan luar negeri mdalui stasion Jatiluhur.

Peningkatan pelayanan tilpon dengan mengotomatisasikan tilpontilpon dalam kota terus diusahakan sehingga makin bertambah. Jangkauan hubungan tilpon, telegraf dan telex akan semakin meluas dan akan lebih berkembang lagi apabila djaringan microwave nusantara yang sedang dalam pembangunan benar-benar telah selesai.

Pada bidang telekomunikasi telah dibangun telepon otomat di : Surabaya, Jambi, Banjarmasin, Cirebon, Semarang dan Medan dengan 23.000 tin umum.

Tabel VII.42.
PERKEMBANGAN KEGIATAN TELEKOMUNIKASI
1968 - 1971

	1968	1968	1970	1971 *)
1. Telepon otomatis (buah)	79.434	90.635	101.727	106.885
2. Telepon manual S.B./ LB. (buah)	91.976	92.163	94.727	93.442
3. Kantor telepon (unit)	530	530	536	536
4. Kantor telegraf (unit)	463	657	658	678
5. Telegraf dalam negeri	2.140.605	1.992.468	2.134.080	1.309.733
6. Telegraf LN. (pulsa)	418.000	189.389	391.643	243.999
7. Telex D.N. (pulsa)	2.218.362	3.645.320	4.934.027	3.684.737
8. Telex LN. (pulsa)	25.747	45.134	121.869	93.325

Sumber : Departemen Perhubungan.

*) Sampai dengan semester I. 1971.

Demikian juga telah dibangun hubungan antar kota dengan VHF antara lain: Open Wire Carrier antara Lombok - Sumbawa dengan 12 channels, Medan - Banda Aceh dengan 3 channels sedangkan antara Padang - Pekanbaru dengan 12 channels yang baru selesai 50%.

Hubungan jarak jauh melalui HF (high frequency) radio antara Jakarta - Medan dan Jakarta - Padang telah selesai dibangun. Dan pembangunan hubungan jarak jauh antara Pontianak - Makassar Gorontalo - Manado masih dalam pelaksanaan.

Dalam pada itu pembangunan microwave antara Jawa - Bali yaitu antara Bandung - Semarang telah selesai dalam tahun 1969/1970 dan antara Semarang - Surabaya selesai dalam tahun 1970/1971. Antara Surabaya - Denpasar masih dalam pelaksanaan, sedang pembangunan microwave antara Jakarta - Palembang baru selesai 50 persen.

7.5.3. Jalan dan listrik

7.5.3.1. Jalan

Sebelum Pelita I terdapat jalan negara sepanjang 10.000 Km, jalan provinsi 20.000 Km dan jalan kabupaten sepanjang 50.000 Km sehingga seluruhnya sepanjang 80.000 Km. Dari jalan-jalan tersebut yang mempunyai nilai penting dipandang dari sudut nasional dan regional adalah kira-kira 40.000 Km. Dari jumlah panjang jalan tersebut hanya 10.000 Km

yang berada dalam keadaan baik, sehingga selebihnya yaitu 30.000 Km berada dalam keadaan kurang baik. Semenjak permulaan PELITA I baru dapat menanggapi kira-kira 60 persen dari 30.000 Km yaitu :

- rehabilitasi jalan 11.225 km
- up grading jalan 6.000 km,
- rekonstruksi/pembangunan jalan baru 305 km,
- rehabilitasi jembatan 64.000 meter,
- upgrading/pembuatan baru jembatan 16.000 meter.

Mengingat keadaan tersebut maka kebijaksanaan ditujukan terutama untuk menemukan suatu sistematik yang dapat menampung masalah-masalah prasarana perhubungan darat dewasa ini. Sistematik yang dipandang paling baik ialah system trunk-lines dan feeder-lines yang dipandang penting secara nasional dan regional.

Di pulau Jawa jalan-jalan yang termasuk trunk-lines adalah jalan yang menghubungkan Jakarta- Cirebon - Semarang - Surabaya - Solo Djogjakarta - Bandung - Bogor - Jakarta. Yang sekundair adalah jalan antara Jakarta - Merak; Bogor - Pelabuhan Ratu; Sukabumi - Tjiandjur Tjikampek - Padalarang - Bandung - Cirebon kemudian Cilacap - Tegal; Semarang -Djogjakarta; Surabaya - Malang; Surabaya - Banyuwangi.

Untuk pulau Sumatera, trunk-lines utama adalah antara Kalianda Tandjungkarang - Baturadja - Lahal - Bangka - Sei Dareh - Solak Bukittinggi - Medan - Banda Aceh, sedang yang sekunder antara Muara Enim - Palembang - Lubuk Linggau - Bengkulu - Muara Tebo - Jambi; juga antara Solorangun - Jambi; Padang - Bukittinggi - Pakanbaru; Kotacane - Medan; Bireun - Takengon. Untuk pulau Kalimantan ialah antara Banjarmasin - Balikpapan - Samarinda dan untuk Sulawesi antar Manado - Bitung; Manado - Gorontalo; Makassar - Parepare - Palopo Pose; Makassar - Watampone - Palopo.

Atas feeder-lines dan jalan penting lokal telah diadakan pula rehabilitasi Feeder-line berfungsi menghubungkan jalan-jalan propinsi ke trunk line; juga ditujukan untuk kepentingan ekonomi serta menghapuskan isolasi daerah. Jalan lokal lainnya yang bernilai nasional seperti jalan-jalan untuk transmigrasi, pariwisata dan yang bersifat politis mendapat prioritas yang serupa dengan feeder-lines.

Untuk semester 1-1971/1972 dalam rangka program perbaikan prasarana perhubungan darat (jalan/jembatan) telah dapat diselesaikan sebanyak 27,2 persen dari target.

7.5.3.2. Listrik

Sebelum PELITA I tenaga listrik mempunyai daya terpasang (installed capacity) sebesar 659.000 kw dimana diperkirakan 10 persen daripadanya memerlukan rehabilitasi. Keadaan transmisi dan djaringan distribusi tidak seimbang dengan besarnya daya terpasang. Tenaga listrik yang tersedia digunakan sebagian besar untuk penerangan dan kira-kira 20 persen dipergunakan untuk industri. Untuk masa-masa mendatang akan diusahakan agar menggunakan tenaga listrik lebih banyak lagi untuk keperluan industri.

Dalam pada itu sasaran PELITA 1 dibidang tenaga listrik adalah untuk merehabilitir daya terpasang sebesar 65.900 kw dan pembangunan baru dengan daya terpasang sebesar 366.500 kw serta mengusahakan terdapatnya keseimbangan antara daya terpasang, transmisi dan djaringan distribusi. Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 1969/1970 dan tahun 1970/1971 dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel VII.44

REALISASI PEMBANGUNAN TENAGA LISTRIK, 1969/1970 – 1970/1971

	1969/1970	1970/1971	Jumlah
Rehabilitasi pembangkitan	3.894 kw	--	3.894 kw
Pembangunan pembangkitan	200 kw	24.250 kw	24.450 kw
Transmisi/gardu induk	55 km/6 bh	- / 203 bh	55 km/209 bh
Jaringan distribusi	289 km	416,45 km	705,45 km

Sumber : Departemen PUTL

7.6. Pendidikan dan Kesehatan

7.6.1. Pendidikan

Pada prinsipnya tujuan umum pendidikan adalah membimbing semua warganegara Indonesia menjadi manusia PANCASILA, yaitu yang berpribadi, berkesadaran akan ke-Tuhan-an, berkesadaran bermasyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitarnya. Perkembangan bidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

Sampai dengan tahun 1966 keadaan pendidikan di Indonesia dirasakan sudah sangat parah dengan terdapatnya berbagai mat jam kepintyangan, baik dibidang kwalita dan kwantita, maupun dibidang-bidang kurikulum personil guru-guru, materiil, organisasi/administrasi dan lain-lain.

Menyadari betapa beratnya keparahan dibidang pendidikan itu, pemerintah mulai melakukan usaha-usaha menanggulangi masalah-masalah urgent dan meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan yang baru. Dalam rangka melaksanakan usaha-usaha tersebut, telah

dilakukan pula usaha-usaha pembinaan dibidang kurikulum, personil, materiil, keuangan, khususnya bagi pendidikan disekolah dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi problema yang telah dilakukan dapat dikemukakan berbagai ketidak seimbangan sebagai berikut :

- ketidak seimbangan horizontal, dimana jumlah murid-murid sekolah umum jauh lebih banyak dari pada murid-murid sekolah kejuruan;
- ketidak seimbangan vertikal, dimana jumlah murid-murid SD jauh lebih banyak dari pada murid-murid SL., dan murid-murid SL jauh lebih banyak dari pada mahasiswa-mahasiswa diperguruan tinggi ;
- jumlah drop-out lebih banyak dari pada yang berhasil menyelesaikan suatu tahap pendidikan.

Setelah dilaksanakannya pembangunan lima tahun, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan usaha meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar, dengan memperbaharui kurikulum dan metode mengajar, menjediakan/melengkapi kebutuhan akan buku-buku dan alat-alat pelajaran lainnya, serta usaha-usaha untuk mengurangi jumlah murid yang gagal pelajarannya.
2. Dalam usaha memberikan persiapan yang cukup bagi anak-didik telah diusahakan pendirian tempat-tempat pembinaan ketrampilan yang mempunyai management tersendiri dan yang dapat dipergunakan oleh berbagai jenis sekolah ditingkat pendidikan menengah.
3. Rehabilitasi ruang praktikum, laboratoria, mesin-mesin dan alat-alat lainnya dalam rangka peningkatan pendidikan tehnik dan kejuruan sebagai program inti pendidikan didalam PELITA. Dibidang pendidikan tehnik dari program 12 instatasi pendidikan tehnik telah selesai dibangun 2 STM Pembangunan (di Jakarta dan Semarang) sedangkan 10 lainnya masih dalam taraf kelanjutan.
4. Dalam rangka peningkatan pendidikan guru, usaha-usaha telah dilakukan dengan lebih menitik beratkan kepada peningkatan mutu guruguru dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan, dengan tujuan memberikan kewenangan yang lebih tinggi, dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan.
5. Disamping itu telah diusahakan pula perluasan/penambahan fasilitas. Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi terutama berupa rehabilitasi fakultas-fakultas/djurusan-djurusan eksakta. Selanjutnya untuk menuju kearah tercapainya peningkatan mutu pendidikan akademis telah dibentuk konsorsium-konsorsium dan lembaga-lembaga dibidang-bidang ilmu pengetahuan

tertentu. Disamping konsorsium-konsorsium tersebut telah dilakukan pembentukan "centres of excellence" di 5 tempat, yaitu : Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga.

6. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan orang dewasa telah dilaksanakan rehabilitasi dan peningkatan kegiatan beberapa pusat latihan pendidikan masyarakat, menjediakan buku-buku pelajaran dan perpustakaan rakyat dalam usaha menuju kepada fungsionalisasi pembrantasan buta-huruf. Demikian juga sebagai bagian penting dari program pembangunan desa pada umumnya telah dilakukan pula usaha-usaha yang tetap untuk-menjenggarakan kursus-kursus bagi masyarakat orang dewasa. Dalam bidang kebudayaan telah dilakukan usaha pengembangan pusat-pusat kesenian dan.pembinaan konservatori di beberapa daerah dalam rangka meningkatkan apresiasi kesenian dikalangan masyarakat.
7. Dibidang olahraga telah dilakukan usaha-usaha yang ditujukan kepada peningkatan physical fitness dan prestasi olah raga baik disekolah maupun diluar sekolah, serta peningkatan/memperluas pendidikan tenaga-tenaga pembina olah raga dengan memanfaatkan sekolah-sekolah olah raga yang sudah ada.

Dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan agar sekolah lebih mampu menanggapi kebutuhan masyarakat yangmembangun telah dirintis langkah-langkah untuk merubah sistim evaluasi kemajuan/kemampuan anak-didik. Adapun gambaran perkembangan kwantitatif sekolah negeri dari tahun 1966 sampai dengan 1970 dapat dilihat didalam **Tabel VII. 45.**

Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain adalah :

1. Program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar yang meliputi usaha pembaharuan kurikulum dan metode mengajar, masing-masing di Jakarta, Bandung, Ungaran, Yogyakarta dan Malang. Disamping itu dalam usaha meningkatkan mutu alat-alat pendidikan telah diterbitkan dan dibagikan sebanyak 12,181 juta buku-buku untuk Sekolah-sekolah Dasar Negeri maupun Swasta dan Madrasah-madrasah.
2. Guna peningkatan mutu pendidikan tehnik telah dapat diselesaikan dua Sekolah Tehnologi Menengah Pembangunan sebagai proyek perintis, masing-masing di Semarang dan Jakarta yang menelan biaya Rp. 1 miliar diatas luas tanah masing-masing Semarang +/- 2,5 ha dan Jakarta 3,5 ha dengan luas bangunan masing-masing 10.730 m² dan 8.533 m². Proyek perintis ini diperlengkapi dengan peralatan yang lengkap dan modern. Disamping itu diadakan pula peningkaran muru pengajaran.

teknik/S.T.M. pendidikan instruktur di 8 tempat, serta peningkatan pendidikan kejuruan di 25 tempat.

3. Guna mengatasi kekurangan guru, baik kwalitatip maupun kuantitatif telah direhabilitir 25 SPG, upgrading guru-guru S.D., dan Sekolah Lanjutan Umum di 7 tempat serta penyediaan buku-buku pelajaran untuk Sekolah Guru.
4. Dibidang pembinaan pendidikan tinggi telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut :

4.1. Perpustakaan

Pembangunan ruang perpustakaan seluas 47.137 m² untuk Universitas/Institut.

Penambahan buku-buku ilmiah sejumlah 12.000 exp dan 20.000 majalah ilmiah untuk 19 Universitas/Institut dan Tropical Biology serta Tropical Medicine.

Tabel VII.45.

**PERKEMBANGAN KWANTITATIF SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI
1966 - 1970 1)**

No	Jenis Sekolah	1966	1967	1968	1969	1970
1.	S.D.	45.009	49.333	50.600	51.747	55.550
2.	S.M.P.	1.271	1.270	1.353	1.384	1.483
3.	S.M.E.P.	315	312	352	382	399
4.	S.K.K.P.	-	176	180	188	189
5.	S.M.A.	361	399	409	411	439
6.	S.M.E.A.	118	134	171	203	292
7.	S.K.K.A.	-	23	25	32	38
8.	S.P.G.	-	184	197	197	3472)
9.	S.T.	569	574	575	578	560
10.	S. T .M.	187	194	196	198	3383)
11.	Universitas/Institut	40	40	40	40	40

Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1) Angka sementara

2) S.P.G, S.P.G.G.I, S.P.G.C.II

4.2. Laboratorium

Pembangunan gedung laboratorium seluas 35.400 m² untuk 33 Universitas, seluas 1.168 m² untuk Tropical Medicine dan 747 m² untuk Tropical Biology, serta peralatan laboratorium.

4.3. Penelitian ilmiah

Diadakan 368 jenis penelitian ilmiah oleh 32 Universitas Institut disamping 3 jenis penelitian untuk pengembangan buku dan ilmu pengetahuan.

4.4. Upgrading dosen

Oleh 11 Universitas/Institut Pembina telah diadakan penataran (upgrading) untuk pembinaan staf pengajar yang meliputi berbagai jenis ilmu pengetahuan yang diikuti oleh 474 orang dosen.

4.5. Rehabilitasi/pembangunan ruang kuliah

Telah diadakan pula rehabilitasi ruang kuliah pembangunan gedung kuliah yang baru dengan luas untuk 25 Universitas/Institut. disamping 6.463 m²

5. Peningkatan pendidikan masyarakat dan orang dewasa.

Dalam bidang ini telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut :

- 5.1. Kursus PBH biasa 1282 buah dengan murid 199.493; kursus PBH fungsional telah selesai; kursus penganran pembangunan 4159 buah dengan murid 10.675 orang; panti musyawarah pembangunan di 5.745 tempat dengan peserta 183.600 orang. Disamping itu telah disediakan 160.000 buah buku bacaan dari 32 judul buku, dan 95.000 buah buku pelajaran dari 3 judul buku.
- 5.2. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam ketrampilan kejuruan telah diadakan kursus kader kejuruan dengan murid 102 orang, penyediaan alat-alat pelajaran praktek kejuruan masyarakat 1971 buah dengan murid 3.719 orang.
- 5.3. Dalam rangka peningkatan pendidikan masyarakat wanita telah diadakan kursus pembimbingan/pelopor pendidikan kesejahteraan keluarga sebanyak 395 buah dengan murid 9.873 orang, kursus pendidikan kesejahteraan keluarga 1.050 buah dengan murid 48.081 orang.
- 5.4. Untuk meningkatkan mutu pengetahuan masyarakat melalui bacaan telah diadakan bahan bacaan sebanyak 177 judul dengan jumlah : $\pm$ 15.000 buah.

Dalam bidang olah raga dan pemuda telah dilakukan :

1. Pembaharuan kurikulum S.T.O. dan S.M.O.A., peningkatan sarana perkuliahan untuk S.T.O. dan S.M.O.A., peningkatan kegiatan olah raga pelajar di 293 Daerah Tingkat III, dan sebagainya.
2. Dalam usaha meningkatkan kesadaran kesegaran jasmani telah dilakukan test physical fitness dengan performance test, terhadap 12.005 pelajar dan mahasiswa.

Dalam bidang kebudayaan telah dilaksanakan program

pengembangan kebudayaan nasional yang meliputi proyekproyek pengembangan pusat kesenian di 5 daerah, konservatori di 7 daerah rehabilitasi dan perluasan Museum Jakarta dan Bali serta restorasi Candi Borobudur.

7.6.2. Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan manusia baru yang sehat secara sosial, badaniah dan rohaniah dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1969 diusahakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembrantasan wahab terutama cacar dan cholera eltor.
2. Pemberantasan penyakit malaria secara intensif sampai kedaerah-daerah.
3. Pembrantasan penyakit-penyakit menular lainnya antara lain penyakit tbc/paru-paru.
4. Pemberantasan penyakit patek, penyakit kusta, penyakit mata dan lain-lain.
5. Mengusahakan kesehatan lingkungan yang lebih baik terutama air minum dan pembuangan kotoran.
6. Mendirikan lebih banyak stasiun karantina dan laboratorium.
7. Mengadakan rehabilitasi dari rumah-rumah sakit, balai-balai pengobatan dan B.K.I.A.
8. Mengusahakan pembinaan dan peningkatan usaha-usaha kesehatan melalui B.K.I.A., usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan jiwa, usaha kesehatan gigi dan usaha perbaikan gigi.
9. Pendidikan dari distribusi tenaga-tenaga kesehatan yang lebih intensif.
10. Mengusahakan assembling obat-obatan dalam negeri dan mendirikan pabrik farmasi.
11. Menggiatkan usaha-usaha kesehatan kedaerah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
12. Mengusahakan agar supaya keluarga berencana menjadi program yang diikuti oleh masyarakat.

Setelah April 1969 program kesehatan lebih dititik beratkan pada :

1. Pelaksanaan program Keluarga Berencana, terutama dipulau Jawa, Madura dan Bali.
2. Pendidikan kesehatan masyarakat .
3. Pencegahan dan penanggulangan wahab .
4. Peningkatan tenaga kesehatan .
5. Pembangunan sarana kesehatan, termasuk obat-obat/alat-alat kedokteran
6. Research dan survey.

Didalam melaksanakan program PELITA telah diadakan kerja-sama yang erat dengan instansi-instansi lain yang acta hubungannya dengan keseharan, serta dengan badan-badan internasional dan negara-negara lain. Kerja-sama dengan luar negeri

meliputi bidang bantuan tenaga ahli, bea siswa, perlengkapan, kendaraan, biaya operasional dan sebagainya. Pelaksanaan program PELITA dibidang kesehatan dari tahun 1969 hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. Program pendidikan dan latihan institusional :

Tujuan daripada proyek ini ialah untuk membantu mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan, memperbaiki kurikulum, meng-upgrade tenaga-tenaga pengajar, melengkapi fasilitas pendidikan. Untuk itu telah diadakan kursus-kursus penjegar, work-shop, menjediakan alat-alat pendidikan. mengadakan rehabilitasi dan perluasan gedung-gedung pendidikan, menerbitkan sebanyak 74.000 macam buku-buku dan brochures-brochures untuk dibagikan keseluruh Indonesia, serta 38.721 buku-buku untuk perpustakaan departemen kesehatan.

2. Program peningkatan penelitian dan survey:

Tujuan daripada proyek ini ialah untuk mendapatkan data informasi sebagai bahan perencanaan dan evaluasi serta memecahkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik teknis maupun administratif. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah penyelidikan terhadap berbagai macam penyakit, antara lain penyakit cholera, pes, penyakit anak-anak, schistosemiasis, vaksinasi cacar dan BCG secara simultan. Selanjutnya telah dilakukan pula integrasi usaha keluarga berencana di Puskesmas dan B.K.I.A., penelitian gizi dan sebagainya. Dalam bidang research telah diadakan kerja sama dengan fakultas-fakultas kedokteran, WHO dan badan-badan luar negeri lain (NAMRU).

3. Program pendidikan kesehatan masyarakat

Tujuan daripada proyek ini ialah untuk menanamkan, memupuk, mengembangkan dan mempertinggi kesadaran hidup sehat daripada seluruh rakyat Indonesia, serta mengajak mereka berpartisipasi dalam melaksanausaha-usaha kesehatan.

Kegiatan-kegiatan yang telah diadakan ialah up-grading bagi petugaspetugas dari seluruh Indonesia serta menjediakan buku-buku pedoman, flip charts, alat-alat praga, slide-projector, tape-recorder, audio-visual-aid , film dan buku-buku sebanyak 100.000 eksemplar.

4. Pengembangan infra-struktur

Proyek ini meliputi pembangunan rumah-rumah sakit, Puskesmas, B.K.I.A., balai-balai pengobatan dan laboratorium Usaha-usaha yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Rehabilitasi dan perluasan pada 9 buah rumah sakit vertical dan 17 buah rumah sakit

propinsi yang dipakai sebagai teaching hospital dan referral hospital. Sebanyak 17 buah rumah sakit jiwa, 2 buah rumah sakit mata dan 2 buah rumah sakit paru-paru telah direhabilitir dan diperluas.

- b. Pembangunan B.K.I.A. di - 12 propinsi, sehingga dewasa ini terdapat 5.815 B.K.I.A., diantaranya 980 yang di-integrasikan kedalam Puskesmas, dan 1.500 buah B.K.I.A. telah dijadikan klinik keluarga berencana.
- c. Pembangunan balai pengobatan di 11 propinsi, sehingga dewasa ini terdapat sebanyak 7.629 buah. Dewasa ini telah terdapat 2.007 buah Puskesmas, dimana diberikan pelayanan kesehatan integrasi .
- d. Rehabilitasi pada 8 buah laboratorium, sedangkan pembangunan laboratorium baru berupa 1 buah laboratorium kesehatan pusat di Jakarta dan 5 buah laboratorium di propinsi.

5. Penyediaan obat-obat/alat-alat kesehatan :

Usaha-usaha yang telah dilaksanakan ialah :

- a) Telah dibagikan kedaerah alat-alat kedokteran berupa 452 set poliklinik, 100 buah emergency sets, 1 buah ICU dan Nuclear Medicine dan alat Rontgen.
- b) Telah dibeli obat-obatan untuk keperluan rumah sakit dan balai balai pengobatan, serta DDT untuk keperluan pemberantasan malaria
- c) Telah direhabilitir dan diperluas pabrik farmasi departemen kesehatan, depot farmasi pusat dan 17 depot farmasi daerah, sedangkan pembangunan baru ialah 4 buah unit produksi dan 3 buah Laboratorium Drug Quality Control.
- d) Melalui undang-undang penanaman modal asing telah disetujui 31 buah perusahaan modal asing dibidang farmasi, dimana 24 di antaranya merupakan joint-venture. Disamping itu terdapat sebanyak 167 pabrik farmasi nasional yang tersebar dibeberapa daerah.
- e) Pada unit-unit distribusinya terdapat sebanyak 446 pedagang besar farmasi, 995 buah apotik dan 2.000 toko obat.

6. Penyempurnaan prasarana fisik pemerintah :

Tujuan daripada proyek ini ialah untuk memberikan sarana bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Untuk itu telah dibangun kantor kesehatan di pusat dan didaerah-daerah seluas 3.417,3 m², fasilitas akomodasi seluas 1.620 m², penambahan peralatan kantor serta 19 buah kendaraan roda 4 untuk para IKES dan pejabat-pejabat departemen kesehatan.

7. Pemulihan/peningkatan kesehatan masyarakat :

- a) Usaha perbaikan gizi keluarga terdapat di 8 propinsi yang meliputi 39 kabupaten. tujuannya ialah untuk meningkatkan taraf gizi masyarakat, terutama untuk ibu dan anak.
- b) Dalam program kesehatan jiwa telah di-upgrade sebanyak 12 orang dokter, dan mendidik beberapa orang dokter untuk menjadi psikiater. Usaha-usaha dibidang perawatan secara ambulatoria serta after care services telah ditingkatkan. Rehabilitasi telah diadakan terhadap 11 buah rumah sakit jiwa, menambah poliklinik poliklinik, membangun 3 tempat latihan kerja dan 1 buah sheltered workshop.
- c) Dalam program peningkatan kesehatan gigi telah diadakan survey kesehatan gigi, pengadaan obat-obat serta alat-alat gigi dan meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemeliharaan kesehatan gigi. Dewasa ini terdapat 6.318 balai pengobatan gigi, 628 dokter gigi, 263 perawat gigi dan 29 orang tehnik gigi.
- d) Dalam rangka program peningkatan kesehatan mata, telah didistribusikan red palm-oil dan vitamin A kepada 51.316 orang anak, dan penyediaan 5.915 tube obat salep mata.
- e) Dalam usaha kesehatan sekolah telah dapat dicapai sebanyak 2,9 juta murid, 17.390 buah sekolah, 3.187 guru yang di-upgrade, dengan jumlah petugas sebanyak 2.336 orang.

8. Pemberantasan penyakit menular :

Walaupun masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang penyakit menular, tetapi dalam 3 tahun terakhir telah dicapai banyak kemajuan.

a) Cacar:

Dalam permulaan PELITA dilaporkan sebanyak 17.970 penderita yang terdapat di 15 propinsi. Pada saat ini penyakit cacar hanya terdapat di Sulawesi Selatan, diharapkan pada akhir tahun 1973 sudah dapat terbasmi seluruhnya.

Dalam 2 tahun terakhir PELITA telah dapat dicacar sebanyak 46.000.000 orang.

b) Penyakit Cholera:

Penyakit cholera pada saat ini telah tersebar diseluruh Indonesia. Sejak ditinggalkannya usaha vaksinasi massal terhadap penyakit cholera, karena kurang efisien dan efektif, maka penanggulangannya dititik beratkan kepada usaha surveillance epidemiology serta follow-up di daerah letusan.

Kemampuan untuk menanggulangi wabah cholera telah ditingkatkan dari 6 propinsi

dalam tahun 1969/1970, menjadi 15 propinsi dalam tahun 1971/1972.

Berhubung penyakit cholera erat hubungannya dengan keadaan hygiene dan sanitasi, terutama persediaan air minum, maka penyakit cholera masih akan tetap merupakan penyakit endemis di Indonesia, selama belum ada perbaikan hygiene rakyat dan sanitasi lingkungan.

c) Penyakit malaria:

Pulau Jawa dan Bali diadakan usaha penyemprotan, pencarian serta pengobatan penderita. Diluar Jawa dititik beratkan kepada kegiatan surveilance dari penanggulangan wabah didaerah transmigrasi dan pariwisata. Dalam tahun 1969/1970 telah dapat disemprot sebanyak 231 daerah, dan dalam tahun 1970, 1971 dan 1972 dapat disemprot 2 500.000 rumah

d) Penyakit TBC paru-paru

Pembrantasan penyakit TBC dititik beratkan kepada pencegahan timbulnya penyakit dengan vaksinasi BCG terhadap anak-anak umur 0-14 tahun. serta menemukan dan mengobati sumber-sumber penularan. Anak-anak yang telah dapat divaksinasi sebanyak 4.482.129, dan akan diusahakan agar pada akhir PELITA I dapat divaksinasi sebanyak 55 000.000 anak.

e) Penyakit frambusia

Usaha pembrantasan penyakit frambusia di pulau Jawa dan Bali sudah mencapai tingkat konsolidasi dan maintenance. Pembrantasan penyakit frambusia sudah dimulai sejak 1952 dan sampai sekarang sudah dapat dilindungi 90% dari rakyat Indonesia.

Dari 3.226 kecamatan telah diadakan pembrantasan untuk penyakit frambusia pada 2.657 kecamatan.

f) Penyakit-penyakit menular lainnya seperti penyakit kusta, penyakit kelamin dan filariasis, ditanggulangi dengan memperhatikan prevalence ratenya serta tersedianya tenaga dan biaya.

g) Surveillance epidemiology :

Tujuannya ialah mengumpulkan data. secara sederhana, terus-menerus dan sistimatis untuk digunakan dalam mengambil tindakan dasar analisa yang diadakan. Untuk keperluan ini telah dibentuk unit-unit di beberapa daerah.

9. Peningkatan hygiene air minum :

Dari survey yang diadakan terhadap 10 propinsi, ternyata, bahwa :

26% menggunakan mata air,

45% menggunakan sumur,

- 15% menggunakan air sungai,
- 12% menggunakan air hujan,
- 2% lain sumber, sebagai air minum.

Telah dapat selesai dibangun didesa-desa sebanyak 6 buah sumur artesis, 12 instatasi penangkap mala air, 2 buah instatasi penampung air hujan, 3 buah instatasi penjerapan air dari sungai dan 750 buah sumur pompa tangan.

10. Perencanaan/pengawasan:

Telah diadakan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang lokasinya dipusat dan didaerah-daerah.

Untuk keperluan perencanaan telah diadakan survey kelahiran dan kematian, studi administrasi Puskesmas, pengumpulan data-data dibidang personil, farmasi, anggaran kesehatan daerah dan sebagainya.

7.7. Tenaga kerja

7.7.1. Perkembangan tenaga kerja

Perkembangan tenaga kerja Indonesia semenjak tahun 1966 dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya. Semenjak 1966 perkembangan penduduk dan angkatan kerja Indonesia menunjukkan gambaran sebagai berikut: .

Tabel VII.46.
PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA INDONESIA, 1966 -1971
(dalam ribuan)

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Penduduk	109.593	112.311	118.130	118.054	121.089	124.237
Angkatan Kerja	39.234	40.207	41.262	42.322	43.434	44.625
Laki - laki	26.051	26.978	27.810	28.694	29.578	30.612
Wanita	13.183	13.229	13.452	13.628	13.854	14.013

Sumber : 1. Departemen Tenaga Kerja
2. B.P.S.

Perkiraan ini didasarkan atas asumsi bahwa peningkatan penduduk adalah 2,24 persen dalam tahun 1961.

Dari tabel itu dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah 35,6 persen sampai 35,9 persen dari jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat disekitar 3 juta orang.

Angkatan kerja setiap tahunnya meningkat, misalnya dari tahun 1970 ke tahun 1971 meningkat dengan 1,1 juta. Artinya, harus ditijptakan smanyak 1,1 juta kesempatan kerja baru untuk menghindarkan bertambahnya pengangguran.

7.7.2 Penyebaran tenaga kerja

Penyebaran penduduk dan angkatan kerja Indonesia tidak seimbang antara Jawa Madura-Bali dan daerah Indonesia lainnya. Penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang tidak seimbang tersebut tergambar pada tabel dibawah ini.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa di Jawa-Madura-Bali terdapat 81,1 juta penduduk termasuk angkatan kerjanya yang berjumlah 29,1juta. Wilayah tersebut hanya meliputi 7,1 % dari wilayah Indonesia. Demikian pula dalam daerah yang hanya meliputi 7,1% dari seluroh wilayah Indonesia itu penduduk meningkat 1,81 juta dan angkatan kerja meningkat sebesar 0,66 juta setahunnya. Sedangkan didaerah Indonesia lainnya yang meliputi seluas 92,9% dari seluruh wilayah penduduknya hanya meningkat 1 juta termasuk angkatan kerja sebanyak 0,37 juta orang.

Tabel VII.47

PENYEBARAN PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA, 1970
(dalam ribuan)

Daerah	Penduduk	%	Angkatan kerja	%	Luas daerah (km)	%
Jawa, Madura dan Bali	81.126	65,3	29.140	65,3	137.735	7,1
Daerah Indonesia lainnya	43.111	34,7	15.485	34,7	1.769.558	92,9
	124.237	100	44.625	100	1.904.345	100

Sumber : Biro Pusat Statistik

7.7.3. Pendidikan tenaga kerja

Tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia adalah tergambar dalam hasil survey seperti pada **Tabel VII.48.**

Tabe1 VII. 48.

PERSENTASE ANGKATAN KERJA (10 TAHUN KEATAS)

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, INDONESIA, 1965

Dibawah Sekolah dasar	78,9
Sekolah dasar	16,4
Sekolah lanjutan pertama umum	2,2
Sekolah lanjutan pertama kejuruan	1,1
Sekolah lanjutan atas umum	0,5
Sekolah lanjutan atas k.ed.juruan	0,5
Akademi	0,1
Universitas	0,1
Tidak terjawab	0,2
	100,0 (35.698.000)

Sumber : Biro Pusat Statistik, SUSENAS 1965

Pada saat dimana Indonesia meningkatkan usahanya dibidang pernbangunan disegala lapangan, maka perlu diketahui tingkat pendidikan sebagian besar angkatan kerja masih belum tamat sekolah dasar.

7.7.4. Masalah pengangguran

Suatu corak khusus dari pada tenaga kerja Indonesia ialah adanya pengangguran dan setengah pengangguran. Pada **Tabel VII. 49.** dikemukakan tingkat pengangguran untuk tahun 1965 dan 1967.

Dinegara-negara yang berpenghasilan rendah seperti Indonesia jumlah pengangguran penuh tidak akan besar jumlahnya. Di Indonesia jumlah itu hanya disekitar 0,9% sampai 2,6% seperti yang dinyatakan dalam surveysurvey terse but diatas. Oleh karena dengan mendapat hasil sedikit orang sudah dapat hidup, maka orang jarang terdaftar sebagai pengangguran penuh seperti halnya dinegeri-negeri industri yang sudah maju. Tetapi sebaliknya jumlah setengah penganggur (disguised and visible unemployed) adalah besar karena pencari kerja lebih banyak daripada jumlah pekerd)aan yang tersedia. Dilihat dari sudut penggunaan waktu kerja, gambarannya adalah sebagai pada **Tabel VII.50**

Didaerah pedesaan (rural) sebanyak 25,7% bekerja kurang dari 30 djam seminggu. Didaerah kola (urban) prosentase itu adalah 15,2% sedangkan untuk seluruh Indonesia sebanyak 24,5% dari angkatan kerja bekerja kurang dari 30 djam seminggu. Banyaknya persentase setengah penganggur didaerah pedesaan (Jawa) terutama disebabkan karena perbandingan antara tanah garapan dan orang yang bekerja makin lama makin kecil

(decreasing land-man ratio) atau luas areal tanah yang dibagi oleh sejumlah tenaga makin kecil.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam perkembangan tenaga kerja selama ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel VII.49
PENDUDUK (10 TAHUN KEATAS) DAN TINGKAT PENGANGGURAN
INDONESIA (1965) DAN JAWA – MADURA (1967)

Umur (dalam tahun)	Tingkat pengangguran (%)	
	Jawa – Madura (1967)	Indonesia (1965)
10 - 14	1,1	13,8
15 - 19	1,9	4,0
20 – 24	1,4	2,9
25 - 29	0,9	1,5
30 - 34	0,4	0,4
35 - 39	0,4	0,8
40 - 44	0,8	0,9
45 - 49	0,5	1,2
50 - 54	0,9	1,2
55 - 59	0,1	0,7
60 dan lebih	1,5	1,8
Tidak terjawab	68,5	--
Rata - rata	0,9	2,6

Sumber : Biro Pusat Statistik

Jumlah rumah tangga sample :
 SUSENAS 1965 : 21.305
 SUSENAS 1967 : 8.10

- (1) Pertambahan penduduk dan angkatan kerja yang meningkat setiap tahunnya. Karena itu perkembangan perekonomian Indonesia harus dapat menciptakan tambahan lapangan kerja untuk menghindarkan bertambahnya pengangguran dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang tidak merata menyebabkan ketidakseimbangan antara daerah-daerah Jawa dan luar Jawa.
- (3) Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kejuruan tenaga kerja Indonesia masih rendah. Untuk melajani pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia memerlukan perbaikan tingkat pendidikan angkatan kerja.
- (4) Tingkat setengah pengangguran yang terdapat di daerah kota maupun di daerah pedesaan menunjukkan bahwa jumlah kesempatan kerja kurang seimbang jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja.

Tabel VII.50

**PERSENTASE PENDUDUK INDONESIA (10 TAHUN KEATAS)
 MENURUT JAM KERJA SEMINGGU, INDONESIA, 1967**

Jam kerja seminggu	Daerah pedesaan	Daerah kota	Indonesia
1 - 4	0,3	0,3	0,2
5 - 9	1,3	1,1	1,3
10 - 14	3,9	2,1	3,7
15 - 19	2,3	1,6	2,2
20 - 24	8,6	5,3	8,3
25 - 29	9,3	4,8	8,8
30 - 34	4,4	4,4	4,3
35 - 39	14,0	13,4	14,2
40 - 44	18,8	22,0	19,1
45 – dan lebih	36,7	44,3	37,4
Tidak terjawab	0,5	0,8	0,4
	100,0 (31.965.000)	100,0 (3.125.000)	100,0 (35.090.000)

Sumber : Biro Pusat Statistik, SUSENAS 1967

7.7.5. Peningkatan produksi dan penggunaan tenaga kerja

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa peningkatan investasi menyebabkan peningkatan produksi nasional disegala lapangan. Dilain pihak juga menyebabkan bertambahnya lapangan kerja baru yang tersedia bagi tenaga kerja. Dengan tercapainya stabilitas sosial dan politik sekarang ini tampaknya bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi akan terus meningkat dimasamasa yang akan datang.

Disektor pertanian meningkatnya daya-serap tenaga kerja terutama tampak pada proyek-proyek BIMAS. Penyelidikan menunjukkan bahwa setiap hektar sawah BIMAS membutuhkan 13 hari kerja lebih banyak dibandingkan dengan sawah non-BIMAS. Oleh karena dalam tahun 1970/1971 sebanyak 2.071.700 ha yang direncanakan di-BIMAS-kan, maka diperkirakan bahwa pem-BIMAS-an sawah akan menciptakan sebanyak 26,9 juta hari kerja tambahan.

Selainnya pem-BIMAS-an, juga proyek-proyek kehutanan yang meningkat produksinya dalam tahun-tahun 1967-1971 akibat meningkatnya penanaman modal dalam negeri dan asing, menyebabkan makin besarnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Disektor pedesaan (rural) proyek-proyek Rp. 100.000,-- untuk setiap desa, proyek Rp. 100,-, per kapita dan proyek Padat Karya, selainnya berhasil menimbulkan perbaikan pada prasarana dan pengairan, ternyata juga berhasil menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi tenaga kerja setengah penganggur. Proyek Padat Karya selama tiga tahun PELITA ini telah dapat menciptakan kesempatan kerja sebagai berikut :

Tahun 1969/1970 : meliputi 17 Kabupaten/Kodya dengan mencapai 7.499.933 man days.

Tahun 1970/1971 : meliputi 43 Kabupaten/Kodya dengan mencapai 7.704.995 man days.

Diharapkan untuk tahun 1971/1972 dapat meliputi 52 Kabupaten/Kodya dengan memberikan kesempatan kerja 15.000.000 man days.

Dalam sektor-sektor pertanian dan pedesaan investasi pemerintah memegang peranan penting untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan dipergunakannya tenaga kerja. Disektor-sektor bukan pertanian (non-agricultural) peningkatan produksi terutama disebabkan karena peningkatan investasi swasta. Peningkatan kegiatan itu tampak pada pertambangan minyak didaratan dan dilepas pantai, tembaga (Irian Barat), nikel (Sulawesi) dan pasir besi. Pada umumnya pertambangan dan penggalian itu memerlukan tenaga kerja yang terlatih (skilled).

Investasi swasta terutama tampak meningkat sekali dalam sektor industri, terutama

tekstil, makanan, kimia, mineral dan barang-barang logam yang kesemuanya itu memerlukan tenaga kerja terlatih. Pada umumnya investasi swasta masih banyak yang dalam taraf konstruksi, walaupun beberapa diantaranya sudah mulai berproduksi.

Sampai dengan bulan Juli 1971 perusahaan investasi swasta dibidang industri telah tercatat sebanyak 680 buah dan diperkirakan jika perusahaan-perusahaan investasi swasta baru itu telah bekerja, maka akan dapat dipekerjakan sebanyak kira-kira 200.000 orang. Perkiraan ini didasarkan atas perhitungan investasi modal dihubungkan dengan capital-labor-ratio sektor

Peningkatan investasi dibidang pertanian, pertambangan dan industri itu menyebabkan peningkatan kegiatan disektor jasa-jasa. Perdagangan, perbankan, angkutan, perhotelan, pariwisata dan rekreasi tampak meningkat kegiatannya dipusat maupun didaerah-daerah. peningkatan kegiatan yang terutama disebabkan karena meningkatnya investasi swasta itu pun menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan disektor jasa-jasa ini.

7.8. Transmigrasi dan koperasi

7.8.1. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan usaha untuk menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga setengah penganggur pedesaan sehingga mereka menjadi tenaga yang dapat dimanfaatkan didaerah penempatan (settlement) Pembentukan settlement sebagai landasan untuk produksi pertanian dan sumber pendapatan. Settlement tersebut diharapkan dapat membantu menimbulkan faktor-faktor penarik bagi transmigrasi spontan.

Pengetrapan kriteria ekonomis tersebut diatas dalam penilaian transmigrasi merupakan salah satu aspek perkembangan penting dalam bidang transmigrasi.

Didalam periode sejak tahun 1966 sampai 1971 usaha transmigrasi belum dapat berkembang secara lancar. Sampai dengan tahun 1968 kegiatan transmigrasi terutama dititik beratkan pada penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah intern terutama yang menyangkut penyempurnaan aparatur, administrasi dan pelaksanaannya. Semua ini merupakan persiapan-persiapan fisik

dalam tahap stabilisasi menghadapi PELITA I. Target selama masa ini terutama berupa penempatan sejumlah kepala keluarga (K.K.) didaerah penempatan tertentu. Sampai dengan tahun 1969, penempatan rata-rata kurang dari 1.300 K.K. setiap tahunnya. Dalam tahun-tahun PELITA I target tersebut diusahakan sampai rata-rata 5.000 K.K. per tahun.

Jumlah tersebut terutama meliputi jenis transmigrasi umum yang dibiayai

sepenuhnya oleh Pemerintah dan transmigrasi sektoral yang sebagian biaya ditanggung oleh instansi lain atau Pemerintah Daerah.

Perkembangan transmigrasi spontan baru diusahakan secara sistimatis berlandaskan program dan target pada tahun 1970/1971. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat penting, berdasarkan garis strategis untuk pada akhirnya membuat mekanisme transmigrasi bergerak sendiri dalam bentuk transmigrasi spontan, bersamaan dengan semakin kuatnya faktor-faktor penarik di daerah penempatan. Penentuan lokasi penempatan transmigran didasarkan atas keperluan untuk memperkuat objek-objek yang telah ada agar terdapat pengelompokan-pengelompokan yang lebih besar untuk timbulnya masyarakat desa transmigran sebagai unit-unit ekonomi yang lebih kuat. Sasaran dalam penyelenggaraan objek-objek transmigrasi ialah agar, dalam waktu kira-kira 5 tahun dapat diserahkan kepada administrasi Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 1971/1972 sekarang ini tercatat seluruhnya 108 objek transmigrasi di 18 propinsi daerah penempatan. Dalam hubungannya dengan target-target penyerahan pada administrasi Pemerintah Daerah maka hasil-hasil yang tercapai adalah sebagai berikut :

Jumlah objek	106 buah
Telah diserahkan	27 buah
Matang/siap diserahkan	27 buah
Ditinggalkan (tahun 1966) :	1 buah
	<u>55 buah</u>
Sisa	51 buah
Transmigrasi spontan	2 buah
Jumlah yang masih dibina	53 buah.

Dengan demikian ada 53 objek transmigrasi umum dan spontan yang perlu diperhatikan dan dikembangkan secara sosial ekonomis. Objek yang ditinggalkan tersebut diatas ialah objek Biang Peutik di Aceh sebagai akibat adanya pembrontakan G.30.S./P.K.1.

Sejak tahun 1970/1971 telah mulai diusahakan memperlancar transmigrasi spontan dengan penyediaan anggaran untuk menimbulkan arus initial.

Hasil transmigrasi spontan berdasarkan target tersebut ialah :

- Tahun 1969/1970	1.842 K.K
- Tahun 1970/1971	1.881 K.K.
- Target 1971/1972	1.450 K.K

Biaya transmigrasi umum rata-rata adalah Rp. 250.000,-- per K.K. sedangkan biaya yang dipergunakan untuk secara langsung menimbulkan arus initial transmigrasi spontan ialah Rp.15.000,- atau 6 persen dari biaya transmigrasi umum.

Untuk menjamin berhasilnya settlement transmigrasi dengan usahapertanian sebagai basis ekonomi, syarat pertama ialah terdapatnya areal-areal dengan potensi pertanian yang cukup baik. Untuk itu kegiatan survey dan feasibility studies diberikan perhatian yang sebesar-besarnya. Koordinasi didalam pelaksanaan diusahakan untuk dapat mengikut sertakan institut dan lembaga keilmuan yang ada hubungannya dengan bidang tugas transmigrasi.

Selanjutnya usaha-usaha pembinaan dan pengembangan objek-objek transmigrasi merupakan faktor yang menentukan untuk berhasilnya settlement transmigrasi sebagai unit ekonomi yang kuat yang menjamin peningkatan taraf hidup transmigrasi.

Usaha pembinaan dan pengembangan ditujukan pula untuk peningkatan swadaya masyarakat agar memperkuat peranannya sebagai faktor penarik terhadap arus transmigrasi spontan dalam rangka lajunya pembangunan ekonomi daerah. Disamping kegiatan-kegiatan penyuluhan, maka dalam tahun 1970/1971 telah diberikan modal investasi imttik peningkatan produksi pertanian serta processing hasil-hasil.

Sarana-sarana tersebut diatas telah dibagikan ke sembilan propinsi di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Kemudian telah diberikan bantuan pula dalam bentuk honorarium guru, tenaga kesehatan dan penyuluhan pertanian di objek-objek transmigrasi, perbaikan bangunan-bangunan umum seperti sekolah, masjid, balai kesehatan dan sebagainya.

Usaha pembinaan dan pengembangan tersebut diatas masih merupakan unsur baru yang mulai dikembangkan sejak PELITA 1. Dalam masa sebelumnya usaha-usaha demikian belum ada atau sangat insidentil dan tidak menentu sifatnya.

Setiap K.K. transmigran mendapatkan 1/4 hektar pekarangan beserta rumah dan 1 3/4 hektar tanah garapan. Pada umumnya usaha tani (farm) transmigran ditujukan pada produksi pangan yaitu padi dan palawija.

Keadaan pada tahun 1970 menunjukkan adanya ± 80 objek yang masih harus dibina dan dikembangkan yang meliputi ± 29.000 K.K. Hal ini berarti adanya areal pertanian seluas 50.000 Ha, sebagai areal potensi untuk pengembangan usaha pertanian. Pada umumnya para transmigran telah dapat melampaui taraf subsistensi dengan hasil rata-rata equivalent 1 ton padi/Ha. Jadi setiap tahun yang dapat dicapai ialah sebesar equivalent 50.000 ton padi atau ± 25.000 ton beras.

Kesadaran semakin meluas bahwa usaha rani yang terbatas pada produksi pangan

dalam batas-batas pasaran lokal kurang dapat menjamin peningkatan pendapatan dan taraf hidup yang cukup tinggi. Untuk lebih mendorong maju kehidupan ekonomi pedesaan transmigran, telah diusahakan kegiatan-kegiatan bersama yang ditujukan kearah penyempurnaan desa-desa transmigran. Kegiatan-kegiatan tersebut terutama dipusatkan didaerah Lampung sebagai salah satu daerah transmigran terbesar. Pada tahap pertama program rehabilitasi dan pengembangan telah dilakukan untuk daerah transmigrasi lama maupun ham.

Untuk pengembangan usaha rani dengan produksi cash-crops yang market oriented, usaha penanaman tanaman keras sangat diandjurkan didaerah-daerah transmigrasi seperti kelapa, cengkeh, buah-buahan dan sebagainya. Dengan demikian usaha ini dapat membantu peningkatan penghasilan devisa negara.

Untuk menghindarkan monokultur, maka salah satu usaha yang telah dimulai ialah usaha peternakan. Usaha ini masih terbatas dibeberapa daerah dengan settlement tanah daratan (non-pasang-surut) dengan pemeliharaan ternak besar terutama sapi.

Usaha transmigrasi dalam tahun-tahun terakhir PELITA I ialah untuk dapat mempersiapkan peningkatan kegiatan-kegiatan dalam PELITA II yang akan datang. Landasan fisik, Organisatoris dan administratif perlu pula lebih dimantapkan untuk peningkatan transmigrasi dalam PELITA II.

Untuk usaha perlu lebih dititik beratkan pada daerah-daerah konsentrasi tertentu sebagai prioritas pada taraf pertama. Daerah konsentrasi tersebut meliputi :

- a. Wilayah Lampung - Sumsel - Bengkulu
- b. Wilayah Sulsel - Sultara
- c. Wilayah Kalsel - Kalteng.

Penentuan wilayah-wilayah konsentrasi ini disesuaikan dengan rencana-rencana pembangunan daerah sebagai usaha integral antar departemen. Dalam hubungan ini sebagai pedoman ditentukan 16.000 K.K. untuk tahun 1972/1973.

7.8.2. K o p e r a s i

Kebijaksanaan Pemetintah antara tahun 1960 dan tahun 1966 menempatkan koperasi sebagai alat politik yang akibatnya menimbulkan adanya anggapan yang keliru dikalangan masyarakat dan gerakan koperasi sendiri. Dalam bidang ekonomi koperasi dianggap sekedar sebagai alat distribusi barang-barang Pemerintah belaka. Sejak tahun 1966, telah dilakukan usaha-usaha untuk mengadakan koreksi menjeluruh terhadap kebijaksanaan perkoperasian tersebut dan mengembalikan koperasi pada fungsi dan peranan yang sebenarnya, yaitu menjadi unit-unit sosial ekonomi.

Sebagai akibat dari adanya koreksi itu, maka secara kuantitatif jumlah koperasi menurun. Kalau pada akhir tahun 1967 terdapat 64.000 buah koperasi (diantaranya 45.000 buah yang berbadan hukum), maka dengan Undang-undang No. 12 tahun 1967 pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi tinggal 15.000 buah. Jumlah ini belum menunjukkan kekuatan dan kemampuan koperasi yang ada, akan tetapi sekedar menunjukkan banyaknya koperasi yang memenuhi ketentuan juridis dari Undang-undang No. 12 tahun 1967.

Untuk memberikan dasar bagi peningkatan mutu koperasi diklasifikasikan menjadi tiga kelas : kelas A (baik), kelas B (sedang), dan kelas C (kurang). Rasionalisasi yang dilakukan terhadap koperasi pada waktu itu disertai pula dengan rasionalisasi bagian Pemerintahan yang melakukan pembinaan terhadap koperasi supaya pembinaan tersebut dapat berjalan dengan efektif. (Lihat **Tabel VII.51.**).

Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ternyata mulai pulih kembali dengan adanya kebijaksanaan baru itu dan hal itu terbukti dari meningkatnya jumlah koperasi sejak tahun 1968 hingga kini.

Bila pada akhir masa penyesuaian (Desember 196) jumlah yang menyesuaikan adalah 15.000 buah, maka Pada pertengahan tahun 1971 jumlah itu sudah meningkat lagi menjadi 19.310 buah dimana 17.230 buah sudah terselesaikan hak badan hukumnya. Ini berarti bahwa dalam masa 2 tahun lebih jumlah koperasi sudah meningkat dengan 4.000 buah. Hasil kuantitatif dari usaha rehabilitasi dapat dilihat dari angka-angka pada **Tabel VII.52.**

Untuk membina koperasi-koperasi supaya berfungsi lebih efektif, maka Pemerintah melatih koperasi-koperasi untuk menggunakan peralatan yang lebih modern, seperti rice-mill dan alat-alat processing yang lain, truck dan perahu motor serta lainnya.

Tabel VII.51.
JUMLAH KOPERASI, 1971 X)

No.	Propinsi	Jumlah Koperasi	TELAH DIKLASIFIKASIKAN			Belum diklasifikasikan
			A	B	C	
1. D.I. Aceh		334	38	81	206	9
2. Sumatera Utara		705	150	218	237	-
3. Riau		118	7	49	6	56
4. Sumatera Barat		421	79	120	146	76
5. Jambi		118	1	57	-	60
6. Sumatera Selatan		235	2	20	9	204
7. Bengkulu		60	3	25	6	26
8. Lampung		149	8	27	104	10
9. D.K.I. Jaya		399	38	99	123	139
10. Jawa Barat		2.474	579	1.132	602	161
11. D.I. Jogjakarta		605	75	358	54	198
12. Jawa Tengah		4.284	574	1.582	1.644	484
13. Jawa Timur		3.630	788	1.272	1.343	227
14. Bali		470	48	206	210	6
15. N.T.B.		200	7	65	33	95
16. N.T.T.		59	2	20	6	31
17. Kalimantan Barat		214	5	100	19	90
18. Kalimantan Tengah		148	2	16	9	124
19. Kalimantan Timur		93	3	84	-	6
20. Kalimantan Selatan		327	62	199	49	17
21. Sulawesi Utara		434	64	233	137	
22. Sulawesi Tengah		155	17	119	19	
23. Sulawesi Tenggara		252	19	177	56	
24. Sulawesi Selatan		1.021	57	341	333	290
25. Maluku		148	18	71	44	15
26. Irian Barat		97	-	21	1	75
Jumlah		17.230	2.646	6.692	5.493	2.399

Sumber: Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

X) Angka klasifikasi berdasarkan Raker April 1971.

Tabel VII.52
[PERKEMBANGAN SIMPANAN DAN PENDIDIKAN KADER,
1967 – 1970

Tahun	Simpanan (Rp)	Perputaran (Rp)	Pendidikan kader (orang)
1967	207.231.090	--	--
1968	439.254.956	--	--
1969	1.231.744.791	31.705.737.219	42.000
1970	1.753.043.665	39.120.373.500	18.560

Sumber : Departemen Transmigrasi dan Koperasi

Dibidang produksi dan tata-niaga peranan koperasi sudah mulai dipulihkan kembali meskipun dalam ukuran yang terbatas. Sebaliknya dalam bidang perikanan, kopra dan penyediaan bahan baku pembatikan, koperasi-koperasi yang bersangkutan telah berhasil mempunyai peranan yang tidak kecil.

Kegiatan perkreditan ternyata merupakan kegiatan yang masih diperlukan oleh para anggota koperasi dan masyarakat. Berkat terkendalinya inflasi Pada waktu ini koperasi simpan pinjam ternyata dapat berkembang dengan baik didesa dan dikota untuk melajani usaha-usaha pertanian, kerajinan, perdagangan kecil dipasar-pasar, kebutuhan konsumtif diantara buruh kecil, guru-guru, pegawai negeri, ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya.

Suatu langkah yang sangat penting dalam bidang permodalan koperasi ini, ialah didirikannya lembaga jaminan kredit koperasi dengan dana permulaan sebesar Rp. 100.000.000 untuk memberikan jaminan terhadap koperasi, khususnya koperasi pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan.

Meskipun peranan koperasi pada umumnya dalam peningkatan produksi pada waktu ini masih terbatas, kecuali di beberapa bidang seperti perikanan, kopra, tekstil bahan batik, akan tetapi jelas bahwa perkembangan koperasi pada waktu ini telah memberikan harapan akan peningkatan fungsinya dikemudian hari.

Kalau hambatan-hambatan utama seperti management dan permodalan dapat diatasi maka peranan koperasi yang berarti dalam bidang produksi sudah jelas dapat dipastikan dalam waktu mendatang ini. Dengan demikian koperasi-koperasi akan dapat memenuhi kebutuhan ekonomis dari para anggotanya (dan juga masyarakat sekelilingnya) dalam bidang-bidang produksi, kredit, marketing dan lain sebagainya. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan yang lebih intensip terhadap koperasi yang disertai oleh penyempurnaan struktur organisasi dengan memperkokoh koperasi-koperasi primer sebagai landasan dan mengintegrasikan secara horisontal dan vertikal sangat diperlukan.

Pendidikan dan latihan dalam bidang management dan usaha harus ditingkatkan untuk memungkinkan koperasi-koperasi dapat memiliki management yang sehat dan efisien serta ketrampilan usaha. Dalam pembinaan koperasi, pendidikan untuk menciptakan kader-kader adalah sangat penting.

Dalam tahun mendatang peranan koperasi akan makin dikembangkan sebagai unit ekonomi. Untuk itu dalam program pembangunan yang akan datang Pemerintah akan menempatkan koperasi tidak hanya dibidang sosial seperti yang terjadi sampai sekarang, tetapi juga dibidang ekonomi, dimana berbagai pilot proyek akan diadakan untuk

memungkinkan koperasi-koperasi dapat mengikuti serta menghayati teknologi modern dan akhirnya mengambil alih cara-cara yang digunakan dalam pilot-pilot proyek yang bersangkutan.

7.9. Penanaman modal

7.9.1. Penanaman modal dalam negeri

Sampai September 1971 telah ada 981 proyek penanaman modal dalam negeri mengajukan investasi yang meliputi Rp. 481 miliar. Selama semester 1 1971/1972 permohonan yang masuk berjumlah 171 proyek dengan modal Rp. 132 miliar dapat dilihat pada **Tabel VII.54**. Permohonan pada semester yang sama tahun 1970/1971 adalah 212 proyek dengan modal = Rp. 78,8 miliar. Dari 981 proyek yang diadjudkan telah direkomendasikan oleh panitia PMDN sebanyak 743 proyek dengan nilai Rp. 319 miliar. Pemberian fasilitas tax holiday perpajakan berjumlah 148 proyek dengan modal Rp. 36,6 miliar pada semester 1-1971/1972, sehingga keseluruhan sejak tahun 1968 berjumlah 543 proyek dengan modal Rp. 139 miliar. Fasilitas bea masuk atas barang-barang modal yang diperlukan meliputi 97 proyek dengan nilai US \$ 39,6 juta selama semester 1-1971/1972, sehingga sejak di-undangkannya penanaman modal dalam negeri sudah berjumlah 494 proyek dengan nilai US \$ 203 juta.

7.9.2. Penanaman modal asing

Perkembangan yang dicapai sampai bulan September 1971 telah disetujui oleh Pemerintah 418 proyek, terdiri dari 116 penanaman langsung dan 302 joint enterprise. Modal yang akan ditanam meliputi US \$ 1,4 miliar. Dari jumlah tersebut telah direalisasi US \$ 179 juta atau kira-kira 13%. Realisasi tersebut keseluruhannya berupa pemasukan barang-barang modal. Selama semester 1-1971/1972 Pemerintah telah menyetujui 57 proyek meliputi US \$ 65,5 juta. Sebagian terbesar bergerak dibidang perindustrian (32 proyek). Dibandingkan dengan proyek-proyek yang disetujui Pemerintah pada semester 1-1970/1972 ternyata jumlah tersebut lebih kecil. Dalam semester 1-1970/1971 disetujui Pemerintah 72 proyek dengan modal US \$ 96,4 juta. Namun demikian angka realisasi pada semester 1-1971/1972 menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar dari pada semester yang sama tahun anggaran sebelumnya (US \$ 56 juta terhadap US \$ 36 juta). Angka realisasi semakin bertambah besar lagi, karena proyek-proyek yang pada masa lampau masih dalam survey atau persiapan, kini sudah banyak yang mencapai tarap "trial operation" atau "commercial production".

**PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI
PEMERINTAH, 1967 - 1971**

Periode	Langsung		J o i n t		Jumlah		Realisasi
	Jumlah proyek	Modal (US\$)	Jumlah proyek	Modal (US\$)	Jumlah proyek	Modal (US\$)	Modal (US\$)
1967	15	106.014	8	23.821	23	129.855	133
1968	15	152.296	52	66.697	67	218.995	8.572
1969/1970	29	599.701	93	150.321	122	750.022	8.623
1970/1971	52	73.439	97	168.890	149	242.329	75.974
1971/1972 Triw. I	2	4.500	29	39.060	31	43.560	55.999
Triw. II *)	3	P.M.	23	21.975	26	21.975	
Jumlah	116	935.950	302	470.764	418	1.406.714	179.081

Sumber : Departemen Keuangan R.I.
September 1971.

Penanaman modal asing menurut bidang usaha ternyata bahwa para investor sampai sekarang masih banyak mempunyai minat untuk menanam modalnya disektor industri, terutama dalam tahun 1970/1971 dan 1971/1972. Secara akumulatif dari tahun 1967 sampai 1971/1972 masih lebih besar jumlah modal yang ditanam disektor pertambangan dan sektor kehutanan. Melihat realisasinya ternyata modal yang direalisasi disektor industri adalah yang paling besar; kemudian menyusul sektor kehutanan dan pertambangan.

Bila dilihat jumlah modal yang ditanam sejak tahun 1970 sampai semester 1-1971/1972 maka jumlah yang terbesar berasal dari Amerika (US \$ 463 juta), Philipina (US \$ 263 juta) dan kemudian Jepang (US \$ 199 juta).

Tabel VII. 54.

**PERMOHONAN PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.
1968 - 1971/1972
(dalam jutaan rupiah)**

Bidang Usaha	1968-1969/1970		1970 / 1971		1971/1972				Jumlah	
					Triwulan I		Triwulan II		Jumlah	
	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah
1. Pertanian/Perkebunan	18.080	53	24.124	5	1.201	13	5.680	18	6.881	134
2. Kehutanan	13.946	59	47.459	14	9.888	13	8.692	27	18.580	111
3. Perikanan	1.280	3	573	2	345	-	-	2	345	10
4. Peternakan	161	-	-	1	873	-	-	1	873	4
5. Pertambangan	1.518	3	7.341	-	-	1	10.289	1	10.289	6
6. Perindustrian	80.008	225	75.736	56	22.906	45	12.252	101	35.158	576
7. Perhubungan/Pariwisata	28.476	60	46.125	9	7.228	6	2.524	15	9.752	124
8. Perumahan Rakyat	275	1	1.000	-	-	1	49.235	1	49.235	4
9. Prasarana	264	2	451	4	1.003	-	-	4	1.003	10
10. Usaha lain-lain	-	-	-	-	-	1	240	1	240	1
Jumlah	146.06	3.436	202.809	91	43.444	80	88.912	171	132.356	981

Sumber : Departemen Keuangan R.I.

Tabel VII.55.
REKOMENDASI SF. P.M.D.N. UNTUK PROYEK-ProyekPENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI 1968 - 1971/1972

(dalam jutaan rupiah)												
Bidang Usaha	1968 - 1969/1970		1970/1971		1971/1972						Jumlah seluruhnya	
					Triwulan I		Triwulan II		Jumlah			
	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah
1. Pertanian/Perkebunan	6.736	42	16.120	10	2.442	6	2.387	16	4.809	97	27664	
2. Kehutanan	8.041	36	17.320	12	7.771	6	7.793	18	15.564	69	10.925	
3. Perikanan	1.279	2	70	2	262	-	57	2	319	8	1.668	
4. Peternakan	61	1	100	1	170	1	800	2	970	5	1.131	
5. Pertambangan	1.093	2	6.630	-	-	1	10.849	1	10.849	4	18.572	
6. Perindustrian	42.550	222	58.585	63	58.337	53	18.084	116	76.421	421	177.556	
7. Perhub. Pariwisata	12.719	37	17.803	10	8.767	7	8.548	17	17.315	80	47.837	
8. Perumahan rakyat	30	1	1.506	2	552	-	-	2	552	4	2.088	
9. Prasarana	178	4	1.621	-	-	-	-	-	-	5	1.799	
10. Usaha lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	72.686	347	119.755	100	78.281	74	49.018	174	127.299	743	319.740	

Sumber : Departemen Keuangan.

Tabel VII. 56.
REALISASI FASILITAS TAX HOLIDAY UNTUK PROYEK-PROYEK
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, 1968 -1971/1972
(dalam jutaan rupiah)

Bidang Usaha	1970/1971		1971/1972						Jumlah seluruhnya.	
			Triwulan I		Triwulan II		Jumlah			
	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal
1. Pertanian/Perkebunan	23	14.163	-	-	1	65	1	65	66	18.049
2. Kehutanan	18	5.891	5	1.592	10	3.592	15	5.544	44	11.958
3. Perikanan	-	-	-	-	1	118	1	118	4	975
4. Peternakan	1	100	-	-	1	170	1	170	3	320
5. Pertambangan	2	1.394	-	-	-	-	-	-	2	1.394
6. Perindustrian	150	33.733	24	5.799	93	18.178	117	23.977	385	78.645
7. Perhub./Pariwisata	21	10.079	2	199	11	7.022	13	7.221	54	24.423
8. Perumahan rakyat										
9. Prasarana										
10. Usaha lain-lain										
Jumlah :	214	65.360	31	7.590	117	29.000	148	36.590	543	139.205

Sumber: Departemen Keuangan.

Tabel VII.58.
PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI
PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA, 1967 - 1971/1972
(dalam ribuan US \$)

Bidang Usaha	1967		1968		1969/1970		1970/1971		1971/1972		Jumlah	Realisasi
	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	(Triwulan I + II)		Jumlah	Modal	Modal
	Jumlah											Modal
1. Perindustrian	35.235	26	26.129	64	101.408	52	123.973	32	24.730	187	321.475	68.151
2. Perikanan	4.500	3	4.000	-	-	3	5.356	-	-	9	13.856	6.534
3. Pertambangan	76.500	2	82.000	5	304.707	4	6.255	5	3.000	17	472.462	27.517
4. Kehutanan	5.500	10	69.585	25	287.750	13	25.500	7	12.000	59	400.335	54.779
5. Perhub.Pariwisata	6.100	5	6.267	9	14.340	4	11.080	4	10.880	23	48.662	15.662
6. Pharnasi	-	6	6.081	7	11.250	16	17.403	2	1.125	31	35.859	1.956
7. Pertanian/Perkebunan/Peternakan	-	6	11.190	6	23.090	4	5.975	1	500	17	40.755	3.033
8. Perdagangan	-	5	7.046	3	3.700	-	5.700	-	-	13	16.446	1.209
9. Jasa & lain-lain	2.000	4	6.700	3	3.777	14	13.392	6	3.300	28	29.169	250
10. Perusahaan dikembalikan	-	-	-	-	-	34	27.695	-	-	34	27.695	-
Jumlah	129.835	67	218.993	122	750.022	149	242.329	57	65.535	418	1.406.714	179.081

Sumber : Departemen Keuangan R. I .

Tabel VII.59.
PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG DISETUJUI PEMERINTAH
MENURUT NEGARA ASAL, 1967 - 1971/1972
(dalam ribuan US \$)

NEGARA	1967		1968		1969/1970		1970/1971		1971/1972 (Triwulan I + II)		Jumlah		Realisasi
	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	Jumlah	Modal	
1. Amerika	5	98.700	11	16.920	21	284.514	21	53.958	9	8.980	67	463.072	
2. Australia	2	1.500	1	100	4	1.310	4	7.250	6	3.350	17	13.560	
3. Belanda	3	8.721	9	14.293	2	798	10	13.874	-	-	24	37.686	
4. Belgia	1	230	2	5.360	1	500	9	3.625	-	-	13	9.715	
5. Denmark	1	1.000	1	1.500	2	2.500	-	-	-	-	4	5.000	
6. Jerman Barat	1	250	4	5.325	9	5.855	5	10.175	3	1.800	22	23.385	
7. Jepang	2	3.000	9	15.391	21	118.380	29	49.899	12	13.300	73	199.970	
8. Hongkong	1	250	8	12.425	18	24.000	19	19.187	9	20.550	55	76.412	
9. Inggris	1	134	3	370	2	6.000	20	20.412	1	300	27	27.216	
10. India	-	-	-	-	-	-	1	649	-	-	1	649	
11. Italia	-	-	-	-	-	-	1	1.000	1	1.000	2	2.000	
12. Kanada	-	-	3	75.817	-	-	-	-	-	-	3	75.817	
13. Korea Selatan	-	-	1	48.500	-	-	3	4.900	-	-	4	53.400	
14. Malaysia	-	-	1	980	11	19.340	7	10.300	9	10.050	28	40.670	
15. Norwegia	-	-	3	4.230	-	-	-	-	-	-	3	4.230	
16. Panama	1	9.000	-	-	2	2.500	1	1.500	-	-	4	13.060	
17. Perancis	3	2.500	3	5.500	1	5.790	1	2.100	-	-	8	15.890	
18. Filipina	2	4.500	1	5.500	8	249.000	1	2.500	3	2.750	15	263.750	
19. Singapura	-	-	5	6.300	10	18.683	10	28.100	3	2.705	28	55.788	
20. Swedia	-	-	-	-	1	1.200	-	-	-	-	1	1.200	
21. Swis	-	-	2	982	4	3.822	6	12.650	-	-	12	17.454	
22. Thailand	-	-	-	-	5	5.850	1	250	1	750	7	6.850	
JUMLAH	23	129.835	67	218.993	122	750.022	149	242.329	57	65.535	418	1.406.714	179.081

Sumber: Departemen Keuangan.

1) Sampai September 1971.

Tabel VII.60.
PENANAMAN MODAL ASING
(dalam ribuan US \$)

	Semester I – 1970/1971			Semester I – 1971/1972		
	Jumlah Proyek	Modal	Realisasi	Jumlah Proyek	Modal	Realisasi
1. Perindustrian	26	27.945	12.488	32	24.730	21.234
2. Perikanan	3	5.356	2.475	-	-	1.872
3. Pertambangan	3	5.755	4.559	5	3.000	14.896
4. Kehutanan	10	18.000	13.115	7	12.000	12.481
5. Perhub/Pariwisata	1	1.800	1.850	4	10.880	4.475
6. Farmasi	8	7.403	424	2	1.125	327
7. Pertanian/Perkebunan/Peternakan	3	5.200	782	1	500	476
8. Perdagangan	5	5.700	114	-	-	124
9. Jasa & lain-lain	13	13.242	18	6	3.300	124
10. Perusahaan dikembalikan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	72	96.401	35.828	57	65.535	55.999

Sumber : Departemen Keuangan R.I.

PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1972/1973
(dalam jutaan rupiah)

JENIS PENERIMAAN	JUMLAH
A. PENERIMAAN DALAM NEGERI	573.600
I. Pajak langsung	297.300
1. Pajak pendapatan	21.400
1.1. Bur u h	13.300
1.1.1. Dalam rupiah	10.000
1.1.2. Valuta aging	3.300
1.2. Usahawan	8.100
2. Pajak perseroan	29.500
2.1. Perusahaan negara	21.500
2.2. Perusahaan swasta	8.000
3. Pajak perseroan minyak	206.400
4. M P O	26.000
5. IPEDA	12.000
6. Lain - lain	2.000
II. Pajak tidak langsung	267.500
1. Pajak penjualan (dalam negeri)	26.500
2. Pajak pendjua lan impor	29.600
3. Cukai	45.800
3.1. Cukai tembakau	39.600
3.2. Cukai lainnya	6.200
4. Bea mas uk	93.900
5. Pajak ekspor	30.900
6. Penerimaan minyak lainnya	34.800
7. Lain -lain	6.000
III. Penerimaan non - tax	8.800
B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN	178.000
1. Bantuan program	95.000
2. Bantuan proyek	83.000
J UMLAH	751.600

DASAR PERHITUNGAN UNTUK PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
RAPBN - 1972/1973
(dalam jutaan rupiah)

A. PENERIMAAN DALAM NEGERI	573.600
I. Pajak langsung	297.300
1. Pajak pendapatan	21.400
1.1. Pajak pendapatan buruh	13.300
Terdiri dari dua bagian :	
1.1.1. Dalam rupiah	10.000
1.1.2. Dalam valuta asing	3.300
1.2. Pajak pendapatan usahawan	8.100
ad. 1.1.1. Buruh rupiah	

Faktor-faktor yang diperhitungkan :

(1) Yang akan mempengaruhi penerimaan :

- penurunan tarif pajak pendapatan.

(2) Yang akan menambah potensi penerimaan :

(a) peningkatan kegiatan ekonomi, sehingga :

- ada peningkatan dalam tingkat upah dan gaji;
- timbulnya perusahaan baru atau perluasan-perluasan perusahaan yang ada, sehingga memperluas kesempatan lapangan kerja.

(b) Peningkatan efektifitas dari aparat pajak agar pengenaan pajak pendapatan buruh meliputi :

- semua majikan (subjek) yang menurut Undang-undang Pajak Pendapatan merupakan wajib pajak;
- upah/gaji (objek) yang sebenarnya, dengan cara meningkatkan kegiatan verifikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperkirakan penerimaan yang berasal dari pajak pendapatan buruh dapat mencapai Rp. 10.000,- juta.

ad. 1.1.2. Buruh-valuta asing.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan tersebut pada ad. 1.1.1. diatas, berlaku pula untuk penerimaan pajak pendapatan buruh dalam valuta asing. Meningkatnya proyek-proyek penanaman modal asing, termasuk dibidang perminyakan, akan mengakibatkan penambahan jumlah majikan dan buruh-buruh asing. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperkirakan pemasukan penerimaan pajak pendapatan buruh dalam valuta asing dapat mencapai jumlah Rp. 2.300 juta.

ad. 1.2. Usahawan

Faktor-faktor yang diperhitungkan :

(1) Yang akan mempengaruhi penerimaan :

- penurunan tarif pajak pendapatan

(2) Yang akan menambah potensi penerimaan :

(a) Peningkatan effektivitas dari aparat pajak dalam bidang :

- ekstensifikasi, sehingga pengenaan pajak pendapatan meliputi semua orang (subjek) yang menurut Undang-undang Pajak Pendapatan merupakan wajib pajak, termasuk pula pemantapan hasil-hasil pelaksanaan dari LP2P;
- intensifikasi, sehingga pengenaan pajak pendapatan meliputi pendapatan (objek) yang sebenarnya, dengan cara meningkatkan effektivitas dan intensitas verifikasi;
- pencairan tunggakan-tunggakan mengenai tahun 1970 dan sebelumnya;
- peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menambah tingkat kesadaran membayar pajak.

(b) Pemberitahuan yang lebih baik oleh para wajib pajak mengenai besarnya pendapatan mereka yang sebenarnya dan pembayaran yang tepat pada waktunya mengenai tahun 1971 dan sebelumnya maupun mengenai tahun 1972.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, diperkirakan pemasukan penerimaan pajak pendapatan usahawan akan mencapai jumlah Rp. 8.100 juta.

2. Pajak perseroan 29.500

2.1. Pajak perseroan Perusahaan Negara 21.500

Dalam penerimaan ini termasuk pula pajak perseroan dari perusahaan daerah, koperasi dan perusahaan-perusahaan asing/perwakilan asing yang ada di Indonesia.

Faktor-faktor yang diperhitungkan :

- (1) Peningkatan kegiatan usaha, terutama pada PN-PN dibidang agraria (perkebunan) dan dibidang perbankan, yang meningkatkan potensi pajak.
- (2) Peningkatan pelaksanaan pengenaan pajak pada perusahaan-perusahaan/perwakilan-perwakilan asing dibidang: pelayanan, penerbangan dan perdagangan.
- (3) pencairan tunggakan-tunggakan mengenai tahun 1970 dan sebelumnya.
- (4) Mempercepat verifikasi atas wajib pajak yang telah memasukkan neraca dan perhitungan rugi-laba atas tahun 1971 dan sebelumnya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, diperkirakan penerimaan akan mencapai jumlah Rp. 21.500,- juta.

2.2. Pajak perseroan badan-badan swasta 8.000

Faktor-faktor yang diperhitungkan :

(1) Yang akan mempengaruhi penerimaan :

- (a) Pemanfaatan dari fasilitas penanaman kembali laba yang diperoleh berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Oalam Negeri, sehingga bebas dari pajak perseroan.
- (b) Adanya usaha-usaha untuk meloloskan diri dari badanbadan swasta dengan cara membubarkan diri, berpindah-pindah tempat atau menggunakanalamat palsu dan sebagainya.

(2) Yang akan menambah potensi penerimaan :

(a) peningkatan effektivitas dari aparat pajak dalam bidang :

- ekstensifikasi, sehingga pengenaan pajak perseroan meliputi semua badan (subjek) yang menurut Undang-undang Pajak Perseroan merupakan wajib pajak;
- intensifikasi, sehingga pengenaan pajak perseroan meliputi laba (objek) yang sebenarnya, dengan cara meningkatkan effektivitas dan intensitas pemeriksaan pembukuan;

- pencairan tunggakan-tunggakan mengenai tahun 1970 dan sebelumnya;
- peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menambah tingkat kesadaran membayar pajak.

(b) Pemberitahuan yang lebih baik oleh para wajib pajak mengenai besarnya laba yang diperoleh sebenarnya, baik mengenai tahun 1971 maupun mengenai tahun 1972.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, diperkirakan pemasukan penerimaan pajak perseroan swasta akan mencapai Rp 8.000 juta.

3. Pajak perseroan minyak 206.400

Perhitungan didasarkan pada hal-hal berikut :

- (1) Penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan minyak diperkirakan berjumlah US \$ 497,4 juta.
- (2) Dari jumlah tersebut sebesar US \$ 395,0 juta berupa penerimaan valuta asing dan sebesar US \$ 102,4 juta berupa penerimaan equivalent rupiah dari valuta asing.
- (3) Kurs: Rp. 415,0 per US \$.

Penerimaan : 497,4 juta x Rp. 415,0 = Rp. 206.421,0 juta.

Dibulatkan : Rp. 206.400 juta.

4. MPO 26.000

M.P.O. ini terdiri dari M.P.O.-Pajak Pendapatan dan M.P.O. Pajak Perseroan yang pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga (wajib pungut) yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Pajak.

Dalam tahun 1971 jumlah wajib pungut telah diperluas dengan para bendaharawan dari setiap departemen dan lembaga negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah :

- (1) peningkatan perdagangan ekspor dan impor dalam tahun 1972/ 1973 akan meningkatkan pungutan MPO oleh bank-bank devisa serta pungutan oleh .eksportir dan importir sebagai wajib pungut. Juga peningkatan dari sektor industri dan sektor lain-lain yang ditunjuk sebagai wajib pungut.
- (2) Peningkatan pengeluaran oleh Pemerintah melalui bendaharawan bendaharawan dan Kas Negara.

(3) Perkembangan ekonomi, produksi dan perdagangan dalam tahun 1972/1973.

(4) Peningkatan effektivitas dari aparat pajak dalam bidang :

- ekstensifikasi, sehingga semua badan yang potensiil dapat ditunjuk menjadi wajib pungut MPO
- pengawasan dan verifikasi yang lebih ketat terhadap para wajib pajak yang telah ditunjuk menjadi wajib pungut MPO.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, diperkirakan pemasukan penerimaan MPO akan mencapai Rp. 26.000 juta.

5. I P E D A

12.000

Peningkatan pemasukan IPEDA diusahakan dicapai dengan jalan :

- (1) Intensifikasi pengenaan/pemungutan disektor perdesaan dan perkotaan, terutama di daerah lama, antara lain dengan cara penyesuaian harga padi yang dijadikan dasar pengenaan.
- (2) Ekstensifikasi pengenaan didaerah-daerah baru dengan cara antara lain meningkatkan pendaftaran subjek dan objek IPEDA semaksimal mungkin.
- (3) Pengenaan IPEDA disektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan juga ditingkatkan terus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diperkirakan dapat dihasilkan penerimaan IPEDA sebesar Rp. 12.000 juta.

6. LAIN-LAIN

2.000

Yang termasuk dalam penerimaan ini ialah : pajak kekayaan dan pajak atas bunga, dividen dan royalti.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan faktor-faktor yang sama dengan apa yang berlaku untuk pajak pendapatan usahawan, diperkirakan penerimaan pajak kekayaan akan mencapai jumlah Rp 250 juta.

Dengan dicabutnya pengecualian pajak atas bunga, dividen dan royalti atas deposito berjangka dan sertifikat Bank Indonesia, serta dengan pengawasan serta verifikasi yang ketat terhadap pembagian dividen dan pembayaran bunga serta royalti, diperkirakan penerimaan pajak atas bunga, dividen dan royalti akan mencapai jumlah Rp 1.750 juta.

II. Pajak tidak langsung	267.500
1. Pajak penjualan	26.500

Hal-hal yang mempengaruhi penerimaan adalah :

- (1) Penurunan tarif pajak penjualan dalam tahun 1971 secara integral akan mengurangi penerimaan. Namun diharapkan bahwa penurunan tarif tersebut akan diimbangi oleh perluasan produksi dan penjualannya, sehingga achimja akan meningkatkan penerimaan.
- (2) Peningkatan effektivitas dari aparat pajak dalam bidang :
 - a. ekstensifikasi, sehingga pengenaan pajak penjualan meliputi semua orang/badan (subjek) yang menurut Undang-undang Pajak penjualan merupakan wajib pajak.
 - b. intensifikasi, sehingga pajak penjualan dikenakan atas penyerahan barang/jasa yang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak.
- (3) Pemberitahuan yang lebih baik oleh para wajib pajak mengenai besarnya pajak yang terhutang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperkirakan penerimaan pajak penjualan dapat mencapai jumlah sebesar Rp. 26.500 juta.

2. Pajak penjualan impor	29.600
---------------------------------	--------

Perkiraan pajak penjualan impor erat hubungannya dengan perkiraan penerimaan bea masuk. Berdasarkan pengalaman ada "ratio" tertentu antara penerimaan pajak penjualan impor dengan penerimaan bea masuk.

Untuk tahun anggaran 1972/1973 "ratio" tersebut diperkirakan besarnya 31,5%. Berarti jika penerimaan bea masuk diperkirakan besarnya Rp. 93.900 juta, maka penerimaan pajak penjualan impor besarnya diperkirakan dapat mencapai Rp. 29.578 juta. Dibulatkan : Rp. 29.600 juta.

3. Cukai	45.800
3.1. Cukai tembakau	39.600

Hal-hal yang dapat meningkatkan penerimaan :

- (1) Bahan-bahan produksi untuk hasil-hasil tembakau diusahakan agar tetap mencukupi dan lancar.
- (2) Diusahakan agar antara harga pita cukai, harga jual dan kualitas produk terdapat keserasian yang lebih wajar.
- (3) Kemajuan yang dicapai dibidang ekonomi pada umumnya dapat meningkatkan konsumsi masyarakat atas hasil-hasil tembakau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diperkirakan penerimaan cukai tembakau sebesar Rp. 39.600 juta.

3.2. Cukai lainnya	6.200
---------------------------	-------

Cukai lainnya terdiri dari cukai gula, cukai bit da cukai alkohol sulingan.

Hal-hal yang dapat meningkatkan penerimaan :

- (1) Usaha-usaha yang dapat menjamin peningkatan produksi akan terus dilaksanakan dan disempumakan.
- (2) Kemajuan dibidang ekonomi akan lebih meningkatkan lagi konsumsi masyarakat atas produk-produk dimaksud.
- (3) Penserasian yang lebih wajar antara cukai dan harga.

Berdasarkan hal-hal tersebut penerimaan cukai lainnya diperkirakan dapat mencapai Rp.6.200 juta.

4. **Bea masuk** 93.900

Perkiraan penerimaan bea masuk didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- (1) Impor yang dapat dikenakan bea masuk diperkirakan berjumlah US \$ 961,0 juta.
- (2) Tarif rata-rata bea masuk diperkirakan sebesar 23,55%.
- (3) Nilai dasar perhitungan bea masuk adalah Rp. 415,0 per US \$.

Berdasarkan hal-hal tersebut penerimaan bea masuk diperkirakan dapat mencapai :
 $961,0 \text{ juta} \times 23,55\% \times \text{Rp. } 415,0 = \text{Rp. } 93.918 \text{ juta. Dibulatkan : Rp. } 93.900 \text{ juta.}$

5. **Pajak ekspor** 30.900

Dasar perhitungan adalah :

- (1) Jumlah ekspor diluar minyak diperkirakan dapat mencapai US \$ 875,0 juta.
- (2) Dari jumlah tersebut sebesar 15,0% adalah ekspor barang jadi dan setengah jadi.
- (3) Pajak ekspor adalah 10,0%.
- (4) Kurs devisa adalah Rp. 415,0 per US \$.

Penerimaan pajak ekspor diperkirakan sebesar :

$85\% \times 875,0 \text{ juta} \times 10\% \times \text{Rp. } 415,0 = \text{Rp. } 30.864 \text{ juta. Dibulatkan : Rp. } 30.900 \text{ juta.}$

6. **Penerimaan minyak lainnya** 34.800

Perkiraan penerimaan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Semakin meningkatnya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan lagi pemakaian masyarakat akan bahan bakar minyak.
- (2) Biaya produksi dan biaya penyaluran minyak akan tetap diusahakan pada tingkat yang wajar.
- (3) Kewajaran seperti yang disebutkan dalam ad. (2). tidak dapat dilepaskan daripada kenyataan bahwabahan bakar minyak. merupakan komoditi internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diperkirakan penerimaan dapat mencapai Rp. 34.800 juta.

7. **Lain-lain** 6.000

Penerimaan lain-lain ini meliputi penerimaan bea meterai dan bea lelang.

Perkiraan pemasukan penerimaan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kegiatan ekonomi sehingga volume transaksi yang dapat dikenakan bea meterai akan meningkat.
- (2) Penertiban penjualan kekayaan milik Negara melalui Kantor Lelang Negara.
- (3) peningkatan interusifikasi pemungutan dan pengawasannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan akan dapat dicapai penerimaan bea meterai sebesar Rp. 5.750 juta dan bea lelang sebesar Rp. 250 juta.

III. Penerimaan non-tax 8.800

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan :

- (1) Peningkatan penertiban aparatur negara secara keseluruhan, termasuk departemen-departemen, tentu akan meningkatkan pula pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan ekonomi yang semakin berkembang akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi aktivitas dunia usaha perusahaan-perusahaan negara.

Hal-hal tersebut memungkinkan perkiraan penerimaan non-tax sebesar Rp. 8.800 juta.

B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN 178.000

1. Bantuan program 95.000

Perkiraan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan program didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Jumlah bantuan program dalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan sebesar US \$ 320,0 juta.
- (2) Dari jumlah tersebut sebesar US \$ 185,0 juta merupakan bantuan dalam bentuk devisa kredit, barang-barang modal dan pupuk.
- (3) Sejumlah US \$ 25,0 juta berupa kapas.
- (4) Sisanya sebesar US \$ 110,0 juta merupakan bantuan beras dan -tepung terigu
- (5) Kurs adalah Rp.4115,0 per Us \$.

Berdasarkan hal-hal tersebut diperkirakan dapat diterima jumlah-jumlah sebagai berikut :

- nilai-lawan dari bantuan berupa devisa kredit, barang-barang modal dan pupuk :	76.775
subsidi	<u>11.200</u>
	65.575
 dibulatkan	 65.600
 - nilai-lawan dari bantuan kapas	 10.375
subsidi	<u>4.700</u>
	5.675

dibulatkan :	5.700	
- nilai-lawan dari bantuan beras dan tepung terigu subsidi	45.650 <u>21.975</u> 23.675	
dibulatkan :	23.700	
- jumlah seluruh nilai-lawan	95.000	
2. Bantuan proyek		83.000
Perkiraan bantuan proyek didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :		
(1) Komitmen bantuan proyek dalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan dapat mencapai jumlah sebesar US \$ 350,0 juta.		
(2) Realisasi atau "disbursement" dalam tahun anggaran 1972/1973 diperkirakan sebesar US \$ 200,0 juta.		
(3) Kurs penilaian adalah Rp.415,0 per US \$.		
Dengan demikian nilai dalam rupiah daripada bantuan proyek adalah : 200,0 juta x Rp.415,0 = Rp.83.000 juta.		

ANGGARAN BELANJA RUTIN 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bagian Anggaran	Departemen/Lembaga	Belanja pegawai ¹⁾	Belanja barang ²⁾	Jumlah
1A	M.P.R.S.	106.478,3	439.135,2	545.613,5
I B	D.P.R.	290.351,5	696.687,4	987.038,9
I C	D.P.A.	25.502,5	55.206,6	80.709,1
II A	B.P.K.	87.597,6	154.093,2	241.690,8
II B	Mahkamah gung	20.758,6	30.735,0	51.493,6
II C	Kedjaksaan Agung	1.616.705,4	711.582,4	2.328.287,8
III A	Kepresidenan	50.131,8	779.061,5	829.193,3
III B	Sekretariat Negara	287.191,3	1.242.034,2	1.529.225,5
III C	Badan/Lembaga non-Departemen	711.353,7	562.753,0	1.274.106,7
IV	Departemen Dalam Negeri	2.169.755,9	956.575,2	3.126.331,1
V	Departemen Luar Negeri	4.573.342,6	4.386.119,0	8.959.461,6
VI	Departemen HANKAM	91.030.318,6	53.946.143,4	144.976.462,0
VII	Departemen Kehakiman	2.684.033,4	2.204.454,5	4.883.487,9
VIII	Departemen Penerangan	1.818.830,9	1.261.730,3	3.080.561,2
IX	Departemen Keuangan	3.342.309,5	5.877.439,1	9.219.748,6
IXA	Bagian Pembiayaan * Perhitungan	45.028.938,8	12.450.521,6	57.479.460,4
X	Departemen Perdagangan	531.095,1	412.841,4	943.936,5
XI	Departemen Pertanian	1.162.622,7	679.947,8	1.842.570,5
XII	Departemen Perindustrian	599.093,7	547.388,8	1.146.482,5
XIII	Departemen Pertambangan	244.162,1	137.529,1	381.691,2
XIV	Departemen P.U. & T.L.	703.485,0	1.158.266,2	1.861.751,2
XV	Departemen Perhubungan	1.573.171,2	2.396.246,7	3.969.417,9
XVI	Departemen P & K	21.905.861,8	5.852.615,0	27.758.476,8
XVII	Departemen Kesehatan	3.268.618,1	2.756.189,0	6.024.807,1
XVIII	Departemen A g a m a	13.146.482,2	1.004.0,8	14.150.529,0
XIX	Departemen Tenaga Kerja	497.779,4	672.065,9	1.169.845,3
XX	Departemen Sosial	506.867,6	834.181,7	1.341.049,3
XXI	Departemen Transkop.	817.160,7	293.810,0	1.110.970,7
JUMLAH		198.800.000,0	102.500.000,0	301.300.000,0
Subsidi / Perimbangan keuangan		-	-	83.500.000,0
Bunga dan cicilan hutang		-	-	47.700.000,0
Lain-lain		-	-	5.000.000,0
JUMLAH BESAR		198.800.000,0	102.500.000,0	437.500.000,0

Sumber : Departemen K.euangan.

1) Tidak termasuk belanja lauk-pauk.

2) Termasuk belanja lauk-pauk

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor		J u m l a h
1	BIDANG EKONOMI	184.912.503,9
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	39.622.280,0
1.2	Sektor Industri dan pertambangan	4.698.380,0
1.3	Sektor tenaga listrik	16.200.000,0
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	43.990.843,9
1.5	Sektor daerah dan desa	55.682.000,0
1.6	Sektor penyertaan modal pemerintah	24.719.000,0
2	BIDANG SOSIAL	31.966.500,1
2.1	Sektor agama	785.000,0
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	16.233.982,1
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	317.000,0
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	7.275.500,0
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	4.410.100,0
2.6	Sektor penerangan	1.164.168,0
2.7	Sektor tertib hukum	1.780.750,0
3	BIDANG UMUM	14.220.996,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	4.996.961,0
3.2	Sektor pertahanan dan keamanan	6.000.000,0
3.3	Sektor badan-badan perwakilan	667.000,0
3.4	Sektor pengurusan keuangan negara	2.557.035,0
JUMLAH		231.100.000,0

Lampiran 3a

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor	MPR	D P R	DPA
1 BIDANG EKONOMI	-	-	-
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-
1.6 Sektor penyertaan pemerintah	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	-	-	-
2.1 Sektor agama	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	-	-	-
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-
3 BIDANG UMUM	50.000,0	667.000,0	27.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	50.000,0	-	27.000,0
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-
3.3 Sektor badan-badan perwakilan	-	667.000,0	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-
JUMLAH	50.000,0	667.000,0	27.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN 1972/1973
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor /Sub-sektor /Program		J U M L A H
1.	BIDANG EKONOMI	--
2	BIDANG SOSIAL	--
3	BIDANG UMUM	50.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	50.000,0
3.1.1	Sub-sektor pemerintahan umum	50.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintahan	--
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	50.000,0
JUMLAH		50.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor/Subsektor/Program	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	-
3	BIDANG UMUM	667.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	-
3.2	Sektor pertahanan dan keamanan	-
3.3	Sektor badan-badan perwakilan	667.000,0
3.3.1	Sub-sektor badan-badan perwakilan	667.000,0
3.3.1.1	Program peningkatan produk legistarif	667.000,0
	Jumlah	667.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor /Sub-sektor /Program	JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	-
3	BIDANG UMUM	27.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	27.000,0
3.1.1	Sub-sektor pemerintahan umum	27.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	27.000,0
	JUMLAH	27.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN. 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor	BPK	Mahkamah Agung	Kejaksaan Agung
1 BIDANG EKONOMI	-	-	-
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-
1.6 Sektor penjeaan modal pemerintah	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	-	70.000,0	306.000,0
2.1 Sektor agama	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	-	-	40.000,0
2.3 Sektor tenagakerja dan penduduk	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-
3 BIDANG UMUM	155.000,0	-	-
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	-	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-
3.3 Sektor badan-badan perwakilan	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	155.000,0	-	-
JUMLAH	155.000,0	70.000,0	306.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor/Sub-sektor/Program	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	-
3	BIDANG UMUM	155.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	-
3.2	Sektor pertahanan dan keamanan	-
3.3	Sektor badan-badan perwakilan	-
3.4	Sektor pengelolaan keuangan negara	155.000,0
3.4.1	Sub-sektor pengelolaan keuangannegara	155.000,0
3.4.1.1	Program peningkatan penerimaan negara	-
3.4.1.2	Program peningkatan efisiensi pengeluaran negara	-
3.4.1.3	Program peningkatan tata-usaha keuangan negara	-
3.4.1.4	Program peningkatan pengawasan keuangan negara	155.000,0
	Jumlah	155.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
MAHKAMAH AGUNG
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub-sektor/Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	70.000,0.
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	-
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-
2.6	Sektor penerangan	-
2.7	Sektor tertib hukum	70.000,0
2.7.1	Sub-sektor tertib hukum	70.000,0
2.7.1.1	Program pembinaan tertib hukum	70.000,0
3	BIDANG UMUM	-
JUMLAH		70.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
KEJAKSAAN AGUNG
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor Sub-sektor /Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	306.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	40.000,0
2.2.1	Sub-sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub-sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub-sektor pendidikan dan penelitian institusionil	40.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusionil	40.000,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dari penyediaan air minum	-
2.6	Sektor penerangan	-
2.7	Sektor tertib hukum	266.000,0
2.7.1	Sub-sektor tertib hukum	266.000,0
2.7.1.1	Program pembinaan tertib hukum	266.000,0
3	BIDANG UMUM	-
JUMLAH		306.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor	Departemen Dalam Negeri	Departemen Luar Negeri	Departemen HANKAM
1 BIDANG EKONOMI	-	-	-
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-
1.6 Sektor penjeaan modal pemerintah	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	-	480.000,0	593.900,0
2.1 Sektor agama	-	400.000,0	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	-	80.00,0	593.900
2.3 Sektor tenagakerja dan penduduk	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-
3 BIDANG UMUM	75.000,0	125.000,0	365.100,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	75.000,0	125.000,0	365.100,0
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-
3.3 Sektor badan-badan perwakilan	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-
JUMLAH	75.000,0	605.000,0	959.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
KEPRESIDENAN
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor / sub-sektor /Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	-
3	BIDANG UMUM	75.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	75.000,0
3.1.1	Sub-sektor pemerintahan umum	75.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	75.000,0
JUMLAH		75.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973**SEKRETARIAT NEGARA****(dalam ribuan rupiah)**

Bidang/Sektor /Sub-sektor /Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	--
2	BIDANG SOSIAL	480.000,0
2.1	Sektor agama	400.000,0
2.1.1	Sub Sektor agama	400.00,0
2.1.1.1	Program penyediaan sarana kehidupan beragama	-
2.1.1.2	Program penerangan dan bimbingan agama	-
2.1.1.3	Program peningkatan kesejahteraan perjalanan haji/ziarah	-
2.1.1.4	Program pengawasan dan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta	-
2.1.1.5	Program pembangunan masjid Istiqlal	400.000,0
2.2	Sektor pendidikan & kebudayaan	80.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub-sektor kebudayaan	50.000,0
2.2.2.1	Program pengembangan kebudayaan nasional	50.000,0
2.2.3	Sub-sektor pendidikan dan penelitian institusionil	30.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan & latihan instimsionil	-
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	30.000,0
3	BIDANG UMUM	125.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	125.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	125.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparaturnya pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	125.000,0
JUMLAH		605.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
BADAN / LEMBAGA NON - DEPARTEMEN
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor /Sub-sektor /Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	--
2	BIDANG SOSIAL	593.900,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan & kebudayaan	593.900,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub-sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub-sektor pendidikan dan penelitian institusionil	593.900,0
2.2.3.1	Program pendidikan & latihan instimsionil	316.400,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	277.500,0
3	BIDANG UMUM	365.100,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	365.100,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	365.100,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparaturn pemerintahan	--
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	365.100,0
JUMLAH		959.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor	Departemen Dalam Negeri	Departemen Luar Negeri	Departemen HANKAM
1 BIDANG EKONOMI	432.000,0	112.500,0	-
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	112.500,0	-
1.5 Sektor daerah dan desa	432.000,0	-	-
1.6 Sektor penjeaan modal pemerintah	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	686.000,0	3.000,0	-
2.1 Sektor agama	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	686.000,0	3.000,0	-
2.3 Sektor tenagakerja dan penduduk	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-
3 BIDANG UMUM	1.192.000,0	144.500,0	6.000.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	1.192.000,0	144.500,0	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	6.000.000,0
3.3 Sektor badan-badan perwakilan	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-
JUMLAH	2.310.000,0	260.000,0	6.000.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN HANKAM
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub-sektor/Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	-
3	BIDANG UMUM	6.000.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	-
3.2	Sektor pertahanan dan keamanan	6.000.000,0
3.2.1	Sub-sektor pertahanan dan keamanan	6.000.000,0
3.2.1.1	Program industri	2.000.000,0
3.2.1.2	Program konstruksi dan pengadaan	1.750.000,0
3.2.1.3	Program penyaluran	1.250.000,0
3.2.1.3	Program prasarana	1.000.000,0
JUMLAH		6.000.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973**DEPARTEMEN DALAM NEGERI****(dalam ribuan rupiah)**

Bidang/Sektor	Departemen Kehakiman	Departemen Penerangan
1 BIDANG EKONOMI	-	-
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-
1.6 Sektor penyediaan modal pemerintah	-	-
2 BIDANG SOSIAL	1.475.000,0	1.250.000,0
2.1 Sektor agama	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	30.250,0	85.832,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	1.444.750,0	1.164.168,0
3 BIDANG UMUM	-	139.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	139.000,0
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-
3.3 Sektor badan-badan perwakilan	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-
JUMLAH	1.475.000,0	1.389.000,0

Lampiran 3e.1.

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973**DEPARTEMEN KEHAKIMAN****(dalam ribuan rupiah)**

Bidang/Sektor /Sub-sektor /Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	--
2	BIDANG SOSIAL	1.475.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan & kebudayaan	30.250,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub-sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub-sektor pendidikan dan penelitian institusionil	30.250,0
2.2.3.1	Program pendidikan & latihan instimsionil	30.250,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial & penyediaan air minum	-
2.6	Sektor penerangan	-
2.7	Sektor tertib hukum	1.444.750,0
2.7.1	Sub Sektor tertib hukum	1.444.750,0
2.7.1.1	Program pembinaan tertib hukum	1.094.750,0
2.7.1.2	Program pemasyarakatan/reklasering	350.000,0
3	BIDANG UMUM	-
JUMLAH		1.475.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN PENERANGAN
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor /Sub-sektor /Program		JUMLAH
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	1.250.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan & kebudayaan	85.832,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub-sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub-sektor pendidikan dan penelitian institusionil	85.832,0
2.2.3.1	Program pendidikan & latihan instimsionil	58.804,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	27.028,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial & penyediaan air minum	-
2.6	Sektor penerangan	1.164.168,0
2.6.1	Sub Sektor penerangan	1.164.168,0
2.6.1.1	Program peningkatan penerangan rakyat	421.255,0
2.6.1.2	Program pengembangan alat-alat mass media	742.913,0
3	BIDANG UMUM	139.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	139.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	139.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aoparatur pemerintah	7.500,0
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintah	131.500,0
JUMLAH		1.389.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973**(dalam ribuan rupiah)**

Bidang/Sektor	Departemen Keuangan	Bagian Pembiayaan/ Perhitungan
1 BIDANG EKONOMI	-	84.734.000,0
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	4.188000,0
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	1.027.000,0
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	54.800.000,0
1.6 Sektor penyediaan modal pemerintah	-	24.719.000,0
2 BIDANG SOSIAL	166.965,0	3.228.000,0
2.1 Sektor agama	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	166.965,0	711.000,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	167.000,0
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	2.350.000,0
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-
3 BIDANG UMUM	2.402.035,0	150.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	150.000,0
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-
3.3 Sektor badan-badan perwakilan	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	2.402.035,0	-
JUMLAH	2.569.000,0	88.112.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN KEUANGAN
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor/Sub sektor/program	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	166.965,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	166.965,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	166.965,0
2.2.3.1	Program pendidikan & latihan institusionil	156.965,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/ survey	10.000,0
3	BIDANG UMUM	2.402.035,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	-
3.2	Sektor pertahanan dan keamanan	-
3.3	Sektor badan2 perwakilan	-
3.4	Sektor pengurusan keuangan negara	2.402.035,0
3.4.1	Sub sektor pengurusan keuangan negara	2.402.035,0
3.4.1.1	Program penmgkatan penenmaan negara	1.281.535,0
3.4.1.2	Program peningatan effisiensi pengeluaran negara	959.000,0
3.4.1.3	Program peningkatan tara usaha keuangan negara	31. 300,0
3.4.1.4	Program peningkatan pengawasan keuangan negara	130.200,0
	JUMLAH	2.569.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	84.734.000,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	4.188000,0
1.1.1	Sub Sektor pertanian	4.188000,0
1.1.1.1	Program peningkatan produksi bahan makanan	4.188000,0
1.2	Sektor industri dan pertambangan	1.027.000,0
1.2.1	Sub Sektor industri	1.027.000,0
1.2.1.1	Program pembinaan industri ringan & kerajinan rakyat	-
1.2.1.2	Program pemanfaatan proyek tertunda	-
1.2.1.3	Program pengembangan industri	1.027.000,0
1.3	Sektor tenaga listrik	-
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	-
1.5	Sektor daerah dan desa	54.800.000,0
1.5.1	Sub Sektor desa	5.700.000,0
1.5.1.1	Program pembangunan desa	5.700.000,0
1.5.2	Sub sektor daerah	49.100.000,0
1.5.2.1	Program pembangunan daerah tingkat II	24.800.000,0
1.5.2.2	Program pembangunan daerah Irian Barat	3.500.000,0
1.5.2.3	Program pembangunan daerah tingkat I	20.800.000,0
1.6	Sektor penyediaan modal pemerintah	24.719.000,0
1.6.1	Sub Sektor kredit investasi	24.719.000,0
1.6.1.1	Program kredit investasi melalui perbankan	24.719.000,0
2	BIDANG SOSIAL	3.228.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	711.000,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	80.000,0
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	80.000,0
(bersambung)		

BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN

-(sambungan)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Jumlah
2.2.3 Sub sektor pendidikan dan penelitian institusional	631.000,0
2.2.3.1 Program pendidikan dan latihan institusional	-
2.2.3.2 Program peningkatan penelitian/survey	631.000,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	167.000,0
2.3.1 Sub sektor tenaga kerja	-
2.3.2 Sub sektor penduduk	167.000,0
2.3.2.1 Program sensus penduduk	167.000,0
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	2.350.000,0
2.4.1 Sub sektor kesehatan	-
2.4.2 Sub sektor keluarga berencana	2.350.000,0
2.4.2.1 Program pembinaan keluarga berencana	2.350.000,0
3 BIDANG UMUM	150.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	150.000,0
3.1.1 Sub sektor pemerintahan umum	150.000,0
3.1.1.1 Program penyempurnaan efisiensi aparat pemerintahan	-
3.1.1.2 Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	150.000,0
JUMLAH	88.112.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bidang Sektor	Departemen Perdagangan	Departemen Pertanian	Departemen Perindustrian
1 BIDANG EKONOMI	-	7.667.000,0	2.103.000,0
1.1 Sektor pertanian dan migas	-	7.667.000,0	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	2.103.000,0
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-
1.6 Sektor penyertaan modal pemerimah	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	327.000,0	1. 372.000,0	605.000,0
2.1 Sektor agama	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	327.000,0	1. 372.000,0	605.000,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan air minum	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-
3 BIDANG UMUM	257.000,0	375.000,0	150.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	257.000,0	375.000,0	150.000,0
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-
3.3 Sektor badan2 per wakilan	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-
JUMLAH	584.000,0	9.414.000,0	2.858.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973**DEPARTEMEN PERDAGANGAN****(dalam ribuan rupiah)**

	Bidang Sektor	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	327.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	327.000,0
2.2.1	Sub Sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub Sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub Sektor pendidikan & penelitian institusionil	327.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan & latihan institusionil	-
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	327.000,0
3	BIDANG UMUM	257.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	257.000,0
3.1.1	Sub Sektor pemerintahan umum	257.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparaturnya pemerintah	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintah	257.000,0
	JUMLAH	584.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN PERTANIAN
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor /Sub Sektor /Program	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	7.667.000,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	7.667.000,0
1.1.1	Sub sektor pertanian	7.073.750,0
1.1.1.1	Program peningkatan produksi bahan makanan	4.697.000,0
1.1.1.2	Program peningkatan produksi hasil perkebunan	586.000,0
1.1.1.3	Program peningkatan produksi perikanan	550.000,0
1.1.1.4	Program peningkatan produksi hasil kehutanan & pembinaan hutan	530.750,0
1.1.1.5	Program peningkatan produksi peternakan	710.000,0
1.1.2	Sub sektor irigasi	593.250,0
1.1.2.1	Program penyelamatan tanah dan air	593.250,0
2	BIDANG SOSIAL	1.372.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	1.372.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian insti tusionil	1.372.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan insti tusionil	963.000,0
2.2.3.2	Program peningkatan pene litian/survey	409.000,0
3	BIDANG UMUM	375.000,0
3.1.	Sektor pemerintahan umum	375.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	375.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparaturn pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	375.000,-
	JUMLAH	9.414.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	2.103.000,0
1.1	Sektor pertanian dari irigasi	-
1.2	Sektor industri dan pertambangan	2.103.000,0
1.2.1	Sub sektor industri	2.103.000,0
1.2.1.1	Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat	1.146.500,0
1.2.1.2	Program pemanfaatan proyek2 tertunda	381.500,0
1.2.1.3	Program pengembangan industri	575.000,0
2	BIDANG SOSIAL	605.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	605.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusional	605.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusional	259.000,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/ survey	346.000,0
3	BIDANG UMUM	150.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	150.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	150.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparaturnya pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	150.000,0
JUMLAH		2.858.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor	Departemen Pertambangan	Departemen P.U. & T.L.	Departemen Perhubungan
1 BIDANG EKONOMI	1.484.000,0	64.689.000,0	20.258.343,9
1.1 Sektor pertanian dan migas	-	24.869.000,0	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	1.484.000,0	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik.	-	16.200.000,0	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	23.620.000,0	20.258.343,9
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-
1.6 Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	85.000,0	4.546.000,0	306.656,1
2.1 Sektor agama	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	85.000,0	765.000,0	306.656,1
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan social & penyediaan air minum	-	3.781.000,0	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-
3 BIDANG UMUM	67.000,0	361.000,0	275.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	67.000,0	361.000,0	275.000,0
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-
JUMLAH	1.636.000,0	69.596.000,0	20.840.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	1.484.000,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	-
1.2	Sektor industri dan pertambangan .	1.484.000,0
1.2.1	Sub sektor industri	-
1.2.2	Sub sektor pertambangan	1.484.000,0
1.2.2.1	Program penelitian minyak dan gas bumi	60.000,0
1.2.2.2	Program perbaikan pertambangan timah	-
1.2.2.3	Program perbaikan pertambangan batubara	650.000,0
1.2.2.4	Program pemngkatan kegiatan geologi	300.000,0
1.2.2.5	Program perbaikan fasilitas pembinaan pertambangan	474.000,0
2	BIDANG SOSIAL	85.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	85.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	85.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusionil	85.000,0
3	BIDANG UMUM	67.000,0
3.1.	Sektor pemerintahan umum	67.000,0
3.1..1	Sub sektorpemerintahan umum	67.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan effisiensi apartur pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemintahan	67.000,0
Jumlah		1.636.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	64.689.000,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	24.869.000,0
1.1.1	Sektor industri dan pertambangan	-
1.1.2	Sub sektor industri	24.869.000,0
1.1.2.1	Sub sektor irigasi	-
1.1.2.2	Program penyelamatan tanah dan air	11.020.800,0
1.1.2.3	Program perbaikan irigasi	5.402.500,0
1.1.2.4	Program perluasan irigasi	1.391.500,0
1.1.2.5	Program perbaikan dan pengamanan sungai	7.054.400,0
1.2	Sektor industri dan pertambangan	-
1.3	Sektor tenaga listrik	16.200.000,0
1.3.1	Sub Sektor tenaga listrik	16.200.000,0
1.3.1.1	Program peningkatan tenaga listrik	16.200.000,0
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	23.620.000,0
1.4.1	Sub Sektor perhubungan	23.620.000,0
1.4.1.1	Program perbaikan prasarana perhubungan darat (jalan & jembatan)	23.620.000,0
1.4.1.2	Program peningkatan fasilitas angkutan jalan	-
1.4.1.3	Program peningkatan & perbaikan angkutan kereta api	-
1.4.1.4	Program perbaikan prasarana perhubungan laut	-
1.4.1.5	Program perbaikan armada niaga	-
1.4.1.6	Program perbaikan angkutan sungai	-
1.4.1.7	Program perbaikan prasarana perhubungan udara	-
1.4.1.8	Program pembinaan armada udara niaga	-
1.4.1.9	Program peningkatan jasa pos dan giro	-
1.4.1.10	Program perbaikan & peningkatan jasa telekomunikasi	-
(bersambung)		

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK**(sambungan)**

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program	Jumlah
1.4.1.11 Program peningkatan sarana pembangunan	500.000,0
2 BIDANG SOSIAL	4.546.000,0
2.1 Sektor agama	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	765.000,0
2.2.1 Sub sektor pendidikan	-
2.2.2 Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3 Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	765.000,0
2.2.3.1 Program pendidikan dan latihan institusionil	182.500,0
2.2.3.2 Program peningkatan penelitian/survey	582.500,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan social dan penyediaan air minum	3.781.000,0
2.5.1 Sub sektor perumahan rakyat, tata kota dan tata daerah	875.000,0
2.5.1.1 Program penyuluhan pembangunan perumahan kota dan perumahan desa	735.000,0
2.5.1.2 Program perencanaan tata kota dan tata daerah	140.000,0
2.5.2 Sub sektor kesejahteraan sosial	-
2.5.3 Sub sektor air minum dan assainering	2.906.000,0
2.5.3.1 Program pemngkatan persediaan air mmum	2.861.000,0
2.5.3.2 Program peningkatan assainering	45.000,0
3 BIDANG UMUM	361.000,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	361.000,0
3.1.1 Sub sektor pemerintahan umum	361.000,0
3.1.1.1 Program penyempurnaan effisiensi aparatur pemerintahan	50.000,0
3.1.1.2 Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	311.000,0
JUMLAH	69.596.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	20.258.343,9
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	-
1.2	Sektor industri dan pertambangan	-
1.3	Sektor tenaga listrik	-
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	20.258.343,9
1.4.1	Sub Sektor perhubungan	19.653.343,9
1.4.1.1	Program perbaikan prasarana perhubungan darat (jalan & jembatan)	-
1.4.1.2	Program peningkatan fasilitas angkutan jalan	100.000,0
1.4.1.3	Program peningkatan & perbaikan angkutan kereta api	3.387.750,0
1.4.1.4	Program perbaikan prasarana perhubungan laut	7.518.811,9
1.4.1.5	Program perbaikan armada niaga	-
1.4.1.6	Program perbaikan angkutan sungai	405.000,0
1.4.1.7	Program perbaikan prasarana perhubungan udara	3.884.000,0
1.4.1.8	Program pembinaan armada udara niaga	-
1.4.1.9	Program peningkatan jasa pos dan giro	500.000,0
1.4.1.10	Program perbaikan & peningkatan jasa telekomunikasi	3.133.000,0
1.4.1.11	Program peningkatan sarana pembangunan	724.782,0
1.4.2	Sub sektor pariwisata	605.000,0
1.4.2.1	Program pengembangan pariwisata	605.000,0
2	BIDANG SOSIAL	306.656,1
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	306.656,1
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusional	306.656,1
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusional	306.656,1
(bersambung)		

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
(sambungan)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah
3	BIDANG UMUM	275.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	275.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	275.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	275.000,0
Jumlah		20.840.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor		Departemen P & K	Departemen Kesehatan	Departemen Agama
1	BIDANG EKONOMI	-	-	-
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	-	-	-
1.2	Sektor iridustri dan pertam bangan	-	-	-
1.3	Sektor tenaga listrik	-	-	-
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-
1.5	Sektor daerah dan desa	-	-	-
1.6	Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-	-
2	BIDANG SOSIAL	8.3 50.000,0	5.495.500,0	1.090.000,0
2.1	Sektor agama	-	-	385.000,0
2.2	Sektor pendidikan dan kebu dayaan	8.350.000,0	451.000,0	705.000,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluar ga berencana	-	4.925.500,0	-
2.5	Sektor peru mahan, kesedjah teraan sosial dan penyediaan air minum	-	119.000,0	-
2.6	Sektor penerangan	-	-	-
2.7	Sektor tertib hukum	-	-	-
3	BIDANG UMUM	450.000,0	188.500,0	135.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	450.000,0	188.500,0	135.000,0
3.2	Sektor pertahanan dan ke amanan	-	-	-
3.3	Sektor badan2 perwakilan	-	-	-
3.4	Sektor pengurusan keuang an negara	-	-	-
JUMLAH		8.800.000,0	5.684.000,01.225.000,0	

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN PENDIDIKAN. & KEBUDAYAAN
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor/Sub sektor/Program	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	8.350.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	8.350.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	7.855.000,0
2.2.1.1	Program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar	450.000,0
2.2.1.2	Program penambahan pendidikan kejuruan pada sekolah lanjutan umum	1.400.000,0
2.2.1.3	Program peningkatan pendidikan tehnik dan kejuruan	2.250.000,0
2.2.1.4	Program peningkatan pendidikan guru	325.000,0
2.2.1.5	Program pembinaan perguruan tinggi	3.000.000,0
2.2.1.6	Program peningkatan pendidikan masja rakat dan orang dewasa	200.000,0
2.2.1.7	Program pengembangan pendidikan	230.000,0
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	445.000,0
2.2.2.1	Program pengembangan kebudayaan nasional	300.000,0
2.2.2.2	Program peningkatan kegiatan olah raga	145.000,0
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusional	50.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusional	50.000,0
3	BIDANG UMUM	450.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	450.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	450.000,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi;paratur pemerintahan	150.000,0
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	300.000,0
	JUMLAH	8.800.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973**DEPARTEMEN KESEHATAN**

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	5.495.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	451.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	451.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan instituonil	183.000,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	268.000,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluar ga berencana	4.925.500,0
2.4.1	Sub sektor kesehatan	4.925.500,0
2.4.1.1	Program pendidikan kesehatan masyarakat	200.000,0
2.4.1.2	Program pengembangan infrastruktur kesehatan	1.831.500,0
2.4.1.3	Program pemberantasan penyakit menular	1.796.000,0
2.4.1.4	Program pemulihan & peningkatan kesehatan	98.000,0
2.4.1.5	Program pengadaan obat-obatan & alat-alat kesehatan	1.000.000,0
2.5	Sektor peru mahan, kesedjah teraan sosial dan penyediaan air minum	119.000,0
2.5.1	Sub sektor perumahan rakyat, tata kota dan tata daerah	-
2.5.2	Sub sektor kesejahteraan sosial	-
2.5.3	Sub sektor air minum dan assainering	119.000,0
2.5.3.1	Program pemngkatan persediaan air mmum	119.000,0
3	BIDANG UMUM	188.500,0
(bersambung)		

DEPARTEMEN KESEHATAN
(sambungan)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Jumlah
3.1 Sektor pemerintahan umum	188.500,0
3.1.1 Sub sektor pemerintahan umum	188.500,0
3.1.1.1 Program penjempumaan effisiensi aparatur pemerintahan	21.460,0
3.1.1.2 Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	167.040,0
JUMLAH	5.684.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973**DEPARTEMEN AGAMA**

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	1.090.000,0
2.1	Sektor agama	385.000,0
2.1.1	Sub Sektor agama	385.000,0
2.1.1.1	Program penyediaan sarana kehidupan beragama	275.000,0
2.1.1.2	Program penerangan dan bimbingan agama	65.000,0
2.1.1.3	Program peningkatan kesejahteraan perjalanan haji/ziarah	20.000,0
2.1.1.4	Program pengawasan dan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta	25.000,0
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	705.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusional	705.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusional	675.000,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	
3	BIDANG UMUM	135.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	135.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	135.000,0
3.1.1.1	Program penjiwaan efisiensi aparat pemerintahan	10.000,0
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	125.000,0
JUMLAH		1.225.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor	Departemen Tenaga Kerja	Departemen Sosial	Departemen Transkop.
1 BIDANG EKONOMI	450.000,0	-	2.982.660,0
1.1 Setor pertanian dan irigasi	-	-	2.898.280,0
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	84.380,0
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-
1.4 Setor perhubungan dan pariwisata	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	450.000,0	-	-
1.6 Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	600.000,0	539.900,0	390.579,0
2.1 Sektor agama	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	450.000,0	29.800,0	390.579,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	150.000,0	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	510.100,0	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-
3 BIDANG UMUM	200.000,0	144.100,0	126.761,0
3.1 Sektor pemerintahan umum	200.000,0	144.100,0	126.761,0
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-
JUMLAH	1.250.000,0	684.000,0	3.500.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN TENAGA KERJA
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor/Sub sektor/Program	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	450.000,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	-
1.2	Sektor industri dan pertambangan	-
1.3	Sektor tenaga listrik	-
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	-
1.5	Sektor daerah dan desa	450.000,0
1.5.1	Sub sektor desa	450.000,0
1.5.1.1	Program pembangunan desa	450.000,0
2	BIDANG SOSIAL	600.000,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	450.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusio	450.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusionil	400.000,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	50.000,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	150.000,0
2.3.1	Sub sektor tenaga kerja	150.000,0
2.3.1.1	Program penyediaan dan penggunaan tenaga kerja	50.000,0
2.3.1.2	Program pembinaan keahlian dan kejuruan	-
2.3.1.3	Program pembinaan norma2 perlindungan kerja	100.000,0
3	BIDANG UMUM	200.000,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	200.000,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	200.000,0
3.1.1.1	Program penjempumaan effisiensi aparatur pemerintahan	10.000,0
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	190.000,0
	JUMLAH	1.250.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN SOSIAL
(dalam ribuan rupiah)

	Bidang/Sektor/Sub sektor/Program	Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	-
2	BIDANG SOSIAL	539.900,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	29.800,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	29.800,0
2.2.3.1	Program pendidikan ,dan latihan institusionil	19.800,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	10.000,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-
2.5.	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	510.100,0
2.5.1	Sub sektor perumahan rakyat, tata kota dan tata daerah	-
2.5.2	Sub sektor kesejahteraan sosial	510.100,0
2.5.2.1	Program pembinaan perubahan sosial	319.945,0
2.5.2-.2	Program bantuan sosial	190.155,0
3	BIDANG UMUM	144.100,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	144.100,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	144.100,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparaturn pemerintahan	7.000,0
3.1.1.2	Program penjmpumaan prasarana fisik pemerintahan	137.100,0
	JUMLAH	684.000,0

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN, 1972/1973
DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah
1	BIDANG EKONOMI	2.982.660,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	2.898.280,0
1.1.1	Sub sektor pertanian	2.898.280,0
1.1.1.1	Program peningkatan produksi bahan makanan	2.629.316,0
1.1.1.2	Program peningkatan produksi hasil perkebunan	123.880,0
1.1.1.3	Program peningkatan produksi perikanan	95.204,0
1.1.1.4	Program peningkatan produksi hasil kehutanan dan pembinaan hutan	-
1.1.1.5	Program peningkatan produksi peternakan	49.880,0
1.2	Sektor Industri dan pertambangan	84.380,0
1.2.1	Sub Sektor Industri	84.380,0
1.2.1.1	Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat.	84.380,0
2	BIDANG SOSIAL	90.579,0
2.1	Sektor agama	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	390.579,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	390.579,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusionil	298.879,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	91.700,0
3	BIDANG UMUM	126.761,0
3.1	Sektor pemerintahan umum	126.761,0
3.1.1	Sub sektor pemerintahan umum	126.761,0
3.1.1.1	Program penyempurnaan efisiensi aparaturnya pemerintahan	-
3.1.1.2	Program penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	126.761,0
JUMLAH		3.500.000,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$) ,

Bidang/Sektor		JUMLAH NILAI	
		Rp.	US \$
1	BIDANG EKONOMI	78.783.600,0	189.840,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	13.853.530,0	33.382,0
1.2	Sektor industri dan pertambangan	22.368.915,0	53.901,0
1.3	Sektor tenaga listrik	12.606.040,0	30.376,0
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	29.955.115,0	72.181,0
1.5	Sektor daerah dan desa	-	-
1.6	Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-
2	BIDANG SOSIAL	4.216.400,0	10.160,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	2.253.450,0	5.430,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	427.450,0	1.030,0
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	1.535.500,0	3.700,0
2.6	Sektor penerangan	-	-
2.7	Sektor tertib hukum	-	-
3	BIDANG UMUM	-	-
3.1	Sektor pemerintahan umum	-	-
3.2	Sektor pertahanan dan keamanan	-	-
3.3	Sektor badan perwakilan	-	-
3.4	Sektor pengurusan keuangan negara	-	-
JUMLAH		83.000.000,0	200.000,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973

(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor	Bagian Pembiayaan & Perhitungan	
	Rp.	US \$
1 BIDANG EKONOMI	25.916.335,0	62.449,0
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	3.375.000,0	9.000,0
1.2 Sektor industri dan pembangunan	21.550.950,0	51.930,0
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	630.385,0	1.519,0
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-
1.6 Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-
2 BIDANG SOSIAL	427.450,0	1.030,0
2.1 Sektor agama	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	415.000,0	1.000,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	12.450,0	30,0
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-
3 BIDANG UMUM	-	-
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-
JUMLAH	26.343.785,0	63.479,0

Lampiran 4a.1

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973

BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN

(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub-sektor/ Program		Jumlah	
		Rp.	US \$
1	BIDANG EKONOMI	25.916.335,0	62.449,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	3.735.000,0	9.000,0
1.1.1	Sub sektor pertanian	3.735.000,0	9.000,0
1.1.1.1	Program peningkatan produksi bahan makanan	-	-
1.1.1.2	Program peningkatan produksi hasil2 perkebunan	2.656.000,0	6.400,0
1.1.1.3	Program peningkatan produksi perikanan	-	-
1.1.1.4	Program peningkatan hasil kehutanan dan pembinaan hutan	-	-
1.1.1.5	Program peningkatan hasil peternakan	1.079.000,0	2.600,0
1.2	Sektor industri dan pertambangan	21.550.950,0	51.930,0
1.2.1	Sub sektor industri	20.164.020,0	48.588,0
1.2.1.1.	Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat	-	-
1.2.1.2	Program pemanfaatan proyek2 tertunda	-	-
1.2.1.3	Program pengembangan industri	20.164.020,0	48.588,0
1.2.2	Sub sektor pertambangan	1.386.930,0	3.342,0
1.2.2.1	Program penelitian minyak dan gas bumi	-	-
1.2.2.2	Program perbaikan tambang timah	1.386.930,0	3.342,0
1.3	Sektor tenaga listrik	-	-
1.4	Sektor penerbangan dan pariwisata	630.385,0	1.519,0
1.4.1	Sub sektor perhubungan	630.385,0	1.519,0
1.4.1.1	Program perbaikan prasarana perhubungan darat	-	-
1.4.1.2	Program peningkatan fasilitas angkutan darat	80.510,0	194,0
1.4.1.3	Program peningkatan dan perbaikan angkutan kereta api	-	-
1.4.1.4	Program perbaikan prasarana perhubungan laut	-	-
1.4.1.5	Program perbaikan armada niaga	-	-
1.4.1.6	Program perbaikan angkutan sungai	-	-
1.4.1.7	Program perbaikan prasarana perhubungan udara	-	-
1.4.1.8	Program pembinaan armada udara niaga	-	-
	(bersambung)	549.875,0	1.325,0

BAGIAN PEMBIAYAAN & PERHITUNGAN
(sambungan)

Bidang/Sektor/Sub-sektor/ Program		Jumlah	
		Rp.	US \$
2	BIDANG SOSIAL	427.450,0	1.030,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	415.000,0	1.000,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	415.000,0	1.000,0
2.2.3.1	Program pendidikan dan latihan institusionil	-	-
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian survey	415.000,0	1.000,0
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	12.450,0	30,0
2.4.1	Sub sektor kesehatan	12.450,0	30,0
2.4.1.1	Program pendidikan kesehatan masyarakat	-	-
2.4.1.2	Program pengembangan infrastruktur kesehatan	-	-
2.4.1.3	Program pemberantasan penyakit menular	-	-
2.4.1.4	Program pemulihan dan peningkatan kesehatan	-	-
2.4.1.5	Program pengadaan obat-obatanl alat2 kesehatan	12.450,0	30,0
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		26.343.785,0	63.479,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang / Sektor	Dep. Perdagangan		Dep. Pertanian	
	Rp.	US \$	Rp.	US \$
1 BIDANG EKONOMI	-	-	3.959.930,0	9.542,0
1.1 Se k tor pertanian dan irigasi	-	-	3.99.930,0	9.542,0
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-	-
1.4. Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-	-
1.5. Sektor daerah dan desa	-	-	-	-
1.6. Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	6.640,0	16,0	736.625,0	1.775,0
2.1 Sektor agama	-	-	-	-
2.2. Sektor pendidikan dan kebudayaan	6.640,0	16,0	736.625,0	1.775,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial & penyediaan air minum	-	-	-	-
2.6. Sektor penerangan	-	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-	-
3 BIDANG UMUM	-	-	-	-
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	-	-	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-	-
JUMLAH	6.640,0	16,0	4.696.555,0	11.317,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973**DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

	Bidang / Sektor / Sub Sektor / Program	Jumlah	
		Rp.	US \$
1	BIDANG EKONOMI	-	-
2	BIDANG SOSIAL	6.640,0	16,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	6.640,0	16,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-	-
2.2.2	Sub sektor-kebudayaan	-	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	6.640,0	16,0
2.2.3.1	Program pendidikan/latihan institusionil	-	-
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/ survey	6.640,0	16,0
3	BIDANG UMUM	-	-
	JUMLAH	6.640,0	16,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973**DEPARTEMEN PERTANIAN**

(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US \$
1	BIDANG EKONOMI	3.959.930,0	9.542,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	3.959.930,0	9.542,0
1.1.1	Sub sektor pertanian	3.808.455,0	9.177,0
1.1.1.1	Program peningkatan produksi bahan makanan	852.825,0	2.055,0
1.1.1.2	Program peningkatan produksi hasil2 perkebunan	-	-
1.1.1.3	Program peningkatan produksi perikanan	2.905.000,0	7.000,0
1.1.1.4	Program peningkatan hasil kehutanan dan pembinaan hutan	25.730,0	62,0
1.1.1.5	Program peningkatan hasil peternakan	24.900,0	60,0
1.1.2	Sub sektor irigasi	151.475,0	365,0
1.1.2.1	Program penyelamatan tanah dan air	151.475,0	365,0
2	BIDANG SOSIAL	736.625,0	1.775,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	736.625,0	1.775,0
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian insti sionil	736.625,0	1.775,0
2.2.3.1	Program pendidikan/latihan institusionil	374.330,0	902,0
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	362.295,0	873,0
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		4.696555,0	11.317,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang / Sektor	Dep .Perindustrian		Dep. Pertambangan	
	Rp.	US\$	Rp.	US \$
1 BIDANG EKONOMI	7011.765,0	1.691,0	116.200,0	280,0
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	701.765,0	1.691,0	116.200,0	280,0
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-	-
1.6 Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
2.1 Sektor agama	-	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	-	-	-	-
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana.	-	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahtraan sosial dan penyediaan air minum	-	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-	-
3 BIDANG UMUM	-	-	-	-
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	-	-	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan.	-	-	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-	-
J U M L A H	701.765,0	1.691,0	116.200,0	280,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
 (dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub sektor/program		Jumlah	
		Rp.	US\$
1	BIDANG EKONOMI	701. 765,0	1.691,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	-	-
1.2	Sektor industri dan pertambangan	701.765,0	1.691,0
1.2.1	Sub sektor industri	701.765,0	1.691,0
1.2.1.1	Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat	195.465,0	471,0
1.2.1.3	Program pengembangan industri .	506.300,0	1.220,0
2	BIDANG SOSIAL	-	-
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		701.765,0	1.691,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN
 (dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub sektor/program		Jumlah	
		Rp.	US\$
1	BIDANG EKONOMI	116.200,0	280,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	-	-
1.2	Sektor industri dan pertambangan	116.200,0	280,0
1.2.1	Sub sektor industri	-	-
1.2.1.1	Program pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat	116.200,0	280,0
1.2.1.3	Program pengembangan industri .	116.200,0	280,0
2	BIDANG SOSIAL	-	-
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		116.200,0	280,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973

(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang / Sektor	DEP. P.U.& T.L.		Dep. Perhubungan	
	Rp.	US\$	Rp.	US\$
1 BIDANG EKONOMI	28.163.560,0	67.864,0	19.900.910,0	47.954,0
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	6.133.700,0	14.780,0	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	12.606.040,0	30.376,0	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	9.423.820,0	22.708,0	19.900.910,0	47.954,0
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-	-
1.6 Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	1.986.190,0	4.786,0	311.250	750,0
2.1 Sektor agama	-	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan.	450.690,0	1.086,0	311.250,0	750,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	1.535.500,0	3.700,0	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-	-
3 BIDANG UMUM	-	-	-	-
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	-	-	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-	-
JUMLAH	30.149.750,0	72.650,0	20.212.160,0	48.704,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/ Sub Sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US\$
1.	BIDANG EKONOMI	28.163.560,0	67.864,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	6.133.700,0	14.780,0
1.1.1	Sub sektor pertanian	-	-
1.1.2	Sub sektor irigasi	6.133.700,0	14.780,0
1.1.2.1	Program penyelamatan tanah dan air	-	-
1.1.2.2	Program perbaikan irigasi	4.606.500,0	11.100,0
1.1.2.3	Program perluasan irigasi	207.500,0	500,0
1.1.2.4	Program perbaikan dan pengamanan sungai	913.000,0	2.200,0
1.1.2.5	Program pembangunan irigasi lainnya	406.700,0	980,0
1.2	Sektor industri dan pertambangan	-	-
1.3	Sektor tenaga listrik	12.606.040,0	30.376,0
1.3.1	Sub sektor tenaga listrik	12.606.040,0	30.376,0
1.3.1.1	Program peningkatan tenaga listrik	12.606.040,0	30.376,0
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	9.423.820,0	22.708,0
1.4.1	Sub sektor perhubungan	9.423.820,0	22.708,0
1.4.1.1	Program perbaikan prasarana perhubungan darat	9.423.820,0	22.708,0
2	BIDANG SOSIAL	1.986.190,0	4.786,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.2.	Sektor pendidikan dan kebudayaan	450.690,0	1.086,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan		
2.2.2	Sub sektor kebudayaan		
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	450.690,0	1.086,0
2.2.3.1	Program pendidikan/latihan institusionil	-	-
2.2.3.2	Program peningkatan penelitian/survey	450.690,0	1.086,0
(bersambung)			

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK

(sambungan)

Bidang/Sektor/ Sub Sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US\$
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-
2.4	Sektoe kesehatan dan keluarga berencana	-	-
2.5	Sektor perumahan, kesejahteraan social dan penyediaan air minum	1.535.500,0	3.700,0
2.5.1	Sub sektor perumahan rakyat,tata kota dan tata daerah	-	-
2.5.2	Sub sektor kesejahteraan sosial	-	-
2.5.3	Sub sektor air minum & assainering	1.535.500,0	3.700,0
2.5.3.1	Program peningkatan persediaan air minum	1.535.500,0	3.700,0
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		30.149.750,0	72.650,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US \$
1	BIDANG EKONOMI	19.900.910,0	47.954,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	-	-
1.2	Sektor industri dan pertambangan	-	-
1.3	Sektor tenaga listrik	-	-
1.4	Sektor perhubungan dan pariwisata	19.900.910,0	47.954,0
1.4.1	Sub sektor perhubungan	18.644.290,0	44.926,0
1.4.1.1	Program perbaikan prasarana perhubungan darat	-	-
1.4.1.2	Program peningkatan fasilitas angkutan darat	-	-
1.4.1.3	Program peningkatan dan perbaikan angkutan kereta api	1.696.520,0	4.088,0
1.4.1.4	Program perbaikan prasarana perhubungan laut	7.557.980,0	18.212,0
1.4.1.5	Program perbaikan armada niaga	-	-
1.4.1.6	Program perbaikan angkutan sungai	-	-
1.4.1.7	Program perbaikan prasarana perhubungan udara	1.012.600,0	2.440,0
1.4.1.8	Program pembinaan armada udara niaga	-	-
1.4.1.9	Program peningkatan jasa pas dan giro	-	-
1.4.1.10	Program perbaikan dan peningkatan jasa telekom	8.377.190,0	20.186,0
1.4.2	Sub sektor pariwisata	1.256.620,0	3.028,0
1.4.2.1	Program pengembangan pariwisata	1.256.620,0	3.028,0
2	BIDANG SOSIAL	311.250,0	750,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.20	Sektor pendidikan dan kebudayaan	311.250,0	750,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	311.250,0	750,0
2.2.3.1	Program pendidikan/latihan institusionil	311.250,0	750,00
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		20.212.160,0	48.740,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973

(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor	DEP. P. & K.		Dep.Kesehatan	
	Rp.	US \$	Rp.	US \$
1 BIDANG EKONOMI	-	-	-	-
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-	-	-
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-	-
1.6 Sektor penyertaan modal pemerintah	-	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	249.830,0	602,0	487.625,0	1.175,0
2.1 Sektor agama	-	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	249.830,0	602,0	487.625,0	1.175,0
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-	-
3 BIDANG UMUM	-	-	-	-
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	-	-	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan	-	-	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-	-
JUMLAH	249.830,0	602,0	487.625,0	1.175,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAN
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US \$
1	BIDANG EKONOMI	-	-
2	BIDANG SOSIAL	249.830,0	602,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	249.830,0	602,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	209.160,0	504,0
2.2.1.1	Program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar	-	-
2.2.1.2	Program penambahan pendidikan kejuruan pada sekolah lanjutan umum	-	-
2.2.1.3	Program peningkatan pendidikan tehnik dan kejuruan	166.000,0	400,0
2.2.1.4	Program peningkatan pendidikan guru	43.160,0	104,0
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	40.670,0	98,0
2.2.2.1	Program pengembangan kebudayaan nasional	40.670,0	98,0
3	BIDANG UMUM	-	-
	JUMLAH	249.830,0	602,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
DEPARTEMEN KESEHATAN
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US \$
1	BIDANG EKONOMI	-	-
2	BIDANG SOSIAL	487.625,0	1.175,0
2.1	Bidang agama	-	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	72.625,0	175,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	72.625,0	175,0
2.2.3.1	Program pendidikan/latihan institusionil	72.625,0	175,0.
2.3	Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-
2.4	Sektor kesehatan dan keluarga berencana	415.000,0	1.000,0
2.4.1	Sub sektor kesehatan	415.000,0	1.000,0
2.4.1.1	Program pendidikan kesehatan masyarakat	-	-
2.4.1.2	Program pengembangan infra struktur kesehatan	415.000,0	1.000,0
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		487.625,0	1.175,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973

(dalam rib.uan rupiah dan ribuan US\$)

Bidang / Sektor	Dep.Tenaga Kerja		Dep. Transkop.	
	Rp.	US \$	Rp.	US\$
1 BIDANG EKONOMI	-	-	24.900,0	60,0
1.1 Sektor pertanian dan irigasi	-	-	24.900,0	60,0
1.2 Sektor industri dan pertambangan	-	-	-	-
1.3 Sektor tenaga listrik	-	-	-	-
1.4 Sektor perhubungan dan pariwisata	-	-	-	-
1.5 Sektor daerah dan desa	-	-	-	-
1.6 Sektor penyertaan:modal pemerintah	-	-	-	-
2 BIDANG SOSIAL	10.790,0	26,0	-	-
2.1 Sektor agama	-	-	-	-
2.2 Sektor pendidikan dan kebudayaan	10.790,0	26,0	-	-
2.3 Sektor tenaga kerja dan penduduk	-	-	-	-
2.4 Sektor kesehatan dan keluarga berencana	-	-	-	-
2.5 Sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum	-	-	-	-
2.6 Sektor penerangan	-	-	-	-
2.7 Sektor tertib hukum	-	-	-	-
3 BIDANG UMUM	-	-	-	-
3.1 Sektor pemerintahan umum	-	-	-	-
3.2 Sektor pertahanan dan keamanan,	-	-	-	-
3.3 Sektor badan2 perwakilan	-	-	-	-
3.4 Sektor pengurusan keuangan negara	-	-	-	-
JUMLAH	10.790	26,0	24.900,0	60,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973**DEPARTEMEN TENAGA KERJA**

(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US\$
1	BIDANG EKONOMI	-	-
2	BIDANG SOSIAL	10.790,0	26,0
2.1	Sektor agama	-	-
2.2	Sektor pendidikan dan kebudayaan	10.790,0	26,0
2.2.1	Sub sektor pendidikan	-	-
2.2.2	Sub sektor kebudayaan	-	-
2.2.3	Sub sektor pendidikan dan penelitian institusionil	10.790,0	26,0
2.2.3.1	Program pendidikan/latihan institusionil	10.790,0	26,0
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		10.790,0	26,0

PERINCIAN BANTUAN PROYEK, 1972/1973
DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
(dalam ribuan rupiah dan ribuan US \$)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program		Jumlah	
		Rp.	US\$
1	BIDANG EKONOMI	24.900,0	60,0
1.1	Sektor pertanian dan irigasi	24.900,0	60,0
1.1.1	Sub sektor pertanian	24.900,0	60,0
1.1.1.1	Program peningkatan produksi bahan makanan	24.900,0	60,0
2	BIDANG SOSIAL	-	-
3	BIDANG UMUM	-	-
JUMLAH		24.900,0	60,0

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR TAHUN 1972

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1972/1973

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1972/1973 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara keempat dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 tetap mengikuti skala prioritas nasional sebagaimana yang tertera dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 khususnya pasal 25;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1972/1973 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun I sehingga bidang pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor, tetap menjadi titik sentral pembangunan;
- d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1972/1973 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- e. bahwa untuk lebih menyaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1972/1973 diatur dalam Undang-undang ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal S ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Bermusjawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968;
4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1972/1973.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1972/1973 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
 - b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp.573.600.000.000,00.
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp.178.000.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1972/1973 menurut perkiraan berjumlah Rp. 751.600.000.000,00.
- (5) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 terdiri atas :
 - a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
 - b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp.437.500.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp.314.100.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 menurut perkiraan Rp. 751.600.000.000,00.
- (5) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
- (6) Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga Negara/Departemen-departemen/Lembaga-lembaga non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet).
- (7) Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan Rutin,
 - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,

- c. Anggaran Belanja Rutin,
 - d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai :
 - a. Kebijakan per Kreditan,
 - b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri..
 - (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk enam bulan berikutnya.
 - (4) Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
 - (5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1972/1973 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1973/1974 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1973/1974.
- (2) Saldo anggaran lebih tahun 1972/1973 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun 1973/1974.
- (3) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1972/ 1973.
- (4) Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974, terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
- (5) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1972/1973 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1972/1973 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1972.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1972.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ALAMSYAH

LETNAN JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1972 NOMOR :

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 1972

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1972/1973

UMUM.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara keempat dalam rangka pelaksanaan PELITA I 1969/1970 - 1973/1974. Oleh sebab itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 tetap mengikuti skala prioritas nasional seperti yang tercantum didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966. Pengutamaan bidang pertanian, khususnya produksi pangan dan ekspor mengandung arti bahwa sektor yang menunjang bidang pertanian terus dikembangkan, sedangkan kegiatan-kegiatan dibidang lainnya tidak diabaikan.

Dalam pada itu, kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis terutama ditujukan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan sedemikian rupa sehingga tabungan pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Pengeluaran untuk tugas umum pemerintahan diarahkan kepada pembinaan aparatur dan administrasi negara agar mampu menanggulangi tugas yang kian meningkat sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya pengeluaran ditujukan untuk memelihara apa yang telah dihasilkan, menyelesaikan proyek-proyek dari tahun-tahun sebelumnya, menyediakan dana bagi bantuan proyek dan sebagainya.

Sementara itu, bantuan kepada desa dan kabupaten yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan didesa dan mengurangi tekanan pengangguran, dilanjutkan dan ditingkatkan.

Agar biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan garis besar kebijaksanaan anggaran maka penggeseran antar mata anggaran, pasal dan pos dapat dilakukan. Untuk penggeseran mata anggaran harus dimintakan persetujuan Presiden sedang penggeseran antar pos harus dilakukan dengan Undang-undang.

Dalam rangka kelangsungan kegiatan pembangunan, maka sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan dan saldo-anggaran-lebih Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara ini ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut :

- a. Dipertahankannya kestabilan moneter yang telah tercapai dalam rahun anggaran 1971/1972 serta terselenggaranya perkembangan harga kearah yang lebih mantap lagi dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masyarakat.
- b. Dapat ditingkatkannya penerimaan Negara meskipun diberikan fasilitas-fasilitas dan perangsang-perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada maupun industri baru dalam rangka penanaman modal.
- c. Target penerimaan Negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan internasional diusahakan dapat dipertahankan meskipun adanya penyesuaian dalam kebijaksanaan disektor tersebut.
- d. Tidak terjadinya perubahan-perubahan dalam situasi internasional yang dapat membawa pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi internasional Republik Indonesia.

P ASAL DEMI P ASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembahasan dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip dalam menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berikutnya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR